SIAUW GIOK TJHAN

G30S
DAN
KEJAHATAN NEGARA

PENYUNTING:
SIAUW TIONG DJIN

ULTIMUS

G30S dan Kejahatan Negara

Siauw Giok Tjhan
(1914—1981)

- Lahir di Surabaya, 23 Maret 1914.
- Lulus HBS Surabaya pada tahun 1932.
- Ikut mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tahun 1932. PTI mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.
- 1932—1942: Wartawan dan pemred harian *Matahari*, mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.
- 1943—1945: Memimpin Kebotai—paramiliter Tionghoa yang didirikan Jepang di kota Malang. Bekerja sama dengan pimpinan PETA dan pemuda Jawa Timur.
- 10 November 1945: Berpartisipasi dalam pertempuran di Surabaya.
- 1945—1948: Anggota Dewan Harian Partai Sosialis.
- 1946—1949: Anggota KNIP dan Badan Pekerja KNIP.
- 1947—1948: Menteri Negara, Kabinet Amir Sjarifoeddin.
- 1949—1955: Anggota DPR, Ketua Fraksi Nasional Progresif.
- 1949—1959: Pemred harian *Republik* dan mingguan *Sunday Courier* Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia)
- 1955—1959: Anggota DPR hasil Pemilu I, Ketua Fraksi Nasional Progresif.
- 1955—1959: Anggota Konstituante, Ketua Fraksi Baperki.
- 1954—1966: Ketua Umum Baperki.
- 1959—1966: Anggota DPR, MPRS, DPA, Dewan Harian Angkatan 45.
- 1965—1978: Tahanan politik rezim orde baru.
- 1978—1981: Eksil di Negeri Belanda.
- 20 November 1981: Meninggal karena serangan jantung beberapa menit sebelum memberi ceramah tentang "Kegagalan Demokrasi di Indonesia" di Universitas Leiden.

SIAUW GIOK TJHAN

G30S DAN KEJAHATAN NEGARA

ULTIMUS

BANDUNG 2015

G30S dan Kejahatan Negara
©Siauw Giok Tjhan

Penyunting: Siauw Tiong Djin
Desain sampul: Herry Sutresna

Diterbitkan oleh Ultimus
Cetakan **1, Oktober 2015**

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)
Siauw Giok Tjhan
G30S dan Kejahatan Negara
Cetakan 1, Bandung: Ultimus, 2015
xxx + 230 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

978-602-8331-68-5

ULTIMUS
Tel. (+62) 812 245 6452, (+62) 811 227 1267
ultimus_bandung@yahoo.com
www.ultimus-online.com

Daftar Isi

Daftar Singkatan — vii
Catatan Penyunting — ix
Kata Pengantar — xv

Gerakan 30 September — 1
Latar belakang — **1**
Peristiwa G30S — **13**
Dewan Revolusi — **18**
Siapa yang memimpin G30S? — **23**
Mengapa Sjam menjadi orang yang demikian penting? — **27**
Peran Aidit — **32**
Peran Soekarno — **40**
Peran Soeharto — **44**

G30S adalah Urusan Internal Angkatan Darat — 57
Peristiwa 3 Juli 1946 — **59**
Peristiwa Madiun 1948 — **59**
Peristiwa 17 Oktober 1952 — **62**
Peristiwa Bambang Utoyo 27 Juni 1955 — **63**
Pemberontakan PRRI–Permesta (1956, 1958, 1961) — **63**
Gerakan 30 September 1965 — **65**

Sesungguhnya Siapa Mengkudeta Siapa? — 73
PKI sebagai organisasi tidak terlibat — **82**

Pelanggaran Hukum dan HAM — 87

Kegiatan PKI Setelah G30S — 115
KOK – Kritik Oto Kritik — **115**
Perjuangan bersenjata (Perjuta) — **116**
Sikap dan kualitas tokoh-tokoh PKI di berbagai penjara — **122**

Pemerintah Militer Soeharto — 131
Tumbuh dan berkembangnya Soeharto — **131**
Pelanggaran UUD 45 dan Pancasila — **142**
Gerakan dan kebijakan anti-Tionghoa — **163**

Lenyapnya Demokrasi — 187
Arti demokrasi pemerintahan Soeharto — **187**
Arti sesungguhnya "mengembalikan ke dalam masyarakat" — **197**
Menjadi lebih tidak bebas dan tidak merdeka — **206**

Indeks — 223

Daftar Singkatan

ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
Bakin	Badan Koordinasi Intelijen Negara
Baperki	Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BPI	Badan Pusat Intelijen
BTI	Barisan Tani Indonesia
Cakrabirawa	Resimen Pengawal Presiden
CC PKI	Comite Central Partai Komunis Indonesia
CGMI	Central Gerakan Mahasiswa Indonesia
CIA	Central Intelligence Agency
Conefo	Conference of the New Emerging Forces
CPM	Corps Polisi Militer
G30S	Gerakan 30 September
Gestapu	Gerakan Tigapuluh September
Gestok	Gerakan Satu Oktober
Golkar	Golongan Karya
HAM	Hak Asasi Manusia
IMF	International Monetary Fund
kabir	kapitalis birokrat
Kapolri	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KENSI	Konferensi Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia
KGB	Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti – Committee for State Security – Intel Uni Soviet
KKO	Korps Marinir Indonesia
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
Kodam	Komando Daerah Militer
Kodim	Komando Distrik Militer
Kogam	Komando Ganyang Malaysia

Kopkamtib	Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Kostrad	Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
Koti	Komando Operasi Tertinggi
KSAD	Kepala Staf Angkatan Darat
KSAL	Kepala Staf Angkatan Laut
KSAU	Kepala Staf Angkatan Udara
Lekra	Lembaga Kebudayaan Rakyat
LPKB	Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa
Mahmilti	Mahkamah Militer Tinggi
Mahmilub	Mahkamah Militer Luar Biasa
Masyumi	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Nasakom	nasionalis, agama, dan komunis
NU	Nahdlatul Ulama
OSS	Office of Strategic Services – Intel AS pada masa Perang Dunia II
Partindo	Partai Indonesia
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PDI	Partai Demokrat Indonesia
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKT	Partai Komunis Tiongkok
PKUS	Partai Komunis Uni Soviet
PNI	Partai Nasional Indonesia
PP-10	Peraturan Pemerintah No.10
PRRI/Permesta	Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta
PSI	Partai Sosialis Indonesia
RPKAD	Resimen Para Komando Angkatan Darat
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
SOBSI	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
Supersemar	Surat Perintah Sebelas Maret
TNI	Tentara Nasional Indonesia
USA	United States of America
UPI	United Press International

CATATAN PENYUNTING

PADA tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 7 pagi, saya bermain catur dengan ayah saya, Siauw Giok Tjhan, di beranda depan rumah. Sebuah kebiasaan di pagi hari kalau ayah memiliki waktu luang. Pada hari yang sangat khusus dan penting itu, ia terlihat tenang seperti biasa.

Ini menandakan bahwa ia tidak tahu-menahu tentang akan adanya rencana Gerakan 30 September (G30S) menculik para jenderal Angkatan Darat dan tidak tahu-menahu tentang rencana G30S mengambil alih pemerintahan dari tangan Kabinet Dwikora dan menyerahkannya ke Dewan Revolusi. Tidak terbayang olehnya bahwa malapetaka hebat sebagai akibat kejahatan negara berada di ambang pintu. Ia tidak menyadari bahwa malapetaka tersebut akan menghancurkan semua perjuangan dan harapan politiknya. Ia tetap tenang bermain catur dengan saya yang pada waktu itu berumur 9 tahun.

Tidak lama kemudian, ada mobil masuk ke pekarangan rumah. Keluarlah Sunito, salah seorang tokoh Partindo. Sunito yang memang kerap datang ke rumah adalah sekretaris Universitas

Respublica, universitas yang dikelola dan diasuh oleh Baperki—Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia.

Siauw Giok Tjhan adalah Ketua Umum Baperki. Ia anggota DPRGR, MPRS, DPA, Dewan Harian Angkatan 45, dan beberapa lembaga resmi lainnya

Sunito dengan suara lantang berseru sambil menjabat tangan ayah, "Selamat." Ayah jelas tidak tahu mengapa ia diselamati dan apa yang membuat Sunito gembira. Pembicaraan antara kedua orang tua ini berlangsung sebentar. Sunito kemudian pergi meninggalkan rumah.

Ayah menyatakan bahwa permainan catur harus dihentikan dan ia segera menyalakan radio mencari berita. Tidak lama kemudian ia bergegas meninggalkan rumah. Dan baru kembali ke rumah pada malam hari. Ia tampak muram dan ketika berbicara dengan ibu, saya dengar ia menyatakan, "Keadaan gawat. G30S sudah ditumpas oleh Angkatan Darat. Pasti akan ada perubahan politik yang merugikan kita semua…."

Tentunya sekarang mudah untuk disimak bahwa yang dihadapi oleh Siauw Giok Tjhan pada hari itu adalah Peristiwa G30S, yang oleh pemerintah Soeharto ditambahi predikat PKI menjadi G30S/PKI sebagai manifestasi tuduhan pemerintah Soeharto bahwa PKI terlibat bahkan mendalangi G30S.

Siauw Giok Tjhan ternyata masuk dalam Dewan Revolusi yang dibentuk oleh G30S. Sebuah dewan yang tidak sempat bersidang karena G30S keburu ditumpas oleh Jenderal Soeharto.

Sejak tanggal 2 Oktober 1965, Jenderal Soeharto dengan dalih menumpas G30S, melaksanakan kejahatan negara yang mungkin terburuk setelah Perang Dunia II. Penghancuran yang dilaksanakan oleh penguasa militer secara sistematik terhadap PKI, organisasi yang resmi dan merupakan salah satu pilar kebijakan politik negara yaitu Nasakom sebelum 30 September 1965.

Penghancuran ini melibatkan pengejaran, penangkapan, dan pembunuhan massal. Lebih dari sejuta orang yang dianggap menganut paham komunisme dibunuh secara kejam. Sekitar 500 ribu orang ditahan. Puluhan ribu di antaranya ditahan belasan tahun tanpa proses hukum. Sebelas ribu di antaranya dibuang ke Pulau Buru.

Di samping itu, jutaan orang yang dianggap berhaluan politik kiri mengalami persekusi yang resmi dilaksanakan oleh negara belasan tahun. Dipecat dari pekerjaan, tidak bisa memperoleh pekerjaan lain, diusir dari tempat kediaman, anak-anak mereka tidak bisa memperoleh pendidikan yang baik. Mereka didiskriminasi dan diasingkan dari masyarakat dan hidup sebagai elemen yang membahayakan masyarakat.

Siauw Giok Tjhan memimpin Baperki melawan rasisme dan mencanangkan konsep integrasi wajar. Ia mengajak komunitas Tionghoa untuk menerima Indonesia sebagai tanah air dan menjadi patriot Indonesia tanpa menanggalkan latar belakang etnisitas. Harapannya adalah komunitas Tionghoa diterima sebagai salah satu suku Indonesia.

Menjelang akhir zaman demokrasi terpimpin (1959—1965), polarisasi politik di Indonesia kian meruncing. Kelompok berhaluan kiri dipimpin oleh PKI. Kelompok berhaluan kanan dipimpin oleh Angkatan Darat. Presiden Soekarno cenderung mendukung kelompok kiri.

Siauw dan Baperki bersikap mendukung Soekarno. Karena Soekarno cenderung berhaluan kiri, dengan sendirinya Siauw membawa Baperki ke perahu Soekarno yang bertentangan dengan partai-partai politik berhaluan kanan dan Angkatan Darat.

Pengejaran, penangkapan, dan pembunuhan yang dilaksanakan oleh Soeharto turut menghancurkan Baperki dan banyak anggotanya di berbagai daerah menjadi korban. Siauw Giok Tjhan mendorong pimpinan Baperki untuk tidak melarikan diri dan

melindungi para anggotanya. Mereka berupaya sekuat tenaga membersihkan nama Baperki dari semua tuduhan penguasa militer.

Pada tanggal 15 Oktober 1965 kampus Universitas Respublica di Jakarta diserbu dan dibakar oleh massa yang didukung oleh militer. Pada tanggal 4 November, Siauw Giok Tjhan ditahan dengan dalih "diamankan" dari masyarakat. Pada bulan Maret 1966, ia dipecat "dengan hormat" dari DPR, MPRS, dan DPA.

Sejak November 1965 hingga Agustus 1978, Siauw Giok Tjhan tercatat sebagai seorang tahanan politik (tapol). Ia resmi di-"bebaskan" dengan predikat "ET"—eks-tapol pada tahun 1978.

Ia ditahan di berbagai penjara di Jakarta. Dimulai dengan penahanan sementara di Lapangan Banteng dan kompleks Unra (Universitas Rakyat) dari November 1965 hingga Juli 1966. Di penjara Salemba dari Juli 1966 hingga November 1969. Di tahanan Satgas, November 1969 hingga Februari 1970. Di penjara RTM (Rumah Tahanan Militer), Februari 1970 hingga Desember 1972. Di penjara Nirbaya, Desember 1972 hingga November 1973. Di penjara Salemba, November 1973 hingga Oktober 1975. Tahanan rumah, Oktober 1975 hingga Agustus 1978.

Di berbagai tahanan inilah ia bertemu dan berdiskusi dengan banyak tokoh politik dan militer yang langsung dan tidak langsung terlibat dalam Peristiwa G30S. Ia berdiskusi dengan banyak orang dari berbagai lapisan, sipil maupun militer. Dari tokoh-tokoh utama seperti KSAU Omar Dhani, KSAD Pranoto, Menteri Setiadi, Menteri Sumarno dan Menteri Oei Tjoe Tat, Kolonel Latief hingga para tentara yang ikut dalam operasi penculikan para jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965. Ia juga berkesempatan berdiskusi dengan para tokoh yang memimpin operasi Blitar Selatan, di antaranya Munir dan Ruslan.

Diskusi-diskusi dengan para pelaku sejarah dari berbagai tingkat dan aliran ini mendorongnya menulis beberapa catatan

berbentuk analisa tentang G30S, kesalahan dan kecerobohan yang dilakukan oleh pimpinan PKI, setelah ia keluar dari penjara.

Ketika ia diizinkan oleh Adam Malik, pada waktu itu wakil presiden, untuk berobat ke Negeri Belanda pada tahun 1978, ia pun sering berbicara dengan para teman dan mahasiswa di Eropa. Sebagian dari pembicaraan-pembicaraan ini direkam.

Catatan-catatan Siauw sebenarnya disebar secara terbatas di antara para temannya pada tahun 1978. Jadi, sebelum banyak tulisan tentang G30S terbit.

Siauw Giok Tjhan menyimpulkan bahwa PKI secara organisasi tidak terlibat dalam G30S. Dan dari berbagai kenyataan yang ia amati, Soeharto memainkan peranan penting dalam peristiwa yang kemudian menjadi dasar dari kejahatan negara yang dilaksanakan secara sistematik belasan tahun.

Buku ini merupakan gabungan semua catatan, tulisan dan rekaman Siauw Giok Tjhan tentang Peristiwa G30S, peristiwa yang terjadi 50 tahun yang lalu, yang secara drastis mengubah struktur politik Indonesia dan membuahkan penderitaan jutaan orang yang tidak bersalah di Indonesia. Dan kesemuanya ini dilakukan oleh negara yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.

Diharap buku ini, bersama banyaknya publikasi lain tentang G30S, mempertinggi kemampuan para sejarawan dan generasi muda untuk secara objektif mempelajari dan menganalisa G30S. Dan yang lebih penting lagi, diharap buku ini mendorong generasi di kemudian hari untuk berjuang menjamin tidak terulangnya kejahatan negara seperti yang dilakukan oleh Soeharto.

Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan para saudara saya, terutama kakak saya, Siauw Tiong Tjing yang telah dengan rajin dan penuh dedikasi mengubah banyak bahan tertulis Siauw Giok Tjhan ke dalam format yang mempermudah upaya penyuntingan.

Semua kelemahan dan kesalahan penyuntingan dari berbagai dokumen dan rekaman ini adalah tanggung jawab saya sebagai penyunting.

Siauw Tiong Djin
1 Oktober 2015

KATA PENGANTAR

John Roosa[1]

PERKENALAN saya dengan tulisan-tulisan Siauw Giok Tjhan terjadi pada tahun 2000, ketika saya memperoleh fotokopi yang sudah menguning dari beberapa tulisannya yang belum pernah diterbitkan.

Pada waktu itu, saya sedang duduk di antara rak-rak buku di kamar kerja Oey Hay Djoen, di rumahnya, Jakarta Selatan. Buku-buku tersebut telah diselamatkan dengan penuh keberanian oleh istrinya, ketika ia sendiri meringkuk dalam tahanan sebagai seorang tahanan politik selama 14 tahun.

Sambil duduk di meja, di mana ia bekerja keras untuk menyelesaikan terjemahan tulisan-tulisan Marx dan para Marxis, ia memberikan tulisan-tulisan Siauw tersebut tanpa menyampaikan pendapatnya tentang sosok Bung Siauw maupun tulisan-tulisannya.

Pada waktu itu, saya hanya mengetahui Bung Siauw sebagai Ketua Baperki. Selain itu saya tidak banyak mengenalnya. Saya pun tahu bahwa Oom Oey, demikian saya memanggilnya, cenderung menganjurkan orang Tionghoa Indonesia untuk masuk ke dalam

[1] Associate Profesor Sejarah di Universitas British Columbia di Vancouver, Kanada. Penulis buku *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto.*

organisasi-organisasi nasional, tidak masuk ke dalam organisasi yang bersandar atas etnisitas seperti Baperki. Akan tetapi saya tahu bahwa Oom Oey sangat menghormati Bung Siauw dan mengerti alasan sejarah pembentukan Baperki. Ia sangat antusias menerbitkan tulisan-tulisan Bung Siauw dan tulisan-tulisan tentangnya.

Beberapa saat kemudian, di rumah saya yang terletak di Jakarta Timur, saya membaca esai-esai Bung Siauw tersebut. Saya kagumi kejelasan penuturannya. Esai-esai tersebut merupakan sebuah teladan karena merefleksikan pemikiran yang analitis, bahkan berani menyentuh topik-topik sensitif, seperti mengapa PKI tidak melakukan perlawanan terhadap serangan dan penghancuran yang dilakukan oleh Angkatan Darat.

Banyak orang tentunya tidak akan mengira bahwa seorang korban kekerasan seperti Bung Siauw, dipenjarakan selama 12 tahun sebagai seorang tahanan politik, telah mengalami kelaparan dan menyaksikan para kawan setahanan meninggal di sekitarnya, masih memiliki kemampuan untuk menulis sebuah analisa mendalam.

Dalam mempersembahkan sebuah argumentasi, ia nyatakan sumber bahan yang ia gunakan dan dengan penuh kerendahan hati ia tandaskan, untuk beberapa butir pandangan, ia memang tidak memiliki informasi yang lengkap. Tidak ada pengakuan yang dibuat-buat, tidak ada penuturan yang tidak berdasar bukti-bukti kuat dan tidak ada upaya menjelek-jelekkan orang lain. Orang yang membaca tulisan-tulisan ini akan memperoleh kesan bahwa Bung Siauw adalah seorang pengamat, bukan seorang korban. Ia tidak pernah menggambarkan penderitaannya sendiri.

Salah satu esai ditulis tentang Gerakan 30 September (G30S). Ia menggambarkannya sebagai: "catatan-catatan berdasarkan ingatan apa yang telah didengar, diperbincangkan di dalam tahanan tanpa ada maksud untuk menyinggung perasaan siapa pun dan diajukan secara tulus dan sejujur-jujurnya." Dari tulisan ini, saya mengerti

mengapa ia sangat dihormati di dalam gerakan progresif dan sangat disegani oleh para tokoh militer kanan.

Ia benar-benar jujur. Ia dengan sangat tulus dan rendah hati mendengarkan apa yang para tapol tuturkan mengenai G30S dan setelah itu dengan kritis mengevaluasi penuturan mereka. Ia pun sangat rajin. Ia kumpulkan begitu banyak informasi yang berbeda tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan G30S. Saya belum pernah menemukan mantan tapol lain yang pernah mengeluarkan sebuah analisa tentang kejadian 30 September sedemikian komprehensif, teliti dan lengkap.

Dari kesemuanya ini saya kemudian mengerti kenapa ia dipilih sebagai Ketua Baperki pada tahun 50-an. Ia sangat terbuka dan mampu berdialog secara tenang dan mantap dengan orang-orang yang memiliki orientasi politik yang berbeda dengannya tanpa mengkompromikan pendapat-pendapatnya.

Dalam esai ini, saya akan memusatkan perhatian ke tulisan Bung Siauw pada tahun 1978 tentang G30S, dan tentang tuntutannya yang ditulis pada tahun 1979, membawa Soeharto ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya.[2] Keduanya ditulis setelah ia bebas dari tahanan dan ketika ia berobat di Negeri Belanda.

Di dalam esai pertama, Bung Siauw menyatakan bahwa ia ingin menyebarluaskan informasi yang ia peroleh dari tahanan tentang hancurnya PKI. Ia ingin membantu para pelarian politik di Eropa dan para kawan sepengorbanan di Indonesia, untuk mengerti, apa yang menyebabkan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto menjadikan mereka—yang tidak tahu-menahu tentang G30S—kelompok orang yang bersalah.

[2] Bung Siauw menggunakan dua nama pena: Sukidjan, "Berbagai Catatan dari Berbagai Macam Cerita yang Dikumpulkan dalam Percakapan2 dengan Berbagai Teman Tahanan di Salemba, Rumah Tahanan Chusus, dan Nirbaya" (November 1978); Sigit, "'The Smiling General' Harus Dituntut di Depan Mahkmah" (Agustus 1979).

Di esai kedua, ia menulis sebuah tuntutan disertai informasi dan argumentasi untuk membawa Soeharto ke pengadilan, bilamana situasi politik memungkinkan, baik di pengadilan Indonesia maupun pengadilan internasional.

Yang paling menarik perhatian saya dari tulisan-tulisan ini adalah komitmen Bung Siauw terhadap *rule of law.* Tulisannya bersandar atas Indonesia sebagai *negara hukum*. Sekilas, hal ini tidak memerlukan sorotan apa-apa. Penegakan hukum sering dianggap sebagai topik yang membosankan dan kuno, sesuatu yang sebenarnya lebih baik dibahas oleh orang-orang konservatif yang berhubungan dengan kegiatan hukum dan ketertiban.

Akan tetapi dalam konteks Indonesia di mana penegakan hukum merupakan pengecualian, ia adalah sebuah masalah yang penting dan mendesak. Sejak kemerdekaan dan Republik Indonesia diterima sebagai negara merdeka oleh dunia internasional pada tahun 1949, sebagian besar masanya, 1959 hingga 1998, Indonesia berada di bawah kekuasaan berbagai pemerintah yang melanggar prinsip *rule of law*.

Pada umumnya orang-orang komunis dan anti-komunis tidak terlalu memperhatikan masalah penegakan hukum. Tulisan-tulisan tentang tragedi 1965—1966, contohnya, ditekankan sebagai pertikaian politik, seolah-olah tragedi itu adalah semata-mata akibat pertikaian antara PKI dan Angkatan Darat. Padahal, sementara pengamat menyatakan bahwa yang berlaku pada masa itu adalah hukum rimba.

Kiranya sulit di masa kini untuk menghargai cita-cita para nasionalis sebelum "kemunduran demokrasi konstitusional" (seperti yang dinyatakan oleh Herb Feith) pada akhir tahun 1950-an. Tulisan-tulisan Bung Siauw menyegarkan ingatan kita tentang cita-cita ini. Bung Siauw mengingatkan kita tentang apa yang diperjuangkan oleh para nasionalis yang teguh berprinsip dalam melawan

kolonialisme. Para pejuang yang ingin membangun sebuah negara hukum yang berpijak di atas HAM—hak asasi manusia.

Bung Siauw menjadi anggota parlemen selama hampir 20 tahun (sejak KNIP pada tahun 1946 hingga DPR-GR pada tahun 1965) dan anggota Konstituante. Ia sangat mengerti Undang-Undang Indonesia dan menyadari betapa pentingnya Indonesia memiliki kerangka hukum yang tepat.

Untuk bisa menghargai nilai tulisan-tulisan Bung Siauw, kita harus membandingkannya dengan tulisan-tulisan beberapa tokoh PKI yang berhasil menyelamatkan dirinya, tidak lama setelah pembantaian massal pada tahun 1965—1966. Tulisan-tulisan ini lebih banyak berbentuk perdebatan abstrak antar kelompok tentang teori Marxisme dan Leninisme yang oleh mereka dijadikan dogma. HAM dan penegakan hukum tidak ditonjolkan sebagai bahan perdebatan. Yang berkiblat ke Soviet Uni menyalahkan pimpinan PKI yang dianggapnya terlalu mengikuti Maoisme; sebaliknya, yang berkiblat ke RRT menyalahkan pimpinan tidak cukup disiplin mengikuti Maoisme. Timbullah perdebatan antara revisionisme modern (remo) dan advonturisme, meminjam istilah-istilah yang dipergunakan untuk mencela satu dengan yang lain pada waktu itu. Mungkin hanya satu hal yang bisa disimpulkan dari tulisan-tulisan para tokoh PKI itu, yaitu terdapat tidak sedikit orang dogmatis di dalam tubuh PKI.

PKI tidak menganggap penegakan hukum sebagai sesuatu yang mahapenting. Memang semua partai komunis yang dibentuk setelah revolusi di Rusia pada tahun 1917 menganggap penegakan hukum sebagai penekanan borjuis, tidak perlu didukung oleh orang-orang revolusioner. Hukum di bawah politik sedangkan politik adalah dasar peperangan. Orang-orang komunis harus menjadi pendekar-pendekar dalam peperangan kelas, mengambil alih kekuasaan negara dan kemudian menciptakan undang-undang baru setelah kekuasaan diraih. Negara Soviet adalah bentuk negara yang

diidamkan, di mana partai komunis sepenuhnya berkuasa dan hukum atau undang-undang diciptakan oleh partai komunis. Penegakan hukum di luar partai komunis tidak diizinkan berfungsi.

Beberapa tokoh yang meninggalkan gerakan komunis internasional seperti sejarawan E.P. Thomson, keluar dari Partai Komunis Inggris setelah Soviet menyerang Hongaria pada tahun 1956, menyimpulkan bahwa menganggap hukum sebagai alat penindasan kelas adalah sebuah kesalahan.

Thompson yang tetap menjadi seorang Marxis, mengakhiri bukunya *Whigs and Hunters (1975)* dengan sebuah bab, 11 halaman, yang ia namakan "The Rule of Law" (Negara Hukum). Kata-kata ternama dari bab itu adalah: "Saya hanya ingin menekankan sebuah hal yang paling penting, yang telah diabaikan oleh para Marxis modern, bahwa ada perbedaan antara kekuasaan sewenang-wenang dan penegakan hukum. Kita harus membongkar penipuan dan ketidak-adilan yang terselubung oleh undang-undang. Penegakan hukum yang membatasi kekuasaan dan melindungi rakyat dari kekuasaan sewenang-wenang, menurut saya, tanpa pengecualian, adalah hal yang baik."

Thompson melihat bahwa Undang-Undang Inggris merangkul berbagai aspek perjuangan sosial yang berlangsung berabad-abad dan yang mengandung kemenangan rakyat jelata. Pembatasan kekuasaan pemerintah dibutuhkan oleh setiap negara, termasuk negara-negara yang terbentuk sebagai hasil revolusi, walaupun negara itu, seperti yang Lenin definisikan dalam bukunya *State and Revolution* (1917), merupakan jembatan sementara dalam menuju masyarakat tidak bernegara.

Bung Siauw menyatakan: "pejuang2 kemerdekaan RI, bercita-citakan menegakkan satu negara yang berdasarkan prinsip '*rule of law*', mencapai satu negara berdasarkan hukum '*rechtstaat*' (negara hukum) dan bukan menjadi '*machtstaat*' (negara kekuasaan)."

Saya ingin mengembangkan diskusi ini. Saya yakin bahwa para perumus UUD 45 memiliki komitmen tinggi tentang pembentukan negara hukum, walaupun harus disadari bahwa tidak semuanya seirama tentang apa yang dimaksud dengan negara hukum.

Ada sementara anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menganggap *rechstaat* adalah *rechstaat* yang dilakukan oleh Belanda di zaman kolonial Hindia-Belanda, yaitu sebagai negara yang mengikuti undang-undang tertulis; undang-undang ini tidak perlu memiliki norma demokratik atau mengindahkan HAM.

Di lain pihak, ada beberapa perumus UUD 45 menganggap dirinya sebagai insinyur sosial, menciptakan cetak biru dalam pembentukan masyarakat baru. Oleh karena itu, menurut mereka, kekuasaan negara tidak perlu dibatasi. Adanya UUD saja sudah cukup sebagai dasar pembentukan sebuah negara hukum. Mereka tidak mementingkan penegakan hukum. Istilah negara hukum tidak dicantumkan dalam UUD 1945.

Mohammad Hatta lah yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak perorangan di dalam UUD: "Kita mendirikan negara yang baru. Hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan jadi negara kekuasaan." Hatta mengusulkan dimasukkannya sebuah pasal: "hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain."

Oleh karena itu ada Pasal 28 dalam UUD 1945: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Akan tetapi perlu dicatat bahwa para perumus UUD tersebut tidak tegas menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk melakukan hal-hal tercantum di atas. Istilah "hak" tidak masuk di dalam Pasal 28. Yang dijamin adalah para pembuat undang-undang diberi wewenang untuk mengeluarkan peraturan tambahan mengatur kegiatan-kegiatan yang tercantum.

Memang UUD 1945 tidak memberi banyak hak untuk rakyat. Ada hak untuk bekerja dan memiliki standar hidup yang baik (Pasal 27), hak untuk memilih agama (Pasal 29), dan hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 31). Yang jelas terlewat adalah hak untuk memilih. UUD 1945 juga tidak dengan jelas menjabarkan bagaimana wakil-wakil rakyat di DPR dan MPR dipilih. Kebijakan ini dinyatakan akan ditentukan di lain kesempatan.

Keputusan Presiden Soekarno untuk mengganti UUD Sementara 1950 dengan UUD 1945, sebagai reaksi terhadap kegagalan Konstituante dalam merumuskan UUD baru pada tahun 1959, merupakan sebuah tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia.

Berbeda dengan UUD 1945, seperti yang Bung Siauw tandaskan, UUD Sementara 1950 mengikutsertakan banyak hak: "Rakyat Indonesia pernah hidup di bawah UUD Sementara Negara Kesatuan (17 Agustus 1950—5 Juli 1959) yang mengutip seluruh isi '*Universal Declaration of Human Rights*' yang disahkan PBB dalam sidang umumnya 10 Desember 1948."

Setelah UUD 1945 dibekukan selama 40 tahun, perubahan positif akhirnya bisa dicapai. Sebelum itu, UUD 1945 diperlakukan sebagai sebuah benda yang dibungkus kain keramat yang tidak boleh disentuh dan hanya diletakkan di museum. Para perumus undang-undang akhirnya sadar bahwa Indonesia harus menghentikan situasi di mana negara tergantung atas kata-kata seorang presiden—yang dalam zaman demokrasi terpimpin dan orde baru—berbentuk hukum. Mereka sadar bahwa negara Indonesia harus bersandar atas *rule of law*.

Dalam hal penegakan hukum, Indonesia memang sangat terbelakang. Hanya sekali setelah Soeharto jatuh pada tahun 1998, perubahan ini dilakukan. Sebelum itu, Indonesia diajak oleh pemerintah untuk menghindari penegakan hukum. Ini bisa dimengerti, karena banyak perumus UU adalah orang-orang orde baru yang tidak memiliki komitmen tentang penegakan hukum.

Akan tetapi akhirnya mereka sadar dan menanggulangi masalah penegakan hukum yang sangat dibutuhkan Indonesia. Perubahan-perubahan yang dicapai bersandar atas pasal-pasal yang ada dalam UUD Sementara 1950.

Bung Siauw bertanya, mengapa Indonesia gagal menjadi negara hukum yang diidamkan oleh para pendirinya? Jawaban atas pertanyaan ini adalah satu kata: tentara.

Konflik di dalam tubuh Angkatan Darat telah mencegah dikuasainya negara oleh kekuatan sipil dan gagalnya negara bersandar atas *rule of law.* Tentara-tentara Indonesia kerap bertempur menghantam satu sama lain: Peristiwa Madiun pada tahun 1948; pemberontakan PRRI-Permesta pada tahun 1957—1960; G30S pada tahun 1965.

Perwira-perwira Angkatan Darat juga kerap menentang upaya Presiden dan parlemen untuk mempengaruhi Angkatan Darat: Kejadian 1952; Kejadian Bambang Utoyo 1955, dan pembangkangan terselubung Angkatan Darat di masa Konfrontasi (1963—1966).

Walaupun saya menganggap Soekarno dan demokrasi terpimpinnya bertanggung jawab atas pelanggaran *prinsip negara hukum*, saya bisa mengerti mengapa Bung Siauw tidak menyalahkan Soekarno. Banyak politikus progresif seperti Bung Siauw mengenalnya secara pribadi dan menganggapnya sebagai seorang pemimpin yang jujur, memiliki maksud baik dan terhormat. Mereka juga melihat bahwa Soekarno, dalam merumuskan berbagai kebijakan mengikuti prinsip-prinsip HAM, walaupun ia tidak merealisasi kebijakan-kebijakan ini dengan prosedur-prosedur hukum yang kuat dan berpengaruh.

Contohnya, Siauw menyatakan bahwa Soekarno tidak melakukan penangkapan dan pembunuhan massal ketika menindas pemberontakan PRRI-Permesta dan tidak menganggap orang-orang yang pernah memberontak terhadap pemerintah sebagai pengkhianat bangsa. Soekarno tidak menahan semua anggota

Masyumi dan PSI walaupun pimpinan partai-partai tersebut terlibat dalam PRRI-Permesta. Dan mereka yang ditahan kemudian diampuni dan dibebaskan. Soekarno tidak memerintahkan eksekusi terhadap mereka yang memberontak: "Dan ingat, Presiden Soekarno tidak pernah mencabut atau membatalkan secara sepihak pensiun yang mereka berhak menerimanya sebagai bekas menteri, sebagai anggota DPR!"

Ini tentunya bertolak belakang dengan tindakan Soeharto dalam membasmi G30S. Sebenarnya G30S bukan sebuah gerakan. Ia tidak berbentuk gerakan pemberontakan sekaliber PRRI-Permesta. Akan tetapi Soeharto menggunakan dalih pemberontakan G30S sebagai alasan untuk melakukan penangkapan dan pembantaian dalam skala yang sangat besar. Mengingat kelaliman Soeharto, mudah dimengerti mengapa para korbannya tidak bisa menyalahkan Soekarno.

Walaupun Dekrit 1959 bisa dikatakan sebagai upaya darurat untuk menanggulangi sebuah krisis, kiranya sulit memaafkan Soekarno yang gagal menghentikan sistem yang bersandar atas kekuasaan mutlak seseorang. Soekarno tidak memiliki komitmen untuk memulihkan penegakan hukum dan demokrasi. Dan tidak adanya harapan bahwa karakter demokrasi terpimpin yang berkepanjangan ini akan berakhir dan telah mendorong PKI dan Angkatan Darat untuk mencari jalan keluarnya masing-masing.

Pimpinan Angkatan Darat dan PKI sejak awal tahun 1965 saling ragu apakah mengambil langkah mendahului penyerangan terhadap satu sama lain. Dokumen-dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat jelas menunjukkan bahwa para jenderal Angkatan Darat terus-menerus berhubungan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan memutuskan untuk menunggu PKI mengambil langkah terlebih dahulu. Para jenderal tersebut tidak ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, karena ia sangat populer. Mereka berpendirian sebaiknya menunggu adanya alasan untuk

menghantam PKI dan secara berangsur menyingkirkan Presiden Soekarno. Dan dalam waktu bersamaan, tetap menunjukkan kesetiaan terhadap Soekarno. Gerakan 30 September adalah alasan yang mereka nantikan. Bung Siauw menyatakan: "Yang jelas sekarang ini, G30S ternyata dijadikan alasan oleh Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI."

Bung Siauw menyadari bahwa Aidit dan beberapa pimpinan top PKI terlibat dalam G30S. Akan tetapi, ia tidak habis pikir bagaimana mereka ini terlibat dan mengapa mereka terlibat. Selama ia di penjara, ia berkesempatan berbicara dengan beberapa pimpinan dan anggota PKI yang terlibat, seperti Kusno, asisten pribadi Aidit, Mohamad Munir, anggota Politbiro PKI. Walaupun mereka tidak memiliki informasi yang lengkap, tetapi dari pembicaraan ini Bung Siauw bisa menyimpulkan bahwa yang paling berperan dalam pengaturan G30S adalah seorang yang bernama Sjam: "Dan dari kenyataan-kenyataan yang terjadi sekitar G30S, kita bisa melihat bahwa yang memainkan peranan menentukan dan sebagai 'memimpin' G30S adalah Sjam, dan jelas Sjam tidaklah identik dengan pimpinan PKI, karena Sjam bukanlah orang yang bisa bertindak mewakili PKI berdasarkan Anggaran Dasar PKI." Sjam memainkan peranan sebagai Ketua Biro Khusus yang "merupakan alat dari Ketua CC PKI D.N. Aidit."

Dari Kusno, Bung Siauw mengetahui bahwa Aidit berada di Halim pada hari pelaksanaan G30S dan terbang ke Jawa Tengah pada malam harinya dengan pesawat Angkatan Udara. Dalam buku saya *Dalih Pembunuhan Massal*, saya mencoba untuk meneruskan analisa Bung Siauw tentang peran yang dimainkan oleh Sjam dan Biro Khusus dalam G30S dan kaitannya dengan hubungan antara Aidit dengan para perwira yang oleh PKI dinyatakan sebagai "perwira yang progresif dan revolusioner".

Bung Siauw tidak bisa mengerti dan menerima bagaimana orang yang tidak banyak diketahui ini bisa secara tiba-tiba muncul

berperan sebagai seorang "kingmaker". Sjam, yang pernah bersama Bung Siauw berada di penjara di Jakarta pada tahun 60-an, dianggapnya sebagai seorang misterius.

Informasi yang ia peroleh tentang diri Sjam selama di tahanan menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kesetiaan terhadap partai, bahkan sering mengkhianati para anggota partai: "Benar-benar satu mentalitet yang merusak nama baik komunis. Bagaimana bisa terjadi seorang tokoh PKI seperti Sjam itu yang memegang peranan begitu pentingnya! Martabat yang sedikit pun tidak ada bau komunisnya."

Bung Siauw tidak tahu apakah Aidit dikelabui Sjam untuk terlibat dalam G30S atau apakah Aidit bekerja sama dengan Sjam dalam mengkoordinasikan G30S. Bung Siauw curiga bahwa Sjam adalah agen anti-komunis yang menyelundup ke dalam PKI untuk menghancurkannya. Akan tetapi ia heran, kalau benar begitu, mengapa Sjam bisa dipercaya penuh oleh Aidit untuk memimpin sebuah lembaga—Biro Khusus—yang demikian pentingnya, sehingga Aidit bersedia diperintah oleh Sjam di hari aksi tersebut. Situasi ini menurutnya aneh.

Walaupun peran apa yang Aidit mainkan dalam G30S tetap tidak jelas, tetapi ia bukan seorang yang begitu bodoh untuk bisa dikelabui oleh Sjam berada di Halim sehingga PKI bisa disalahkan dalam melakukan aksi yang direncanakan untuk gagal. Beberapa minggu sebelum G30S, Aidit telah bekerja sama dengan Sjam untuk mengatur serangan mendadak terhadap jenderal-jenderal kanan yang anti-komunis. Transkripsi pembicaraan Aidit dengan Mao di Beijing pada tanggal 5 Agustus 1965 membuktikan bahwa Aidit tahu persis rencana untuk G30S. Aidit menjelaskan ke Mao bahwa personil tentara yang pro-PKI akan melakukan aksi untuk menyingkirkan perwira kanan dan mendirikan dewan yang kelihatannya netral. Dua bulan sebelum G30S Aidit bisa menggambarkan secara detail apa yang akan dilakukan dan kenapa.

Komando G30S dan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Untung ternyata adalah sebuah jembatan untuk melakukan perombakan susunan negara yang radikal. G30S adalah sebuah gerakan yang akan mengenyahkan jenderal-jenderal Angkatan Darat kanan dan mempertahankan kedudukan Presiden Soekarno. Rencananya adalah menghindari pertentangan dengan kekuatan-kekuatan yang terhimpun dalam Front Nasional.

Akan tetapi rencana ini sebenarnya mengundang kegagalan. G30S tidak bisa menyatakan menyelamatkan Presiden Soekarno dan pada waktu bersamaan mengganti kabinet yang sah dengan Dewan Revolusi, apalagi kalau Soekarno tidak berperan dalam pemilihan kabinet dan tidak lagi berfungsi sebagai Presiden *de facto*. Bung Siauw dengan panjang lebar menggambarkan bagaimana pengumuman tentang Dewan Revolusi dan komposisinya telah mendorong kekuatan netral untuk turut menyerang PKI.

Tentunya sulit untuk membantah argumentasi Bung Siauw bahwa kekuatan anti-komunis internasional turut memasang jebakan untuk PKI pada tahun 1965 dan bahwa: "PKI kurang kewaspadaan sehingga masuk dalam jebakan ini." Menurut analisis di buku *Dalih Pembunuhan Massal*, Sjam tidak bekerja untuk organisasi di luar PKI, apakah itu CIA atau KGB atau Angkatan Darat yang menginginkan kehancuran PKI. Kesalahan utama Sjam adalah kecerobohan dan ketidakmampuannya dalam merencanakan dan memimpin gerakan, bukan karena ia adalah seorang agen berganda dan pengkhianat.

Dari bahan-bahan Amerika Serikat yang sudah dideklasifikasi kita tahu bahwa Amerika Serikat bersama para jenderal Angkatan Darat giat memprovokasi PKI untuk mengambil langkah mendahului; mereka menantikan adanya kejadian yang bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan PKI. Aidit ternyata merasa ada dasar untuk mengambil tindakan mendahului dan yakin bahwa

akan mencapai kemenangan, sehingga ia masuk ke dalam perangkap.

Dalam mempertimbangkan keganasan serangan terhadap para anggota PKI setelah G30S, Bung Siauw tidak segan mengkritik pimpinan PKI. Ia mempertanyakan apa yang menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa PKI tidak berbuat apa-apa untuk melawan serangan ganas ini? Jawaban Bung Siauw adalah, PKI telah menjadi sebuah partai yang hanya menerima perintah dari atas. Setelah 1 Oktober 1965, Aidit bersembunyi di Jawa Tengah dan Politbiro tercerai-berai. Instruksi Aidit adalah menunggu Presiden Soekarno untuk mendapatkan jalan keluar. Sebuah instruksi untuk tidak melawan demi kedamaian.

Dalam menghadapi penghancuran yang tidak dapat dicegah oleh Soekarno, pimpinan PKI ternyata tidak mampu mengubah strategi dan mengorganisasi perlawanan: "Apa yang dilakukan selanjutnya oleh Aidit di Jawa Tengah, tidak ada kejelasan … dalam kehidupan dikejar-kejar, Aidit ternyata tidak dapat melaksanakan pimpinan sebagaimana yang diharapkan sebagai Ketua PKI."

Bung Siauw menyadari pada tahun 1970-an bahwa dalam menghadapi kediktatoran Soeharto, Indonesia harus kembali ke dasar-dasar negara hukum dan hak rakyat: "Merasakan perlunya ditegakkan kembali prinsip '*rule of law*', ditegakkannya prinsip '*presumption of innocence*' (hak untuk diperlakukan sebagai manusia 'tidak berdosa' sebelum dibuktikan oleh pengadilan yang tidak memihak), ditegakkannya prinsip '*fair trial*' (pemeriksaan perkara secara adil oleh pengadilan yang tidak memihak), dan diindahkannya Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)."

Dengan cerdas dan tepat Bung Siauw berargumentasi bahwa salah satu sila Pancasila, sila perikemanusiaan, harus diinterpretasikan sesuai dengan Pernyataan PBB tentang HAM 1948 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR): "Jadi, sila

perikemanusiaan yang adil dan beradab tidak bisa lain adalah hak asasi manusia seperti yang diakui umat manusia sedunia dan harus dilaksanakan secara konsekuen tanpa kecuali."

Setelah hampir setiap negara telah mengakui UDHR, tidak ada dokumen lain yang lebih baik dalam memformulasikan cita-cita umum untuk seluruh penduduk dunia. Indonesia tentunya tidak bisa menjunjung tinggi Pancasila selama ia melanggar HAM. Selama Soeharto berkuasa, rakyat Indonesia dipaksa untuk menerima Pancasila tanpa menyadari adanya UDHR dan adanya rentetan perjanjian tentang HAM yang telah disetujui setelah tahun 1948. Rezim Soeharto tidak bersedia menandatangani banyak Perjanjian HAM, seperti *International Convenant on Civil and Political Rights of 1966*. Ia menjalankan berbagai kampanye bersama Singapura dan Malaysia yang didesain untuk melanggar HAM dengan dalih martabat Asia. Baru setelah Soeharto jatuh, Indonesia mulai mengikuti konsensus internasional (bukan hanya "Barat") tentang HAM.

Saya kira Bung Siauw akan menghargai kegiatan HAM yang dilakukan oleh Ahmed Seif el-Islam (1951-2014) di Mesir. Ia adalah seorang aktivis yang dipenjarakan dan disiksa oleh diktator militer pada tahun 1980-an. Ketika di penjara, ia memutuskan untuk menjadi sarjana hukum dan teguh mendukung HAM. Ia yakin bahwa penyiksaan adalah kejahatan dan harus ditentang, siapa pun yang melakukannya: "Saya berkeyakinan bahwa tidak ada artinya melakukan kegiatan politik tanpa HAM. Orang-orang komunis secara rahasia menyatakan bahwa menyiksa orang-orang Islam tidak salah. Sedangkan orang Islam menyatakan: Apa salahnya menyiksa orang-orang komunis." Masalah yang diangkat oleh Seif adalah hal yang Bung Siauw tandaskan pula, yaitu bagaimana memadukan perjuangan politik dalam mencapai kekuasaan negara dengan komitmen menjunjung tinggi HAM?

Sangat disayangkan Bung Siauw wafat di usia yang relatif muda pada tahun 1981. Sebuah kematian yang harus dikaitkan dengan rezim Soeharto di mana kondisi penjaranya yang buruk telah merusak kesehatan Bung Siauw.

Pembunuhan dan penangkapan massal yang dilakukan Soeharto selama bertahun-tahun telah menghancurkan kehidupan banyak orang Indonesia yang terbaik dan terpandai. Banyak penulis yang terbaik, pelukis yang terbaik, intelek yang terbaik, dan organisatoris terbaik dibunuh, menjadi cacat seumur hidup, dibungkam, diteror, dan dipaksa untuk hidup sebagai eksil. Lalu muncullah sekelompok preman, perwira militer yang cupat, koruptor dan oportunis yang tidak memiliki talenta menggantikan mereka yang dipersekusi ini.

Dengan wafatnya Bung Siauw, Indonesia telah kehilangan salah satu suara yang membela HAM. Ia adalah seorang yang patut diingat sebagai salah satu pembangun bangsa dan negara karena turut dalam perumusan kedua UUD pertama dan seorang tua bijaksana yang di puncak kediktatoran Soeharto mengingatkan rakyat Indonesia bahwa mereka adalah rakyat yang memiliki berbagai hak.

GERAKAN 30 SEPTEMBER

LATAR BELAKANG

Menjelang akhir 1965, terjadilah sebuah peristiwa yang oleh pemerintah orde baru diperingati sebagai Peristiwa G30S/PKI. Hingga kini masih dipertanyakan orang: apakah ini provokasi kekuatan imperialis atau semata-mata keteledoran politik pimpinan PKI? Banyak pertanyaan yang masih tidak terjawab. Berbagai faktor yang berkaitan dengan peristiwa ini masih tidak jelas.

Perkembangan politik internasional pada tahun 1965 memaksa Amerika Serikat untuk jauh lebih melibatkan dirinya dalam pertempuran di Indocina dengan mengirim jauh lebih banyak pasukan, berbagai peralatan perang yang mahal dan tentunya dana untuk peperangan. Kesemuanya ini dilakukan untuk membendung pengaruh komunisme dan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan kebijakan *China containment policy*.

Pada tahun yang sama, Konferensi Asia–Afrika II sedang dipersiapkan di Aljazair dengan jumlah pengikut yang lebih besar dari Konferensi A-A pertama di Bandung. Konferensi ini dianggap akan membangkitkan solidaritas rakyat di kawasan Asia dan Afrika, dan akan mempengaruhi perkembangan rakyat di Amerika Latin. Kesemuanya ini merugikan kepentingan perusahaan-perusahaan

multinasional dan akan menghambat pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.

Dapatlah dimengerti mengapa Amerika Serikat berkepentingan berbuat sesuatu untuk menggagalkan konferensi ini.

Pada waktu yang bersamaan, pertentangan ideologi antara Peking dan Moskow semakin meruncing. Perkembangan di masa itu membuat RRT (Republik Rakyat Tiongkok) semakin populer di kawasan Asia dan Afrika. Oleh karena itu Uni Soviet ingin memperkecil pengaruh RRT di kawasan Asia. Dengan sendirinya, Uni Soviet tidak mendukung diselenggarakannya Konferensi A-A II yang diperkirakan akan memperbesar pengaruh RRT. Apalagi setelah keinginan Uni Soviet untuk berpartisipasi di dalam konferensi itu ditolak oleh RRT dan Indonesia.

Dalam hal ini, kepentingan Amerika Serikat dan Uni Soviet kelihatannya berembuk. Akan tetapi sulit untuk dibuktikan siapa yang sebenarnya lebih berperan dalam upaya kekacauan politik di Aljazair, CIA (Central Intelligence Agency) atau KGB (Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti – Committee for State Security – Intel Uni Soviet) yang menyebabkan Konferensi A-A II dibatalkan beberapa saat sebelum tanggal penyelenggaraannya.

Delegasi besar Indonesia yang dipimpin sendiri oleh Bung Karno sebenarnya telah berangkat menuju ke Aljazair. Bung Karno hendak menggunakan kesempatan konferensi ini untuk mempersiapkan diselenggarakannya Conefo (*Conference of the New Emerging Forces*) yang mengikutsertakan para negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Sebelum ini, Bung Karno memang telah mengeluarkan kebijakan untuk membanting setir ke arah kemampuan berdikari—berdiri di atas kaki sendiri. Program ekonomi nasional dipersiapkan untuk melaksanakan kebijakan ini. Di dalam salah satu pidatonya, Bung Karno dengan lantang berseru: "*go to hell with your aid!*"—menolak bantuan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya.

Bilamana ini benar dilaksanakan, kekuatan ekonomi multinasional akan dipreteli dan berbagai "bantuan" negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris tentu akan diperkecil, bahkan dilenyapkan. Di samping ini, kebijakan politik luar negeri yang didasari atas poros Jakarta–PhnomPenh–Hanoi–Peking–Pyongyang yang menentang *China containment policy* mengkhawatirkan pihak Amerika Serikat.

Bung Karno memainkan peranan penting dalam menggalang persatuan rakyat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ia sering berkeliling ke berbagai kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk tujuan ini. Mudah dimengerti bahwa Bung Karno pun menjadi target untuk dibunuh atau diganti oleh kekuatan di luar Indonesia.

Di bawah Bung Karno dengan Nasakom-nya (nasionalis, agama, dan komunis), kekuatan kiri terutama PKI semakin berkembang. Dan terasa bahwa Bung Karno mendapat dukungan luas di Indonesia. Seolah-olah tidak ada tantangan yang berarti di dalam negeri. Mereka yang berasal dari ideologi kanan, termasuk pimpinan Angkatan Bersenjata, terlihat mendukungnya.

Dukungan Angkatan Bersenjata, terutama Angkatan Darat ini rupanya diperoleh sebagai imbalan dipenuhinya berbagai tuntutan mereka:

1. Penundaan diselenggarakannya pemilu ke-2 selama 6 tahun. Kekuatan ABRI terutama Angkatan Darat khawatir bilamana pemilu diadakan, PKI yang kian berkembang akan menjadi pemenang utama. Dan ini tentunya mengubah struktur politik Indonesia yang akan mengurangi pengaruh politik mereka.

2. Para perwira tinggi diizinkan menjadi direktur banyak perusahaan asing yang telah disita pemerintah. Pada waktu itu, tidak ada yang mengira bahwa inilah titik permulaan

tumbuhnya sebuah kekuatan kapitalis serakah yang menjadi salah satu sumber korupsi di Indonesia.

3. Para perwira tinggi diizinkan berpartisipasi di dalam badan-badan legislatif dan eksekutif—menjadi anggota DPR, menteri, gubernur, dan berbagai jabatan lainnya, sebagai pelaksanaan kebijakan ABRI berdwifungsi.

4. ABRI dan lapisan pimpinan atasnya tidak perlu di-Nasakom-kan.

Proses me-Nasakom-kan berbagai aparat negara penting untuk upaya PKI masuk ke dalam berbagai lapisan pemerintahan. Dan ini tidak sepenuhnya jalan sesuai dengan anjuran atau permintaan Bung Karno. Bisa dilihat dari jumlah gubernur yang diangkat. Pada tahun 1965, dari 24 gubernur, 12 adalah perwira tinggi ABRI. Tidak ada satu pun dari mereka anggota PKI, walaupun ada gubernur "kiri" seperti Henk Ngantung seorang tokoh Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) Gubernur Jakarta Raya; Dr. Satrio, Wakil Gubernur Jawa Timur; dan Astrawinata, Wakil Gubernur Jawa Barat.

Kalau di tingkat tinggi PKI kurang berhasil, ia ternyata bisa masuk di lapisan menengah dan bawah. 8 dari 37 bupati di Jawa Timur, 6 dari 37 bupati di Jawa Tengah, dan 2 dari 23 bupati di Jawa Barat adalah anggota PKI.

PKI terlihat sabar. Ia sepenuhnya mendukung kebijakan politik Bung Karno. Tidak ingin mendorong atau menuntut apa yang sudah berjalan, karena rupanya PKI pada waktu itu beranggapan bahwa mendukung Bung Karno sama dengan mendukung persatuan yang diperlukan.

Akan tetapi Howard Jones, Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, berpendapat lain. Ia menyatakan bahwa sesungguhnya

Soekarno adalah seorang tokoh yang paling pintar dalam menjinakkan PKI. Menurutnya, kesediaan PKI untuk meng-iyakan apa pun yang Soekarno inginkan, menunjukkan berhasilnya Soekarno dalam menjinakkan PKI. Kelihatannya ada pula yang menganggap bahwa kebijakan Soekarno sebenarnya memperlunak tumbuhnya kekuatan komunisme di Indonesia. Kalau tidak, Amerika Serikat akan kewalahan, karena di Indocina saja mereka tidak berhasil membendung menguatnya pendukung komunisme.

Pemerintah Amerika Serikat menganggap Howard Jones pro-Soekarno. Oleh karena itu menjelang 1965, ia diganti oleh Marshall Green, yang sebelum ke Indonesia, sebagai duta besar di Korea Selatan berhasil menjatuhkan Syng Man Rhee dari kekuasaan dan menggantikannya dengan Park Chung Hee yang sangat mendukung kebijakan Amerika Serikat. Jelas pemerintah Washington menginginkan wakil yang bisa menjalankan perintahnya dengan efektif.

Marshall Green dianggap berhasil mendorong perwira Angkatan Bersenjata Korea yang dilatih di Amerika untuk mengirim pasukan yang dijelmakan sebagai orang sipil dan memobilisasi demonstrasi-demonstrasi "massa" yang kemudian menjatuhkan pimpinan pucuk pemerintah Korea Selatan.

Kehadiran Green di Jakarta menimbulkan pertanyaan: Apakah hal yang sama akan dilakukan di Indonesia? Ada tuduhan bahwa memang beberapa oknum Indonesia sudah dilatih di Amerika untuk persiapan usaha menjatuhkan Soekarno.

Sementara itu, baik PNI (Partai Nasional Indonesia) maupun PKI telah merayakan hari ulang tahunnya secara besar-besaran. Hari ulang tahun PKI pada tanggal 23 Mei 1965 dihadiri oleh banyak delegasi asing, di antaranya Mikoyan anggota Politbiro Partai Komunis Uni Soviet, dan Peng Chen anggota Politbiro PKT (Partai Komunis Tiongkok).

Pada waktu itu, PKI dianggap sebagai partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan RRT. Dan di Indonesia, di atas kertas, kekuatan PKI berada di atas semua partai besar yang ada. Ini menyebabkan PKI dianggap memiliki peranan besar di dalam kekuatan komunis internasional. Perkembangan ini rupanya menyebabkan para tokoh PKI berbesar kepala, seolah-olah kemenangan sudah berada di tangan. Mereka cukup sering menyatakan bahwa kalau diadakan pemilu, merekalah yang akan menang.

Sikap PKI dalam menghadapi perpecahan antara PKT dan PKUS (Partai Komunis Uni Soviet), jelas memihak PKT. Dalam berbagai konferensi internasional, wakil-wakil PKI turut mengkritik garis Uni Soviet sebagai revisionis modern, bahkan terkadang lebih keras dari kritikan yang dilontarkan wakil-wakil PKT sendiri. Dalam persiapan Konferensi A-A II di Aljazair, Uni Soviet menyatakan ingin ikut dengan alasan sebagian besar wilayah Uni Soviet berada di benua Asia. Indonesia lah, di bawah pimpinan PKI, yang paling keras menentang kehadiran Uni Soviet. Dengan sendirinya sikap ini membuat pimpinan Uni Soviet marah.

Tokoh PKUS Mikoyan, dikatakan pernah menegur D.N. Aidit dan memperingatkannya bahwa Moskow memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana di mana Aidit bisa diganti dengan orang yang dianggap bisa bekerja sama dengan Moskow. Peringatan ini perlu diperhatikan karena pada waktu itu, Uni Soviet adalah pihak yang paling banyak menyuplai persenjataan berat untuk ABRI dan banyak perwira ABRI dilatih di Uni Soviet.

Perkembangan politik setelah peringatan HUT PKI seharusnya membuat pimpinan PKI lebih waspada. Adanya keinginan KGB dan CIA untuk mengubah perkembangan seharusnya membuat mereka lebih hati-hati dalam mengambil tindakan.

Siauw Giok Tjhan
dan Soekarno (1960).

Siauw Giok Tjhan di sebuah acara Baperki Jawa Timur (1965).

Siauw Giok Tjhan, Werdojo, dan Oei Tjoe Tat (1965).

Angkatan Darat juga sangat jengkel dengan adanya usul PKI mendorong Bung Karno menyetujui dibentuknya Angkatan ke-5 yang terdiri dari 5 juta buruh dan tani. Achmadi, seorang tokoh angkatan perjuangan pelajar di zaman revolusi, telah dicalonkan sebagai komandan angkatan baru ini.

Sikap congkak dan merasa telah menang ini rupanya juga menyebabkan Mao Tse Tung bertanya ke Aidit di salah satu pertemuan di Peking pada tahun 1965: "…berapa persen dari anggota PKI berasal dari kelas buruh kecil?" Aidit tidak bisa menjawabnya, karena memang tidak ada statistik untuk itu. Dia sendiri tidak berasal dari kelas ini, karena dia adalah anak seorang guru agama Islam. Mao yang menganggap pentingnya sebuah partai komunis terdiri atas kelas buruh dalam mencapai kemenangan perjuangan, dikatakan telah memperingatkan Aidit untuk berhati-hati dalam mengembangkan PKI.

Mao, dikatakan juga memperingatkan Aidit untuk tidak bermain api, karena revolusi adalah perjuangan serius yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Di Indonesia telah terjadi 2 *red-drive* terhadap komunisme. Yang ketiga, menurut Mao, akan menghancurkannya.

Lenin, berdasarkan pengalaman revolusinya di Rusia, juga menitikberatkan betapa pentingnya pimpinan partai komunis untuk mempersiapkan diri dan memupuk kekuatan sebelum melakukan tindakan. Dan sekali tindakan dimulai, ia harus diteruskan sampai kemenangan, tidak dihentikan di tengah jalan.

Memang mengetahui teori dan melakukan praktik adalah dua hal yang berbeda. Apalagi bilamana pimpinan PKI pada waktu itu, termasuk golongan muda yang berasal dari golongan borjuis kecil-menengah, belum pernah berpengalaman dalam melaksanakan revolusi yang bersandar atas kekuatan rakyat. Yang sulit untuk pimpinan muda yang tidak berpengalaman ini adalah bersikap sabar dan teliti. Tidak terburu-buru melakukan tindakan tanpa persiapan yang matang.

Pimpinan PKI yang tidak berpengalaman ini tentu saja bukan tandingan ahli penggulingan kepala negara semacam Marshall Green yang didukung CIA atau oknum-oknum KGB berpengalaman yang diperintahkan Mikoyan.

Setelah perayaan kemerdekaan 17 Agustus 1965, banyak tokoh politik memang mempertanyakan: siapakah yang akan mengganti Soekarno bila ia meninggal secara mendadak? Kesehatan Soekarno diketahui mundur banyak ketika itu.

Ada pula desas-desus santer bahwa KSAD Yani, didukung oleh para pendukung yang dipercayainya, telah mempersiapkan kekuatan bersenjata untuk menghadapi kekacauan yang terjadi apabila Soekarno wafat. Yang dimaksud dengan kekacauan tentunya bangkitnya arus pendukung PKI merebut kekuasaan.

Tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan desas-desus ini. Akan tetapi rupanya pihak pimpinan PKI merasa perlu untuk merencanakan aksi untuk melawan kekuatan yang disusun oleh Yani. Kewaspadaan dan kecurigaan terhadap masing-masing kekuatan dan kegiatan antara pimpinan Angkatan Darat dan pimpinan PKI meningkat.

Nyono dan Sudisman, tokoh pimpinan PKI yang diadili menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi akan adanya rencana kudeta di sekitar perayaan Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober 1965 dan dibentuknya Dewan Jenderal yang akan memimpin tindakan kudeta ini. Menurut apa yang mereka ketahui beberapa batalyon dari berbagai provinsi dibawa ke Jakarta dengan alasan untuk memeriahkan perayaan tersebut, tetapi maksud sesungguhnya adalah mendukung kudeta militer. Oleh karena itu pimpinan PKI mempercayai ketuanya, D.N. Aidit untuk melakukan tindakan yang mencegah kudeta, menyelamatkan Soekarno dan RI. Apa yang direncanakan Aidit, kedua tokoh ini menyatakan, tidak mengetahuinya.

Pengadilan-pengadilan selanjutnya menunjukkan bahwa Aidit menjalankan rencana ini dengan bantuan Biro Khusus yang kegiatannya, bahkan kehadirannya tidak diketahui banyak orang. Biro Khusus dipimpin langsung oleh Aidit dengan 3 wakil: Sjam, Supono, dan Subono.

Lukman, Aidit, dan Njoto.

Aidit dan Soekarno (1965).

Siauw, Lu Tjun Seng, dan Aidit (1965).

Biro Khusus dibentuk sebagai biro intel lapisan PKI. Salah satu tugas utamanya adalah mengikuti sepak terjang para anggota PKI yang membangkang. Lain tugas utamanya adalah membina dukungan sementara pimpinan Angkatan Bersenjata yang bersimpati terhadap gerakan PKI.

Sebagai tahanan politik setelah Peristiwa G30S, saya memiliki banyak kesempatan berbicara dengan para anggota CC dan Politbiro PKI yang sama-sama meringkuk di penjara. Dari mereka diketahui bahwa Biro Khusus tumbuh sebagai kekuatan di dalam partai yang kekuasaan, pengetahuan, dan perancangan pelaksanaan politiknya melebihi CC dan Politbiro.

Sjam yang tertangkap dan berada di tahanan, ternyata menjadi pembocor utama semua rahasia partai. Ia berfungsi sebagai alat ampuh penguasa militer Soeharto dalam menghancurkan infrastruktur organisasi PKI, karena melalui Sjam inilah semua jaringan PKI terbuka.

Sjam diperkirakan seorang *double agent* yang menyelusup ke PKI dan menjadi orang kepercayaan Aidit.

Rencana *counter coup* ternyata dibuat oleh Biro Khusus. Pelaksanaannya ternyata mengikutsertakan latihan-latihan militer yang dilakukan oleh para anggota Pemuda Rakyat dan para pelajar di daerah Halim, pangkalan udara Angkatan Udara. Pada waktu itu, dalam rangka gerakan mengganyang Malaysia dan mendukung Gerakan Pembebasan Rakyat Serawak, latihan-latihan militer dilakukan di daerah itu.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, mereka yang sudah dilatih disebar ke berbagai "benteng pertahanan" di Jakarta Raya. Walaupun banyak pimpinan PKI, termasuk Nyono terlibat dalam koordinasi dan mobilisasi relawan yang dilatih ini, mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rencana *counter-coup* yang disiapkan Biro Khusus. Aidit tidak pernah mendiskusikannya dengan para anggota Politbiro.

Peristiwa G30S

Pada tanggal 1 Oktober 1965, pagi-pagi penduduk Jakarta dikejutkan oleh siaran RRI tentang Gerakan 30 September (G30S). Berita pertama pada pagi hari menimbulkan banyak pertanyaan dan teka-teki. Baru di tengah hari diumumkan melalui RRI bahwa telah dibentuk Dewan Revolusi yang mengambil alih fungsi kabinet. Nama saya tercantum di dalam dewan yang tidak pernah bersidang ini. Dan saya dapat memastikan bahwa saya tidak pernah diberitahu atau dikonsultasi sebelum dewan ini terbentuk. Saya juga terkejut mengetahui nama saya masuk dalam Dewan Revolusi itu.

Apa yang terjadi pada hari itu tetap simpang siur. Keadaan di Jakarta bisa dikatakan tenang walaupun di sekitar istana dan RRI terlihat banyak pasukan berjaga-jaga. Pada waktu itu berlangsung Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) di Jakarta. Tidak ada gangguan apa-apa yang mencolok.

Perkembangan selanjutnya menjadi lebih jelas bahwa yang terjadi adalah diculiknya 6 jenderal dan seorang kapten oleh pasukan yang tergabung di dalam G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang perwira Cakrabirawa. Pangab, Jenderal Nasution, sebenarnya akan diculik pula, tetapi berhasil lolos. Pengawalnya, Kapten Tendean yang agak mirip dengannya, yang terculik. Keenam jenderal Angkatan Darat yang diculik adalah Jenderal Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo, dan Jenderal Panjaitan.

Operasi penculikan dimulai sekitar pukul 2–3 pagi pada tanggal 1 Oktober 1965. Ada di antara jenderal yang diculik itu tewas tertembak ketika pasukan penculik menggerebek rumah-rumah mereka. Mereka kemudian dibawa ke daerah yang dinamakan Lubang Buaya, dekat lapangan udara Halim, markas besar

Angkatan Udara. Di sana, yang masih hidup ditembak dan semua jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur.

Sampai sekarang tidak jelas siapa sebenarnya yang memberi perintah pembunuhan terhadap para jenderal tersebut. Apa yang dinyatakan mereka yang terlibat, perintahnya adalah menangkap dan menahan para jenderal. Ada perintah untuk melakukan pembunuhan, tetapi tidak ada yang mengetahui jelas, dari mana perintah ini datang.

Pasukan G30S menguasai beberapa posisi strategis di Jakarta, termasuk kantor RRI. Akan tetapi pada hari itu terjadi kekacauan yang membingungkan. Jalan-jalan utama dan posisi penting dipenuhi pasukan dan panser yang berseliweran. Tidak jelas pasukan apa yang berkeliaran dan siapa yang bertanggung jawab atas apa.

RRI mengeluarkan beberapa siaran yang menyatakan bahwa ada beberapa jenderal yang telah ditahan dan Soekarno berada dalam keadaan aman dan sehat walafiat. Tetapi pemberitaan ini tidak mengurangi kesimpangsiuran yang berkembang pada hari itu.

Timbullah pertanyaan: Siapa sebenarnya yang mendalangi G30S? Bagaimana persiapannya? Apa peranan Soekarno? Apa peranan Soeharto? Apa peranan PKI sebagai partai politik yang sedang menanjak kebesarannya? Apa peranan CIA? Apa peranan KGB?

Jawabannya tidak pernah jelas dan definitif. Akan tetapi dampaknya luar biasa. Dalam sekejap mata, keseimbangan politik berubah secara drastis. PKI dan semua organisasi yang dianggap berasosiasi dengannya diganyang. Jutaan orang dikejar, dibunuh secara kejam. Ratusan ribu orang ditahan dan seratus ribuan tetap ditahan belasan tahun tanpa proses pengadilan apa pun. Saya adalah salah satu korban keganasan yang dilakukan secara sistematik, didukung oleh kekuatan militer, dan direstui oleh

kekuatan imperialis yang memang berkepentingan menghancurkan arus politik yang dipimpin oleh Soekarno.

Rentetan kejadian sebelum dan sesudah hari itu banyak yang menceritakan. Di berbagai penjara dan tempat tahanan, saya berkesempatan berbicara dengan para pelaku yang langsung terlibat di dalam G30S. Dari mereka banyak yang diketahui. Akan tetapi, pada waktu bersamaan, banyak pula pertanyaan yang tidak terjawab, karena para pelakunya sendiri tidak mengetahui. Yang seharusnya mengetahui apa yang direncanakan dan bagaimana rencana ini lahir dan dilaksanakan, di antaranya Ketua PKI, D.N.Aidit, telah dibunuh. Apakah pembunuhan ini dilakukan untuk menutupi keterlibatan para pelaku lain dan institusi asing tertentu? Lagi-lagi, tidak ada yang bisa menjawab.

Apa yang terjadi secara detail?

Persiapan penculikan ternyata tidak baik. Tujuh pasukan dipersiapkan untuk menculik ketujuh jenderal yang berada di dalam daftar. Mereka melakukan latihan penculikan termasuk mempelajari rumah-rumah para jenderal. Semalam sebelumnya, pasukan yang ditugaskan untuk menculik Nasution ternyata diganti. Pasukan baru ini tidak mengetahui secara baik lokasi dan keadaan sekitar rumah Nasution, sehingga mereka salah sasaran.

Bukan rumah Nasution yang diserang, melainkan rumah Wakil Perdana Menteri Leimena yang letaknya berseberangan, sehingga terjadi tembak-menembak dengan para ajudannya. Kemungkinan besar suara tembakan ini telah menggugah Nasution, sehingga ketika pasukan penculik tiba di rumahnya, Nasution sempat menghindar penculikan dengan meloncat pagar dan bersembunyi di pekarangan tetangganya. Kecerobohan pasukan penculik lebih terlihat lagi ketika mereka menangkap Kapten Tendean, pengawal Jenderal Nasution yang disangka mereka adalah Jenderal Nasution.

Pasukan-pasukan yang ditugaskan menculik para jenderal tidak menerima perintah untuk membunuh mereka. Tugas mereka

adalah menangkap para jenderal tersebut. Ketujuh orang tersebut dibawa ke daerah yang dinamakan Lubang Buaya, dekat Halim. Di sanalah mereka ditembak dan jenazahnya dibuang ke sumur. Tidak pernah ada penyiksaan seperti yang digambarkan oleh pemerintah orde baru. Hingga kini tidak jelas, siapa yang memerintahkan para jenderal tersebut dibunuh, karena menurut banyak cerita sebenarnya mereka ditangkap untuk dihadapkan ke Presiden Soekarno. Jelas telah terjadi kesimpangsiuran.

Persiapan buruk lainnya tampak pada masalah konsumsi. Ribuan orang yang tergabung dalam G30S menjaga berbagai pos pada hari itu tidak diberi makan dan minum. Bisa dibayangkan, di sore hari, ribuan orang yang sudah mulai beroperasi sejak pukul 2–3 pagi ini, tentu lapar dan tidak berada dalam kondisi bertempur yang baik.

Telah terjadi pula kesimpangsiuran dalam rencana pengaturan dan perlindungan untuk Soekarno, yang dukungannya menjadi tumpuan utama gerakan. Pada pagi hari itu, Soekarno dibawa ke Halim. Rencana awalnya adalah bilamana perkembangan situasi tidak menguntungkan, ia akan dibawa ke Yogyakarta. Akan tetapi, Bung Karno, atas desakan Dewi Soekarno pergi ke Istana Bogor. Jadi tidak mengikuti rencana ke Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa Soekarno tidak berada di bawah pengaruh para perancang G30S.

Aidit yang pada pagi hari itu berada di Halim ternyata tidak pernah bertemu dengan Soekarno. Tidak ada diskusi tentang keadaan dan strategi menghadapi keadaan yang berjalan di luar rencana.

Ketika jelas bahwa Soekarno tidak jadi berangkat ke Yogyakarta seperti yang direncanakan, Aidit yang seharusnya pergi bersama dengan Soekarno ke Yogya, bingung dan tidak bisa memutuskan. Ternyata Sjam lah, Ketua Biro Khusus PKI, yang "memerintahkannya" untuk berangkat ke Yogyakarta dengan pesawat yang sudah disiapkan.

Di Halim, Aidit tidak dikelilingi para tokoh PKI lainnya. Bilamana PKI menjadi dalang G30S dan Halim dijadikan pusat koordinasi G30S, seharusnya Aidit dikelilingi para anggota tertinggi PKI pada hari yang paling menentukan itu. Kenyataannya tidak. Ia satu-satunya anggota Politbiro PKI yang berada di Halim.

Bagaimana Aidit bisa mengikuti "perintah" Sjam untuk berangkat ke Yogyakarta pun ganjil.

Sebelum Soekarno meninggalkan Halim dan berangkat ke Istana Bogor, Supardjo datang memberi laporan tentang perkembangan keadaan. Rupanya pada saat itu diketahui bahwa Nasution berhasil meloloskan diri. Dan juga diketahui olehnya bahwa Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) di bawah pimpinan Soeharto bersikap siap melawan G30S. Soekarno ternyata memberi perintah ke Supardjo untuk menghentikan semua kegiatan militer untuk mencegah pertumpahan darah dan menunggu instruksinya sebagai presiden.

Sebelum semua ini, Soekarno telah mengeluarkan surat perintah yang mengangkat Jenderal Pranoto untuk menggantikan Yani sebagai KSAD. Padahal di markas Kostrad, Soeharto telah mengambil inisiatif untuk mengambil alih komando Angkatan Darat. Banyak perwira tinggi Angkatan Darat, termasuk Pranoto, dikumpulkan di Kostrad. Dalam hierarki Angkatan Darat, posisi Komandan Kostrad memang kedua di bawah KSAD, sehingga bilamana KSAD berhalangan, Komandan Kostrad lah yang menjadi KSAD. Nasution yang berhasil lolos penculikan, juga berhasil sampai ke markas Kostrad dan mulai memberi berbagai instruksi militer ke para perwira yang berkumpul di sana.

Soekarno, dikelilingi oleh para panglima ABRI, dikatakan sempat bingung dalam memilih pengganti Yani yang diketahuinya telah meninggal. Calon-calon yang dipertimbangkan adalah Soeharto, Mursyid, dan Pranoto. Pranoto lah yang ia anggap paling cocok untuk menggantikan Yani.

Perintah Soekarno untuk mengangkat Pranoto tadinya diserahkan kepada Kapolri Sutjipto. Akan tetapi kemudian dibawa oleh KSAL Laksamana Martadinata yang menyampaikannya ke Soeharto di markas Besar Kostrad.

Soeharto yang tadinya menyiapkan diri untuk menjadi KSAD tentu tidak berani menentang keputusan Soekarno. Pranoto yang sebenarnya lebih muda dan lebih junior dari Soeharto tidak berani melawan Soeharto tetapi juga tidak bisa menolak keputusan Soekarno.

Timbullah kompromi. Pranoto tetap diangkat sebagai pejabat KSAD sedangkan Soeharto menjadi kepala sebuah institusi baru, yang dinamakan Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban).

Dari banyak bahan yang ada bisa disimpulkan bahwa gerakan penghancuran PKI dan kekuatan kiri di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Oktober 1965. Dan komando utama gerakan penghancuran ini berada di tangan Soeharto.

Di bawah Soeharto, Kopkamtib ini kemudian berkembang sebagai badan militer yang paling berkuasa di Indonesia. Bukannya keamanan dan ketertiban yang dipulihkan, tetapi pengganyangan PKI dan ormasnya serta semua organisasi yang dianggap berhaluan kiri. Badan inilah yang mengkoordinasi pembunuhan massal dan penangkapan massal yang jelas melanggar hukum.

Secara bertahap Soeharto mewujudkan keinginannya. Dimulai dengan pemaksaan menjadi KSAD, kemudian menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akhirnya, ia lah yang menghancurkan infrastruktur pertahanan politik Soekarno sehingga Soekarno jatuh.

Dewan Revolusi

Susunan Sentral Komando (Senko) G30S cukup ganjil dan tidak masuk di akal. Yang menjadi kepala adalah Letnan Kolonel Untung.

Wakil pertama adalah Kolonel Latief. Wakil kedua adalah Brigadir Jenderal Supardjo. Terbalik. Yang pangkatnya terendah menjadi atasan orang yang berposisi paling tinggi.

Tidak ada orang yang bisa menjelaskan logika ini. Akan tetapi yang lebih penting dan yang menjadi dasar kehancuran PKI, semua kekuatan kiri dan kemudian Soekarno sendiri, adalah susunan Dewan Revolusi.

Pengumuman Dewan Revolusi yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 mengandung beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan: Siapakah perumusnya? Dan apakah maksud utamanya?

Ada dua hal yang terpenting dari pengumuman ini:

1. Pernyataan bahwa kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno didemisionerkan—tidak lagi berfungsi sebagai pemerintah.
2. Nama Soekarno tidak tercantum dalam susunan Dewan Revolusi.

Didemisionerkannya kabinet Soekarno dijadikan alasan dan bukti oleh pengadilan-pengadilan para pelaku G30S bahwa gerakan ini merupakan sebuah kudeta. Walaupun ada ketegasan dari beberapa tokoh yang diadili bahwa yang dinyatakan adalah kabinet "akan didemisionerkan", jadi belum dilaksanakan tindakan pendemisioneran.

Tidak dicantumkannya nama Soekarno telah menimbulkan perkiraan, bahwa gerakan itu bertujuan menyingkirkan Soekarno dan menimbulkan akibat psikologis yang sangat merugikan gerakan. Para pendukung Soekarno di seluruh Indonesia yang seharusnya dapat ditarik untuk memberi dukungan untuk memperkuat gerakan malah bersikap anti-gerakan. Ini menyebabkan PKI yang dituduh mendalangi G30S mudah dijadikan sasaran para pendukung Soekarno dan menyebabkannya terpencil dan terisolasi.

Oleh karenanya penting kita ketahui siapa yang merumus dan menyusun Dewan Revolusi. Dari situ kita bisa mengetahui logika dan motivasi penyusunannya. Apa sesungguhnya alasan mendemisionerkan kabinet Soekarno? Dan mengapa Soekarno yang paling mampu menarik dukungan rakyat justru tidak dicantumkan dalam Dewan Revolusi?

Ada pula keganjilan lain. Tokoh-tokoh utama PKI, Aidit, Njoto, dan Lukman juga tidak dicantumkan dalam susunan Dewan Revolusi. Hanya ada satu tokoh PKI dalam dewan itu, ialah Tjugito.

Menurut Sungkowo yang memimpin penyelenggaraan siaran-siaran RRI pada tanggal 1 Oktober 1965, naskah penyiaran tentang susunan Dewan Revolusi disiapkan oleh Sjam. Dan ia menerima naskah ini dari Sjam. Karena ini diperoleh dari Sjam, timbul dugaan bahwa Aidit mengetahui dan menyetujui pula isinya. Akan tetapi tidak ada orang yang bisa memastikannya.

Tidak dicantumkan nama Aidit dan para tokoh utama PKI lainnya tidak menimbulkan dampak psikologis yang besar. Situasi pasti berbeda bilamana Soekarno dicantumkan sebagai misalnya, Ketua Agung Dewan Revolusi.

Salah satu contoh yang bisa menggambarkan dampak psikologis ini diceritakan oleh Murdiono, alias Djungkung, seorang tokoh pemuda PNI di Solo. Murdiono ditahan di penjara Salemba dan kemudian menjadi salah seorang saksi Jenderal Achmadi, Menteri Penerangan yang diadili dan dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Seperti diketahui, ketika Achmadi mengajukan *appel*, hukumannya diperberat menjadi 10 tahun. Achmadi menjadi anggota *Fact-Finding Mission* yang diketuai oleh Jenderal Sumarno, Menteri Dalam Negeri, dengan tugas mengumpulkan data tentang pembunuhan massal di berbagai daerah pada tahun 1966. Murdiono atau Djungkung adalah anak buah Achmadi.

Djungkung sendiri akhirnya ditahan dan dipenjarakan di penjara Salemba. Di sana ia dikenal sebagai jagal. Banyak orang

menjauhinya. Akan tetapi saya bisa mengajaknya bicara. Darinya saya peroleh banyak informasi mengenai perkembangan di Solo, termasuk apa yang terjadi dengan para anggota Baperki di Solo.

Djungkung menyatakan bahwa karena dalam susunan Dewan Revolusi tidak tercantum nama Soekarno, ia mengira bahwa G30S adalah gerakan anti-Soekarno. Ia turut mengkoordinasi penggaganyangan PKI di Solo. Dengan kawan-kawannya, ia bersatu dengan kelompok Islam fanatik dan menyusun daftar hitam, terdiri dari orang-orang yang dianggap mendukung Dewan Revolusi. Ada 35 orang yang masuk dalam daftar ini dan mereka harus disembelih. Salah satu pengurus Baperki Solo, Ketua Bagian Pendidikan Baperki, Dr. Bong Nyan Fong, yang juga dokter pribadi walikota Solo, Utomo Ramelan, terdaftar nomor 3 dari ke-35 orang yang harus dibunuh. Setiap malam dua atau tiga orang dibunuh. Djungkung mengubah susunan daftar. Dr. Bong diletakkan di urutan ke-33 karena dianggap tidak cukup berbahaya.

Pembunuhan mereka dilakukan di tepi Bengawan Solo. Pada waktu orang ke-30 dibunuh, kunjungan delegasi *Fact-Finding Mission* tiba di Solo. Ketika Achmadi menemuinya, ia menjelaskan bahwa tindakan mengganyang PKI dan membunuh para anggota PKI adalah tindakan yang menguntungkan musuh-musuh Soekarno. Achmadi mendorongnya untuk menggerakkan massa mendukung Soekarno. Akan tetapi imbauan ini datang terlambat karena senjata-senjata yang dimiliki massa yang bisa dikelola, yaitu massa yang terdiri dari orang-orang bekas Tentara Pelajar di Solo, sudah diserahkan ke Kodim (Komando Distrik Militer) Solo.

Kedatangan delegasi *Fact-Finding Mission* tersebut menyelamatkan jiwa Dr. Bong.

Cerita Djungkung di atas menggambarkan bagaimana tidak dicantumkannya nama Soekarno dalam Dewan Revolusi telah menguntungkan para musuh Soekarno yang akhirnya bisa membina kekuatan untuk menggulingkannya.

Bilamana Sjam yang menyusun daftar Dewan Revolusi, ia jelas memiliki kesengajaan untuk menimbulkan kesan salah bahwa G30S dan Dewan Revolusi adalah gerakan anti-Soekarno. Ini sangat merugikan gerakan yang katanya dilakukan untuk melindungi Soekarno dan mengalahkan pihak para jenderal yang dianggap tidak loyal terhadapnya. Soekarno malah digulingkan oleh kelompok jenderal yang menentangnya. Dan kesan negatif yang timbul dari susunan Dewan Revolusi ini juga menjadi dasar penghancuran PKI.

Daftar Dewan Revolusi juga mencantumkan nama beberapa jenderal yang kemudian memainkan peranan penting dalam penggeseran Soekarno. Tiga nama ini perlu diperhatikan: Jenderal Umar Wirahadikusuma, Panglima Jakarta Raya; Jenderal Amir Machmud, Panglima Kalimantan Selatan; dan Jenderal Basuki Rachmat, Panglima Jawa Timur.

Pada bulan November 1965, Amir Machmud menggantikan Umar sebagai Panglima Jakarta Raya. Sebelum Peristiwa G30S, PKI dan Partindo (Partai Indonesia) didukung oleh Achmadi gigih mendukung pergantian Umar dengan Amir Machmud.

Dasar dukungan ini adalah sebagai Panglima Kalimantan Selatan Amir Machmud sangat mendukung usaha Achmadi mendapatkan dana untuk Universitas Bung Karno di Kalimantan Selatan, daerah kaya karena ekspor karetnya. Dan menurut PKI, Amir Machmud sebagai panglima menguntungkan posisi PKI di Kalimantan Selatan. Bahkan menurut Sujono Pradigdo, seorang tokoh penting PKI, Amir Machmud bukan saja simpatisan PKI, melainkan juga calon anggota PKI.

Akan tetapi setelah Amir Machmud mengganti Umar, kegiatan anti-komunis semakin ganas.

Basuki Rachmat, oleh PKI dinyatakan sebagai seorang perwira tinggi maju. Ia membiarkan PKI mencapai kemajuan yang berarti di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai seorang panglima yang setia pada Soekarno.

Jenderal Jusuf, walaupun tidak masuk dalam Dewan Revolusi, adalah ipar Kolonel Saelan, seorang Panglima Cakrabirawa yang sangat setia terhadap Soekarno.

Pada kenyataannya, Jenderal Amir Machmud, Jenderal Basuki Rachmat, dan Jenderal Jusuf adalah ketiga jenderal yang menemui Soekarno untuk mengeluarkan Surat Perintah yang dikenal sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang dipergunakan Soeharto untuk memperkuat posisinya sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Perlu diperhatikan bahwa di dalam daftar Dewan Revolusi tercantum nama-nama tokoh-tokoh lain yang justru aktif mengganyang PKI dan berperan dalam menjatuhkan Soekarno.

Siapa yang memimpin G30S?

Para pelaku G30S yang berada di dalam tahanan kerap memasalahkan siapa sesungguhnya yang memimpin G30S. Peran Aidit dalam persiapan dan pelaksanaan G30S tidak menonjol.

Sedangkan Sjam yang tidak dikenal banyak orang, dinyatakan sangat berperan sebagai pemimpin gerakan. Bahkan pada saat-saat krisis seperti yang digambarkan di atas, ia bisa memerintahkan Aidit, Ketua PKI.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, Aidit di Halim tidak berjumpa dengan Soekarno. Juga tidak berjumpa dengan Dewi, Leimena, Omar Dhani (KSAU), Sutjipto (Kapolri), Martadinata (KSAL), dan lain-lainnya. Kesemuanya berada di Halim pada hari itu. Aidit berdiam di rumah sersan mayor AURI dekat landasan penerbangan di Halim.

Beberapa perwira yang terlibat dan ditahan menceritakan bahwa Letnan Kolonel Untung berusaha menemui Aidit beberapa hari sebelum peristiwa untuk mengusulkan ditundanya gerakan

yang sudah direncanakan. Untung merasa tidak siap. Tetapi ia ternyata tidak berhasil menemui Aidit, karena Sjam lah yang menentukan siapa yang bisa menemui Aidit ketika itu. Sjam tidak memperkenankan Untung menemui Aidit dan memerintahkan Untung melaksanakan gerakan pada hari yang sudah ditentukan.

Tidak jelas mengapa Sjam diberi wewenang demikian besar oleh Aidit dan apakah pertimbangan untuk tidak mempertemukan Untung dengan Aidit untuk hal yang sedemikian pentingnya.

Pada saat dilangsungkan proses pengadilan Supono, orang kedua Biro Khusus, Sjam mengemukakan bahwa Supono pernah mencari dirinya bersama Jenderal Pranoto Reksosamudro pada tanggal 30 September malam untuk bertemu Aidit malam itu juga. Sjam menolak permintaan untuk menemui Aidit. Atas pertanyaan hakim, Jenderal Pranoto menerangkan bahwa ia menganggap perlu menemui Aidit pada malam itu karena sebagai ketua panitia parade Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober 1965, ia ingin membicarakan ikut sertanya Barisan Tani Indonesia (BTI) dalam parade perayaan itu.

Hakim kurang percaya pada keterangan ini karena permintaan pertemuan itu dilakukan hampir pada waktu penculikan para jenderal. Tetapi keterangan lain tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa Aidit pada tanggal 30 September malam tidak bisa ditemui orang lagi dan segala sesuatunya ditentukan oleh Sjam.

Pimpinan Biro Khusus lainnya seperti Supono tidak dapat menentukan apa-apa. Sjam lah satu-satunya saluran untuk berjumpa dengan Aidit. Akan tetapi karena ia tidak mengizinkan orang lain bertemu dengan Aidit, timbullah kesan bahwa Sjam lah yang memutuskan segala sesuatu pada saat-saat yang paling menentukan.

Oleh karena itu, timbullah pertanyaan: setelah Aidit pergi ke Jawa Tengah atas perintah Sjam, siapakah yang menentukan segala sesuatu yang dianggap perlu? Jawabannya tentu adalah Sjam! Sjam lah orang yang sesungguhnya membuat keputusan. Para wakil

ketua PKI, M.H. Lukman dan Njoto, atau para tokoh PKI lainnya tidak berwenang menentukan apa pun atau tidak tahu apa yang harus dilakukan karena tidak langsung terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Akibatnya timbul *vacuum* pimpinan setelah 1 Oktober 1965. Timbullah suasana di kalangan pimpinan PKI *sauve qui peut*, cari selamat sendiri-sendiri. Tidak ada ketegasan komando untuk para prajurit dan pada Pemuda Rakyat di seluruh kota yang telah dipersenjatai.

Ketidaktegasan pimpinan PKI menjadi lebih parah setelah Aidit menyatakan dari tempat sembunyinya di Jawa Tengah: "Tunggu komando Presiden Soekarno yang akan mengusahakan penyelesaian politik!" Dikabarkan bahwa Lukman yang menemui Aidit di Semarang pada awal bulan Oktober mengusahakan Aidit kembali ke Jakarta.

Lukman kembali dari Jawa Tengah ke Jakarta naik mobil untuk menghadiri rapat dengan para gubernur di Istana Bogor pada awal Oktober 1965. Ia berhasil tiba di Bogor pada waktunya dan sempat menyampaikan surat Aidit kepada Soekarno, yang menyatakan kepercayaan penuh pada Bung Karno untuk memberikan komando dan tindakan ke arah penyelesaian politik.

Menurut cerita, Aidit tidak berhasil mendapatkan bantuan AURI di lapangan terbang Panasan Solo untuk terbang ke Jakarta. Oleh karena itu ia gagal menghadiri sidang gubernur di Istana Bogor dan tetap berada di Jawa Tengah.

Tindakan apa yang dilakukan Aidit di Jawa Tengah tidak jelas. Kusno sebagai pengawal pribadi, yang kemudian ditahan, bisa menceritakan bahwa Aidit hidup dalam keadaan dikejar-kejar, karena penyelesaian politik yang diharapkan dari Presiden Soekarno tidak kunjung tiba. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak bisa memberi pengarahan yang dibutuhkan oleh para anggota PKI. Ia tidak bisa berfungsi sebagai Ketua PKI.

Menurut Kusno, fisik Aidit di masa pengejaran dan persembunyian tidak baik. Ia tidak bisa berjalan kaki jarak jauh. Kakinya lecet kena sepatu yang dipakainya, sehingga dalam pengejaran seringkali harus digendong oleh Kusno. Karena digendong-gendong dari satu desa ke desa lain, menjadi perhatian orang. Apalagi ternyata Aidit di saat persembunyian itu masih mengenakan pakaian menteri.

Mencari tempat persembunyian juga tidak mudah. Pimpinan PKI di Jawa Tengah tidak bisa dihubungi untuk melakukan koordinasi tempat persembunyian. Ini yang mendorong Aidit untuk memerintahkan Kusno ke Jakarta mencari hubungan. Pada pertengahan Oktober 1965, Kusno meninggalkan Aidit di Jawa Tengah di rumah seorang anggota PKI. Ternyata perpisahan ini merupakan perpisahan untuk selamanya.

Munir menceritakan bahwa seminggu sebelum Aidit tertangkap, ia masih berhasil berjumpa dan melakukan pembicaraan sebentar dengannya. Munir berkesan bahwa Aidit sudah berada dalam keadaan panik. Ia tidak memiliki semangat untuk memimpin perjuangan lebih lanjut. Ia hanya bisa menyatakan penyesalannya: "Borjuasi memang kuat betul, sudah digoyang-goyang begitu rupa, belum juga bisa tumbang!" Munir tidak berhasil memperoleh petunjuk dan perintah tentang apa yang ia harus lakukan untuk menghadapi situasi gawat seperti ini.

Oleh karena itu Munir berkesimpulan bahwa Aidit bukan seorang pemimpin yang berpengalaman dalam memimpin aksi massa. Kenyataannya memang demikian. Aidit belum pernah memimpin gerakan. Bahkan memimpin sebuah aksi buruh dalam memperjuangkan tuntutan juga tidak pernah. Kurangnya pengalaman dalam memimpin gerakan seperti ini menyebabkan Aidit tidak bisa menemukan jalan keluar dan memberi petunjuk konkret untuk dilaksanakan para anak buahnya.

Salah satu dampak keragu-raguan Aidit dalam bersikap bisa diceritakan oleh para tahanan yang menjadi korban di Jawa Tengah. Sesaat setelah G30S, Kolonel Suherman mengambil inisiatif menyusun kekuatan bersenjata di Jawa Tengah. Ia telah mengundang semua Kodim di Jawa Tengah. Ia berhasil mengumpulkan 34 sampai 38 Kodim se-Jawa Tengah. Aidit yang berada di Solo dihubungi untuk memberi petunjuk. Aidit ternyata memberi instruksi untuk membubarkan kekuatan yang sudah dikumpulkan dan menunggu komando Presiden Soekarno untuk mencapai penyelesaian politik. Tiga hari kemudian Aidit meminta Kolonel Suherman untuk mengumpulkan kembali kekuatan Kodim se-Jawa Tengah. Akan tetapi sudah terlambat. Pengejaran terhadap para pendukung Soekarno sudah dilakukan dengan gencar oleh Soeharto. Kolonel Suherman sendiri menyingkir ke kompleks Merbabu dan tertembak mati dalam pertempuran. Terlambat, kekuatan bersenjata yang sudah terkumpul diperintahkan untuk dibubarkan dan tidak mungkin dikumpulkan lagi.

Mengapa Sjam menjadi orang yang demikian penting?

Seperti dituturkan di atas, Sjam ternyata lebih banyak berperan dari Aidit sekitar G30S. Ia lah yang menentukan Aidit untuk pergi ke Jawa Tengah pada tanggal 1 Oktober 1965. Ia yang menolak permintaan Untung untuk mengundurkan hari pelaksanaan gerakan. Ia lah yang menentukan siapa yang bisa menemui Aidit. Susunan Dewan Revolusi pun diduga disiapkan oleh Sjam.

Timbullah pertanyaan, mengapa Sjam menjadi orang sedemikian pentingnya? Dan siapakah sesungguhnya Sjam ini?

Sjam tidak dikenal oleh banyak anggota PKI. Timbullah pertanyaan, apakah jasanya untuk PKI sehingga ia memiliki posisi kunci dan memiliki kekuasaan dan wewenang di atas para wakil

ketua dan para anggota Politbiro PKI. Tidak ada yang bisa memberi jawaban jelas.

Ada cerita, bahwa Sjam pernah berjasa terhadap Aidit, sehingga Aidit merasa berhutang budi padanya. Ini berkaitan dengan sandiwara yang bertujuan meningkatkan gengsi dan prestise Aidit pada tahun 1950.

Pada permulaan tahun 1950, Sjam sebagai seorang tokoh dan pimpinan Serikat Buruh Pelabuhan mengerahkan massa untuk menyambut Aidit dan Lukman, yang dikatakan baru tiba kembali ke Indonesia dari Vietnam dengan kapal yang tiba dari Vietnam dan RRT.

Dalam peristiwa itu, Aidit dan Lukman menghadapi kesulitan untuk keluar dari ruangan imigrasi, karena mereka tidak memiliki surat-surat sah.

Pada tahun 1948 Aidit pernah ditangkap setelah Peristiwa Madiun bersama Alimin dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Solo. Mereka dibawa ke Solo untuk disatukan dengan kelompok Amir Sjarifoeddin yang sudah ditahan oleh Gubernur Militer Gatot Subroto. Akan tetapi mereka berdua berhasil meloloskan diri di perjalanan dan oleh karena itu lolos dari eksekusi yang dilakukan terhadap kelompok Amir Sjarifoeddin.

Aidit dikabarkan berhasil ke Jakarta dan di sana bersatu dengan Lukman. Mereka berdua berhasil melarikan diri. Timbullah pertanyaan, mengapa ia merasa perlu melakukan sandiwara seolah-olah ia tiba dari Vietnam. Rupanya, Aidit dan Lukman merasa bahwa sandiwara itu akan memperbaiki *image* mereka, yang memang berencana untuk mengambil alih pimpinan PKI.

Sjam lah orang yang membantu Aidit dan Lukman keluar dari kantor imigrasi, dibantu oleh Walikota Jakarta Raya, Suwiryo.

Ada juga cerita yang menggambarkan peran Sjam sebagai salah seorang dari tiga serangkai, yang di awal revolusi di Yogyakarta cukup dikenal, yaitu Mohamad Munir, Hartoyo, dan Sjam.

Mereka dikabarkan telah mengikuti kursus kader Partai Sosialis di Mahameru 1 – Yogyakarta dan tinggal di sebuah tempat bersama-sama. Setelah mengikuti kursus kader untuk bekerja di daerah pendudukan Belanda, mereka dikirim bekerja di kalangan serikat buruh di Jakarta.

Munir masuk ke SBKB (Serikat Buruh Kendaraan Bermotor). Sjam masuk ke Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP). Sedangkan Hartoyo masuk ke salah satu serikat buruh lainnya.

Ketiga orang ini kemudian berkembang menjadi tokoh-tokoh yang cukup penting. Sjam menjadi Ketua Biro Khusus langsung di bawah Aidit. Munir menjadi Ketua SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan Hartoyo menjadi orang kedua di Barisan Tani Indonesia (BTI). Dalam Kongres BTI yang akan diadakan pada akhir tahun 1965, Hartoyo katanya sudah disiapkan untuk mengganti Asmu sebagai Ketua BTI.

Telah terjadi perbedaan pendapat antara Aidit dan Asmu mengenai aksi sepihak. Aidit memerintahkan untuk membatasi aksi sepihak yang dianggap merugikan kerja sama dengan unsur-unsur nasionalis dan agama. Sedangkan Asmu tidak menginginkan aksi sepihak dihentikan begitu saja, karena para petani sudah bangkit dan menuntut kelanjutan aksi-aksi sepihak itu.

Ada pula yang menceritakan bahwa Sjam sebenarnya adalah seorang kader Partai Sosialis di Cepu.

Menurut Sampir Suwarto, kepala sekuriti CC PKI, ia pernah menerima pesan dari Pak Karto, Ketua Biro Khusus pada tahun 1950-an, sesaat sebelum ia meninggal dunia. Pak Karto berpesan pada Sampir untuk mengawasi Sjam dengan teliti, karena ia adalah didikan Djohan Sjahroezah, tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Pak Karto adalah seorang tua yang turut mendirikan PKI. Ia dihormati oleh banyak tokoh PKI. Ketika Kongres PKI memutuskan untuk mendirikan Biro Khusus, ia diangkat sebagai Ketua Biro Khusus yang pertama.

Biro Khusus bukan aparat resmi partai. Ia adalah badan yang didirikan untuk membantu Ketua PKI untuk menghubungkan PKI dengan para simpatisan PKI terutama mereka yang berada di ABRI. Aidit lah yang menentukan keanggotaan Biro Khusus, baik di pusat maupun cabang-cabang di daerah. Ini dianggap sebagai organisasi rahasia, sehingga keanggotaannya dan struktur organisasi Biro Khusus tidak diketahui oleh aparat-aparat dan para anggota PKI.

Pak Karto ternyata menyatakan harapannya kepada Sampir bahwa setelah ia meninggal, agar Sjam tidak menggantikannya sebagai Ketua Biro Khusus. Ternyata permintaan yang disampaikan kepada Sampir ini tidak terpenuhi.

Sampir Suwarto setelah Peristiwa G30S masuk penjara dan menjadi tukang pukul yang dipakai oleh Operasi Kalong dalam menyiksa para tahanan. Sampir bersikap demikian, menurutnya untuk melindungi keselamatan istrinya, Soeharti yang ditangkap bersamanya.

Sampir menerangkan semua ini ketika ia ditahan di Salemba, setelah Operasi Kalong tidak memerlukan tenaganya sebagai tukang pukul. Ternyata Pak Karto memiliki kecurigaan terhadap Sjam dan kecurigaan ini tidak didukung oleh Aidit yang malah sepenuhnya bersandar atas Sjam.

Perlu juga dicatat di sini bahwa ipar Sampir adalah Samsu Harya Udaya, Ketua Umum SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia). Setelah Soeharto menjadi presiden, Samsu ternyata menjadi dukun kepercayaan Soeharto hingga ia meninggal dunia.

Sebagai orang pertama Biro Khusus, Sjam memiliki pengetahuan yang mendetail tentang struktur organisasi dan semua orang yang berhubungan dengan PKI, dari pusat hingga daerah.

Walaupun Sjam akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Bandung, selama di penjara ia memperoleh perlakuan istimewa Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu) yang berusaha

memeras berbagai informasi yang berkaitan dengan hubungan antara PKI dan para perwira Angkatan Bersenjata. Dalam banyak proses pengadilan, Sjam menjadi saksi penting. Oleh karena itu, Sjam diduga oleh banyak orang, telah menjadi dalang Teperpu dan telah menjadi sumber utama dalam menyusun berbagai proses pengadilan yang berkaitan dengan G30S.

Tindakan Sjam telah membongkar rahasia PKI. Hampir semua perwira menengah dan tinggi Angkatan Bersenjata masuk penjara karena hubungan mereka dengan PKI telah dibongkar oleh Sjam. Ini dilakukan Sjam untuk menghindari pelaksanaan hukuman matinya.

Ada dua kelompok perwira yang ditahan akibat pembocoran yang dilakukan Sjam. Kelompok pertama terdiri dari mereka yang bisa dibawa ke pengadilan. Kelompok kedua terdiri dari mereka yang harus tetap ditahan.

Salah seorang perwira dari kelompok kedua ini adalah Kolonel Marsudi. Tadinya ia adalah seorang kepercayaan Jenderal Soeharto. Ketika Peristiwa G30S, Kolonel Marsudi menjadi Duta Besar RI di Laos.

Untuk menggambarkan kepercayaan besar Jenderal Soeharto terhadapnya dapat dikemukakan bahwa ia dipanggil pulang ke Indonesia oleh Jenderal Soeharto untuk merombak susunan Badan Pusat Intel (BPI). Kolonel Marsudi mengubah struktur BPI dan menjadikannya sebuah organisasi baru dengan nama Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara).

Sjam membongkar hubungan baik Kolonel Marsudi dengan PKI. Ini dikaitkan dengan peristiwa di Tanjung Priok di waktu mana, Marsudi sebagai kepala staf KMKBDR membongkar upaya barter yang dilakukan oleh PSI. Pembongkaran Marsudi merugikan PSI. Informasi Sjam menyebabkan Kolonel Marsudi ditahan bertahun-tahun. Karena di penjara ia masuk dalam golongan B, hak pensiunnya dicabut. Ini mengakibatkan keluarganya mengalami kesulitan.

Menurut Munir, Sjam kelihatan marah di penjara bila ada orang menuduh dirinya sebagai orang CIA yang telah diselundupkan ke dalam PKI. Akan tetapi faktanya jelas bahwa perbuatannya di penjara sangat menguntungkan CIA yang bertujuan menghancurkan PKI.

Ketika John Lumengkuwas, Wakil Sekretaris Jenderal PNI, menegur Sjam di penjara: mengapa ia membongkar begitu banyak perkara dan menyusahkan banyak perwira tinggi Angkatan Bersenjata? Sjam menjawab: "Setiap manusia berhak mempertahankan hak hidupnya. Sebagai seorang yang telah divonis hukuman mati, saya ingin menunda, kalau bisa malah menggugurkan vonis hukuman mati itu. Pada saat vonis itu akan dilaksanakan atau eksekusi akan dilakukan, saya sengaja membuka persoalan besar baru, sehingga saya tetap diperlukan untuk pemeriksaan, dan dengan demikian hukuman mati saya tidak dijalankan!"

Jawaban Sjam membuktikan bahwa seorang penting PKI dan kader tinggi komunis seperti dirinya, yang sangat dipercayai Aidit, bisa memiliki martabat yang sedemikian rendahnya. Tidak ada jiwa komunisme dalam dirinya.

Peran Aidit

Menurut keterangan sementara orang, Aidit mendengar tentang telah terbentuk sebuah Dewan Jenderal yang akan mengambil tindakan merugikan PKI, menjelang upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober 1965.

Oleh karena itu, diperkirakan, Aidit berpendapat bahwa PKI harus mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal sebelum tanggal 5 Oktober 1965.

Cerita ini tidak menjelaskan apa sebab dipilih tanggal 30 September, karena 3 Oktober umpamanya juga masih beberapa hari sebelum tanggal 5 Oktober.

Peran Aidit dalam perencanaan G30S dan logika pelaksanaan pada tanggal 30 September ini tidak akan bisa dipastikan. Akan tetapi kalau kita mengikuti beberapa kejadian sebelum 30 September 1965, mungkin logika Aidit bisa kita telusuri.

Beberapa tahanan politik mengetahui adanya sebuah pertemuan pada bulan September antara Ketua Mao Tse Tung dan Aidit di Beijing. Dan cerita ini rupanya bisa dipergunakan sebagai basis mengapa tanggal 30 September dijadikan hari pelaksanaan. Aidit yang bangga menjadi pemimpin sebuah partai komunis terbesar di luar kubu sosialis, dikatakan tersinggung oleh beberapa pertanyaan Mao.

Pembicaraan antara Mao dan Aidit dihadiri pula oleh Tjoo Tik Tjoen, anggota CC PKI yang berfungsi sebagai penterjemah di pertemuan itu. Menurut Tjoo isinya kira-kira sebagai berikut:

Mao : Berapa persen dari anggota PKI berasal dari kelas buruh?

Aidit : Tidak diketahui persis, karena belum pernah diselidiki.

Mao : Berapa persen dari anggota CC PKI berasal dari kelas buruh?

Aidit : Juga belum dapat dikatakan persis, belum pernah diteliti.

Mao : Di kalangan Politbiro bagaimana?

Aidit : Tidak diketahui persis.

Mao : Kawan Aidit sendiri asal dari kelas apa?

Aidit : Ayah saya adalah seorang guru agama.

Mao : Bila demikian halnya, Kawan Aidit harus bersikap sangat hati-hati dalam memimpin PKI, supaya PKI

> tidak melakukan kesalahan merugikan untuk ketiga kalinya. Berbuat salah ketiga kali bisa parah

Sebelum dialog ini berlangsung, menurut keterangan Tjoo, berlangsung pula beberapa tanya jawab yang berkaitan dengan siapa yang memimpin PKI bawah tanah di zaman Jepang. Pertanyaan Mao tentang ini juga tidak dijawab dengan tegas oleh Aidit.

Rupanya Aidit tidak bisa menjawab karena di kalangan pimpinan PKI belum ada kesepakatan untuk mengakui bahwa Widarta lah pemimpin PKI di zaman pendudukan Jepang. Ia mengambil tampuk pimpinan setelah Pamudji ditangkap Jepang dan meninggal di dalam tahanan Jepang.

Tokoh Peristiwa Madiun, Soemarsono, menceritakan bahwa ketika Musso tiba di Yogyakarta dan menemui pimpinan PKI, Musso memarahi semua pimpinan PKI karena Widarta "dihukum" mati oleh PKI.

Musso mempertegas dalam pertemuan itu bahwa sebuah partai komunis tidak bisa menghukum mati anggotanya, sekalipun ia melakukan kesalahan besar. Hukuman terberat untuk seorang komunis adalah keanggotaannya dari partai komunis dicabut untuk selama-lamanya. Tindakan menghukum mati Widarta melanggar ketentuan ini.

Ternyata sebelum Pamudji menghembuskan napas terakhir, ia menulis di atas secarik kertas sebuah pesan yang disampaikan pada Sudisman, yang juga ditahan Jepang di penjara yang sama. Pesan itu berbunyi: Teruskan perjuangan!

Secarik kertas itu dianggap sebuah surat wasiat. Yang menjadi persoalan siapakah yang berhak melanjutkan pimpinan PKI ilegal?

Setelah Sudisman bebas dari tawanan Jepang, ia menemui Widarta yang diketahui memimpin PKI ilegal setelah Pamudji ditangkap Jepang. Sudisman merasa bahwa ia memiliki surat wasiat

dan berhak menjadi pemimpin baru. Menurut cerita, Widarta menyatakan sebaiknya menunggu diadakan kongres yang mengikutsertakan para anggota PKI baik ilegal maupun legal untuk memilih pemimpin. Widarta ingin pemimpin baru dipilih oleh para anggota dan tidak bersedia menyerahkan tampuk pimpinan ke Sudisman atau ke para tokoh PKI lain yang baru bebas dari tahanan Jepang.

Sementara menunggu terselenggaranya kongres, terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai *Peristiwa Tiga Daerah* yang melaksanakan pengambilalihan kekuasaan pemerintah di tiga daerah (Tegal, Pemalang, Pekalongan) dari tangan pamongpraja pilihan Jepang yang korup dan menindas rakyat.

Gerakan mengambil alih pimpinan pemerintahan daerah dari tangan pamongpraja yang korup dan pilihan Jepang itu mendapat dukungan rakyat luas. Rakyat tiga daerah itu memang menderita berat selama zaman pendudukan Jepang.

Akan tetapi pemerintah RI menuduh tindakan itu sebagai tindakan separatis yang merugikan RI. Oleh karena itu pemerintah mengambil tindakan menindasnya dengan kekerasan senjata.

Para tokoh PKI yang terlibat diajukan ke pengadilan. Intervensi Amir Sjarifoeddin, melalui Supeno, anggota Badan Pekerja KNIP dari Partai Sosialis menyebabkan Peristiwa Tiga Daerah diselesaikan secara politik. Para tokoh PKI yang terlibat seperti Sardjito, Tan Djin Kiem, dan lain-lain, dibebaskan bahkan kemudian turut memimpin PKI.

Akan tetapi Widarta yang memimpin gerakan tersebut hilang dan kemudian diketahui bahwa ia dijatuhi hukuman mati oleh pimpinan PKI karena dianggap bersalah, mempertarungkan PKI dengan pemerintah RI. Oleh karena Widarta dihukum mati oleh partai, ia tidak bisa dinyatakan oleh partai sebagai Ketua PKI di zaman pendudukan Jepang. Ini rupanya yang menyebabkan Aidit

tidak bisa menjawab pertanyaan Mao tentang siapa yang memimpin PKI di zaman pendudukan Jepang.

Menurut keterangan menjelang Peristiwa G30S, Widarta telah direhabilitasi dan nama Widarta dipergunakan sebagai nama Sekolah Pendidikan Khusus kader PKI, jadi sejajar dengan nama-nama Ali Archam dan Bachtarudin.

Lain pertanyaan Mao yang katanya sulit untuk dijawab oleh Aidit adalah tentang keberadaan Aidit ketika Peristiwa Madiun pada tahun 1948.

Seperti yang diketahui dan digambarkan sebelumnya, Aidit bersama Alimin turut ditahan, tetapi berhasil meloloskan diri sebelum tiba di Solo, di mana para tokoh PKI lainnya menemui ajalnya atas perintah Gatot Subroto. Aidit dan Lukman kemudian berada di Jakarta. Akan tetapi menurut berita *Antara* pada permulaan tahun 1950, telah diadakan upacara penyambutan Aidit dan Lukman di Pelabuhan Tanjung Priok—dikabarkan bahwa mereka baru kembali dari Vietnam dan RRT. Tentunya Aidit tidak bisa menuturkan kepada Ketua Mao bahwa ia berada di RRT, karena pada tanggal 1 Oktober pendirian RRT sudah diproklamasikan.

Dialog yang mengandung pertanyaan-pertanyaan itu ternyata menyinggung perasaan bangga Aidit sebagai ketua sebuah partai komunis besar di dunia. Menurut beberapa orang yang mengenal pribadinya termasuk Achmad Sumadi, dialog dengan Ketua Mao itu mendorong Aidit untuk menunjukkan bahwa sebagai ketua partai besar, ia adalah seorang genius.

Ia ingin melaksanakan gebrakan yang akan menimbulkan sebuah peristiwa besar dan memperkaya pengalaman perjuangan Marxisme–Leninisme, mencapai kemenangan dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya di dunia. Oleh karenanya ia ingin mencapai kemenangan tersebut sebelum hari jadi RRT, 1 Oktober 1965. Menurut perkiraan sementara orang, itulah sebabnya Aidit memilih tanggal 30 September, bukan hari-hari antara 1

Oktober dan 5 Oktober. Dan inilah rupanya yang menyebabkan Aidit menolak anjuran Letnan Kolonel Untung untuk menunda operasi gerakan yang disampaikan melalui Sjam pada tanggal 30 September 1965.

Kebenaran teori ini harus diteliti. Tidak bisa ditelan begitu saja. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan tanggal 30 September dipilih. Sejarahlah yang dapat menjelaskan nanti. Sukar untuk diterima bahwa Aidit hanya terdorong ingin membuktikan kehebatannya, melebihi Ketua Mao, sehingga memilih tanggal 30 September 1965 sebagai hari gerakannya.

Patut diperhatikan bahwa Presiden Soekarno tidak mau menggunakan istilah G30S. Ia berkeras menggunakan istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) berdasarkan pertimbangan bahwa gerakan itu dimulai lewat jam 12 malam, jadi lebih tepat dinyatakan sebagai gerakan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober. Dan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 itulah militer di Indonesia bergerak membina kekuasaan militer di Indonesia dan menindas demokrasi dengan semboyan memurnikan pelaksanaan UUD 1945.

Letnan Kolonel Untung atas perintah Sjam menggunakan istilah "Gerakan 30 September", sekalipun operasi dimulai pada pukul 2 pagi 1 Oktober. Tidak jelas apakah nama Gerakan 30 September itu diciptakan oleh Sjam atau oleh Aidit.

Ada juga yang mengaitkan G30S dengan adanya iri hati Aidit terhadap Njoto. Iri hati yang menyebabkan akibat fatal. Teori ini bisa dituturkan sebagai berikut.

Berkembangnya hubungan baik antara PKI dan Presiden Soekarno jelas tampak. Ternyata hubungan Soekarno dan Njoto pun semakin intim. Soekarno jelas lebih menyukai Njoto dibandingkan Aidit dan Lukman.

Soekarno selalu meminta Njoto untuk menyusun berbagai naskah pidato tertulisnya. Pada waktu ada kesempatan mengangkat seorang PKI sebagai menteri negara di kabinet, Soekarno memilih

Njoto. Dan menjelang akhir 1965 telah tersiar desas-desus bahwa Soekarno akan mengangkat Njoto sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Soebandrio untuk meringankan bebannya yang pada waktu itu merangkap posisi Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri. Reshuffle kabinet direncanakan pada akhir 1965.

Kebenaran isu tentang rencana pengangkatan Njoto sebagai Menteri Luar Negeri diperoleh dari seorang tahanan politik yang bernama Bus Effendi, saudara Rustam Effendi dan ipar Kemal Idris. Bus Effendi pernah bertugas di salah satu negara Afrika. Ia dipanggil pulang ke Indonesia pada bulan November 1965 untuk kemudian ditahan karena di laci meja Njoto ditemukan suratnya ke Njoto, memohon perpindahan tugas ke Eropa bilamana Njoto menjadi Menteri Luar Negeri.

Keinginan untuk melebihi Njoto, menurut teori ini, menyebabkan Aidit merancang G30S.

Ada teori lain yang tidak berkaitan dengan sikap iri hati. Teori lain ini berhubungan dengan kekhawatiran Aidit bilamana Njoto menjadi Menteri Luar Negeri dan hubungan Njoto dan Soekarno kian dekat. Aidit katanya khawatir bilamana ini terjadi, PKI tidak berada dalam posisi untuk mengambil tindakan tegas terhadap Njoto.

Njoto dianggap bersalah oleh PKI karena melakukan hubungan gelap dengan seorang wanita Rusia, yang menyebabkan Njoto sering menyelenong ke Moskow tanpa tugas partai. Wanita Rusia ini bernama Rita, seorang pegawai Departemen Luar Negeri Uni Soviet dan menjadi penterjemah bahasa Indonesia. Setiap kali Njoto ke Moskow, Rita lah yang menjadi penterjemahnya.

Hubungan percintaan dengan Rita diketahui karena seorang mahasiswa Indonesia, Ir. Haryono Saleh, telah berhasil mencuri semua surat-surat Njoto pada Rita. Hal ini sebenarnya membuktikan bahwa Rita bukanlah wanita yang patut menyebabkan pengorbanan semua kedudukan Njoto. Surat-surat Njoto ternyata mudah jatuh ke

tangan pemuda lain yang dapat merayunya. Walaupun demikian, upaya PKI untuk memutuskan percintaan ini tidak berhasil.

Hubungan percintaan antara Njoto dan Rita menjadi masalah untuk pimpinan PKI. Menurut berbagai keterangan, pimpinan PKI dan pimpinan Partai Komunis Uni Soviet telah berhubungan untuk menyelesaikan masalah percintaan Njoto dan Rita yang tidak disukai pimpinan PKI. Akan tetapi pertemuan ini tidak membawa hasil apa-apa. Njoto menyatakan bahwa ia bersedia untuk melepaskan segala kedudukan kepartaian guna melanjutkan percintaan itu dan rela mengambil risiko yang berkaitan dengan keluarga dari perkawinan dengan istrinya.

Karena hubungan percintaan ini, Njoto telah digeser dari posisi Ketua Agitrop (Agitasi dan Propaganda) dan pimpinan Lekra. Tindakan terhadap Njoto selanjutnya akan sulit bilamana ia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri.

Masalah percintaan Njoto dan Rita dan berbagai tindakan PKI menghukum Njoto menyebabkan hubungan Aidit dan Njoto merenggang. Di dalam rapat-rapat Politbiro PKI, Njoto ternyata tegas menentang rencana Aidit untuk mendahului tindakan Dewan Jenderal. Tentangan Njoto inilah, menurut sebuah teori lain, yang mendorong Aidit untuk melakukan tindakan G30S, untuk membuktikan bahwa Aidit lebih tepat dan lebih tajam sehingga menjamin kemenangan mutlak, mengalahkan Dewan Jenderal.

Akan tetapi seperti yang dituturkan sebelumnya, kesemua asumsi ini tidak membantah kenyataan bahwa yang merancang dan memimpin G30S sebenarnya adalah Sjam. Dan Sjam tentunya tidak identik dengan pimpinan PKI.

Menurut Anggaran Dasar PKI, Ketua Biro Khusus Sjam, sebagai alat ketua PKI, tidak dipilih dalam kongres-kongres PKI untuk mewakili PKI dalam melaksanakan berbagai kebijakan partai.

Salah satu tanda bahwa Sjam memimpin G30S diperkuat dengan pernyataan Sjam dalam proses pengadilan Kolonel Latief. Ia

mengakui bahwa dialah yang memerintahkan dibunuhnya para jenderal yang diculik dan dibawa ke Lubang Buaya.

Akan tetapi tidak pernah dibuktikan secara hukum bahwa Sjam bertindak atas nama PKI dan bertindak atas perintah organisasi PKI.

Pimpinan PKI dan PKI secara organisasi tidak tahu-menahu tentang perancangan dan pelaksanaan G30S. Dan yang sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan PKI di mata hukum adalah Aidit, Lukman, dan Njoto. Ketiga tokoh ini dibunuh tanpa proses pengadilan apa pun.

Yang kemudian diadili dari PKI seperti Sjam dan Sudisman, sebenarnya tidak memiliki wewenang apa pun untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. Kesemua ini memperkuat argumentasi bahwa PKI secara organisasi tidak terlibat dalam G30S.

Peran Soekarno

Ada sebuah hal yang patut diteliti dan dipelajari dengan saksama oleh para sejarawan. Benarkah Presiden Soekarno sebenarnya siap untuk menindak para jenderal yang dianggap tidak loyal terhadap dirinya sebagai Panglima Tertinggi? Kalau ini benar, mengapa Aidit bertindak mendahului?

Berbagai keterangan yang dapat dihimpun di dalam penjara belum dapat memastikan kebenaran bahwa Bung Karno sebagai Panglima Tertinggi mengadakan persiapan untuk menindak jenderal-jenderal yang dianggap tidak loyal terhadap dirinya.

Di dalam pengadilan Letnan Kolonel Untung, Mayor Rudhito, seorang perwira intel yang bekerja untuk KSAD dan bertugas mengatur persiapan ruang-ruang sidang yang dipergunakan para perwira tinggi di Hankam dan mengurus *sound system* ruang-ruang sidang tersebut, bercerita bahwa ia memiliki dua set *tape* dari rapat

Dewan Jenderal yang membicarakan rencana mengambil tindakan cepat bilamana kondisi kesehatan Bung Karno mencapai titik krisis.

Tindakan cepat dan tegas dianggap perlu oleh para jenderal untuk mencegah PKI bertindak menguntungkan aliran komunisme di Indonesia. Menurut keterangan Mayor Rudhito, satu *tape* ia serahkan kepada Bung Karno untuk dipelajari dan satu *tape* lagi ia serahkan kepada tim pemeriksa ketika ia ditahan. Nasib kedua *tape* ini tidak diketahui, karena pihak penguasa militer menyatakan bahwa mereka tidak tahu-menahu tentang adanya *tape* yang menggambarkan rapat dan keputusan Dewan Jenderal.

Mayor Rudhito selama pemeriksaan melalui banyak macam siksaan. Ia meninggal dunia karena menderita diabetes. Luka-luka akibat siksaan fisik yang keji akhirnya membunuh Mayor Rudhito.

Bung Karno menjadi tahanan rumah karena tuduhan terlibat dalam G30S. Dan dasar tuduhan ini adalah keterangan salah seorang ajudannya, Kolonel KKO Bambang Widjanarko. Kolonel Bambang menerangkan bahwa pada suatu ketika di serambi belakang istana, ia melihat Bung Karno asyik berbicara dengan Jaksa Agung—Jenderal Sutardio dan Jaksa Agung Muda—Jenderal Sunaryo.

Apa yang dibicarakan tidak dapat didengar oleh Kolonel Bambang. Tidak lama kemudian, Bung Karno memerintahkannya untuk mengundang Jenderal Sabur, Komandan Cakrabirawa. Jenderal Sabur diperintahkan untuk memanggil Letnan Kolonel Untung. Menurut Kolonel Bambang Widjanarko, Bung Karno terlihat mengajukan sebuah pertanyaan, yang oleh Letnan Kolonel Untung dijawab: Siap! Ia menegaskan bahwa apa yang dibicarakan mereka tidak jelas.

Ketika Jenderal Sabur ditanya oleh tim pemeriksa tentang kejadian itu, Jenderal Sabur katanya menjelaskan bahwa Bung Karno bertanya kepada Letnan Kolonel Untung apakah ia siap melaksanakan perintah untuk menangkap para jenderal yang tidak

loyal terhadap dirinya. Letnan Kolonel Untung dinyatakan menjawabnya dengan perkataan: Siap!

Menurut keterangan lebih lanjut, dikatakan bahwa Jenderal Sabur pun menjelaskan ke tim pemeriksa bahwa Jenderal Sutardio dan Jenderal Sunaryo diperintahkan Bung Karno untuk menyiapkan tempat penahanan para jenderal yang dianggap tidak loyal terhadapnya. Menurut Jenderal Sabur, pembicaraan yang dilaporkan ke tim pemeriksa itu dikatakan terjadi setelah tanggal 20 September 1965.

Jenderal Sabur dan Kolonel Bambang Widjanarko dikabarkan menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 1965 di malam hari, ketika Presiden Soekarno sedang bersiap-siap untuk memberi sebuah amanat di acara yang dihadiri oleh para ahli dan siswa Akademi Genie di Senayan, Letnan Kolonel Untung datang untuk menemui Presiden Soekarno. Ia lalu diperintahkan untuk menunggu Soekarno di toilet. Di toilet, Letnan Kolonel Untung terlihat memberi secarik kertas ke Soekarno yang katanya setelah dibaca, dirobek dan dibuang ke toilet. Apa isi secarik kertas itu tidak diketahui dan ke mana Letnan Kolonel Untung pergi dari tempat itu juga tidak diketahui.

Keterangan yang diberikan Jenderal Sabur dan Kolonel Bambang Widjanarko memberi gambaran bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam perencanaan menangkap para jenderal yang dianggapnya tidak loyal terhadap dirinya.

Akan tetapi keterangan Jenderal Sabur dan Kolonel Bambang Widjanarko ditentang keras oleh seorang ajudan Presiden Soekarno lainnya, Wakil Komandan Cakrabirawa, Kolonel Saelan. Saelan menyatakan bahwa di acara di Senayan yang disinggung pada malam 30 September tersebut, ia selalu berada di samping Bung Karno. Dan menurutnya adegan yang digambarkan tidak pernah terjadi.

Jenderal Sutardio dan Jenderal Sunaryo pun membantah versi Jenderal Sabur. Mereka menyatakan bahwa apa yang dibicarakan dengan Soekarno di serambi istana yang disaksikan oleh Jenderal Sabur pada tanggal 20 September itu bersifat rutin dan sama sekali tidak berkaitan dengan rencana penangkapan jenderal-jenderal yang dianggap tidak loyal.

Rupanya penguasa militer tidak berhasil menemukan saksi-saksi yang bisa dengan tegas menyatakan bahwa Bung Karno terlibat dalam G30S. Akan tetapi keterangan Bambang Widjanarko dan Sabur telah menyebabkan Soekarno diperlakukan sebagai seorang tahanan rumah—tidur di gudang rumah yang pernah dihuni oleh Dewi Soekarno—tidak boleh dijenguk orang, tanpa perawatan yang layak, hingga ia sakit keras dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1970.

Bilamana keterangan Jenderal Sabur itu benar, yaitu Presiden Soekarno akan mengambil tindakan tegas terhadap para jenderal yang dianggap tidak loyal, mengapa Aidit atau PKI harus mengambil tindakan mendahului? Bukankah lebih baik pimpinan PKI yang pada waktu itu dekat dengan Bung Karno, mendesaknya untuk menindak para jenderal tersebut ketimbang mencetuskan Peristiwa G30S, yang menurut Sjam, menggunakan perwira-perwira simpatisan PKI untuk menculik para jenderal yang dimaksud?

Ada pula yang bercerita bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno berada di Halim dan menerima laporan Brigadir Jenderal Supardjo tentang G30S. Setelah mendengar laporan itu, Soekarno terlihat menepuk pundak Supardjo sebagai tanda bahwa ia memuji Supardjo tentang apa yang telah berlangsung. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan semua gerakan militer dihentikan untuk menghindari pertumpahan darah. Soekarno juga menyatakan bahwa semua harus menunggu komandonya yang akan mencari penyelesaian politik.

Sejarah membuktikan bahwa perintah Soekarno untuk menghentikan tindakan militer segera ditaati. Gerakan G30S segera menghentikan kegiatan militernya. Dari sini jelas bahwa tidak ada tanda bahwa G30S dilakukan untuk menjatuhkan Soekarno dan pimpinan militer G30S mematuhi perintah Presiden Soekarno. Justru pihak para jenderal yang dipimpin oleh Soeharto lah yang mengambil tindakan militer, menentang ajakan Bung Karno untuk mencapai penyelesaian politik dan kemudian secara bertahap mengakhiri kekuasaan Soekarno yang bersandar atas persatuan Nasakom—nasionalisme, agama, dan komunisme.

Adanya perintah Soekarno untuk menghentikan semua kegiatan, membuat pimpinan G30S berhenti bergerak. Akibatnya, pasukan-pasukan di bawah komando gerakan ini dengan mudah dilucuti oleh kekuatan yang dipimpin Soeharto. Dalam beberapa jam di sore hari, semua pos G30S di Jakarta dilumpuhkan. Orang-orang yang terlibat ditangkap. Sekitar pukul 7 malam, jadi sekitar 17 jam setelah gerakan dimulai, Soeharto telah menguasai Jakarta. Tokoh-tokoh G30S terpaksa melarikan diri, meninggalkan pasukannya yang hancur.

Peran Soeharto

Apa peranan Soeharto? Ternyata besar sekali, bahkan mungkin lebih besar dari keterlibatan Soekarno dalam peristiwa ini.

Beberapa hari sebelum Peristiwa G30S, Latief telah datang mengunjungi Soeharto melaporkan rencana menahan beberapa jenderal yang dianggap menentang kebijakan Soekarno. Soeharto menyatakan kesediaannya mendukung rencana ini.

Pada tanggal 30 September malam, jadi beberapa jam sebelum gerakan penculikan dilakukan, Latief datang lagi menemui Soeharto

memberi laporan bahwa aksi penculikan akan dilakukan malam itu. Lagi-lagi, komitmen dukungan disampaikan kepada Latief.

Beberapa hari sebelum itu, dikatakan, Soeharto mendatangkan beberapa batalyon pasukan dari luar ke Jakarta Raya, dengan alasan untuk memeriahkan perayaan Hari Angkatan Bersenjata—5 Oktober. Soeharto sendiri yang menginspeksi kehadiran batalyon-batalyon ini di Jakarta.

Timbullah pertanyaan: Sebagai perwira Angkatan Darat, bilamana ia mengetahui adanya rencana yang dilakukan untuk merugikan atasannya, dalam hal ini Ahmad Yani sebagai KSAD, ia wajib melaporkannya.

Ternyata ia bukan saja tidak melaporkan, melainkan berjanji untuk mendukung kelompok yang akan menculik atasannya. Dan secara diam-diam mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan yang memperbesar kemungkinannya menjadi orang yang paling berkuasa di Indonesia.

Sjam dikatakan sebagai tokoh yang menjembatani Aidit dengan para tokoh ABRI. Dikatakan pula bahwa Sjam ada hubungan dengan Soeharto. Memang timbul pertanyaan, kenapa Soeharto tidak berada di dalam daftar jenderal yang harus diculik oleh G30S? Bukankah ini berarti ia dianggap simpatisan PKI atau paling sedikit tidak akan merugikan G30S?

Jenderal Soeharto ternyata adalah seorang yang pandai menggunakan situasi untuk menarik keuntungan bagi diri sendiri dan untuk meningkatkan kedudukannya. Dia tidak bodoh sebagaimana perkiraan banyak orang karena dianggap orang yang terlalu banyak bersandar pada "dukun" dan ilmu kleniknya.

Walaupun Jenderal Nasution lolos dari penculikan G30S, Nasution tidak bisa mengendalikan Soeharto. Soeharto dengan licik menggunakan dukungan dan pengaruh Nasution untuk memperkuat posisi politik dan militernya. Setelah Nasution tidak lagi dibutuhkan, ia dilemari-eskan oleh Soeharto. Semua perwira

senior yang dianggap Soeharto sebagai saingan atau tidak menguntungkan posisinya, satu per satu disingkirkan pula, bahkan bilamana perlu dijebloskan dalam tahanan, seperti yang terjadi dengan Jenderal Pranoto Reksosamudro.

Marilah kita amati bagaimana Soeharto berkembang di dalam Angkatan Darat.

Dalam Peristiwa 3 Juli 1946, Soeharto yang pada waktu itu berpangkat letnan kolonel menunjukkan bahwa ia mendukung Jenderal Sudarsono, jadi berada di barisan Tan Malaka, cs. yang berusaha menggulingkan kabinet Sjahrir.

Ketika kelompok Sudarsono berhasil menculik Sjahrir dan kedudukan politik Tan Malaka terlihat lemah, Soeharto dengan cerdik berbalik haluan. Ia malah bekerja sama dengan kekuatan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) untuk mematahkan kudeta 3 Juli 1946 yang dipimpin oleh Tan Malaka. Dengan demikian, Soeharto menjadi kepercayaan partai-partai kiri, termasuk PKI dan para perwira menengah yang berperan dalam G30S di kemudian hari.

Ketika terjadi Peristiwa Madiun 1948, Letnan Kolonel Soeharto dikirim oleh Perdana Menteri Hatta untuk mengunjungi kota Madiun, memastikan apakah telah terjadi tindakan pemberontakan PKI.

Soeharto, karena keterlibatan dalam penumpasan kudeta 3 Juli 1946, memiliki hubungan baik dengan Soemarsono, tokoh Pesindo dan tokoh Peristiwa Madiun. Soemarsono menyambut kedatangan Soeharto di Madiun dan mengajaknya keliling melihat perkembangan Madiun. Soeharto menyaksikan sendiri bahwa tidak ada pemberontakan PKI di Madiun seperti yang disiarkan pemerintah Hatta. Kota berjalan dengan tenang dan tertib. Tidak ada tanda adanya pemberontakan. Bendera Merah Putih tetap berkibar di semua gedung instansi negara. Tidak terlihat berkibarnya bendera Palu Arit. Penjara-penjara tidak dipenuhi oleh

prajurit-prajurit yang dilucuti senjatanya dan ditangkap oleh PKI. Semua berjalan normal.

Soeharto dikatakan telah melaporkan hasil kunjungannya ke Madiun kepada Perdana Menteri Hatta. Akan tetapi ini tidak mengubah sikap Hatta terhadap PKI. Hatta tetap menggunakan alasan pemberontakan PKI di Madiun sebagai alasan untuk menumpas PKI, sesuai kehendak Amerika Serikat.

Laporan Soeharto tentang keadaan Madiun yang sesungguhnya menyebabkan ia menjadi perwira militer kepercayaan para pejuang bersenjata yang berjiwa kerakyatan dan teguh dalam pendirian melawan imperialisme.

Kolonel Latief, orang kedua Senko G30S, sangat dekat dengan Soeharto. Ia lah yang mengharumkan nama Soeharto dalam penyerangan ibukota Yogyakarta di zaman revolusi. Pada waktu itu Latief yang menjadi komandan pertempuran di lapangan. Tetapi Soeharto lah yang memperoleh pengakuan dan ditonjolkan jasanya.

Belanda dalam agresi kedua berhasil menduduki Yogyakarta pada tahun 1948. Pasukan yang dipimpin oleh Soeharto dikenal sebagai pasukan yang paling gigih melawan Belanda dan berhasil merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Yang memimpin pertempuran di lapangan adalah anak buah kesayangan Soeharto, Latief. Banyak perwira yang gigih bertempur merebut kembali Yogyakarta dan telah mengharumkan nama Soeharto, kemudian ditahan oleh Soeharto setelah Peristiwa G30S. Kolonel Latief sendiri dijatuhi hukuman seumur hidup. Sejarah TNI hanya menyinggung nama Soeharto sebagai panglima yang berjasa mengambil alih Yogyakarta dari Belanda. Ini tidak sesuai dengan kenyataan dan merupakan korupsi sejarah dalam arti sesungguhnya.

Letnan Kolonel Untung, orang pertama Senko G30S juga pernah menjadi salah satu anak buah kesayangan Soeharto. Ia banyak berjasa mengharumkan nama Soeharto dalam operasi Mandala—pengambil-alihan Irian Barat ke RI pada tahun 1963. Soeharto dan

Tien Soeharto adalah comblang perkawinan Untung dengan istrinya. Dalam pesta perkawinan Untung, Soeharto dan Tien Soeharto hadir sebagai tamu terhormat.

Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala pasti kewalahan seandainya tidak ada prajurit-prajurit seperti Untung yang dengan berani dan sukarela didrop di Irian Barat dari udara. Tadinya tidak ada pasukan yang bersedia didrop ke Irian Barat. Karena waktu mendesak dan untuk menjaga nama baik Soeharto, Letnan Kolonel Untung lah yang maju ke depan mengajukan diri berani dan siap didrop di Irian Barat. Rasa terharu dan penghargaan Soeharto ditunjukkan dengan mengantar sendiri Untung dan pasukannya ke lapangan terbang dan memeluk Untung sebelum ia naik pesawat.

Hubungan pribadi yang dekat dan baik antara Soeharto dan Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latief ini rupanya yang menyebabkan nama Soeharto tidak tercantum di dalam daftar nama jenderal-jenderal yang harus diculik oleh G30S. Kolonel Latief di sidang pengadilannya jelas menunjukkan bahwa mereka menganggap Soeharto tetap sebagai atasannya, bahkan sebagai komandan gerakan, sehingga Latief memerlukan lapor tentang rencana pelaksanaan G30S sebelum aksi gerakan tersebut dilaksanakan.

Kolonel Latief dalam sidang Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) di Jakarta pada tahun 1978 mengungkapkan dengan jelas bahwa dia telah mengunjungi Jenderal Soeharto dua kali sebelum G30S. Pertama di rumahnya untuk melaporkan adanya Dewan Jenderal yang mau melancarkan kudeta terhadap kekuasaan pemerintah Soekarno. Kedua kalinya pada tanggal 30 September 1965 malam. Kolonel Latief mengakui menemui Jenderal Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto untuk menyampaikan rencana penangkapan tujuh jenderal. Jenderal Soeharto ketika itu berada di Rumah Sakit Gatot Subroto karena kebetulan putranya tersiram air panas.

Arnold Brackman (wartawan Amerika Serikat yang pernah menjadi kepala perwakilan Pers Bureau USA—UPI (United Press International) di Jakarta dalam buku yang berjudul *The Communist Collapse in Indonesia* menulis tentang wawancaranya dengan Soeharto: "…pada tanggal 30 September 1965 malam, beberapa jam sebelum G30S dimulai, Kolonel Latief telah mengunjungi Jenderal Soeharto di Rumah Sakit Angkatan Darat di Jakarta, di mana putranya sedang dirawat karena luka kesiram air panas. Jenderal Soeharto menyatakan bahwa Latief datang mengunjunginya untuk mengetahui perkembangan kesehatan putranya, tapi sesungguhnya untuk memastikan apa betul Jenderal Soeharto berada di rumah sakit. Jadi, ia ditugasi Gerakan untuk memastikan apakah betul Jenderal Soeharto sedang sibuk merawat putranya di rumah sakit, sehingga Jenderal Soeharto tidak bisa beraksi menggagalkan pelaksanaan Gerakan yang akan dilancarkan beberapa jam lagi".

Profesor Wertheim dalam sebuah tulisannya menyatakan bahwa Soeharto sendiri memberi sebuah versi yang berbeda ketika ia diwawancarai oleh majalah Jerman, *Der Spiegel*. Soeharto menjawab pertanyaan *Der Spiegel*: "Kira-kira pukul 11 malam 30 September 1965, Kolonel Latief dari komplotan pemberontak datang pada saya di rumah sakit untuk membunuh saya. Tapi tampaknya ia tidak melaksanakan berhubung kekhawatirannya melakukan pembunuhan di tempat umum."

Dua keterangan Jenderal Soeharto yang berbeda ini tentu diperhatikan oleh para ahli luar negeri, termasuk Profesor Wertheim. Kedua versi Soeharto bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Kolonel Latief sendiri.

Kolonel Latief di dalam sidang pengadilan Mahmilti antara lain mengajukan:

1. Permohonan agar Jenderal Soeharto dan istrinya diajukan sebagai saksi-saksi yang bisa meringankan tuduhan terhadapnya. Mahkamah menolak permintaannya ini.

2. Dua hari sebelum gerakan dimulai, ia mengunjungi Jenderal Soeharto di rumahnya, dan melaporkan tentang informasi adanya Dewan Jenderal yang berniat merebut kekuasaan Pemerintah Soekarno. Dilaporkan pula adanya rencana dari sekelompok perwira muda untuk menggagalkan usaha Dewan Jenderal itu.

3. Pada tanggal 30 September 1965 malam, ketika menemui Jenderal Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto melaporkan rencana yang akan dijalankan beberapa jam kemudian untuk menggagalkan usaha kudeta Dewan Jenderal.

4. Latief mempertegas bahwa Jenderal Soeharto setelah mendengar laporan-laporan Latief berkesempatan dan mampu mencegah berlangsungnya Gerakan 30 September. Kenyataannya Jenderal Soeharto tidak melakukan pencegahan itu.

5. Menjawab pertanyaan mengapa Jenderal Soeharto memimpin penumpasan Gerakan 30 September, dan kemudian diperluas menjadi penumpasan G30S/PKI, Kolonel Latief mengemukakan kemungkinan bahwa Jenderal Soeharto kecewa. Kecewa karena ternyata Presiden Soekarno tidak menunjuknya sebagai pejabat KSAD setelah Jenderal Yani diketahui wafat.

Patut diperhatikan, bahwa apa yang diajukan oleh Kolonel Latief di depan sidang pengadilan itu semula dirahasiakan. Ia tidak

pernah membicarakan dan membongkarnya sebelum sidang tersebut.

Rupanya Kolonel Latief masih terdorong kesetiakawanannya terhadap Soeharto, sebagai seorang bekas komandan yang dihormati dan dipercayainya. Ia sebenarnya berkesempatan membongkar rahasia penting ini di berbagai kesempatan lain sebelum sidang pengadilannya sendiri pada tahun 1978. Antara lain ketika ia menjadi saksi di pengadilan salah seorang anak buahnya, Kapten Suradi, perwira intel Brigade Infantri. Suradi menyatakan di sidang bahwa ia mengantar Kolonel Latief mengunjungi rumah Soeharto dua hari sebelum G30S beroperasi. Ketika Latief ditanya hakim apa yang dibicarakan dengan Soeharto dalam kunjungannya itu, Latief menyatakan bahwa yang dibicarakan adalah masalah perumahannya di Jakarta, karena ia baru saja pindah dari Semarang. Hakim sendiri menyatakan bahwa jawaban Latief kurang masuk di akal. Apakah mungkin Latief sebagai orang kedua Senko G30S menemui Soeharto, Panglima Kostrad, pada waktu-waktu yang sangat menentukan sebelum G30S hanya untuk membicarakan soal perumahan?

Apa yang dibongkar oleh Latief di Mahmilti pada 1978 merupakan hal yang sangat penting. Bilamana ini dibongkar sebelum Pemilihan Umum 1971, jadi sebelum Soeharto dinobatkan sebagai Presiden hasil Pemilu 1971, mungkin perkembangan politik di Indonesia bisa berbeda.

Banyak perwira menengah dan tinggi ABRI diadili dan ditahan dengan tuduhan terlibat dalam G30S hanya karena mereka dinyatakan mengetahui tentang keberadaan Dewan Jenderal tetapi tidak melaporkan apa yang mereka ketahui ke atasannya.

Contohnya Komodor Suradi, Panglima Maritim Kepulauan Riau. Ia dijatuhi hukuman penjara 18 tahun karena ia tidak melaporkan keberadaan Dewan Jenderal yang ia ketahui dari seorang bawahannya ke atasannya.

Brigadir Jenderal Polisi Suwarno telah dijatuhi hukuman karena ia tidak melaporkan ke atasannya tentang keberadaan Dewan Jenderal dan tidak berupaya mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal.

Bagaimana dengan Jenderal Soeharto? Ia bukan saja mengetahui dari Latief tentang keberadaan Dewan Jenderal. Ia mengetahui pula adanya rencana konkret G30S sebelum Gerakan itu beroperasi. Akan tetapi ia tidak melaporkannya ke atasan, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Bahkan tidak berbuat apa-apa untuk mencegah terjadinya penculikan dan kemudian pembunuhan terhadap atasannya.

Timbullah keganjilan. Jenderal Soeharto yang mengetahui tentang Dewan Jenderal dan mengetahui tentang akan adanya G30S yang akan menculik atasannya, yaitu Jenderal Yani dan Jenderal Nasution, tidak mengambil tindakan apa-apa, tidak dituntut ke pengadilan dan dijatuhi hukuman. Sedangkan para perwira menengah dan tinggi yang disinggung di atas dijatuhi hukuman berat. Soeharto bukan saja tidak dituntut ke pengadilan dan dijatuhi hukuman berat, ia malah menanjak terus hingga menjadi Presiden untuk jangka waktu yang panjang.

Keterangan Kolonel Latief di Mahmilti seharusnya menjadi sandaran hukum dalam menuduh Soeharto sebagai perwira yang terlibat dalam G30S. Dan ia memiliki kesalahan yang jauh lebih serius ketimbang kesalahan-kesalahan para perwira tinggi lainnya yang diadili dan ditahan tanpa proses pengadilan apa pun dengan tuduhan terlibat G30S. Sebagai Panglima Kostrad, Soeharto yang sebelumnya sudah mengetahui rencana G30S, memiliki banyak kesempatan dan kemampuan militer untuk mencegah bahkan menggagalkan G30S.

Tentunya jelas mengapa Soeharto tidak menghentikan atau menggagalkan G30S sebelum para atasannya diculik dan dibunuh. Ia menginginkan peluang untuk naik ke atas.

Kepribadian Soeharto dan kemampuannya memperoleh keuntungan pribadi dari berbagai kejadian yang melibatkannya dengan tanpa *tedeng aling-aling* merugikan pihak bahkan kawan-kawan dekat yang mempercayainya, sangat jelas.

Kejadian G30S menunjukkan itu. Soeharto berpura-pura berada di pihak para perwira muda yang tidak menyetujui sikap para jenderal yang dinyatakan membentuk Dewan Jenderal dan tidak loyal terhadap Soekarno. Akan tetapi secara diam-diam, ia menggunakan mereka untuk menghilangkan semua saingannya dalam tubuh Angkatan Darat, termasuk atasannya sendiri. Setelah mereka hilang, dengan ganas dan tegas Soeharto menghantam para perwira muda ini dari belakang. Bahkan ia dengan ganas menumpas PKI dan kemudian menjatuhkan Presiden Soekarno.

Patut diperhatikan pula perkembangan yang menunjukkan bahwa Soeharto memainkan peran penting dalam G30S dan langsung berkepentingan akan penumpasan PKI. Hal-hal di bawah mendukung kesimpulan ini:

1. Jenderal Supardjo menaati perintah Presiden Soekarno untuk menghentikan semua operasi militer pada tanggal 1 Oktober 1965. Sebaliknya Jenderal Soeharto malah melancarkan operasi militer yang berkepanjangan hingga terjadi penangkapan dan pembunuhan massal. Operasi militer terhadap PKI kemudian dilanjutkan hingga dikeluarkannya Supersemar yang ternyata tidak ditaati secara keseluruhan oleh Soeharto.

2. Bila kita perhatikan, yang menjadi ukuran hukuman para tokoh G30S yang diadili, berat-ringannya ukuran hukuman tidak tergantung pada tinggi-rendah kedudukan mereka di dalam PKI atau penting-tidaknya peranan dalam perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan Soeharto. Yang menjadi ukuran adalah isi pembelaan para tokoh tersebut di pengadilan.

> Bilamana pembelaan yang diungkapkan lebih banyak mengungkapkan self-kritik terhadap PKI, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan. Contohnya Tjoegito dan Rewang dijatuhi hukuman seumur hidup. Sedangkan mereka yang mengupas kepalsuan kekuasaan Soeharto, seperti Munir, Ruslan Widjajasastra, Iskandar Subekti, dan Mardjoko, dijatuhi hukuman mati. Pembelaan mereka dianggap bisa membakar semangat rakyat untuk memberontak.

Ada perkembangan menarik pada tahun 1970-an. Pada masa itu ternyata ada perwira-perwira Angkatan Darat yang tidak bisa menerima Jenderal Soeharto sebagai pimpinan negara. Beberapa perwira menengah yang mengenal Soeharto di penjara karena G30S, telah berkali-kali dipanggil oleh tim pemeriksa di penjara untuk menjelaskan tingkah laku Soeharto sebagai Panglima Diponegoro dan Panglima Mandala. Keterangan tentang peran Letnan Kolonel Ali Mutopo, anak buah Soeharto, dalam menyabot kebijakan Presiden Soekarno di masa Ganyang Malaysia pun dipertanyakan dalam pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Akan tetapi keterangan-keterangan para perwira yang dipenjara ini rupanya tidak pernah atau tidak bisa dipergunakan oleh musuh-musuh Soeharto untuk menjatuhkannya.

Menjelang Pemilihan Umum kedua pada tahun 1977, terjadi peristiwa Sawito. Sawito diajukan ke sidang pengadilan karena ia membongkar masalah penimbunan harta kekayaan oleh keluarga Jenderal Soeharto. Tuntutan terhadap Sawito adalah: ia mengadakan gerakan subversi dan hendak melaksanakan kudeta.

Sawito ternyata berhasil mengumpulkan tanda tangan para tokoh ternama, termasuk Mohamad Hatta, Jenderal Simatupang, Kardinal Darmojuwono—pimpinan Gereja Katolik, Hamka—tokoh Islam, dan Sukamto—mantan Kapolri, untuk menuntut perubahan kebijakan ekonomi.

Menurut mereka kebijakan pembangunan ekonomi ternyata memperhebat penderitaan rakyat dan memperlimpah kekayaan keluarga Soeharto. Mereka menuntut pula agar Soeharto menyerahkan kekuasaan politik ke Hatta. Naskah penyerahan kekuasaan itu mengikuti model Supersemar yang menjadi dasar pengambilalihan kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto pada tahun 1966.

Soeharto terlalu kuat untuk digoyahkan dan tetap menjadi Presiden Republik Indonesia. Sedangkan Sawito masuk penjara.

G30S adalah Urusan Internal Angkatan Darat

PKI menyatakan bahwa Peristiwa Gerakan 30 September itu adalah peristiwa urusan internal atau urusan "dalam" Angkatan Darat. PKI secara organisasi tidak terlibat.

Pernyataan ini ternyata menimbulkan reaksi pimpinan Angkatan Darat, terutama Jenderal Soeharto. Buku Putih diterbitkan untuk menyanggah tanggapan PKI bahwa G30S itu adalah urusan internal Angkatan Darat. Buku Putih tersebut diterbitkan untuk memperkuat tuduhan pemerintah bahwa G30S didalangi oleh PKI. Sejak itu Peristiwa G30S dinyatakan sebagai Peristiwa G30S/PKI.

Bila kita amati secara saksama, pengadilan para tokoh sipil yang berkaitan dengan Peristiwa G30S menunjukkan bahwa "dosa" yang terbesar para tokoh politik seperti pimpinan Partindo: Hadisumarto, Sekertaris Jenderal Partindo, Suharto Rebo dan Oei Tjoe Tat, wakil-wakil ketua Partindo, adalah berkisar pada pernyataan Partindo bahwa Peristiwa G30S adalah peristiwa yang berkaitan dengan urusan dalam Angkatan Darat.

Marilah kita segarkan ingatan kita tentang sejarah perkembangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebelum Peristiwa G30S dan sesudahnya, terutama dengan mengemukakan beberapa cuplikan peristiwa, sehingga TNI menjadi Angkatan Bersenjata RI seperti yang kita ketahui sekarang ini.

Tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Untuk menghadapi usaha Belanda menjadi penjajah lagi di wilayah Indonesia, terbentuklah banyak laskar bersenjata yang terdiri dari banyak pemuda bahkan anak-anak sekolah yang berusia belasan tahun. Dasar pembentukan laskar-laskar bersenjata ini adalah rasa tanggung jawab dan keinginan membela ibu pertiwi Indonesia.

Banyak laskar bersenjata ini berinduk kekuatan politik yang sedang saling berebutan memegang tampuk pimpinan negara. Oleh karena itu tidak aneh bilamana terjadi tindakan saling mendaulat atau penculikan dan perlucutan senjata dari satu kelompok kekuatan bersenjata atas kekuatan bersenjata lainnya.

Tentunya kekacauan yang timbul dari perselisihan kelompok-kelompok bersenjata ini sangat tidak menguntungkan pertahanan nasional dalam melawan Belanda.

Amir Sjarifoeddin, ketua Partai Sosialis sebagai Menteri Pertahanan di zaman revolusi sangat berjasa dalam membenahi struktur Angkatan Bersenjata yang mengurangi persengketaan bersenjata tergambar di atas. Dia lah yang menyempurnakan struktur Angkatan Bersenjata. Tentu ada kecenderungan pemerintah Soeharto untuk melupakan jasa-jasa Amir Sjarifoeddin, karena dia adalah seorang tokoh komunis Indonesia. Sudah lazim untuk pemerintah Soeharto memalsukan sejarah dengan "menggelapkan" jasa orang-orang komunis dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan kebebasan rakyat.

Oleh Amir Sjarifoeddin, laskar-laskar bersenjata yang berasal dari berbagai organisasi dan berbagai haluan politik yang berbeda-beda digabung dan dikoordinasi dalam sebuah kekuatan bersenjata yang dinamakan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) yang kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Akan tetapi ternyata sulit untuk menyatukan berbagai haluan ini dalam sebuah kekuatan bersenjata. Perpecahan di dalam tubuh TNI terus berkembang. Inilah persoalan dan perpecahan yang kemudian berkembang hingga Peristiwa G30S pada tahun 1965.

Ada beberapa kejadian yang berkelanjutan sebagai kejutan-kejutan nasional yang timbul karena urusan internal atau urusan dalam Angkatan Bersenjata:

Peristiwa 3 Juli 1946

Dalam sejarah, kita mengenal apa yang dinamakan Peristiwa 3 Juli 1946, di mana sebagian Angkatan Darat di bawah pimpinan seorang Panglima Resimen Yogyakarta, telah mendukung upaya penculikan Perdana Menteri Sjahrir dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin. Amir Sjarifoeddin berhasil lolos dari upaya penculikan itu.

Peristiwa penculikan ini mengakibatkan Jenderal Sudarsono dituntut dan dihukum. Demikian juga beberapa tokoh politik seperti Achmad Subardjo, Iwa Kusumasumantri, dan Mohamad Yamin yang oleh Mahkamah Agung dinyatakan bersalah melakukan makar.

Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak ada seorang terdakwa yang turut mendalangi peristiwa penculikan perdana menteri ketika itu dijatuhi hukuman seumur hidup, apalagi hukuman mati.

Peristiwa Madiun 1948

Peristiwa Madiun yang oleh sementara orang dikatakan sebagai "pemberontakan" PKI, sebenarnya adalah peristiwa intern atau "dalam" Angkatan Bersenjata. Peristiwa yang dimulai dengan penculikan seorang Panglima Divisi Solo—Kolonel Sutarto, berlarut

menjadi Peristiwa Madiun setelah ada pertemuan di belakang layar di Sarangan antara Perdana Menteri Mohamad Hatta dengan seorang tokoh OSS Amerika Serikat (Office of Strategic Services – Intel pada masa Perang Dunia II) yang bermaksud melenyapkan PKI dari bumi Indonesia.

PKI menyatakan Peristiwa Madiun sebagai Provokasi Madiun, karena menurutnya ini adalah sebuah kompromi politik yang dilakukan Hatta untuk mendapatkan penyelesaian dengan Belanda. Amerika Serikat dikatakan bersedia mendukung keinginan RI untuk mendesak Belanda menerima kemerdekaan Indonesia bilamana pemerintah RI mengganyang komunisme dan PKI.

Penelitian sejarah membuktikan, bahwa di kota Madiun ketika itu pada bulan September 1948, tidak ada bendera Merah-Putih yang diturunkan, seperti dikabarkan. Tidak ada pembentukan negara soviet di sana. Penjara-penjara juga tidak dipenuhi oleh para tawanan baru yang terdiri tentara yang dilucuti senjatanya dan ditangkap oleh pasukan bersenjata PKI.

Akan tetapi Hatta dengan tuduhan bahwa PKI telah melakukan pemberontakan di Madiun mengerahkan seluruh kekuatan Angkatan Bersenjata untuk menumpas "pemberontakan PKI" tersebut. Akibat penumpasan ganas ini, banyak tokoh PKI tewas, dibunuh tanpa proses pengadilan apa pun. Di antara yang dibunuh adalah Musso, Amir Sjarifoeddin, Maruto Darusman, Suripno, dan Oei Gee Hwat. Kecuali Musso yang tewas dalam pertempuran, para tokoh lainnya dibunuh atas perintah Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer. Hatta di kemudian hari pada tahun 1978 dalam buku *Bung Hatta Menjawab* menyatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan tanpa sepengetahuannya sebagai Perdana Menteri. Dan Hatta pun mengakui bahwa secara hukum, para tokoh PKI itu seharusnya diadili terlebih dahulu sebelum ditembak mati.

Dari keterangan Hatta pada tahun 1978, bisa disimpulkan bahwa ia ingin mencuci tangan atas kesalahan besar dalam membunuh para patriot sejati Indonesia.

Penanganan pemerintah dalam menyelesaikan Peristiwa 3 Juli 1946 terbatas pada para pelaku yang langsung terlibat, dalam pengertian, hanya puluhan orang yang ditahan dan yang diadili adalah orang-orang yang langsung terlibat.

Akan tetapi dalam hal Peristiwa Madiun, pemerintah Hatta menangkap dan menahan puluhan ribu orang dari berbagai organisasi massa, buruh dan tani. Mereka ditahan tanpa proses hukum apa pun, karena memang mereka tidak terlibat dan pemerintah tidak memiliki landasan hukum untuk mengadili mereka.

Dan sebagian terbesar mereka menjadi "bebas" ketika tentara Belanda melaksanakan agresi ke-2 pada tahun 1948. Amerika Serikat ternyata tidak berhasil memaksa Belanda untuk mengakui RI, sekalipun kabinet Hatta telah membuktikan kemauannya membasmi PKI dari bumi Indonesia.

Yang menyedihkan adalah banyak dari mereka yang ditahan pemerintah Hatta, seperti di Dampit, dibunuh atas instruksi pemerintah. Mereka yang dipenjarakan harus dibunuh sebelum tentara Belanda masuk. Lagi-lagi, mereka dibunuh tanpa proses hukum apa pun.

Sejarah menunjukkan bahwa pada umumnya para tahanan politik yang bebas segera menyusun kekuatan bersenjata untuk melanjutkan perjuangan melawan agresi Belanda. Para pejuang yang dituduh sebagai pengikut PKI ini dan yang harus meringkuk dalam penjara dengan tuduhan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia, justru menunjukkan keberaniannya melawan Belanda tanpa kompromi dan tidak pernah menyerah terhadap segala rintangan yang dihadapi.

Keberanian dan kegigihan mereka dalam membela Republik Indonesia mendorong Panglima Besar RI Jenderal Sudirman untuk merehabilitasi orang-orang yang ditahan oleh pemerintah Hatta.

Peristiwa 17 Oktober 1952

Sebuah peristiwa lain yang terjadi karena adanya persoalan intern Angkatan Darat.

Peristiwa ini terjadi karena pimpinan Angkatan Darat berusaha membangun Angkatan Darat sebagai angkatan yang jauh lebih profesional. Jumlah prajurit ingin dikurangi. Disiplin dan kualitas prajurit ingin dipertinggi.

Pada waktu yang bersamaan telah berlangsung perdebatan sengit di parlemen tentang keterlibatan Angkatan Darat dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah dan keterlibatan para politikus sipil dalam rasionalisasi Angkatan Darat. Para politikus sipil menyatakan bahwa parlemen adalah perwakilan rakyat yang paling berhak menentukan berbagai kebijakan, termasuk struktur organisasi Angkatan Bersenjata. Bukan senapan yang berperan.

Pimpinan Angkatan Darat tidak bisa menerima turut campurnya parlemen dalam urusan Angkatan Darat.

Untuk menunjukkan ketidakpuasan ini, Angkatan Darat mengadakan demonstrasi pada tanggal 17 Oktober 1952 dengan mengarahkan meriam ke gedung parlemen yang sedang bersidang dan Istana Merdeka. Pimpinan Angkatan Darat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen.

Presiden Soekarno menolak tuntutan pimpinan Angkatan Darat. Sebagai respons, ia melakukan *retooling* dalam tubuh Angkatan Darat dari pusat sampai ke daerah. Banyak perwira Angkatan Darat, termasuk Kolonel Nasution yang pada waktu itu menjadi KSAD, diturunkan dari posisi-posisi yang dijabatnya.

Banyak perwira Angkatan Darat yang mengalami proses *retooling* ini merasa dikhianati oleh Nasution sehingga ia kehilangan dukungan setia dari banyak perwira bawahannya.

Peristiwa Bambang Utoyo 27 Juni 1955

Peristiwa ini berkaitan dengan upaya para perwira Angkatan Darat untuk menggagalkan pelantikan Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD pada bulan Juni 1955.

Pelantikan itu akhirnya tetap berlangsung. Yang memainkan musik dalam acara pelantikan adalah Korps Musik Pemadam Kebakaran, karena Korps Musik Angkatan Darat tidak datang, sebagai tanda pemboikotan.

Pemboikotan itu terjadi karena Kolonel Bambang Utoyo dianggap pengikut setia PNI, dan PNI lah yang telah memaksakan pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD. Pertentangan antara PNI dan Angkatan Darat ini ternyata menyebabkan jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama.

Pemberontakan PRRI–Permesta (1956, 1958, 1961)

Tidak terselesaikannya berbagai masalah intern Angkatan Darat menyebabkan sejak Angkatan Darat berdiri, kontradiksi sengit antara para perwira tetap berlangsung. Pembangkangan terhadap perintah atasan sering terjadi.

Kontradiksi menjadi lebih runcing ketika para panglima daerah diberi keleluasaan untuk mencari dana dengan cara melakukan perdagangan dengan luar negeri. Terbentuklah berbagai dewan, antara lain Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda. Ini menjadi basis pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintahan

Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta) yang dipimpin oleh Masyumi dan PSI.

Pada tahun 1958 pemerintah bersikap tegas. Kekuatan bersenjata pemberontak juga ditindas dengan operasi militer. Tokoh-tokoh Masyumi dan PSI yang mendirikan pemerintah tandingan ditangkap.

Seperti diketahui, keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung pemberontakan ini terungkap setelah Alan Pope, penerbang pesawat Amerika Serikat ditembak jatuh di atas kota Ambon dan ditangkap. Taiwan ternyata menjadi pangkalan pesawat-pesawat Amerika Serikat yang mendukung pemberontakan PRRI-Permesta tersebut. Berpeti-peti perlengkapan bersenjata yang berasal dari Amerika Serikat untuk kelompok pemberontak di Sumatra didrop oleh pesawat-pesawat yang berpangkalan di Taiwan.

Penumpasan pemberontakan itu berupa penangkapan orang-orang yang langsung terlibat dalam aksi pemberontakan. Banyak tokoh dan anggota Masyumi dan PSI yang tidak terlibat dalam pemberontakan tidak dikejar, ditangkap atau ditahan. Bahkan banyak tokoh PSI dan Masyumi yang anggota DPR hasil Pemilihan Umum 1955 tetap bebas dan tetap menghadiri rapat-rapat DPR di Jakarta.

PSI dan Masyumi baru dinyatakan sebagai partai-partai terlarang pada awal tahun 1960, karena tidak bersedia mendisiplin para anggotanya yang aktif terlibat dalam pemberontakan PRRI-Permesta dan kemudian bisa dibuktikan bahwa secara organisasi kedua partai ini ikut memimpin pemberontakan PRRI-Permesta.

Akan tetapi Presiden Soekarno mengeluarkan amnesti. Para anggota maupun tokoh-tokoh kedua partai tersebut dibebaskan. Hanya mereka yang menantikan proses pengadilan tetap ditahan. Jumlah tahanan politik di masa itu kemudian bertambah dengan penahanan tokoh-tokoh PSI yang dianggap terlibat dalam upaya membunuh Presiden Soekarno, termasuk Sutan Sjahrir, Subadio, Anak Agung Gde, dan Sultan Hamid.

Perlu diperhatikan bahwa tindakan tegas Soekarno terhadap pemberontakan PRRI/Permesta tidak melibatkan penangkapan massal, apalagi pembunuhan massal. Hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yang jelas terbukti mendukung pemberontakan PRRI-Permesta pun tidak terganggu.

Gerakan 30 September 1965

Berlarutnya kontradiksi tajam yang tidak terselesaikan dalam tubuh Angkatan Darat yang berdasarkan perbedaan haluan politik, perebutan fasilitas dagang, dan perebutan kekuasaan akhirnya meletuskan sebuah peristiwa yang dinamakan Gerakan 30 September. Kontradiksi antara perwira menengah dan atas meruncing. Ini memudahkan pengaturan politik untuk mengubah kontradiksi menjadi sebuah aksi militer. Terjadi penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal senior Angkatan Darat yang dilakukan oleh perwira-perwira muda.

Pemerintah yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto menuduh PKI sebagai dalang G30S dan dengan dalih ini, rezim militer menumpas PKI, melakukan penangkapan dan pembunuhan massal. Padahal tidak terdapat bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

Tidak ada seorang tokoh utama PKI yang tercantum dalam Dewan Revolusi yang dibentuk oleh G30S. Tidak ada bukti bahwa PKI secara organisasi memimpin atau mendalangi G30S. Tidak ada bukti jelas yang menghubungkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan G30S, apalagi sebagai "cukong"-nya. Tuduhan ini kemudian meningkat hingga dibekukannya hubungan diplomatik RRT dan RI pada tahun 1967.

Tanpa bukti-bukti yang seharusnya dikeluarkan dalam proses hukum, pemerintah militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto

melaksanakan kebijakan membasmi PKI hingga ke akar-akarnya dan melenyapkan kehadiran dan pengaruh RRT di Indonesia. Kebijakan ini tentunya berkaitan dengan dorongan Amerika Serikat dan pertikaian kedua *superpower*—Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Kesimpulan ini didukung oleh beberapa fakta sebagai berikut:

1. Amerika Serikat jelas berkepentingan membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Upaya ini melibatkan ditingkat-kannya pertempuran di Vietnam dan menghancurkan PKI di Indonesia dan menghilangkan pengaruh RRT di Indonesia.

2. Pertentangan yang semakin runcing antara Peking dan Moskow mendorong Moskow untuk menyingkirkan tokoh-tokoh PKI yang dianggap dekat dengan Peking. Moskow juga berkepentingan membendung pengaruh RRT di Indonesia.

3. Untuk melaksanakan kebijakan membendung komunisme di Indonesia, Amerika Serikat mengirim Marshall Green sebagai duta besar di Indonesia. Seperti diketahui, Marshall Green adalah seorang spesialis yang mampu membangkitkan massa terutama mahasiswa demi keuntungan politik Amerika Serikat seperti yang ia lakukan di Korea Selatan dan berhasil menjatuhkan Perdana Menteri Syng Man Rhee.

4. Sebelum G30S, CIA giat menggarap mahasiswa-mahasiswa Indonesia di berbagai kampus universitas di Indonesia melalui tokoh-tokoh PSI seperti Sudjatmoko dan Sumitro. Pengacara Amerika Serikat di New York yang menjadi alat CIA, Robert Delson, ikut mengkoordinasi upaya penggarapan ini. Para tokoh yang digarap mengikuti *briefing* tentang ekonomi dan politik Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun oleh MIT dengan dana CIA. Pembiayaan berbagai kegiatan *training* ini

dibiayai pula oleh Ford Foundation melalui Ford International Training Program. Direkturnya, John Howard, pernah menyatakan bahwa keberadaan *training program* ini dianggap penting oleh Soekarno sehingga ancaman untuk menghentikannya cukup untuk mengubah beberapa kebijakan Soekarno.

5. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada tahun 1967 pernah menyatakan bahwa keberhasilan Amerika Serikat menjadikan Indonesia salah satu pendukung yang mengikuti berbagai kebijakan Amerika Serikat merupakan *"the greatest prize in Southeast Asia area*!"

6. Setelah PKI hancur dan Soekarno jatuh, sebagian besar kekayaan alam Indonesia terutama sumber minyak dan bahan-bahan pertambangan lainnya jatuh ke tangan dan dikuasai oleh para perusahaan raksasa Amerika Serikat.

Selain indikasi global tersebut di atas, perlu kita perhatikan pula beberapa indikasi yang berkaitan langsung dengan urusan intern, urusan dalam Angkatan Darat, antara lain sebagai berikut:

1. Politik Ganyang Malaysia

   Pada Tahun 1964, ketika Presiden Soekarno melontarkan politik Ganyang Malaysia dan membentuk Koga (Komando Siaga) di bawah pimpinan Omar Dhani, pihak pimpinan Angkatan Darat tidak menyetujui sekalipun tidak secara terbuka menentangnya.

   Tugas Koga dibatasi pada pengaturan persiapan siaga pertahanan bilamana ada serangan Inggris dan Malaysia. Kemudian Koga dikembangkan menjadi Kolaga (Komando Mandala Siaga) untuk menjadi komando yang dapat mengerahkan seluruh kekuatan bersenjata pada saat-saat tertentu.

Kolaga memungkinkan dilakukannya pendaratan dan penyerbuan terbatas di wilayah Malaysia. Kemampuan ini pun ditentang oleh pimpinan Angkatan Darat.

Adanya pertentangan di dalam Angkatan Darat ternyata diketahui oleh Malaysia. Hal ini diketahuinya dari anak angkat Sutan Sjahrir yang bekerja di Kuala Lumpur, di kementerian luar negeri Malaysia. Ia menyingkir ke Malaysia setelah pemberontakan PRRI-Permesta dibasmi oleh pemerintah Indonesia. Ternyata ia secara rahasia berhubungan dengan KSAD Ahmad Yani dengan tujuan mencegah terjadinya perang terbuka antara Indonesia dan Malaysia.

Jenderal Yani termasuk pimpinan Angkatan Darat yang menentang perang terbuka antara Indonesia dan Malaysia. Semasa konfrontasi dengan Malaysia itulah Jenderal Yani dan Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, mengirim Letnan Kolonel Ali Murtopo ke Kuala Lumpur untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan rahasia dengan para pemimpin pemerintah Malaysia.

Timbul pertanyaan, kalau hubungan rahasia antara Ali Murtopo dengan pimpinan Malaysia terjalin ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, apakah ini tidak melanggar disiplin militer? Pimpinan Angkatan Darat terlihat membangkang sikap politik Soekarno terhadap Malaysia, padahal kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia yang telah disahkan dan didukung oleh DPR-MPRS, yang berdasarkan UUD 1945, adalah pelaksana kedaulatan rakyat.

Pada masa konfrontasi banyak orang mengetahui dan sekaligus heran karena setiap kali Indonesia melakukan pendaratan dan penyerbuan kecil-kecilan, selalu gagal. Pasukan yang didrop selalu tertangkap. Aksi militer Indonesia selalu diketahui lebih dahulu oleh Malaysia.

Seorang komandan peleton penyerbuan ke Malaysia yang pada tahun 1970 ditangkap karena tuduhan terlibat G30S, menceritakan pengalamannya ketika memimpin peletonnya dari Kalimantan Barat menyerbu masuk daerah Malaysia di Serawak. Begitu peletonnya masuk di daerah wilayah Malaysia, mereka dikepung oleh kekuatan militer Malaysia yang jauh lebih besar jumlahnya. Perwira Inggris yang memimpin pengepungan itu ternyata memiliki daftar pasukan penyerbu, lengkap dengan nama dan foto. Sebuah contoh kebocoran yang merugikan aksi Ganyang Malaysia.

Peristiwa semacam ini akhirnya sampai juga ke telinga Presiden Soekarno, sehingga ia mencanangkan keberadaan kelompok jenderal yang tidak loyal terhadapnya.

Pada bulan April 1965, Presiden Soekarno mengutus Jenderal Sukendro ke Malaysia untuk menjajaki kemungkinan diadakannya pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Malaysia. Upaya ini tidak berhasil. Malaysia sudah mengetahui bahwa ada pertentangan intern dalam Angkatan Darat dan pimpinan Angkatan Darat tidak menginginkan perang terbuka. Politik Ganyang Malaysia dianggap pihak Malaysia tidak akan berjalan baik karena ada hubungan rahasia yang membocorkan semua rencana penyerbuan dan pendaratan pasukan Indonesia di wilayah Malaysia.

2. Pembangkangan pimpinan Angkatan Darat

Pembangkangan sementara jenderal terhadap garis politik dan kebijakan Presiden Soekarno semakin menjadi pada tahun 1964—65.

Sikap membangkang ini semakin diketahui pula oleh para perwira menengah muda, terutama mereka yang berasal dari Divisi Diponegoro di Jawa Tengah. Mereka menyatakan setia

pada Presiden Soekarno dan sepenuhnya mendukung kebijakan politik Bung Karno.

Rupanya kesetiaan yang ditunjukkan ini menyebabkan Letnan Kolonel Untung, Komandan Intel Divisi Diponegoro dipindah ke Jakarta untuk menjadi Komandan Batalyon I Cakrabirawa. Ternyata cukup banyak tentara di Cakrabirawa yang berasal dari Divisi Diponegoro. Oleh karena itu terjalin hubungan khusus antara Diponegoro dan Cakrabirawa.

3. Kehadiran militer dalam dunia dagang

Setelah pemerintah mengundangkan Keadaan Darurat (SOB) pada tahun 1957, dilaksanakanlah politik ambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Di masa ini, kekuatan militer dengan sendirinya berkembang. Dan banyak jenderal Angkatan Darat yang menjadi pengusaha, memimpin perusahaan-perusahaan yang diambil alih dari tangan Belanda. Dengan demikian mereka memainkan peranan dalam menentukan perkembangan ekonomi Indonesia.

Pada zaman Ganyang Inggris—Malaysia, perwira-perwira tinggi Angkatan Darat turut menjadi pimpinan perusahaan-perusahaan Inggris yang diambil alih.

Tumbuhlah sekelompok pengusaha yang sekaligus perwira tinggi. Mereka ini dinyatakan sebagai kapitalis-birokrat (kabir), yaitu para penguasa militer yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Para perwira menengah dan muda tidak puas dengan perkembangan ini. Para perwira tinggi ini dianggap, karena kepentingan ekonominya, tidak loyal terhadap Presiden Soekarno. Dan mereka inilah yang dijadikan sandaran Sjam untuk bergerak menindak para perwira tinggi Angkatan Darat dalam Gerakan 30 September. PKI pada waktu itu gigih melawan kapitalis-

birokrat (kabir) dan korupsi yang merajalela di dalam tubuh Angkatan Darat terutama di kalangan perwira tingginya.

Dengan sendirinya, kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI dan semakin besar kontradiksi Indonesia dengan Amerika Serikat tidak didukung oleh para perwira tinggi yang menjadi kapitalis birokrat ini. Apalagi setelah garis politik Indonesia menuju ke kiri dengan poros Pyongyang–Peking–Hanoi–PhnomPenh–Jakarta yang bersifat anti Amerika Serikat.

Wajarlah bilamana ada upaya sementara jenderal untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Permusuhan antara pimpinan PKI dan kelompok jenderal pengusaha ini juga dengan sendirinya terbentuk dan berkembang.

Pada tahun 1965 Presiden Soekarno menggagas diadakannya Conefo (*Conference of the New Emerging Forces*)—sebagai kekuatan negara-negara yang sedang berkembang melawan dua blok kekuatan—blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet. RRT, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Indonesia, menjadi pendiri utama. Walaupun konferensi ini belum sempat diadakan, gagasan yang akan melibatkan RRT tidak disenangi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mudah dimengerti mengapa kedua kekuatan besar ini siap menyokong upaya para jenderal Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI, menghilangkan pengaruh RRT di Indonesia dan menggulingkan Soekarno.

G30S merupakan sarana ampuh. Oleh karena itu rezim militer yang dipimpin oleh Soeharto menyatakan G30S didalangi oleh PKI dan RRT adalah "cukong"-nya.

Sesungguhnya Siapa Mengkudeta Siapa?

PERS Barat pada umumnya menyebut Gerakan 30 September sebagai *the abortive coup* atau kudeta yang gagal.

Akan tetapi para tokoh yang dinyatakan terlibat dalam G30S dan yang diajukan ke sidang pengadilan selalu mengemukakan bahwa mereka melakukan gerakan itu justru untuk mencegah kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal.

Nyono dan Sudisman, tokoh-tokoh pimpinan PKI yang diadili menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi akan adanya rencana kudeta di sekitar perayaan Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober 1965 dan dibentuknya Dewan Jenderal yang akan memimpin tindakan kudeta ini. Menurut apa yang mereka ketahui, beberapa batalyon dari berbagai provinsi dibawa ke Jakarta dengan alasan untuk memeriahkan perayaan tersebut, tetapi maksud sesungguhnya adalah mendukung kudeta militer. Oleh karena itu pimpinan PKI mempercayai ketuanya, D.N. Aidit untuk melakukan tindakan yang mencegah kudeta, menyelamatkan Soekarno dan RI. Kedua tokoh ini menyatakan tidak mengetahui secara mendetail apa yang direncanakan oleh Aidit.

Pengadilan-pengadilan selanjutnya dan pembicaraan dengan para tahanan di penjara menunjukkan bahwa Aidit menjalankan rencana ini dengan bantuan Biro Khusus yang kegiatannya, bahkan

kehadirannya, tidak diketahui banyak orang. Biro Khusus dipimpin langsung oleh Aidit dengan 3 wakil, Sjam, Supono, dan Subono.

Biro Khusus dibentuk sebagai biro intel lapisan PKI. Salah satu tugas utamanya adalah mengikuti sepak terjang para anggota PKI yang membangkang. Lain tugas utamanya adalah membina dukungan sementara pimpinan Angkatan Bersenjata yang bersimpati terhadap gerakan PKI.

Sebagai tahanan politik setelah Peristiwa G30S, saya banyak berkesempatan berbicara dengan para anggota CC dan Politbiro PKI yang sama-sama meringkuk di penjara. Dari mereka diketahui bahwa Biro Khusus tumbuh sebagai kekuatan di dalam partai yang kekuasaan, pengetahuan, dan perancangan pelaksanaan politiknya melebihi CC dan Politbiro.

Seperti yang dituturkan di atas, rencana *counter coup* ternyata dibuat oleh Biro Khusus di bawah pimpinan Sjam. Pelaksanaannya mengikutsertakan latihan-latihan militer yang dilakukan oleh para anggota Pemuda Rakyat dan para pelajar di daerah Halim, pangkalan Angkatan Udara. Pada waktu itu, dalam rangka gerakan mengganyang Malaysia dan mendukung Gerakan Pembebasan Rakyat Serawak, latihan-latihan militer dilakukan.

Mereka yang sudah dilatih, pada tanggal 1 Oktober 1965, disebar ke berbagai benteng pertahanan di Jakarta Raya. Walaupun banyak pimpinan PKI, termasuk Nyono, terlibat dalam koordinasi dan mobilisasi relawan yang dilatih ini, mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rencana *counter coup* yang disiapkan Biro Khusus. Aidit tidak pernah mendiskusikannya dengan para anggota Politbiro tentang rencana konkret G30S.

Jadi menurut para tokoh yang diadili, G30S tidak pernah merencanakan kudeta dan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Mereka justru hendak melindungi dan mendukung pimpinan Presiden Soekarno, dengan menangkap para jenderal yang dianggap melakukan sabotase atas berbagai kebijakan Bung Karno.

Letkol Untung
di Mahmilub (1966)

Soebandrio di
Mahmilub (1966)

Fakta menunjukkan bahwa setelah Jenderal Soeharto memaksa Presiden Soekarno menandatangani Supersemar pada bulan Maret 1966, ia bukan saja menumpas G30S, akan tetapi menghancurkan PKI dan semua organisasi yang setia mendukung Soekarno. Banyak pendukung Soekarno ditangkap dan ditahan. Oleh Soeharto, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diputar 180 derajat. Dan pada akhirnya, ia menjatuhkan Soekarno bahkan menjadikannya seorang tahanan rumah hingga akhir hayatnya pada tahun 1970.

Sejarah akan menunjukkan bahwa G30S yang dikerahkan untuk mencegah kudeta yang akan dilakukan oleh para jenderal yang tidak loyal terhadap Soekarno, gagal total. Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latief, dan Jenderal Supardjo sebagai pimpinan G30S, tegas menunjukkan bahwa mereka setia terhadap Presiden Soekarno. Mereka segera menghentikan kegiatan militer ketika Presiden Soekarno memerintahkannya untuk berhenti.

Sedangkan para jenderal yang tidak loyal, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto malah berhasil merebut kekuasaan Soekarno dan kemudian menjalankan kebijakan politik yang bertentangan dengan apa yang diinginkan Presiden Soekarno, kebijakan yang didukung oleh blok Amerika Serikat.

Mengikuti logika di atas, G30S bisa dikatakan sebagai gerakan membela pemerintahan sah yang gagal. Sedangkan penindasan terhadapnya, yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto, lebih tepat dikatakan sebagai kudeta yang berhasil. Kudeta yang akhirnya menjatuhkan pemerintahan sah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kudeta yang mengubah secara radikal kebijakan politik haluan negara, kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan kebijakan politik luar negeri yang sudah ditetapkan oleh Presiden Soekarno.

Brigjen Supardjo

Sudisman

Kol. Latief di Mahmilti (1978)

Kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto telah direncanakan dengan teliti dan sistematik. Kegiatan kudeta bertahap ini bisa kita saksikan dari berbagai kejadian sebagai berikut:

1. Pemberitaan tentang penculikan dan pembunuhan jenderal di daerah yang disebut Lubang Buaya oleh kelompok yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dijadikan dasar pembasmian PKI dan simpatisannya. Sengaja dibuat cerita-cerita bohong berupa fitnah untuk menghasut rakyat dan membangkitkan dendam kesumat terhadap PKI. Diceritakan bahwa telah terjadi penyiksaan fisik yang kejam sebelum para jenderal yang diculik itu dibunuh, termasuk pencungkilan biji mata dan penyayatan kemaluan dengan *gillette* oleh para anggota Gerwani. Seperti diketahui cerita ini dibantah oleh para ahli yang memeriksa jenazah para jenderal tersebut. Tidak ada tanda penyiksaan. Tidak mungkin pencungkilan biji mata dan pemotongan kemaluan bisa dilakukan dengan pisau mengetap getah karet dan *gillette* seperti yang diberitakan.

2. Para pemuda, pelajar, dan mahasiswa dihasut untuk bergerak. Dibentuklah kesatuan-kesatuan aksi dengan tujuan melakukan pembalasan dendam terhadap kekejaman PKI yang telah menculik, menyiksa, dan membunuh keenam jenderal Angkatan Darat. Di antaranya: KAMI—Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI—Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, dan KASI—Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia.

   Kesatuan-kesatuan aksi ini didukung dan dilindungi oleh kekuatan militer, terutama Kostrad, untuk membakar kebencian dan dendam rakyat terhadap PKI melalui berbagai demonstrasi di jalan-jalan dan kegiatan penyerbuan dan pengrusakan gedung-gedung milik PKI dan ormasnya. Kemudian

dilanjutkan dengan pengrusakan toko-toko milik Tionghoa, hingga pembakaran gedung Kedutaan Besar Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok dinyatakan sebagai cukong G30S dan para demonstran menuntut pemutusan hubungan RRT—RI, yang secara resmi dibekukan oleh pemerintah RI pada tahun 1967.

Demonstrasi yang dilancarkan oleh kesatuan-kesatuan aksi ini katanya dibiayai oleh dana-dana luar termasuk CIA yang disalurkan melalui Kostrad.

3. Jenderal Soeharto berhasil mencapai kompromi setelah Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Pranoto sebagai pejabat KSAD. Kompromonya adalah ia menjadi Panglima Kopkamtib—Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Anehnya, sebagai Panglima Kopkamtib, Jenderal Soeharto malah menciptakan suasana yang sangat tidak tertib dan sangat tidak aman. Massa dikerahkan untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi dan pengrusakan. Massa dengan dukungan militer dikerahkan untuk melakukan pembunuhan massal. Jutaan orang yang tidak bersalah dibunuh dengan kejam. Ratusan ribu orang yang tidak tahu-menahu tentang G30S ditangkap dan ditahan. Para pendukung Soekarno dikejar dan dipersekusi.

4. Jenderal Pranoto kemudian ditahan dan mendekam di penjara bertahun-tahun. Kedudukan Soeharto sebagai KSAD dan panglima Kopkamtib membuat Soeharto menjadi lebih ganas dalam mendorong para pemuda dan mahasiswa berdemonstrasi, dalam memperhebat upaya penangkapan dan pembunuhan massal di seluruh Indonesia.

5. Gagalnya Soeharto dalam menciptakan ketertiban dan keamanan tidak menyebabkannya diturunkan pangkatnya. Ia bahkan mendesak Presiden Soekarno untuk menandatangani Supersemar, Surat Perintah Sebelas Maret, pada tanggal 11 Maret 1966. Penandatanganan Supersemar merupakan tindakan bunuh diri Presiden Soekarno. Dengan dalih Supersemar, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan riil pemerintah. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia dengan resmi membubarkan PKI. Ini adalah realisasi tuntutan yang didorong Soeharto melalui berbagai kesatuan dan massa yang tidak pernah disetujui oleh Presiden Soekarno.

6. Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan surat perintah menangkapi 15 menteri yang dianggap pendukung setia Bung Karno. Ia kemudian membersihkan DPR dan MPRS. Orang-orang yang dianggap loyal kepada Soekarno dipecat dari kedua lembaga ini. Mereka diganti oleh orang-orang yang mendukung Soeharto.

7. Setelah Chaerul Saleh, Ketua MPRS meninggal dunia dalam tahanan Kostrad, Jenderal Nasution diangkat menggantikannya. Soeharto kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Kekuasaan yang meningkat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk melanjutkan pengejaran, penangkapan, dan pembunuhan massal. Demonstrasi-demonstrasi juga dikerahkan untuk secara terang-terangan menolak ajaran Bung Karno dan menjadi lebih tegas anti-Soekarno.

8. MPRS kemudian meresmikan beberapa keputusan yang mengurangi secara radikal kekuatan politik Soekarno, di antaranya:

a. Membatalkan penetapan yang menentukan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup.
b. Mewajibkan Presiden Soekarno menyerahkan pekerjaan sehari-hari sebagai kepala negara kepada Jenderal Soeharto yang dikukuhkan sebagai Pejabat Presiden.

9. Setelah berhasil menjadi Pejabat Presiden, Jenderal Soeharto mulai mendorong dijadikannya Presiden Soekarno seorang terdakwa dengan tuduhan ia terlibat G30S. Presiden Soekarno kemudian dijadikan seorang tahanan rumah tanpa perawatan kesehatan yang baik, sehingga ia meninggal karena sakit ginjal tanpa perawatan yang layak pada tahun 1970.

Dengan demikian jelas bahwa yang melakukan kudeta politik adalah Jenderal Soeharto dan para pendukungnya. Bukan G30S. Bukan PKI.

Jenderal Soeharto tentunya didukung oleh kekuatan anti-Soekarno di luar, termasuk blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan menghilangkan pengaruh RRT di Indonesia. Mereka menginginkan pengaruh komunisme lenyap dari Indonesia. Pernyataan Presiden Nixon pada tahun 1967 yang menyatakan bahwa kemenangan Jenderal Soeharto atas PKI dan simpatisannya sebagai *the greatest prize in the Southeast Asian area* mendukung kesimpulan ini.

Pengadilan-pengadilan sandiwara yang menghadirkan para tokoh yang tidak tahu-menahu tentang keterlibatan PKI dalam G30S dilaksanakan untuk memperkuat tuduhan pemerintah militer Soeharto bahwa PKI terlibat, sehingga Soeharto dengan mudah menyatakan bahwa PKI harus dibasmi hingga akar-akarnya.

PKI sebagai organisasi tidak terlibat

Sidang-sidang pengadilan pemeriksaan perkara G30S tidak pernah bisa membuktikan bahwa PKI sebagai organisasi terlibat dan mendalangi G30S. Terlibatnya sementara tokoh dan anggota PKI, tidaklah berarti PKI secara organisasi terlibat G30S.

Kehadiran D.N. Aidit di Bandara Halim pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965 tidak pula berarti bahwa PKI secara organisasi terlibat G30S.

Anggaran Dasar PKI menentukan, bahwa seorang ketua tidak dapat mengambil sebuah keputusan dan melakukan tindakan apa pun atas nama PKI tanpa adanya keputusan Kongres PKI atau rapat Sidang Pleno CC atau paling tidak rapat Politbiro. Berbagai pengadilan yang disinggung membuktikan bahwa Politbiro PKI tidak pernah mengambil keputusan yang memberi wewenang kepada D.N. Aidit untuk memimpin atau menyelenggarakan G30S.

Biro Khusus yang diketuai oleh Sjam Kamaruzaman memang dibentuk atas keputusan Sidang Pleno CC. Ketua PKI diberi wewenang untuk membentuk dan menyusun Biro Khusus dengan tugas menjadi penghubung antara PKI dengan perwira-perwira Angkatan Bersenjata. Para perwira tersebut digarap untuk menjadi simpatisan PKI.

Jelas pula bahwa Biro Khusus tidak memiliki mandat untuk mengambil keputusan dan bertindak atas nama PKI, kecuali ada keputusan Kongres/CC PKI atau sedikitnya sidang Politbiro.

Dengan demikian jelas bahwa pemerintah militer Soeharto, secara hukum, tidak bisa memperlakukan tindak-tanduk Aidit sebagai Ketua PKI atau Sjam sebagai pimpinan Biro Khusus, sebagai tindak-tanduk PKI secara organisasi. Pemerintah RI seharusnya memperlakukan pimpinan PKI sebagai pimpinan kolektif, tidak sebagai pimpinan perorangan.

Ada contoh yang memperkuat argumentasi ini, yaitu peristiwa 26 Mei 1962 yang berkaitan dengan pernyataan PKI bahwa Angkatan Darat telah mengebiri Dekon (Deklarasi Ekonomi). Jenderal Sukendro yang ditugasi untuk menuntut PKI telah meminta pertanggungjawaban seluruh anggota Dewan Harian Politbiro CC PKI, yaitu Aidit, Lukman, Njoto, Sakirman, dan Sudisman.

Berbagai catatan sekitar Peristiwa G30S lebih-lebih tidak mendukung tuduhan pemerintah Soeharto bahwa PKI terlibat dalam G30S, apalagi sebagai dalangnya. Tidak ada alasan untuk PKI secara organisasi mendalangi atau terlibat dalam G30S. Kesimpulan ini bisa diperkuat oleh beberapa hal di bawah:

1. Keadaan dan situasi politik nasional dan internasional pada tahun 1965 sangat menguntungkan posisi PKI. *Prestige* PKI sedang berkembang dengan pesat di Indonesia. Conefo sedang dirancangkan untuk berlangsung. KIAPMA—Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing sedang berlangsung menjelang Peristiwa G30S.

2. Persatuan Nasakom berlangsung baik dan menguntungkan PKI. Nasakomisasi sudah mencapai tingkat pemerintah tertinggi. Bahkan Presiden Soekarno sudah memutuskan untuk mengangkat Njoto sebagai Menteri Luar Negeri untuk mempercepat diselenggarakannya Conefo.

3. Penguasa militer tidak berani mengajukan tokoh-tokoh PKI—Aidit, Lukman, dan Njoto—sebagai orang-orang yang menurut Anggaran Dasar PKI bertanggung jawab atas tindakan PKI, ke sidang pengadilan. Jelas kehadiran mereka di pengadilan akan menyanggah tuduhan keterlibatan PKI secara organisasi dalam G30S. Sjam dan para tokoh PKI lainnya yang diadili sebenarnya secara hukum tidak memiliki hak untuk bertanggung jawab.

Keterlibatan mereka dalam G30S tidak bisa dijadikan bukti bahwa PKI secara organisasi terlibat.

Kenyataan di bawah lebih memperkuat argumentasi bahwa PKI secara organisasi tidak terlibat G30S:

1. Bilamana PKI sebagai organisasi memimpin G30S, tentunya seluruh aparat PKI secara organisasi disiapkan secara baik. Kenyataannya tidak demikian. Contoh yang paling mencolok adalah ketika Aidit tiba di Bandara Maguwo Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 1965. Tidak ada orang yang menjemputnya. Dan ketika ia mencari rumah tokoh PKI Yogyakarta di tengah malam, ia salah masuk ke rumah tokoh NU (Nahdlatul Ulama) Yogyakarta, sehingga kehadirannya di Yogyakarta diketahui orang. Organisasi PKI di Jawa Tengah atau di Yogyakarta, tidak tahu-menahu atas kehadiran Aidit di Yogyakarta.

2. Seluruh aparat PKI ternyata tidak disiapkan. Para tokoh PKI baik di Jakarta maupun di daerah tidak tahu-menahu tentang adanya G30S. Dengan demikian, Aidit sebagai Ketua PKI tidak bisa mengerahkan massa PKI untuk melawan tindakan penindasan militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Ini tentunya bertentangan dengan ajaran Marx dan Lenin yang mencanangkan pesan bahwa seorang pemimpin partai komunis tidak bisa bermain-main dengan gerakan bersenjata dan bahwa bilamana gerakan itu dimulai, ia harus dilanjutkan hingga kemenangan dicapai.

3. Kehadiran Aidit di Jawa Tengah sejak 1 Oktober 1965 tidak membangkitkan perlawanan dari PKI terhadap penumpasan kejam yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto. Tidak ada

perlawanan, karena memang Aidit tidak mempersiapkan organisasi PKI untuk melawan.

4. Para tokoh PKI yang ditahan dan diperiksa sehubungan dengan perjuangan bersenjata Blitar Selatan menyatakan bahwa persiapan perjuangan bersenjata baru dilakukan setelah dikeluarkannya Kritik Oto Kritik (KOK) Politbiro CC PKI pada tahun 1966. Sebelum itu tidak ada persiapan perjuangan bersenjata. Tidak ada upaya melakukan pemberontakan bersenjata. Gerakan bersenjata di Blitar Selatan ternyata dilakukan secara terburu-buru dan tidak dipersiapkan dengan baik sehingga dalam waktu singkat ditumpas oleh kekuatan militer Soeharto pada tahun 1968.

5. Jenderal Nasution berhasil lolos dari penculikan G30S, dan kakinya cedera karena meloncati tembok samping rumahnya. Ia justru ditolong oleh kendaraan lapis baja yang merupakan bagian G30S dan dibawa ke RSPAD—Rumah Sakit Angkatan Darat. Di dalam kendaraan itu, Nasution melihat bendera Pemuda Rakyat dan ia bertanya kepada prajurit yang menolongnya apakah ia adalah anggota Pemuda Rakyat. Sang penolong, tidak mengetahui bahwa Jenderal Nasution adalah target G30S. Dengan jujur ia mengiyakan. Setibanya Nasution di RSPAD, ia segera memerintahkan penangkapan regu kavaleri yang justru menyelamatkan jiwanya. Ini tanda jelas bahwa bilamana PKI secara organisasi terlibat, ormas Pemuda Rakyat dengan sendirinya terlibat pula. Anggota Pemuda Rakyat yang ikut dalam kegiatan G30S seharusnya mengetahui bahwa Nasution tidak seharusnya dibawa ke RSPAD, melainkan ditahan sesuai dengan rencana operasi G30S.

Dari penuturan di atas jelas bahwa PKI secara organisasi tidak terlibat dalam G30S. Tuduhan rezim militer Soeharto tidak pernah dibuktikan secara hukum. Akan tetapi pemerintah Soeharto meresmikan penggunaan istilah G30S/PKI dan menjadikannya dasar penangkapan dan pembunuhan massal terhadap para anggota dan simpatisan PKI dan ormasnya.

Sebuah kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Soekarno dalam menghadapi pemberontakan PRRI-Permesta yang dengan jelas dipimpin oleh para tokoh Masyumi dan PSI seperti Natsir, Sumitro, dan Asaat. Akan tetapi Presiden Soekarno tidak melakukan persekusi dan pembunuhan massal terhadap para anggota Masyumi dan PSI. Pembubaran Masyumi dan PSI pun baru dilakukan pada tahun 1960 setelah ternyata bahwa kedua partai tersebut tidak melakukan disiplin terhadap para tokoh yang langsung terlibat dalam gerakan pemberontakan. Dan ingat, Presiden Soekarno tidak pernah mencabut atau membatalkan secara sepihak pensiun yang mereka berhak menerimanya sebagai bekas menteri, sebagai anggota DPR.

PELANGGARAN HUKUM DAN HAM

PARA pejuang kemerdekaan Indonesia bercita-cita untuk membentuk sebuah negara merdeka yang berdaulat penuh di atas tangan rakyat Indonesia dan dapat berkembang menjadi sebuah negara maju yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Para pejuang kemerdekaan pun bercita-cita menegakkan sebuah negara yang berdasarkan prinsip "*rule of law*", negara yang berdasarkan hukum, *rechtstaat* (negara hukum) dan bukan menjadi *machtstaat* (negara kekuasaan).

Akan tetapi sejarah mencatat bahwa penguasa militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto melaksanakan kekejaman yang sewenang-wenang: mengejar, menangkap, menahan, dan membunuh orang-orang komunis atau orang-orang yang dituduh komunis dan bersimpati terhadap paham komunisme.

Dengan dalih keamanan nasional, Kopkamtib telah melakukan pelanggaran HAM yang mungkin terburuk di dunia setelah Perang Dunia II.

Bilamana *rule of law* dijunjung tinggi, tidak akan ada sebuah tindakan yang dianggap melanggar undang-undang bilamana undang-undang yang dinyatakan dilanggar itu tidak ada.

Penguasa militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, dengan dalih menjamin keamanan dan menegakkan UUD 45 dan Pancasila,

telah mempersekusi, menangkap dan membunuh para anggota PKI dan ormas serta simpatisannya.

Padahal sebelum Peristiwa G30S, PKI dan berbagai ormas yang diganyang adalah organisasi-organisasi yang resmi. Bahkan mereka adalah bagian kebijakan politik negara yang dinamakan Nasakom. Para tokoh, anggota partai, dan ormas-ormas ini adalah penjunjung setia program kesatuan nasional yang dipromosikan oleh Presiden sah, yaitu Presiden Soekarno. Tidak ada hukum atau undang-undang yang melarang mereka menjadi tokoh dan anggota para organisasi ini.

Para tokoh militer yang setelah G30S yang meng-*outlaw* komunisme, di zaman pra-G30S adalah orang-orang yang juga mendukung Nasakom. Akan tetapi dengan perubahan cuaca politik, mereka melakukan teror, persekusi, penangkapan dan pembunuhan terhadap mereka yang menjadi bagian dari persatuan nasional yang didukungnya pula, tanpa sanksi hukum apa pun. Seolah-olah, kemampuan menyapu habis komunisme dan menangkap atau membunuh sebanyak mungkin orang yang mendukung paham itu, adalah sebuah tindakan yang hebat dan membanggakan.

Sejak akhir tahun 1965 semua orang di Indonesia diberikan hak dan wewenang untuk menggeledah, menahan, menangkap, bahkan membunuh orang-orang yang dicurigai komunis. Dengan demikian terjadilah penahanan, penangkapan, dan bahkan pembunuhan liar, terutama di banyak daerah di mana aksi sepihak pengambil-alihan tanah dari tuan-tanah berlangsung dengan baik pada tahun-tahun 1964—65. Yang jelas Jenderal Soeharto sebagai panglima Kopkamtib, bukan saja tidak berusaha memulihkan keamanan dan ketertiban, tetapi malah mengobarkan nafsu dendam terhadap semua anggota PKI dan para ormasnya.

Undang-undang yang berlaku jelas dilanggar. Dan pelanggaran hukum ini justru dilakukan oleh Panglima Kopkamtib yang

kemudian menjadi KSAD dan Menteri Pertahanan bahkan Presiden Republik Indonesia, Jenderal Soeharto.

Undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa hanya polisi yang berhak dan berwewenang menggeledah, menahan, atau menangkap orang-orang sipil. Dan hanya CPM (Corps Polisi Militer) sebagai Kepolisian Angkatan Bersenjata, yang berhak dan berwewenang menggeledah, menangkap para anggota Angkatan Bersenjata.

Antara tahun 1965 dan 1967, banyak rumah digeledah oleh kesatuan-kesatuan yang tidak memiliki wewenang untuk menggeledah. Rumah saya digeledah berkali-kali oleh para anggota KAMI dan KAPPI menjelang akhir 1965. Sering pula terjadi pemfitnahan, di mana dokumen-dokumen yang berasal dari luar rumah-rumah yang digeledah diketemukan oleh para penggeledah. Keberadaan dokumen-dokumen ini kemudian dijadikan alasan untuk penangkapan atau penggeledahan lebih lanjut. Inilah yang menyebabkan semua penjara penuh sesak. Ratusan ribu orang ditahan dengan sewenang-wenang.

Karena padatnya penjara-penjara, sebagian besar tahanan tidak bisa tidur dengan merebahkan dirinya. Mereka harus tidur dalam posisi duduk bahkan berdiri dengan tubuh saling menunjang. Makanan yang disediakan penguasa pun tidak mencukupi. Banyak tahanan kelaparan. Sebungkus nasi harus dibagi untuk 4 atau 5 orang. Seringkali bungkusan-bungkusan nasi tiba dalam keadaan basi, tidak bisa dimakan.

Banyak terdengar cerita penangkapan massal yang keterlaluan. Puluhan penjual bakul jamu dan penjual bakso yang berasal dari Wonogiri ditangkap di Jakarta. Wonogiri di zaman perjuangan fisik melawan agresi militer Belanda pada tahun 1947 pernah menjadi pangkalan golongan kiri. Perlawanan gigih di daerah ini menyebabkan Jenderal Soedirman menjadikannya pangkalan markas perlawanan. Setelah belasan hari ditahan, para penjual bakso

dan jamu tersebut dibebaskan. Tidak ada bukti bahwa mereka berfungsi sebagai kurir PKI.

Ketika hal ini saya ungkapkan dalam salah satu interogasi di penjara, sang pemeriksa menyatakan bahwa saya ini di-"aman"-kan dari kemarahan rakyat. Kalau tidak di-"aman"-kan, keselamatan saya tidak bisa dilindungi. Istilah itu memang dipergunakan sebagai upaya mengesahkan tindakan penangkapan tanpa proses pengadilan. Puluhan ribu orang dipenjara, ada yang sampai belasan tahun dengan dalih di-"aman"-kan.

Sebuah hal yang patut diperhatikan adalah, setelah Supersemar, jumlah perwira yang masuk tahanan meningkat. Ternyata terdapat dua golongan utama:

1. Sebagian terbesar dari para perwira yang ditahan adalah mereka yang gigih dan berjasa dalam penumpasan pemberontakan PRRI-Permesta. Merekalah yang berhasil menumpas PRRI-Permesta dan menangkap para tokohnya: Achmad Husein, Mohamad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan Asaat. Ini menandakan bahwa setelah Supersemar dikeluarkan, kekuatan PRRI-Permesta bangkit kembali dan mereka menuntut para perwira yang menumpasnya untuk dijebloskan dalam penjara.

2. Golongan kedua terdiri dari para perwira yang pernah bekerja sama dengan laskar Pesindo—organisasi pemuda PKI melawan agresi Belanda. Mereka dijebloskan dalam penjara dengan tuduhan terlibat G30S.

Pembunuhan massal pun dilakukan secara sewenang-wenang. Terdengar banyak cerita yang menggambarkan kekejaman yang dilakukan. Orang-orang yang tidak bersalah apa-apa dibunuh

dengan kejam. Kepala mereka dipenggal dan jenazahnya dilempar ke sungai-sungai.

Keterangan dan pemberitaan tentang Lubang Buaya yang dikeluarkan oleh Koti G-V (Komando Operasi Tertinggi) di bawah pimpinan Jenderal Sutjipto berhasil mengobarkan nafsu balas dendam banyak orang. Dan ini kemudian didorong oleh penguasa militer Soeharto untuk menumpas komunisme dari muka bumi Indonesia.

Soeharto (1966)

Gerakan militer

Hasutan-hasutan ini berhasil membangkitkan kemarahan orang untuk melakukan tindakan melanggar hukum yang ada, melanggar norma-norma perikemanusiaan. Hasil yang dicapai sebagai hasutan-hasutan Jenderal Sutjipto menyebabkan ia memperoleh penghargaan Jenderal Soeharto. Ia naik pangkat dan kemudian diangkat sebagai Menteri Pertanian di dalam kabinet pertama Soeharto.

Kekejaman yang di luar batas perikemanusiaan bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Penyembelihan massal dilakukan di tepi-tepi Sungai Berantas, Bengawan Solo, dan beberapa sungai di Sumatera Utara, sehingga air di sungai-sungai tersebut berubah menjadi merah dan padat dengan mayat-mayat manusia tidak berdosa yang dibunuh secara kejam.

2. Penahanan massal dilakukan tanpa proses hukum sehingga ratusan ribu keluarga menjadi berantakan dan menderita. Banyak anak masih di bawah umur kehilangan bapak-ibunya, terlantar menjadi gelandangan.

3. Terjadi penyelewengan sewenang-wenang yang mengakibatkan:
   a. penahanan orang untuk merebut tempat kedudukan di tempat kerjanya
   b. penahanan orang untuk merebut istrinya
   c. penahanan orang untuk merebut harta-benda termasuk rumah dan mobil
   d. penahanan untuk melampiaskan ganjelan pribadi yang tidak terselesaikan

Jumlah orang yang dibunuh tidak pernah bisa dipastikan. Banyak orang menyatakan melebihi satu juta orang. Beratus ribu

orang ditahan. Mereka yang dibunuh dan ditahan tidak tahu menahu tentang G30S. Banyak tidak mendalami paham komunisme.

Para petugas penjara yang melakukan pemeriksaan dan interogasi pun bingung, karena tidak memiliki dasar penahanan. Ada juga petugas negara yang menyadari bahwa sebelum orang ditahan, penguasa harus memiliki bukti-bukti kesalahan orang-orang yang ditahan. Akan tetapi mereka tidak berdaya. Tidak berani membebaskan para tahanan karena khawatir dituduh mendukung PKI dan terlibat G30S, sehingga masuk penjara pula.

Hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilanggar. Para tahanan diharuskan menulis riwayat hidupnya. Dari riwayat itulah petugas negara kemudian mencari kaitan sang tahanan dengan PKI. Jadi terbalik. Para tahanan tidak ditahan karena ada bukti-bukti nyata dan lengkap tentang kesalahannya. Mereka harus lebih dulu meringkuk dalam penjara tanpa mengetahui apa salahnya. Baru kemudian para petugas negara menginterogasi para tahanan untuk mencari alasan mengapa mereka ditahan. Demikianlah ratusan ribu orang ditahan dengan cara yang sama. Puluhan ribu di antaranya meringkuk dalam penjara belasan tahun.

Penguasa tidak memperhatikan nasib para tahanan. Makanan dan pengobatan yang disediakan sama sekali tidak cukup untuk mempertahankan hidup para tahanan. Kiriman makanan dari keluarga para tahanan pun tidak bisa diandalkan. Keluarga para tahanan politik ini pun menjadi korban. Predikat keluarga tapol (tahanan politik) menghilangkan semua hak yang ada untuk semua anggota keluarga para tapol. Mereka kehilangan pekerjaan dan tidak mungkin memperoleh pekerjaan baru. Mereka tidak bisa memperoleh surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka "Bebas G30S/PKI." Mereka terpencil dalam masyarakat. Banyak keluarga yang morat-marit. Dengan sendirinya kemampuan untuk mengirim makanan ke para tapol berkurang bahkan hilang.

Aidit ditangkap

Untung ditangkap

Untung ditangkap

Oleh karena ini jumlah tapol yang meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan tinggi sekali. Antara tahun 1966 dan 1967, di penjara Salemba, setiap hari ada seorang atau dua yang meninggal dunia karena kelaparan. Di penjara Tangerang, keadaannya lebih parah. Setiap hari ada dua atau tiga tahanan yang meninggal dunia.

Timbullah kesan bahwa penguasa militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto menjalankan kebijakan pembunuhan massal, dengan cara tidak menyediakan makanan untuk ratusan ribu tahanan politik. Mereka melakukan sebuah penyiksaan fisik yang

luar biasa kejamnya. Para tahanan yang melalui proses penyiksaan kejam ini kerap menyatakan pendapat bahwa pembunuhan massal dengan cara gas racun yang dilakukan oleh Hitler di zaman Perang Dunia II merupakan penyiksaan yang jauh lebih ringan ketimbang penyiksaan yang menyebabkan orang secara perlahan meninggal karena kelaparan. Sungguh sebuah genosida yang kejam dan yang harus dikutuk dunia.

Setelah Supersemar dikeluarkan, pengejaran dan penangkapan menjadi lebih ganas lagi. Demikian juga pembunuhan massal biadab menjadi lebih gencar. Akibatnya jumlah pengiriman makanan dan obat-obatan dari keluarga semakin merosot. Keadaan ini mendorong para tahanan mengajukan usul ke pimpinan berbagai penjara untuk melakukan cocok tanam di lahan-lahan penjara sehingga bisa menambah gizi makanan yang diperoleh. Bayam, kangkung, pepaya kemudian ditanam oleh para tapol. Para tahanan juga mendorong izin penguasa penjara untuk para dokter yang menguasai ilmu akupunktur mendidik para tahanan muda sehingga berbagai macam pengobatan bisa dilakukan di dalam penjara tanpa bersandar atas obat-obatan yang memang tidak disediakan penguasa.

Inisiatif para tapol untuk berdikari ini membawa hasil cukup baik. Gizi makanan menjadi lebih baik. Dan banyak tapol yang sakit tertolong oleh akupunktur. Dikembangkan pula berbagai kegiatan kerajinan tangan untuk mengisi waktu di penjara.

Penangkapan massal

Penangkapan massal

Akan tetapi timbul akibat samping negatif. Banyak penguasa penjara menyalahgunakan inisiatif yang dilakukan untuk *self-supporting*—berdikari—untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di penjara-penjara yang tidak menyediakan cukup makanan. Para penguasa penjara lalu memaksa para tapol untuk *self-supporting* dan mengerjai para tapol. Hasil komersialisasi penyalahgunaan ini memperkaya diri para penguasa penjara tersebut.

Ini kemudian berkembang menjadi kegiatan kerja paksa. Para tahanan yang muda dan kekar dipaksa untuk menggarap lahan-lahan di penjara untuk menghasilkan padi, singkong, dan ubi. Ini terjadi di penjara Tangerang yang memiliki lahan cukup luas. Bilamana panen surplus, melebihi kebutuhan makanan di penjara, hasilnya dijual ke luar untuk memperkaya para penguasa penjara.

Tindakan ini tentunya melanggar hukum internasional yang dikenal. Indonesia sebenarnya menandatangani *Convention International Labour Organization* (ILO). Jadi jelas penguasa militer melanggar *convention* yang berlaku. Para tahanan yang tidak terbukti bersalah, jadi belum divonis oleh pengadilan, tidak bisa dipekerjakan tanpa upah. Bilamana sudah ada vonis pengadilan, para tahanan bisa dipekerjakan dengan upah menurut standar yang berlaku.

Foto-foto pembunuhan massal

Dalam hal ini, para tahanan tidak pernah diadili dan tidak pernah tahu apa kesalahannya. Mereka bukan saja tidak menerima jatah makanan yang wajar tetapi dipaksa untuk bekerja menyediakan makanan untuk dirinya sendiri. Sedangkan surplus hasil kerjanya dijual untuk memperkaya penguasa penjara. Sebuah penghisapan kejam yang melanggar hukum.

Ternyata kegiatan mengerjakan para tahanan tanpa upah ini tidak terbatas untuk kegiatan *self-supporting* saja. Di penjara Salemba misalnya, para tahanan diharuskan membersihkan markas besar CPM di Jalan Guntur. Para tahanan dipaksa untuk menjahit seragam para perwira Angkatan Darat. Banyak tahanan yang diharuskan mereparasi dan memperindah rumah-rumah para perwira. Banyak pula yang dipaksa bekerja tanpa upah membangun rumah-rumah para perwira. Terkadang imbalan yang diberikan adalah cuti pulang bertemu dengan keluarga setengah hari. Tidak ada upah sama sekali.

Hal ini dengan sendirinya memperkecil animo penguasa militer untuk membebaskan para tahanan yang telah menguntungkan mereka. Timbullah keinginan untuk mempertahankan jumlah tahanan yang bisa dipaksa bekerja untuk memberi penghasilan ekstra selama mungkin.

Berhasilnya proyek di penjara Tangerang mendorong penguasa militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto untuk melaksanakan proyek yang lebih kejam lagi, yaitu tempat pengasingan yang kita kenal sebagai proyek Pulau Buru di Maluku Selatan.

Belasan ribu tahanan dari berbagai penjara di Pulau Jawa dikirim ke Pulau Buru. Pulau Buru adalah daerah minus. Tidak ada penghasilan yang bisa diandalkan untuk menampung begitu banyak tahanan.

Para tahanan dipekerjakan secara paksa untuk menunjang kehidupannya sendiri. Mereka hanya memperoleh tunjangan

minimum selama 8 bulan pertama—dengan jatah beras dan pakaian dua stel (kain belacu). Setelah itu tunjangan hidup ditiadakan.

Tindakan tidak berperikemanusiaan ini bisa dibandingkan dengan tindakan penjajah Belanda ketika membuang para tahanan ke Boven Digul di Irian Jaya. Para tahanan penjajah Belanda tidak diharuskan bekerja paksa untuk menunjang kehidupan mereka. Penjajah menyediakan kebutuhan para tahanan yang diasingkan di Boven Digul. Dan sebelum para tahanan diberangkatkan, penjajah mengizinkan mereka bertemu dengan keluarganya.

Penguasa militer merahasiakan upaya pembuangan para tahanan ke Pulau Buru. Pihak keluarga tidak diberitahu. Tidak ada kesempatan untuk berpamitan dan berpisah dengan keluarga. Sebuah perenggutan HAM yang kejam. Dalam hal ini, penjajah Belanda jauh lebih berperikemanusiaan bila dibandingkan dengan tindakan penguasa militer Soeharto terhadap bangsanya sendiri.

Pemberangkatan rombongan pertama ke Pulau Buru dilakukan sehari setelah kunjungan Presiden Nixon dan Kissinger ke Indonesia pada tahun 1969. Ini menimbulkan kesan bahwa Nixon dan Kissinger merestui tindakan kejam pemerintah Soeharto membuang para tahanan ke Pulau Buru sebagai upaya pembasmian komunisme di Indonesia.

Bagaimana dengan posisi hukum mereka yang dipersekusi—dianggap simpatisan PKI? Banyak yang tidak ditangkap, tetapi dipecat dari pekerjaan dan dijadikan momok dalam masyarakat. Mereka tidak bisa memperoleh apa yang dinamakan Surat Bebas G30S/PKI. Dampaknya luar biasa, terutama dalam usaha mendapat pekerjaan. Ada ratusan ribu yang masuk dalam kategori ini. Celakanya, anak-anak dan saudara-saudara mereka pun juga masuk dalam kategori orang-orang yang tidak bebas G30S/PKI.

Dalam pengadilannya, Nyono dengan jantan menyatakan bahwa walaupun PKI secara organisasi tidak terlibat dalam Peristiwa G30S, tetapi sebagai pimpinan PKI dan anggota Politbiro

PKI, walaupun tidak tahu-menahu tentang G30S, ia harus bertanggung jawab. Menurutnya, para anggota Politbiro lah yang menyerahkan mandat ke Aidit untuk bertindak. "Dosa" ini, menurut Nyono, hanya ditanggung oleh para anggota Politbiro. Tidak bisa ditanggung oleh para anggota PKI dan para simpatisannya. Pernyataan yang sama diajukan oleh Sudisman di dalam pledoinya. Ternyata sikap jantan kedua tokoh ini tidak menghentikan persekusi, penangkapan, dan pembunuhan massal yang didukung bahkan dikoordinasi oleh aparat militer yang sah.

Dalam skala lain, saya pun berupaya menyelamatkan Baperki dari proses penghancuran dan penangkapan massal ini. Pernyataan saya bahwa saya seoranglah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan program politik Baperki, tidak digubris. Tetap saja Baperki dijadikan organisasi terlarang dan banyak anggotanya ditahan belasan tahun maupun dipersekusi secara tidak adil.

Red-drive yang dipimpin oleh Kopkamtib ini mudah meledak, terutama di banyak daerah di mana Barisan Tani Indonesia (BTI) pernah melakukan aksi sepihak dalam menjalankan *land-reform*, yaitu pengambilan alih tanah secara paksa dari pemilik tanah untuk petani menjelang akhir zaman demokrasi terpimpin Soekarno. Banyak tokoh BTI dan PKI serta simpatisannya dibantai di daerah-daerah di mana *land-reform* sepihak tersebut terjadi.

Dalam melakukan *witch-hunt* besar-besaran ini, akhir 1965 hingga akhir 1968, pemerintah militer mengancam rakyatnya sendiri. Bilamana diketahui menyembunyikan anggota PKI atau simpatisannya, mereka juga akan masuk penjara dan seluruh keluarganya akan mengalami kesulitan, termasuk disitanya rumah dan barang milik pribadi mereka.

Banyak perwira Angkatan Darat dengan bangga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling berhasil menghancurkan PKI, partai komunis terbesar di luar RRT dan Uni Soviet, tanpa bantuan Amerika Serikat. Ya, mereka memiliki alasan

untuk bangga, karena pada kenyataannya, setelah mengeluarkan banyak uang dan tenaga, Amerika Serikat gagal membasmi komunisme di Indocina.

Apa yang terjadi antara akhir 1965 dan akhir 1968 akan menjadi lembaran hitam dalam sejarah Indonesia. Generasi mendatang harus belajar darinya dan mencegah terulangnya kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyatnya sendiri, dalam skala yang luar biasa besarnya.

Apalagi bila mengingat bahwa dasar pembentukan Indonesia sebagai sebuah negara. Indonesia dibentuk oleh para pejuang kemerdekaan yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika—yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah sebuah kesatuan dari berbagai perbedaan, suku bangsa, agama, dan aliran politik. Dasar negara yang senantiasa dijunjung tinggi oleh pemerintah militer Soeharto adalah Pancasila. Sila kedua yang mengandung keharusan negara menjunjung tinggi perikemanusiaan tidak bisa tidak mengharuskan pemerintah untuk menjunjung tinggi HAM.

Pengaruh luar negeri, perjuangan merebut kekuasaan mutlak dari *superpower* dan kepentingan multinasional ternyata mampu membantu kekuatan di dalam negeri untuk menghancurkan impian dan visi para pembentuk negara.

Seperti yang dituturkan sebelumnya, dalam waktu singkat penjara-penjara menjadi penuh. Jumlah tahanan pesat naik, mencapai ratusan ribu di awal fase pengganyangan PKI. Ini bisa terjadi karena beberapa hal:

1. Banyak tokoh yang tertangkap, karena takut disiksa atau tidak tahan siksaan, mereka rela membocorkan nama dan lokasi para simpatisannya yang menyembunyikan mereka sebelum mereka tertangkap. Banyak tokoh yang menjadi informan—yang membuka nama-nama anggota atau simpatisan yang tidak ada dalam daftar yang dimiliki pihak penguasa

2. Pihak militer bersikap dan melaksanakan pengertian: lebih baik salah menangkap 10 orang daripada gagal menangkap satu orang komunis. Sikap demikian menyebabkan timbul penangkapan massal yang sering tidak berkaitan dengan kenyataan bahwa yang ditangkap benar-benar anggota PKI atau ormasnya. Banyak orang yang ditangkap karena adanya asal tunjuk atau berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Dibesar-besarkannya kejahatan PKI dalam media mempermudah orang terdorong untuk turut mengejar dan mencari anggota-anggota PKI dan simpatisan komunis.

3. Sekali ditahan, sulit untuk dibebaskan. Para penangkap tidak mau dikatakan bersimpati pada komunis, sehingga tidak berani membebaskan orang yang sebenarnya salah ditangkap.

Pemeriksaan sering dilakukan dengan penyiksaan fisik. Para pemeriksa menganggap ini wajar dan tidak melanggar hukum. Kekejaman yang dilakukan terhadap para tahanan G30S direstui, didukung bahkan merupakan hal yang terpuji.

Presumption of innocence until proven guilty sebagai dasar negara hukum dilanggar habis-habisan.

Sebagian kecil tapol diadili. Ada tiga kelompok utama. Kelompok pertama terdiri dari mereka yang langsung terlibat dalam G30S, seperti Untung, Sudjono, Supardjo, Sudisman, Nyono, dan Sjam. Pada umumnya mereka memperoleh hukuman mati dan beberapa waktu setelah pengadilan, hukuman mati dilaksanakan. Tapi ada di antara mereka yang menjadi informan yang sangat berharga untuk pihak penguasa. Sjam adalah salah satu informan ini. Untuk memperpanjang hidupnya, ia membongkar rahasia-rahasia yang dianggap berharga. Rupanya, setiap kali ada ancaman bahwa hukuman matinya akan dilaksanakan, ia membuka lembaran

baru yang menyebabkan banyak orang ditahan atau diubah kategorinya. Inilah yang menyebabkan Sjam tidak dihukum mati hingga beberapa tahun kemudian.

Kelompok kedua terdiri dari tokoh-tokoh pendukung Soekarno yang sempat merugikan atau menghambat upaya Soeharto mengambil kekuasaan dari tangan Soekarno. Kelompok ini terdiri dari tokoh-tokoh seperti Soebandrio, Jusuf Muda Dalam, dan Omar Dhani. Mereka mendapat hukuman mati, tetapi tidak dilaksanakan. Ada pula yang dijatuhi hukuman penjara saja, seperti halnya Achmadi—10 tahun dan Oei Tjoe Tat—13 tahun. Achmadi tadinya dijatuhi hukuman 6 tahun, tetapi ketika mengajukan naik banding, bukannya diturunkan malah dinaikkan menjadi 10 tahun.

Kelompok ketiga terdiri dari tokoh-tokoh yang ditangkap di Lodojo, Blitar Selatan. Mereka berani mengkritik pemerintah militer dan melakukan gerakan bersenjata, seperti Ruslan, Munir, dan Iskandar Subekti. Mereka dijatuhi hukuman mati. Yang kelihatan "lunak" seperti Rewang dan Tjugito dijatuhi hukuman seumur hidup.

Sikap terhadap tahanan politik berbeda-beda pula. Di Jakarta, ada empat macam perbedaan.

Yang muda, kuat, dan dianggap sanggup bekerja keras, dipenjarakan di Tangerang. Mereka tadinya adalah anggota-anggota Pemuda Rakyat, BTI, CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia), dan organisasi massa lainnya. Juga banyak tentara yang berpangkat rendah ditahan di sana. Pada umumnya mereka tidak mencapai tingkat tokoh.

Di sana makanan yang diberikan sedikit karena mereka diharapkan lebih "tahan banting" dan diharapkan bercocok tanam untuk menghidupkan dirinya sendiri. Di penjara Tangerang, mereka relatif bebas, bisa bekerja di sawah, perkebunan dan peternakan ayam di sekitar penjara. Seperti yang dituturkan sebelumnya, hasil

surplus kegiatan mereka dikorupsi sebagai hasil tambahan petugas, terutama kepala penjara.

Kelompok kedua ber-"mukim" di Salemba. Penjara Salemba dipenuhi oleh mereka yang datang dari kelas menengah dan terpelajar. Banyak anggota parlemen, pegawai negeri, anggota-anggota PKI dari tingkat CC pusat hingga struktur daerah, pimpinan serikat buruh, wartawan, mahasiswa, perwira-perwira angkatan bersenjata, anggota-anggota HSI (Himpunan Sarjana Indonesia), Lekra, dan lain-lain. Ada juga jenderal yang ditahan di Salemba sebagai "hukuman" karena melanggar peraturan di penjara elite Nirbaya. Tetapi banyak pula yang masih muda dan memiliki ciri sama dengan mereka yang dipenjarakan di Tangerang.

Di Salemba, yang tertua adalah Makudum Sati, eks-Digulis, pendiri PKI di Sumatera Selatan yang pada tahun 1966 telah berumur 80-an. Yang termuda adalah Salim Bin De Mar, anggota Pemuda Rakyat yang pada tahun 1966 baru berusia 15 tahun. Ia berada di penjara bersama ayahnya, seorang penjual sayur dan kakeknya, seorang penjual es. Jadi 3 generasi ditahan.

Salemba merupakan penjara yang paling padat. Sebagian besar masa tahanan saya dilewati di Salemba.

Pertemuan dengan keluarga jarang. Antara tahun 1967 hingga 1968, saya tidak diizinkan menemui keluarga saya. Baru belakangan diizinkan bertemu sebulan sekali untuk 10—15 menit setiap kali bertemu.

Kelompok ketiga ditahan di RTM—Rumah Tahanan Militer di daerah Lapangan Banteng. Pada umumnya tokoh-tokoh ditahan di sana untuk disiapkan masuk pengadilan, atau menjadi saksi di pengadilan. Sudisman, Nyono, Supardjo, Ruslan, Munir, dan lain-lain dipenjarakan di sana selama persiapan untuk pengadilan. Saya pun ditahan di sana selama 3 tahun, dari tahun 1969 hingga 1972.

Tadinya saya disiapkan untuk masuk ke pengadilan. Selama tiga tahun itu, saya sering diinterogasi. Ternyata pihak penguasa

tidak cukup memiliki bahan untuk mengadili saya. Yang diadili malah Oei Tjoe Tat.

Pertemuan dengan keluarga jauh lebih mudah di penjara ini. Bisa seminggu sekali. Kiriman makanan pun diizinkan setiap hari. Pembagian makan jauh lebih baik. Karena tapol yang tertampung di sana dipersiapkan untuk masuk pengadilan, mereka harus kelihatan sehat. Dengan demikian makanan yang tersedia jauh lebih baik dari Salemba. Bilamana proses pengadilan sudah dimulai, terkadang vitamin juga diberikan untuk memberi kesan terdakwa mendapat perlakuan yang baik.

Kelompok keempat adalah kelompok tapol VIP. Mereka dipenjarakan di kamp Nirbaya (interniran dalam bahaya) dekat daerah Halim. Di kamp ini tersedia 250 kamar, lengkap dengan ranjang, meja tulis, tempat duduk, kamar mandi, dan WC. Tetapi yang dihuni tapol hanyalah sekitar 50 kamar.

Penjara Salemba

Penjara Salemba

Yang berada di Nirbaya adalah tapol tokoh. Mereka yang pernah menjadi menteri, jenderal, duta besar, di antaranya Soebandrio, Omar Dhani, Pranoto, Rukman, Mursyid, Setiadi, Astrawinata, Oei Tjoe Tat, dan lain-lain. Sebenarnya merekalah yang tergolong *heavy weight*—kelas berat.

Saya sendiri sempat dipenjarakan di penjara VIP ini selama setahun dari tahun 1972 hingga 1973. Setelah itu dipindah kembali ke Salemba.

Di Nirbaya perlakuan terhadap tapol cukup baik. Jarang ada tokoh yang berada dalam tahanan Nirbaya mengalami penyiksaan fisik. Dan karena banyak jenderal, para petugas penjara pun bersikap cukup sopan. Setiap tapol bisa "memiliki" dua atau 3 kamar. Peraturan tentang bahan bacaan walaupun terbatas, cukup longgar. Penyelusupan bahan bacaan jauh lebih mudah dilakukan daripada penjara-penjara lain yang saya alami. Kiriman makanan keluarga dapat dilakukan setiap hari. Makanan yang disediakan

penjara pun, dibandingkan penjara lain cukup baik. Tapol tidak kekurangan makan di penjara ini.

Bilamana tapol sakit, ia bisa dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat. Berbeda dengan di Salemba dan Tangerang. Tapol yang sakit keras tetap tidak dirawat semestinya. Inilah yang menyebabkan di penjara-penjara ini ada klinik penjara di mana dokter-dokter tapol bekerja dengan pengobatan minimum. Pengobatan dengan akupuntur atau *accu-pressure* menjadi sandaran utama. Banyak tapol dilatih oleh dokter-dokter yang menguasai teknik akupunktur membantu di klinik-klinik penjara ini.

Memang timbullah keganjilan. Mereka yang termasuk kelas berat dan tokoh, bisa menikmati masa tahanan yang jauh lebih baik ketimbang mereka yang masuk kategori pengikut dan anggota biasa.

Penahanan massal ini juga menimbulkan sebuah keganjilan kejam. Di satu pihak, dana untuk memberi makan tahanan sangat terbatas, tetapi di lain pihak, penguasa militer ternyata rela mengeluarkan banyak uang, tenaga dan fasilitas untuk memotret dan mencetak potret berpuluhan ribu tahanan politik.

Penjara Salemba

Tahanan politik

Ny. Siauw masak untuk mengirim makanan ke penjara

Kualitas dan jumlah makanan yang diberikan kepada tahanan sangat buruk. Antara 1966 dan 1967, tahanan diberi bulgur, makanan yang diimpor untuk makanan kuda. Sebagian besar tahanan politik (tapol) tidak menerima kiriman dari keluarganya—karena kemiskinan dan juga kekhawatiran diteror masyarakat—sehingga bulgurlah sandaran utama hidup mereka. Akibatnya mengenaskan. Banyak yang meninggal karena kekurangan makan dan kekurangan gizi.

Makanan tentunya merupakan hal yang terpenting untuk orang yang dipenjarakan. Kalau tidak cukup tentunya lapar. Dan kelaparan serta kekurangan gizi mempercepat hilangnya daya tahan tubuh sehingga hidup tidak bisa dipertahankan. Untuk menanggulangi ini, di Salemba dan juga banyak penjara lainnya, orang yang menerima kiriman makanan, diminta untuk membentuk grup makan, yang dinamakan "riungan".

Saya termasuk beruntung menerima kiriman makanan dari keluarga. Saya harus membagi apa yang saya terima ke enam sampai delapan orang. Kiriman dalam waktu setengah jam habis dibagi.

Di awal zaman orde baru ini, cukup banyak tapol yang menganggap masa penahanan akan pendek. Siapa yang percaya bahwa mereka yang tidak berdosa itu harus ditahan belasan tahun? Apalagi mereka yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan bahkan yang pernah menjadi anak buah Soeharto sendiri di zaman revolusi dan perjuangan fisik. Akan tetapi mereka semua kecewa. Ternyata penderitaan sebagai tapol harus dilalui belasan tahun.

Meningkatnya jumlah tahanan di berbagai penjara menimbulkan persoalan yang tidak nyaman. Di Salemba, di mana saya dipenjarakan bertahun-tahun, jumlah tapol adalah 4 kali dari jumlah tahanan yang seharusnya diakomodasi. Akibatnya sebuah sel yang seharusnya diisi oleh seorang tahanan diisi oleh 4 tapol.

Untuk tidur terlentang di atas tikar kecil, seorang tapol harus bergiliran, tiga yang lain duduk. Kalau satu harus ke WC, semua harus bangun dan berdiri memberi ruangan jalan.

Kekejaman yang dilakukan pada saat interogasi tidak bisa terbayangkan. Hampir setiap pemeriksaan dilakukan dengan penyiksaan berat. Termasuk pula tapol wanita. Sering perkosaan dilakukan terhadap tapol wanita. Banyak tapol harus dirawat di rumah sakit akibat penyiksaan yang berat dan kejam. Tidak sedikit yang menjadi cacat seumur hidup. Sering pemeriksaan dan penyiksaan kejam mengakibatkan tapol yang diperiksa meninggal. Atau pemeriksaan diikuti oleh pembunuhan. Njoto adalah salah satu tokoh yang disiksa dengan keji hingga ia meninggal.

Saya termasuk beruntung, tidak pernah disiksa, walaupun terkadang teman disiksa di hadapan saya, atau saya berada di ruangan di mana suara bentakan, suara pukulan dan rintihan kesakitan terdengar. Kesemuanya juga merupakan siksaan dalam bentuk lain.

Banyak tapol berasal dari kelas buruh dan tani yang tidak bisa membaca dan menulis. Salah satu kegiatan yang menghibur di tahanan adalah melakukan pengajaran. Tanpa kapur tulis dan papan tulis, pengajaran dilakukan dengan ranting pohon di atas tanah. Saya sendiri menggunakan waktu untuk mengajar bahasa-bahasa asing: Inggris, Belanda, Jerman, dan Perancis. Belakangan menggunakan waktu untuk belajar dan mengajar bahasa Spanyol.

Buku-buku dan surat kabar dilarang. Hanya buku agama yang diizinkan masuk. Ini berbeda dengan ketika saya ditahan oleh penjajah Belanda. Di masa itu, saya bebas membaca surat kabar dan buku-buku politik. Bahkan mendengar berita dari radio pun diizinkan. Belakangan buku-buku pelajaran bahasa asing diizinkan masuk. Selain itu, saya harus minta bantuan keluarga saya untuk menyelundupkan guntingan-guntingan koran atau majalah asing.

Upaya mengajar saya gunakan untuk berdiskusi politik. Pada suatu ketika ada yang melaporkan kegiatan ini, sehingga saya dihukum. Hukumannya adalah dipindah ke blok tahanan kriminal di mana saya ditaruh di satu sel dengan para pembunuh dan perampok selama beberapa bulan. Banyak tapol yang dibuang ke blok kriminal disiksa oleh para tahanan lainnya. Untunglah saya tidak disiksa bahkan bisa bersahabat dengan mereka.

Masalah agama di tahanan patut diperhatikan. Banyak tokoh PKI yang "berubah" menjadi pengikut agama Islam yang setia. Banyak pula yang menjadi fanatik, sehingga timbul pernyataan dari beberapa tapol bahwa orang PKI di tahanan lebih Islam dari mereka yang Islam tapi non-komunis. Ajaran-ajaran agama yang diizinkan cukup sering menimbulkan masalah. Yaitu adanya keinginan untuk mengganti agama.

Pihak penguasa ternyata mengizinkan pergantian agama terjadi selama bukan mereka yang Islam menjadi non-Islam. Yang Konghucu bisa masuk ke Kristen dan sebaliknya. Yang Kristen boleh masuk Islam. Tetapi yang Islam harus tetap Islam.

Puluhan ribu tapol dibagi dalam 3 golongan besar. Golongan A adalah mereka yang langsung terlibat dalam memimpin G30S dan harus diadili.

Golongan B adalah mereka yang langsung terlibat dalam G30S dan mereka yang menjadi tokoh dan anggota PKI dan berbagai organisasi massa yang berafiliasi dengan PKI, seperti Pemuda Rakyat, SOBSI, CGMI, dan lain-lain. Mereka tidak bisa diadili, karena memang tidak ada bukti melakukan kesalahan apa-apa kecuali memiliki orientasi politik yang berhaluan kiri.

Golongan C adalah mayoritas. Mereka tidak langsung terlibat dalam G30S. Banyak yang menjadi anggota PKI biasa, jadi tidak memainkan peranan penting atau pimpinan dan anggota berbagai organisasi yang dianggap berhaluan kiri. Masih dianggap berbahaya, oleh karenanya tidak bisa dibebaskan.

Rupanya pihak penguasa bingung dengan kategori untuk saya, naik-turun dan pada akhirnya diletakkan di C, sehingga saya di-"kembalikan ke dalam masyarakat" dengan predikat eks-tapol pada tahun 1978. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa saya terlibat dalam G30S. Tidak ada fakta yang mendukung tuduhan ini. Mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa saya adalah anggota PKI, karena memang saya tidak pernah masuk ke dalam partai ini. Mereka juga gagal memperoleh fakta bahwa Baperki adalah ormas PKI. Dengan demikian, mereka tidak memiliki bahan untuk mengadili saya.

Yang dituturkan di atas menunjukkan bahwa di zaman kekuasaan Soeharto, RI berubah menjadi sebuah negara yang melakukan kejahatan terhadap warga negaranya sendiri.

Yang aneh, kekejaman ini tidak menimbulkan reaksi hebat di luar Indonesia. Walaupun kekejamannya tidak kalah hebat dengan apa yang dilakukan oleh Nazi terhadap orang-orang Yahudi di zaman Perang Dunia II. Para tapol kekurangan makan hingga menemui ajalnya secara perlahan. Meninggal secara perlahan jauh lebih menderita daripada meninggal di dalam *gas-chambers*. Akan tetapi kekuasaan yang melakukannya tetap bisa bercokol dan negara-negara yang berkepentingan untuk melanjutkan perdagangan dan pengurasan kekayaan Indonesia, bukan saja merestui rezim ini, tetapi mendukung keberlangsungannya.

Kekejaman termasuk pembunuhan massal dan penangkapan sewenang-wenang dan pelanggaran hukum-hukum internasional yang dilakukan oleh pemerintah militer Soeharto akhirnya melahirkan protes dan kritik dunia internasional, termasuk sidang ILO di Geneva. Sidang tersebut dengan tegas mengecam pelaksanaan kerja paksa para tahanan politik di Indonesia, terutama di Pulau Buru, yang berubah menjadi daerah surplus karena kegiatan kerja paksa ini. Timbul pula tuntutan agar penahanan dan

pengasingan yang kejam ini dihentikan disertai berbagai ancaman berupa sanksi terhadap pemerintah Indonesia.

Pada akhir 1978, pemerintah Soeharto terpaksa "membebaskan" semua tahanan politik yang memang tidak bisa dibuktikan kesalahannya itu, termasuk tahanan golongan B yang diasingkan di Pulau Buru. Pulau Buru yang semula termasuk daerah minus, setelah digarap dengan jerih-payah, keringat dan darah para tahanan politik, berubah menjadi daerah surplus. Pulau Buru menjadi daerah perebutan transmigrasi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Maluku.

Keberlangsungan kekejaman dan pelanggaran hukum sejak akhir tahun 1965 ini benar-benar merupakan sebuah lembaran hitam dalam sejarah Indonesia. Para pejuang kemerdekaan pasti kecewa bahwa pengorbanan mereka dalam mencapai kemerdekaan tidak membawa Indonesia sebagai negara yang dicita-citakan. Indonesia tidak berkembang sebagai sebuah negara hukum yang sepenuhnya berdasarkan *rule of law*, tetapi menjadi sebuah negara di mana kebenaran selalu berada di pihak yang berkuasa. Indonesia menjadi negara yang melanggar undang-undang dan menginjak HAM.

Nixon di Indonesia (1969)

Kerja paksa
di Pulau Buru

Kerja paksa
di Pulau Buru

Tapol
di Pulau Buru

Kegiatan PKI Setelah G30S

KOK – Kritik Oto Kritik

Sebelum Peristiwa G30S, di kalangan para siswa Ali Archam, tesis Aidit mengenai Teori Dua Aspek telah banyak didiskusikan. Dua Aspek menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah Republik Indonesia terdiri dari dua aspek. Satu aspek adalah kekuatan pro-rakyat dan aspek kedua adalah kekuatan anti-rakyat. Oleh karena itu, Aidit menyatakan bahwa PKI harus berupaya untuk memperkuat aspek pro-rakyat.

Ketika Sugiono kembali dari Pyongyang setelah memperoleh gelar doktor, menjelang akhir 1965, perdebatan tentang Tesis Dua Aspek ini menjadi lebih hangat. Pyongyang ternyata menentang Tesis Dua Aspek yang dikatakan bertentangan dengan ideologi Marxisme–Leninisme. Sugiono menyelesaikan tesis PhD-nya berdasarkan Teori Dua Aspek ini. Sebenarnya Pyongyang berkeberatan memberi gelar doktor yang berdasarkan Teori Dua Aspek. Akan tetapi gelar doktor tetap diberikan ke Sugiono.

Setelah Peristiwa G30S, pada bulan Oktober 1965, Dudung atau Ismail Bakri dari PKI Jawa Barat mendorong analisa tentang berbagai kebijakan pimpinan PKI sebelum G30S. Upaya berhubungan dengan Sudisman, sebagai tokoh Politbiro yang masih

hidup dan bersembunyi di Jakarta, tidak bisa dilakukan. Beberapa tokoh PKI di antaranya Tjoo Tik Tjoen, Achmad Soemadi, Dudung, dan Soemarsono mengambil keputusan untuk bertemu dan berdiskusi beberapa hari di Pasar Minggu, Jakarta. Pertemuan itu lalu melahirkan sebuah naskah tertulis yang kemudian disampaikan ke Sudisman sebagai bahan pertimbangan. Naskah tertulis itu akhirnya disampaikan ke Sudisman melalui seorang kurir Tionghoa.

Tidak lama setelah naskah tersebut disampaikan ke Sudisman, Tjoo Tiek Tjoen dan Achmad Soemadi tertangkap.

Setelah menerima naskah tersebut, Sudisman kemudian sibuk melengkapinya. Salah satu bahan yang dipelajari oleh Sudisman adalah tulisan Mao yang berjudul *Kritik terhadap Kawan Togliati* yang mengupas masalah kemenangan tidak dapat dicapai dengan perjuangan parlementer.

Lahirlah sebuah dokumen yang dikenal sebagai *KOK – Kritik Oto Kritik – PKI* yang dengan tegas menyatakan bahwa Tesis Dua Aspek salah dan mendukung dilakukannya perjuangan bersenjata—perjuta.

Akibat keteledoran bekerja dan pengkhianatan di dalam penjara, banyak orang yang terlibat dalam penyediaan tempat bertemu dan para kurir para tokoh PKI ini semua masuk dalam penjara.

Perjuangan bersenjata (Perjuta)

Setelah KOK dikeluarkan dan disebarluaskan sebagai dokumen pimpinan PKI di bawah tanah, para tokoh PKI yang belum tertangkap merasa berkewajiban untuk mengikuti instruksi atau ajakan yang terkandung di dalam KOK. Lahirlah proyek Blitar Selatan.

Blitar Selatan dijadikan basis perlawanan bersenjata oleh PKI. Kegiatan ini dimulai sejak akhir 1967. Akan tetapi karena persiapannya tidak baik, dalam waktu singkat pada tahun 1968 operasi bersenjata ini ditumpas oleh kekuatan militer Soeharto. Para tokoh dan anggota PKI yang terlibat dalam Blitar Selatan ditangkap. Salah satu tokoh, Oloan Hutapea, mati tertembak dalam operasi penumpasan. Penumpasan Blitar Selatan mendorong Jenderal Soeharto untuk lebih ganas melakukan penangkapan massal. Banyak perwira-perwira Angkatan Bersenjata pun ditangkap setelah peristiwa Blitar ini.

Di dalam tahanan, gerakan bersenjata di Blitar Selatan didiskusikan secara intens. Ada yang berpendapat bahwa Blitar Selatan merupakan tindakan avonturisme yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada pula yang berpendapat bahwa karena Blitar Selatan, Jenderal Soeharto membatalkan rencana membebaskan para tapol dalam jumlah yang besar. Salah seorang tahanan yang paling keras mencela proyek Blitar Selatan adalah Sidartojo, anggota CC PKI.

Ada pula yang berpendapat bahwa seharusnya proyek Blitar Selatan itu dianalisa berdasarkan berbagai fakta yang ada, dan tidak dicela sebagai avonturisme hanya karena ia gagal. Kelompok ini berpendapat bahwa bilamana mereka setuju dan mendukung KOK, kegiatan yang serupa Blitar Selatan harus dilakukan. Kegiatan yang mengikutsertakan petani dan buruh di desa-desa yang dipersenjatai untuk melawan rezim militer Soeharto.

Tokoh SOBSI Mohamad Munir yang menjadi salah satu pemimpin operasi Blitar Selatan dengan tegas menyatakan di sidang pengadilannya bahwa menurut agama Islam, orang atau organisasi yang dikejar berhak melakukan perlawanan. Oleh karena itu ia menyatakan bahwa operasi bersenjata Blitar Selatan merupakan kegiatan yang tidak bisa dikutuk. Karena PKI diserang dan dikejar secara kejam oleh rezim militer Soeharto.

Munir dan banyak tokoh PKI lainnya tertangkap pada tahun 1968 ketika Blitar Selatan diserbu oleh pasukan militer pemerintah. Ia banyak memberi keterangan panjang-lebar tentang Blitar Selatan selama di penjara.

Salah satu sumber masalah adalah kenyataan bahwa para tokoh PKI yang tiba dan tinggal di Blitar Selatan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa. Mereka tidak terbiasa hidup sebagai orang-orang desa.

Penduduk setempat memberikan sambutan yang hangat dan menerima para tokoh PKI dengan baik. Bilamana ada pesta perjamuan, rakyat setempat selalu membawa oleh-oleh makanan untuk para tokoh ini, untuk para bapak yang mereka hormati.

Akan tetapi sambutan penduduk setempat ini menyebabkan banyak tokoh PKI bersikap sebagai tokoh. Mereka tidak membaur dengan penduduk di desa-desa. Tidak makan bersama mereka. Tidak tinggal bersama mereka. Tidak bekerja sama mereka. Mereka cenderung bersifat sebagai atasan yang perlu menerima pelayanan istimewa, bagaikan raja-raja kecil di desa-desa.

Kebiasaan hidup sebagai borjuis di kota-kota tetap dilakukan di Blitar Selatan. Sebagai contoh adalah masalah kebersihan *higiene*. Rumah-rumah penduduk desa tidak berlantai semen atau ubin. Lantainya adalah tanah yang ditumbuk keras. Para orang desa terbiasa meludah di tanah di dalam rumah mereka. Para tokoh ternyata merasa jijik, takut menginjak ludahan orang di lantai tanah tersebut, sehingga mereka meminta orang-orang desa yang tinggal dengan mereka berhenti meludah di lantai dan menyediakan kaleng-kaleng kosong penampung ludah yang diletakkan di pojok-pojok rumah.

Kebiasaan hidup kota yang manja tetap dilakukan di Blitar Selatan. Beberapa kader tinggi, walaupun sudah berada di desa-desa masih ingin memperoleh makanan-makanan dan rokok dari kota. Melalui kurir-kurir mereka membeli barang-barang keperluan dari

kota-kota besar, seperti Gudang Garam, Bentoel, Djie Sam Soe, dan kacang Lip Lip Hiong. Sampah-sampah bungkusan makanan dan barang-barang kota ini tentunya menarik perhatian para petugas keamanan negara. Kehadiran orang-orang kota segera diketahui oleh mereka, karena rakyat di desa-desa tidak mungkin mampu membeli barang-barang tersebut. Ini mempermudah pasukan penumpas untuk mengetahui di mana para tokoh PKI bersembunyi dan di mana basis koordinasi gerakan bersenjata dilakukan.

Kehadiran beberapa pemuda Tionghoa yang mengikuti kelompok Blitar Selatan ini ternyata membantu dipereratnya hubungan antara pendatang kota dan penduduk desa. Mereka ternyata berhasil melakukan praktik akupunktur membantu penduduk di desa untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan tanpa obat-obatan yang tidak mampu dibelinya.

Munir menyatakan bahwa bilamana semua kegiatan bersenjata ditunda selama setengah tahun sambil membiasakan para tokoh PKI hidup sebagai rakyat jelata di desa-desa, dan tidak menyusun kekuatan bersenjata dalam keadaan dikejar-kejar di daerah Blitar Selatan, perkembangan dan keadaannya pasti berbeda.

Kesalahan yang paling mencolok berkaitan dengan tidak adanya pengalaman para tokoh PKI dalam menyusun kekuatan bersenjata. Memang pada kenyataannya, sebelum tiba di Blitar Selatan, mereka bukan ahli-ahli pertempuran gerilya. Pengetahuan tentang pertempuran gerilya diperoleh dari buku-buku tentang Revolusi Tiongkok yang dipimpin oleh Ketua Mao. Akan tetapi mereka tidak mengikuti apa yang dicanangkan dalam buku-buku tersebut dengan baik dan saksama. Pimpinan dan pengarahan pada waktu yang paling dibutuhkan tidak datang dari komando pusat. Kekuatan bersenjata kecil terpencar-pencar dan tidak menerima komando yang jelas dari pimpinan.

Blitar Selatan ternyata dipilih sebagai "basis" karena dalam Pemilihan Umum, PKI memperoleh suara terbanyak di daerah itu.

Pengertian basis dalam hal ini tentunya tidak tepat. Blitar Selatan baru bisa dikatakan basis PKI bilamana semua ketentuan PKI berlaku secara mutlak di daerah tersebut. Kenyataannya tidak demikian.

Kesalahan yang paling serius terletak pada metode penyusunan kekuatan bersenjata. Ini dilakukan secara terburu-buru. Tidak terdapat kesabaran dan mau cepat menang.

Sifat tidak sabar inilah yang menyebabkan persiapan-persiapan tidak berlangsung dengan baik. Seharusnya kekuatan bersenjata disusun sedemikian rupa sehingga kemenangan bisa diperoleh dalam gempuran pertama kemenangan. Yang terjadi adalah kekuatan bersenjata disusun ketika para tokoh pimpinan berada dalam keadaan dikejar-kejar. Sehingga kekuatan tidak dikonsolidasi secara rapi dan teliti.

Soekatno dan Hardoyo sebagai pimpinan tergesa-gesa menganjurkan para tentara yang bersimpati pada PKI untuk membawa senjata dan meninggalkan posisi mereka dari ABRI untuk memperkuat gerakan bersenjata di Blitar Selatan. Akan tetapi tidak ada persiapan yang baik untuk menampung mereka. Tidak dipikirkan bagaimana memberi makanan untuk sedemikian banyaknya pasukan yang datang ke Blitar Selatan.

Akhirnya mereka terpaksa melakukan perampokan-perampokan. Tadinya yang dirampok adalah orang-orang kaya yang dianggap kejam. Akan tetapi karena jumlah yang dirampok bertambah, definisi kejam tidak lagi dipergunakan. Banyak orang biasa pun dirampok. Perampokan yang dilakukan terhadap penduduk di daerah yang ingin dijadikan basis tentunya bukan kebiasaan orang-orang yang menamakan dirinya komunis.

Perampokan-perampokan bersenjata ini dengan sendirinya mengundang perhatian petugas-petugas keamanan negara, sehingga dalam waktu singkat rezim militer Soeharto mengetahui bahwa ada upaya penyusunan bersenjata di daerah Blitar Selatan. Kekuatan

militer Soeharto segera mengadakan penyelidikan dan Blitar Selatan dikepung ketat. Karena para tani kaya dan penduduk yang berada sering dirampok, mereka yang tadinya bisa diajak untuk membantu gerakan bersenjata Blitar Selatan malah menjadi musuh PKI. Mereka turut membantu operasi militer pemerintah menghancurkan PKI di Blitar Selatan.

Kegagalan Blitar Selatan ternyata lebih cepat dialami karena adanya pengkhianatan luar biasa dari beberapa tokoh PKI yang tertangkap. Pembocoran-pembocoran yang menunjukkan pangkalan-pangkalan dan terowongan-terowongan yang telah dibangun justru datang dari tokoh utama PKI di Blitar Selatan, Suwandi. Ia bukan saja berkhianat tetapi juga bekerja untuk penguasa militer. Aktif menganjurkan rakyat di Blitar Selatan untuk membantu pemerintah menghancurkan barisan bersenjata PKI. Di samping pengkhianatan orang-orang PKI sendiri, pemerintah juga dengan mudah menyelundupkan orang-orangnya ke dalam organisasi PKI di Blitar Selatan. Dengan demikian rahasia kekuatan yang dibina dapat dengan mudah diketahui dan diikuti pemerintah.

Ketika pengejaran mulai dilakukan tentara pada awal 1968, banyak tokoh PKI yang berada di sana ternyata tidak bersikap gagah. Mereka justru meninggalkan barisan yang dipimpinnya dan mementingkan keselamatan dirinya sendiri.

Ini menyebabkan penduduk setempat kecewa. Mereka tidak lagi bersedia membantu gerakan dan para pemimpinnya. Mereka kehilangan keinginan untuk mendukung atau menyelamatkan gerakan.

Serangan dilakukan dari darat dan udara. Serangan utama justru berlangsung ketika para pimpinan Blitar Selatan sedang berkumpul untuk merencanakan perjuta di daerah Banyuwangi dan Banten. Kursus-kursus perjuta juga diikuti oleh kader-kader Kalimantan dan Sulawesi. Oloan Hutapea dan Surachman tewas dalam serangan tersebut dan semua tokoh PKI yang terlibat

tertangkap. Banyak tokoh PKI yang tertangkap ternyata menjadi pengkhianat, membocorkan semua rahasia dan jaringan PKI semasa persiapan Blitar Selatan, bahkan turut menjadi interogator dalam pemeriksaan para anggota PKI lain yang tertangkap.

Sikap dan kualitas tokoh-tokoh PKI di berbagai penjara

Sejarah akan mengukur kualitas para pelakunya. Kegagalan G30S menunjukkan bahwa banyak tokoh PKI masuk dan aktif di PKI bukan untuk menjunjung tinggi Marxisme, tetapi untuk memperbaiki karier dan kedudukan ekonomi keluarganya.

Setelah KOK berhasil diselesaikan dan disebarluaskan, Sudisman yang bersembunyi di rumah seorang Tionghoa tertangkap.

Menurut cerita seorang tokoh CGMI yang sudah berada di penjara sebelum Sudisman tertangkap, Sudisman seharusnya bisa lolos dari penangkapan. Seorang mahasiswa Tionghoa yang di penjara telah mendengar bahwa Sujono Pradigdo ketika disiksa telah membocorkan di mana Sudisman bersembunyi. Pemuda Tionghoa itu memberanikan diri melarikan diri dari penjara untuk mendorong Sudisman untuk segera menyingkirkan diri. Akan tetapi Sudisman tidak mempercayai cerita si pemuda Tionghoa tersebut. Tidak lama kemudian, regu pasukan tentara datang dan menangkap Sudisman dan semua teman yang berada di rumah persembunyian tersebut.

Pengalaman Sudisman itu ternyata mencerminkan kebobrokan kualitas banyak tokoh dan kader tinggi PKI. Banyak kader tinggi PKI di dalam tahanan tidak tahan uji. Tidak tahan siksaan. Banyak pula yang lalu membocorkan banyak rahasia partai dan mengorbankan banyak orang-orang kecil yang menjadi kurir atau melindungi mereka ketika mereka bersembunyi setelah Peristiwa

G30S. Banyak di antara mereka bukan saja menjadi informan kekuasaan militer, tetapi turut menjadi interogator bahkan penyiksa para tahanan.

Banyak pula yang lebih bobrok dari ini. Hanya untuk sekedar memperoleh sebungkus kecil rokok, mereka rela mencelakakan teman-teman yang banyak menolong mereka. Banyak tidak tahan untuk tidak merokok, sehingga di penjara bersedia mencari putung-putung rokok di pekarangan penjara.

Perkembangan PKI yang sedemikian pesatnya sebelum G30S mengundang orang-orang yang memiliki sifat oportunis semacam ini. Peringatan Mao kepada Aidit sebelum G30S membuktikan kebenarannya. Sebagian besar pimpinan PKI tidak berasal dari kelas buruh. Mereka ternyata tidak tahan uji. Dalam penjara, sikap mereka mengecewakan.

Banyak tahanan muda bertanya: Bagaimana mereka bisa menjadi tokoh PKI? Mereka mengajak kita untuk berkorban, tetapi merekalah yang lebih dulu menyerah, sebelum mencapai penderitaan yang kita alami?

Jawaban seorang tokoh PKI tua yang pernah berkali-kali dipenjara dan pernah ikut dalam pemberontakan pada tahun 1926, menyatakan bahwa hal ini terjadi karena dalam perkembangan PKI yang diutamakan adalah jumlah anggotanya, bukan kualitasnya. Akibatnya kualitas banyak anggota, bahkan tokohnya ketika berada dalam masa uji, segera tampak.

Persoalan yang banyak dibicarakan, tetapi tidak pernah dicapai sebuah kesimpulan adalah masalah banyaknya orang-orang penting PKI yang bersedia menjadi interogator, pemeriksa orang-orang yang dituduh anggota PKI atau simpatisan PKI.

Apa yang mendorong mereka untuk bersedia menjadi interogator dan tukang tunjuk para kawannya sendiri sehingga mereka serta keluarganya harus mengalami penderitaan-penderitaan berat dan hidupnya menjadi berantakan? Di samping

menimbulkan penderitaan untuk para kawan dan keluarganya ini, mereka pun telah menghancurkan organisasi-organisasi partai di mana mereka pernah menjadi anggotanya dan bahkan pernah memainkan peranan sebagai pemimpin.

Pada awalnya pemeriksaan di berbagai penjara tidak lancar. Pihak penguasa penjara dan intel yang memeriksa para tahanan tidak banyak mengerti lika-liku kepartaian PKI dan organisasi-organisasi massanya. Oleh karena itu mereka memaksa para tahanan untuk mengisi riwayat hidup masing-masing.

Akan tetapi setelah penguasa militer menggunakan taktik menangkap maling dengan maling, penangkapan massal dilakukan dengan menggunakan para kader dan tokoh PKI sebagai tukang tunjuk. Para kader PKI yang tidak tahan siksa ini diimbau dengan berbagai fasilitas.

Di penjara Salemba, Jakarta, tim pemeriksa mencari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pengadilan untuk membantunya. Para tahanan yang ditunjuk oleh tim pemeriksa ini kemudian diperintahkan untuk membantu tim pemeriksa menyusun daftar siapa yang harus diinterogasi dan menyusun daftar pertanyaan dalam ruang interogasi dan penyiksaan. Salah satu interogator yang terkenal ganas adalah Atjep. Dengan bantuan orang-orang PKI, ia berhasil menangkap banyak orang-orang PKI lainnya, sehingga banyak penjara penuh, jauh melebihi kapasitas penampungan penjara-penjara tersebut.

Di Jakarta ada tempat tahanan di daerah Kebayoran Lama yang dinamakan Satgas Intel—satuan tugas intel. Banyak tahanan yang dipindah ke sana terkejut melihat kenyataan bahwa tidak sedikit tokoh-tokoh PKI yang berpakaian seragam intel, yaitu baju tetoron biru-laut dan celana tetoron biru-tua. Di antaranya adalah Hartoyo, tokoh Barisan Tani Indonesia (BTI), Profesor Bakri Siregar yang baru kembali dari Peking, dan Dr. Suhadiono yang baru kembali dari Moskow setelah menggondol gelar PhD-nya. Dr. Suhadiono pernah

menjadi kepala bagian Indonesia, Radio Moskow. Walaupun mereka mengenakan seragam intel, mereka tidak ikut berfungsi sebagai interogator.

Berbeda dengan Datong, seorang tokoh Pemuda Rakyat; Djufri alias Aradjibal, pelukis Lekra yang mengadakan pameran-pameran lukisan di Peking dan kemudian menjadi mantu Tjoa Ma Tjoen, pemimpin Merpati Film; dan Basuki, dosen Ali Archam, sekolah ilmu Marxisme PKI. Tampaknya Datong menjadi kepala interogator dan paling sengit dalam menangkapi orang-orang PKI. Ia berpendapat bahwa PKI harus ditumpas karena telah mencelakakan banyak orang yang tidak berdosa.

Datong katanya tertangkap di Surabaya bersama istrinya yang kemudian menjadi kepala dapur di tahanan Satgas Intel. Datong ternyata memperoleh kepercayaan penguasa penjara. Ia pernah menyatakan dalam sebuah wawancara dengan wartawan asing: *PKI can only come back when we are asleep.*

Ada seorang interogator lain yang mengecewakan banyak tahanan, yaitu Kusnan. Ia adalah sekretaris pribadi Sudisman dalam pekerjaan Sekretariat CC dan anggota komisi verifikasi. Ada beberapa tahanan yang menyatakan bahwa Kusnan tidak membocorkan semua hal. Akan tetapi Mayor Arjuna, mantan Presiden Direktur Perusahaan Hewan Indonesia (Perhewani) mengalami hal yang mengecewakannya. Ia ditangkap dan diperiksa oleh Mayor Suroso, Kepala Operasi Kalong. Suroso menuduhnya sebagai sekretaris fraksi PKI di Perhewani. Oleh Arjuna tuduhan ini dibantah dan menyatakan bahwa ia tidak tahu-menahu tentang keberadaan fraksi PKI di Perhewani. Suroso lalu bertanya apakah ia kenal dengan Kusnan. Arjuna juga membantah bahwa ia pernah berkenalan dengan Kusnan. Suroso lalu membuka *gordijn* yang menutupi skema lengkap yang menggambarkan hubungan CC PKI dengan berbagai ormas-ormas yang berafiliasi dengan PKI, lengkap dengan nama-nama orang yang bersangkutan. Arjuna tetap

menyangkal. Tidak lama kemudian Suroso memanggil Kusnan untuk masuk ruang pemeriksaan. Kusnan kemudian membeberkan hubungannya dengan Arjuna. Kusnan memang menjadi penghubung Arjuna sebelum Peristiwa G30S. Arjuna terpaksa menerima nasib. Karena pemeriksaan itu, Arjuna ditahan bertahun-tahun dan di penjara menderita penyakit ginjal parah. Tidak lama setelah ia bebas pada tahun 1975, ia meninggal dunia dengan status tahanan rumah. Ia adalah salah satu korban Kusnan yang telah membocorkan semua jaringan PKI dan ormas-ormas yang ia ketahui dengan baik.

Yang mengecewakan banyak orang adalah banyak kader-kader PKI yang menjadi tukang tunjuk dan bahkan menjadi interogator ini turut menyiksa para tahanan. Di antaranya adalah Burhan Kemala Sakti dan Jimmy Bong alias Jimmy Lumenta.

Ironisnya mereka yang menjadi tukang tunjuk dan interogator ini ternyata juga tidak dibebaskan oleh penguasa militer. Begitu informasi yang dibutuhkan penguasa habis disedot dari mereka, mereka pun kembali masuk dalam penjara sebagai tahanan-tahanan biasa. Pada waktu itulah mereka mengalami penderitaan lahir batin, karena di penjara mereka dimusuhi para tahanan, bahkan mengalami siksaan fisik sebagai tindakan balas dendam para kawan yang dikorbankan mereka dalam berbagai pemeriksaan.

Contohnya Burhan Kemala Sakti. Walaupun ia berjasa dalam menangkap Sudisman dan Supardjo, dan pernah memperoleh bintang penghargaan penguasa militer, ia dijatuhi hukuman penjara 13 tahun. Baru pada tahun 1977 ia dibebaskan.

Kalau diperhatikan, orang-orang PKI yang membantu intel penguasa militer bisa dibagi dalam beberapa kelompok.

Golongan pertama terdiri dari mereka yang berfungsi sebagai tukang tunjuk, yang selalu berusaha mencari dan menangkap kawan-kawannya sendiri.

Golongan kedua terdiri dari orang-orang yang senang menjadi interogator, menggunakan pengetahuan tentang seluk-beluk organisasi PKI untuk mengorek keluar informasi dari para kawannya yang tidak bisa memungkiri berbagai tuduhan.

Golongan ketiga terdiri dari para sarjana atau cendekiawan yang bekerja sebagai ahli-ahli di "laboratorium". Mereka meneliti sampai di mana kebenaran pengakuan-pengakuan yang keluar dari mulut para kawannya ketika diinterogasi. Penelitian-penelitian inilah yang membantu penguasa militer dan mempercepat upaya penghancuran organisasi PKI.

Di Satgas, para tahanan yang sedang diperiksa dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, yang mereka namakan "*safe house*". Ruangan ini dulunya adalah bagian gedung studio film di Kebayoran Lama yang dibagi dalam kerangkeng-kerangkeng tertutup dengan kawat seperti kandang ayam.

Para tahanan ditempatkan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan kamp tahanan. Di dalam setiap kerangkeng itu dimasukkan seorang tahanan yang sudah menjadi cecunguk, yang bertujuan "nguping" setiap pembicaraan yang terjadi di antara para tahanan dalam kerangkeng itu. Kadang kala mereka merekam keterangan-keterangan yang dibutuhkan tim pemeriksa. Bilamana para cecunguk ini gagal menjalankan tugas, mereka dipindah kembali ke penjara Salemba atau dikirim ke Pulau Buru.

Para cecunguk ini bersedia melakukan tugas yang merugikan para kawan ini karena memperoleh janji muluk-muluk, seperti akan dibebaskan, atau diizinkan pulang menjenguk keluarganya untuk beberapa hari.

Banyak dari para interogator ini diubah status tahanannya, menjadi tahanan kota. Akan tetapi mereka diancam bahwa status tahanan kota itu dicabut dan mereka kembali menjadi tahanan biasa kalau tugas yang diberikan tidak berjalan sesuai kehendak tim

pemeriksa. Contohnya Profesor Bakri Siregar yang pada awal 1970 mengenakan seragam intel dan bekerja di "laboratorium". Ternyata pada tahun 1972, ia dipindah ke Salemba dan pada tahun 1975 dipindah ke tempat lain. Tidak jelas dengan tugas apa.

Berbeda dengan metode kerja Satgas Intel, Atjep yang bekerja langsung di bawah Kopkamtib pusat mempunyai pembantu-pembantunya sendiri. Pembantu yang sering tampil sebagai interogator antara lain, Soekarno—mantan sekretaris pribadi Sujono Atmo—Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Hardjito—mantan wartawan *Harian Rakyat*.

Hardjito banyak mengorbankan para kawannya. Antara lain Amir Alwi dan Tio King Hok (wartawan foto) yang bekerja di harian *Warta Bakti*. Mereka berdua disumpah untuk menjadi anggota PKI oleh Hardjito. Di dalam penjara, ternyata Hardjito lah yang menjadi interogator mereka. Amir Alwi ketika diperiksa oleh Hardjito menyatakan: "Saudara sajalah yang menulis bagaimana saya harus menjawab, karena Saudara sudah mengetahui semua tentang saya dan nanti saya menandatangani saja proses verbal yang Saudara susun itu." Amir Alwi dan Tio King Hok dikirim ke Pulau Buru.

Atjep ternyata berhasil menggalang tim informan dan interogator yang membantunya menghancurkan organisasi PKI dan para ormasnya. Beberapa tokoh penting PKI dan ormas seperti Suroso dari OISRA (Organisasi Internasional Solidaritas Rakyat-Rakyat Asia-Afrika), Nico Laleno dari CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesi), dan K. Werdojo tokoh Partindo, di-"simpan" dalam tahanan Atjep. Hingga tahun 1975 Atjep masih bersandar atas berbagai informan yang disimpannya itu. Imbalan dari informasi yang diberikan sering berbentuk izin pulang ke rumah secara teratur, misalnya seminggu sekali.

Penguasa militer seringkali menggunakan cara mengadu-domba di antara para tahanan. Mereka memasukkan kembali

cecunguk-cecunguk yang sudah tidak berguna lagi ke dalam tahanan-tahanan.

Untuk mencegah berhasilnya siasat penguasa itu, para tahanan mengambil kesepakatan: Setiap orang boleh mencari jalan selamat dan boleh berusaha mencari jalan untuk meringankan perkaranya, dengan syarat tidak boleh mencelakakan orang lain.

Untuk mendapat jalan selamat dan meringankan hukuman yang mereka ingin peroleh, boleh saja orang sembahyang sehari lima kali secara demonstratif. Boleh saja orang membaca *Al Qur'an.* Boleh saja orang berusaha mengambil hati perwira. Yang penting adalah tidak mencelakakan orang lain dan tidak ikut menghancurkan organisasi PKI.

Cara pemeriksaan dan taktik yang dipergunakan juga berbagai macam. Selain penyiksaan keji, dilakukan pula siasat yang jitu. Cukup banyak tapol yang terkecoh olehnya.

Ada sebuah contoh. Seorang tokoh PKI yang diketahui tabah. Petugas penjara menyusupkan salah seorang tapol yang telah berkhianat untuk mendekatinya. Ia berhasil menjadi teman kepercayaannya. Pengkhianat ini lalu mengajaknya melarikan diri dari penjara. Kesempatan itu memang disiapkan petugas penjara.

Di luar, tokoh PKI ini segera berhubungan dengan para teman yang aktif dalam kegiatan di bawah tanah. Dan si pengkhianat, yang sudah menjadi kepercayaannya dibawa ke mana-mana olehnya. Sesudah informasi tentang semua kontaknya diperoleh, tokoh PKI itu ditangkap lagi. Dan ini disusul dengan penangkapan sekitar 200 orang lainnya yang tadinya sudah berhasil menghindari penangkapan dan melakukan kegiatan di bawah tanah.

Ada pula kader PKI muda yang sudah dijadikan informan. Ia disiksa di hadapan beberapa tokoh PKI lainnya. Karena siksaan hebat dan ia kelihatan tabah, ia menjadi kepercayaan mereka, sehingga ketika ada kesempatan lolos dari penjara, namanya di luar baik. Ia pun dihubungkan dengan kegiatan di bawah tanah,

sehingga dalam waktu sekejap, jaringan di bawah tanah ini terbongkar dan banyak aktivis yang berada di dalamnya tertangkap. Sebuah kenaifan yang harus dibayar mahal.

Selain cerita tentang pengkhianatan, ada pula banyak cerita yang menunjukkan kegagahan tapol yang gigih bertahan, walaupun menghadapi berbagai siksaan hebat. Cukup banyak tapol keturunan Tionghoa, yang sangat dipengaruhi oleh novel-novel revolusi Tiongkok, yang menjadikan siksaan sebagai tantangan, untuk menguji diri sampai di mana mereka tahan siksa. Salah satu di antaranya masih bisa tersenyum ketika disiksa habis-habisan sambil melambaikan tangannya, menyalami tapol lain yang melihat siksaan itu.

Jadi banyak tokoh PKI yang tidak tahan uji di dalam tahanan. Mereka mudah menjual kawan-kawan sendiri hanya untuk menghindari siksaan atau karena sekedar mendapatkan sepotong rokok. Banyak pula yang mencari jalan selamat dengan menonjolkan kesetiaan mereka terhadap agama Islam.

Sikap mereka yang tidak terpuji ini mengecewakan banyak pemuda yang pernah menjadi anak-anak buah mereka. Tidak sedikit yang mengasingkan para tokoh ini, bahkan bilamana berkesempatan melempari mereka dengan batu di penjara, sehingga penguasa penjara harus memisahkan mereka dengan para bekas anak buahnya.

Pemerintah Militer Soeharto

Tumbuh dan berkembangnya Soeharto

Adanya perintah Soekarno pada tanggal 1 Oktober 1965 untuk menghentikan semua kegiatan, membuat pimpinan G30S berhenti bergerak. Akibatnya, pasukan-pasukan di bawah komando gerakan ini dengan mudah dilucuti oleh kekuatan yang dipimpin Soeharto. Dalam beberapa jam di sore hari pada tanggal 1 Oktober, semua pos G30S di Jakarta dilumpuhkan. Orang-orang yang terlibat ditangkap. Sekitar pukul 7 malam pada hari yang sama, jadi sekitar 17 jam setelah gerakan dimulai, Soeharto telah menguasai Jakarta. Tokoh-tokoh G30S terpaksa melarikan diri, meninggalkan pasukannya yang hancur. Dan sejak itu Soekarno berada di dalam posisi yang lemah.

Dimulailah proses penghancuran PKI, pembunuhan dan penangkapan massal, mobilisasi massa untuk menghantam kebijakan politik Soekarno dan pada akhirnya, penjatuhan Soekarno sebagai kepala negara. Kesemuanya ini dicapai dalam waktu sangat singkat. Akan tetapi korban yang jatuh berjumlah besar—dikatakan melebihi 1 juta manusia yang tidak bersalah telah dibunuh secara sistematik dan ratusan ribu warga negara kehilangan hak kebebasan

hidup di negara yang seharusnya menjunjung tinggi *rule of law* dan hak asasi manusia (HAM).

Seperti dituturkan di bagian lain, kepentingan Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelang akhir 1965 berembuk. Kedua *superpower* ini hendak mencegah berkembangnya pengaruh RRT di Indonesia.

Uni Soviet menginginkan PKI berubah haluan. Menjauhi RRT. Sedangkan Amerika Serikat menginginkan PKI hancur. Pimpinan PKI pada waktu itu rupanya tidak menyadari bahwa kedua *superpower* ini giat berupaya menggagalkan berbagai program politik PKI dan Presiden Soekarno. Mereka rupanya terperangkap oleh permainan politik dari luar.

Seperti digambarkan di bagian lain, tangan-tangan gelap internasional telah berhasil menggagalkan Konferensi Asia–Afrika II di Aljazair. Konferensi Asia–Afrika II ini akan lebih memperkokoh solidaritas rakyat Asia–Afrika yang merugikan kepentingan Amerika Serikat di satu pihak dan merugikan kepentingan Uni Soviet di pihak lain. Uni Soviet tidak diikutsertakan dan tentunya khawatir bahwa pengaruh RRT menjadi lebih besar di Asia–Afrika.

Konferensi dibatalkan karena gedung di mana ia akan diselenggarakan rusak karena ledakan. Sebenarnya gagalnya pelaksanaan Konferensi Asia–Afrika II seharusnya mendorong Bung Karno dan PKI untuk lebih waspada dalam rangka mempersiapkan Conefo (*Conference of New Emerging Forces*) yang diprakarsai oleh Bung Karno. Berlangsungnya Conefo tentu tidak disenangi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan kedua *superpower* ini memiliki sarana dan kemampuan untuk menggagalkan pula Conefo di Indonesia sebagaimana yang terjadi dengan Konferensi Asia–Afrika II di Aljazair.

Kita bisa lihat dengan jelas sekarang ini bahwa Peristiwa G30S telah dijadikan alasan Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI.

Pihak Uni Soviet berusaha untuk tetap mempertahankan keberadaan PKI dengan pimpinan baru. Ternyata mereka gagal. Ada

berita bahwa menjelang akhir 1965 Kedutaan Uni Soviet pernah mengadakan pertemuan dengan Chaerul Saleh (Murba), Sukarni (Murba), dan Ali Sastroamidjojo (PNI). Murba diketahui sebagai musuh politik PKI di zaman demokrasi terpimpin.

Pertemuan itu membicarakan nama para tokoh yang dikehendaki Uni Soviet memimpin PKI sehingga ia bisa tetap menjadi sebuah partai politik yang berpengaruh di Indonesia. Apa pun kesimpulan pembicaraan itu tidak berhasil dilaksanakan. Kenyataan menunjukkan bahwa kekuatan Amerika Serikat yang mendukung Angkatan Darat menghancurkan PKI jauh lebih besar dan berpengaruh dibandingkan pengaruh Uni Soviet di Indonesia. Mereka berhasil menghancurkan PKI.

Memang tidak ada bukti konkret keterlibatan CIA maupun KGB dalam G30S. Akan tetapi jelas bahwa setelah 1 Oktober 1965, Amerika Serikat aktif terlibat dalam mendukung Jenderal Soeharto. Umum mengetahui bahwa seragam KAMI yang digunakan para anggota massanya di jalan-jalan diperoleh atas dana CIA. Demikian juga kendaraan-kendaraan motor yang digunakan selama berlangsungnya demonstrasi-demonstrasi di jalan-jalan.

Soeharto tidak dikenal banyak orang sebelum G30S. Akan tetapi ia bergerak cepat dan dalam waktu singkat menjadi orang yang paling berkuasa dan berpengaruh di Indonesia. Tidak ada yang bisa membuktikan secara pasti bahwa CIA sepenuhnya mendalangi perkembangan di Indonesia.

Akan tetapi hadirnya Duta Besar Amerika Serikat, Marshall Green, pada ketika itu tentu menimbulkan kesimpulan bahwa Amerika Serikat dengan CIA-nya terlibat.

Ada ciri Green yang mencolok, yaitu mobilisasi pemuda dan pelajar dalam gerakan pengganyangan. Gerakan massa ini dikoordinasikan dalam wadah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Jelas Kopkamtib langsung melakukan koordinasi dan

banyak tentara yang menyamar sebagai orang biasa terjun mendorong dan mengatur berbagai demonstrasi anti-PKI, anti ormas-ormasnya yang kemudian meluncur menjadi gerakan anti-Soekarno sendiri.

Kekejaman PKI dalam penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dibesar-besarkan. Massa dikerahkan untuk membakar gedung-gedung PKI dan para ormasnya. Rumah-rumah para tokoh PKI dan ormasnya diserang, dirusak, bahkan dibakar. Surat-surat kabar yang dianggap mendukung aliran kiri dilarang terbit. Buku-buku yang mengandung ajaran Marxisme, Leninisme, dan pikiran Mao dilarang beredar dan dibakar.

Rumah saya juga menjadi sasaran. Berkali-kali diserang KAPPI dan KAMI. Tembok-tembok dicat dengan perkataan: "Baperki cukong PKI" atau "Ganyang Baperki" atau "Ganyang Siauw Giok Tjhan". Bergerobak buku saya diambil untuk dibakar, katanya. Padahal banyak yang diambil, buku-buku dalam bahasa asing, bukan buku-buku yang mengandung Marxisme atau komunisme. Untunglah tidak ada kerusakan yang dialami. Rumah milik BR Motik yang saya sewa itu tidak dirusak atau dibakar.

Pembunuhan massal di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali yang dipelopori oleh RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie dilaksanakan. Sungai-sungai besar seperti Brantas dan Bengawan Solo berubah menjadi merah karena darah para korban yang mengalir. Penggorokan massal dilakukan di tepi sungai-sungai itu. Banyak jenazah korban mengambang di sungai-sungai tersebut.

Penjara-penjara penuh sesak. Rumah-rumah atau gedung-gedung yang dimiliki PKI atau ormasnya atau tokoh-tokohnya dijadikan tempat penahanan dan penyiksaan. Kondisi penahanan di tempat-tempat itu sangat buruk. Pada umumnya mereka yang ditahan, termasuk saya, harus tidur duduk bahkan berdiri, karena tempat tidak cukup menampung jumlah tahanan.

Penyerbuan massa — Universitas Respublica, Oktober 1965.

Baperki dinyatakan sebagai ormas PKI. Universitas Baperki, Universitas Respublica, diserang dan dibakar pada tanggal 15 Oktober 1965. "Massa" yang menyerbu terdiri dari KAMI dan KAPPI. Para mahasiswa Universitas Respublica yang melindungi gedung-gedung Universitas Respublica, melihat banyaknya orang berpotongan tentara dengan pakaian preman, mendukung aksi "massa" yang menyerbu dan membakar gedung-gedung Universitas Respublica.

Upaya saya untuk menyelamatkannya dari pembakaran tidak berhasil. Pihak kepolisian tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Bung Karno yang saya kunjungi juga tidak berdaya.

Jumlah "massa' jauh melebihi mahasiswa Universitas Respublica yang bertekad melindungi gedung-gedung. Polisi yang ada di sana hanya melihat dan tidak bertindak untuk menghentikan

penghancuran. Akhirnya, banyak gedung dan fasilitas Universitas Respublica yang dibangun secara gotong royong oleh mahasiswa, dosen, orang tua dan masyarakat, terbakar. Para dosen dan mahasiswa yang tidak berdaya melindunginya, hanya bisa mengucurkan air mata. Pimpinan universitas kemudian diganti. Yayasan baru didominasi oleh tokoh-tokoh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) dan universitas dibuka kembali dengan nama Universitas Trisakti. Berakhirlah prinsip "Pendidikan Bukan Barang Dagangan", karena dalam masa kelanjutannya, Universitas Trisakti merupakan salah satu universitas yang tinggi uang kuliahnya. Cabang-cabang Universitas Respublica di kota-kota lain ternyata tidak dilanjutkan. Gedung-gedung yang sedang dalam tahap pembangunan dibiarkan terlantar.

Sekolah-sekolah Baperki diambil alih oleh negara dan dijadikan sekolah-sekolah negeri. Para kepala sekolahnya diganti, demikian juga banyak guru-gurunya. Pada awal kekuasaan Soeharto, sekolah-sekolah ini dijadikan juga markas KAPPI di mana para siswa dan guru sekolah diteror untuk menunjukkan sikap anti-PKI, anti-Baperki.

Situasi sudah dikuasai sedemikian rupa oleh kekuatan Soeharto. Ia bisa merajalela tanpa pencegahan apa pun. Tindakan kriminal membakar gedung swasta tidak diapa-apakan, bahkan jelas didukung oleh kekuatan Kopkamtib yang seyogianya menjaga keamanan dan menjamin ketertiban.

Soekarno tetap mencoba untuk melawan arus ini. Tapi terlambat. Kekuatan militer yang sebenarnya sebagian besar mendukungnya, telah dikebiri, karena sikapnya sendiri di awal bencana. Perintahnya untuk menghindari pertumpahan darah justru menimbulkan pembunuhan massal yang tidak dapat dihentikan oleh kekuatan yang tidak menyetujuinya. Semua perwira Angkatan Bersenjata yang loyal terhadapnya, seperti Omar Dhani, Mursyid,

dan Rukman, ditahan oleh Kopkamtib. Kekuatan bersenjata yang mampu mendukung Soekarno telah dihancurkan.

Soekarno berhasil mempertahankan status hukum PKI yang bernaung dalam konsep Nasakom hingga bulan Maret 1966. Walaupun banyak tokohnya dibunuh atau ditahan, tuntutan untuk membubarkannya tetap ditolak Soekarno. Walaupun demikian, secara sistematik kekuatan Soeharto terkonsolidasi. Dalam *reshuffle* kabinet pada tahun 1966, ia diangkat menjadi Menteri Pertahanan.

Pada tanggal 11 Maret 1966, tiga jenderal pendukung Soeharto—Amir Machmud, Jusuf dan Basuki Rachmat—berhasil memaksa Soekarno untuk mengeluarkan apa yang kemudian dikenal sebagai Supersemar—Surat Perintah Sebelas Maret.

Yang menarik adalah kenyataan bahwa ketiga jenderal yang mengunjungi Soekarno untuk menuntut dikeluarkannya Supersemar ini adalah jenderal-jenderal yang tidak dimusuhi PKI sebelum G30S. Bahkan Jenderal Amir Machmud dan Jenderal Basuki Rachmat seperti yang digambarkan sebelumnya masuk dalam Dewan Revolusi. Sedangkan Jenderal Jusuf adalah ipar Kolonel Saelan, pengawal setia Presiden Soekarno. Jenderal Soeharto yang berkepentingan malah tidak hadir dalam pertemuan itu. Ia dikabarkan sakit dan tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya.

Isi sesungguhnya surat perintah ini tidak pernah jelas. Versi yang diterbitkan dalam harian *Gesuri*—Genta Suara Revolusi, berbeda dengan apa yang diterbitkan oleh harian *Angkatan Bersenjata*. Apa sesungguhnya tujuan surat perintah ini?

Menurut Soebandrio yang hadir di dalam pertemuan Soekarno dengan ketiga jenderal tersebut, dasarnya adalah memberi kekuasaan ke Soeharto untuk menjamin keamanan dan ketertiban dengan syarat, Soeharto harus tetap memberi laporan ke Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Pihak Soeharto dan ketiga jenderal menyebarluaskan pengertian bahwa surat perintah ini merupakan *transfer of authority*, di mana Soeharto

memiliki kekuasaan penuh sebagai presiden tanpa menjadi presiden.

Setelah surat perintah itu dikeluarkan, banyak menteri yang dianggap pendukung Soekarno ditahan, termasuk Soebandrio, Chaerul Saleh, Sumarno, Setiadi, dan Oei Tjoe Tat.

Setelah itu, secara resmi Soeharto menyatakan bahwa PKI dan berbagai organisasi massa yang dianggap berafiliasi dengannya dinyatakan terlarang. Baperki termasuk dalam daftar organisasi terlarang ini. Saya sudah meringkuk dalam penjara sejak 4 November 1965. Kesemuanya ini dilakukan tanpa konsultasi dengan Soekarno. Perintah-perintah Soekarno pun tidak pernah diindahkan lagi oleh Soeharto.

Salah satu contoh adalah cerita Dr. Sumarno, Menteri Dalam Negeri di masa krisis tersebut, kepada saya ketika saya bertemu dengannya di penjara Nirbaya pada tahun 1972. Ia terkejut menemui saya karena ia beranggapan saya telah bebas. Ia menyatakan bahwa di dalam salah satu rapat kabinet pada awal 1966, ia mendengar sendiri perintah Bung Karno ke Soeharto untuk membebaskan saya dari tahanan. Perintah itu diiyakan, tetapi kenyataannya saya tetap meringkuk dalam tahanan hingga tahun 1978.

Langkah selanjutnya adalah mengganti susunan DPR-GR dan MPRS. Kursi-kursi yang tadinya diisi oleh PKI dan para organisasi massa pendukungnya dan juga orang-orang yang dianggap mendukung Soekarno, diisi oleh banyak anggota ABRI dan golongan yang mendukung kebijakan Soeharto. Dengan demikian kekuatan politik Soekarno secara hukum dan politis dihancurkan pula.

Soekarno masih tidak menyerah. DPA diubah strukturnya dan ia mencoba menyelenggarakan sidang DPA pada tanggal 8 Mei 1966 untuk membuat rumusan politik baru yang mempertahankan kebijakan politiknya. Akan tetapi oleh Kopkamtib sidang ini dibatalkan.

Soekarno dan Soeharto

Pelantikan Soeharto sebagai KSAD

Soekarno mencoba lagi untuk menggunakan sidang MPRS sebagai sarana untuk melaksanakan Pemilu II. Upaya ini juga tidak bisa dijalankan. Soekarno tidak lagi memiliki pendukung yang berarti.

NU yang tadinya mendukungnya, telah masuk barisan Soeharto. PNI pecah menjadi dua—PNI A–Su (Ali Sastroamidjojo dan Surachman) tetap mendukung garis Soekarno dan PNI Osa–Usep (Osa Maliki dan Usep) mendukung barisan Soeharto. Kekuatan Ali tidak bertahan lama. Banyak pengikutnya ditahan atau melarikan diri menghindari penangkapan. Kopkamtib segera melibatkan diri dalam perkembangan PNI.

Dalam kongres partai, Osa Maliki dikukuhkan sebagai Ketua PNI baru dan secara resmi PNI menentang kebijakan Soekarno. Semua pendukung Soekarno di dalam tubuh PNI kemudian di-"bersihkan", baik ditahan maupun dipecat. Akhirnya partai yang didirikan oleh Bung Karno, berubah menjadi alat untuk menjatuhkannya.

Walaupun Soekarno tetap presiden, tetapi ia tidak lagi memiliki kekuasaan apa pun. Kehadirannya tetap dianggap sebagai perintang politik Soeharto. Di dalam pertemuan Angkatan Darat di Cipayung pada akhir Januari 1967, beberapa jenderal di antaranya Dharsono, Kemal Idris, Sarwo Edhie mempersiapkan proses penggantian Soekarno dengan Soeharto. KAPPI dan KAMI dikerahkan di jalan-jalan untuk melakukan tuntutan turunnya Soekarno sebagai presiden dengan menonjolkan berbagai kelemahan Soekarno.

NU di bawah pimpinan ketua umumnya, Kyai Dachlan, mempelopori serangan politik terhadap Soekarno. NU menyatakan bahwa Soekarno terlibat dalam Peristiwa G30S.

Sampai saat itu, pendapat resmi Soekarno adalah: G30S terjadi karena adanya kebingungan di dalam tubuh PKI, adanya kegiatan Nekolim dan adanya elemen buruk di dalam tubuh Angkatan Bersenjata. Ia tidak pernah menyatakan PKI terlibat di dalamnya.

Soekarno tetap berupaya bertahan. Ia ingin mencapai sebuah kompromi di mana ia tetap presiden tetapi memberi kepercayaan kepada Soeharto untuk menjalankan tugas sehari-hari. Usul Soekarno tidak disambut oleh Soeharto yang jelas berada di atas angin. Situasi sudah matang untuk menjatuhkan Soekarno.

Pada tanggal 9 Februari 1967, NU mengajukan resolusi yang disetujui oleh parlemen, yang menuntut Soekarno meletakkan jabatan dan proses hukum dimulai untuk membawanya ke pengadilan atas keterlibatannya dalam Peristiwa G30S. Resolusi ini dibawa ke MPRS dan Badan Pekerja yang dipimpin oleh Nasution menyetujuinya pula.

Pada tanggal 11 Februari 1967, pimpinan ABRI mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu usul Soeharto disetujui, yaitu: Soekarno meletakkan jabatan dan menyerahkan posisi presiden ke Soeharto. Usul para Kepala Staf Angkatan Bersenjata ini ditolak oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Februari, Soekarno siap mengumumkan bahwa Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintah ke tangan Soeharto, akan tetapi tetap menentukan bahwa Soeharto harus melaporkan tugas sehari-hari ke Soekarno bilamana dianggap perlu.

Sambutan Soekarno dianggap bertentangan dengan resolusi parlemen. Pada tanggal 23 Februari, NU mengajukan usul untuk mengadakan sidang khusus MPRS untuk memutuskan kedudukan Soekarno.

Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1967, MPR bersidang. Ruang sidang dijaga keras oleh kekuatan Angkatan Darat. Sidang ini secara resmi memutuskan Soekarno turun sebagai presiden dan Soeharto dinobatkan sebagai pejabat presiden RI.

Dengan Supersemar, Soekarno telah menjalankan *political suicide*. Dalam pengertian lain, Soeharto telah melakukan kudeta jalan damai. Apa pun interpretasinya, Soeharto berhasil menjadi seorang yang paling berkuasa di Indonesia. Dan kekuasaannya didukung oleh kekuatan Amerika Serikat dan para pendukungnya

yang memang tidak menyenangi kehadiran Soekarno dalam kancah internasional.

Timbullah pertanyaan: Kesemuanya ini apakah merupakan provokasi pihak Amerika Serikat supaya PKI bergerak mendahului apa yang mungkin tidak ada, yaitu Dewan Jenderal dan rencana kudetanya, sehingga kekuatan militer dengan dukungan luar negeri memiliki alasan untuk menghancurkannya? Atau pimpinan PKI melakukan keteledoran politik yang melanggar teori revolusi yang seharusnya dipahaminya: Revolusi bukan barang yang bisa diekspor dan bukan permainan kudeta.

Pelanggaran UUD 45 dan Pancasila

Dengan semboyan "Memurnikan pelaksanaan UUD 1945", Bung Karno telah digeser ke pinggir. Tiga tahun setelah mengalami penderitaan sebagai tahanan rumah dengan tuduhan terlibat Peristiwa G30S, Bung Karno meninggal dalam keadaan yang membuat para pendukungnya merasa penasaran.

Penasaran, karena ketika ia sakit keras, ia tidak dapat ditengok para sahabat karibnya. Juga penasaran karena permintaannya untuk berobat ke luar negeri tidak diperkenankan oleh pemerintah. Padahal ketika ia menjadi presiden, ia selalu menunjukkan toleransi tinggi terhadap para musuh politiknya. Sjahrir diizinkannya memperoleh perawatan di luar negeri dengan ongkos negara. Penasaran karena ternyata ia tidak dikebumikan menurut pesan terakhirnya. Penguasa militer menentukan ia dikubur di Blitar.

Kesemuanya ini membenarkan pendapat bahwa untuk memperoleh penghormatan yang resmi dan layak sesuai dengan jasa-jasanya, seorang tokoh perjuangan kemerdekaan harus menutup mata pada waktu yang tepat.

Bung Karno berhasil mencapai keseimbangan politik di masa jayanya, yaitu berdiri di atas dua kekuatan politik kuat, PKI di satu kaki dan ABRI khususnya Angkatan Darat di kaki lain. Ketika PKI dihancurkan oleh Angkatan Darat, keseimbangan ini hilang. Bung Karno mudah dijatuhkan.

Yang terjadi setelah Soeharto menggantikan Soekarno adalah pelanggaran UUD 45 di berbagai bidang penting.

Digantinya Soekarno dengan Soeharto, seorang jenderal, diikutsertai dengan penjenderalan berbagai posisi penting negara, dari kedudukan menteri, gubernur, hingga duta besar. Sedangkan jabatan yang lebih rendah pun, seperti bupati, lurah, dan lain-lain, diisi oleh perwira-perwira militer yang sebelumnya ditugas-sipilkan terlebih dahulu.

Penetapan MPRS yang berjudul *Banting Setir untuk Berdikari* bukan hanya dibatalkan tanpa ramai-ramai, melainkan mengalami *putar balik setir*. Kekayaan alam Indonesia dapat dikuras ke luar untuk kemakmuran maksimal modal raksasa dan para "pembantu"-nya di Indonesia. Bilamana UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, kekayaan alam Indonesia tentunya digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pada bulan Februari 1967, di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia masuk kembali ke IMF (International Monetary Fund). Enam bulan sebelum itu delegasi khusus dari IMF datang mengunjungi Indonesia. Dan kunjungan ini membuahkan beberapa rekomendasi. Di antaranya:

1. Dicapainya keseimbangan budget
2. Pengeluaran untuk pemerintah dibatasi 10% dari penghasilan nasional
3. Sistem pengumpulan pajak harus diperbaiki
4. *Exchange rate* ditentukan secara realistik

5. Subsidi pemerintah akan dihentikan dengan menganalisa kebijakan harga semua perusahaan negara
6. Jumlah pegawai negeri harus diperkecil
7. Kredit bank akan dibatasi
8. Akan diciptakan situasi yang akan mengundang penanaman modal asing

Undang-undang untuk penanaman modal asing dikeluarkan sebagai UU No.1/1967 yang menjamin kepentingan modal asing. Setiap modal asing yang akan masuk ke Indonesia tidak akan diambil alih selama 20 tahun (30 tahun untuk modal yang ditanam di dalam bidang perkebunan). Dan bilamana berlangsung nasionalisasi, kepentingan modal asing akan dikompensasi secara layak.

UU ini menjamin pemilik modal bisa dengan bebas membawa keluar semua keuntungan yang diperoleh dan membawa keluar modal yang ditanam. Di samping ini semua, UU ini juga menjanjikan adanya berbagai kelunakan dalam hal pajak penghasilan dan pajak impor untuk peralatan.

Pada bulan Desember 1966, tiga hari sebelum diselenggarakannya rapat para negara maju, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, Jepang, Australia, Italia, dan Belanda, untuk membahas permohonan Indonesia memperoleh bantuan luar negeri, Soeharto mengeluarkan pernyataan yang menjamin semua perusahaan asing yang telah dirampas RI sebelumnya akan dikembalikan kepada para pemiliknya.

Rapat yang diadakan di Paris ini, dihadiri pula oleh World Bank dan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Mereka menghargai sikap pemerintahan militer Soeharto. Dan sebagai timbal balik, mereka memutuskan:

1. Indonesia memperoleh *ad hoc credit* sebesar US$174 juta untuk menanggulangi defisit pada tahun 1966
2. Pembayaran untuk hutang yang dilakukan sebelum Juni 1966 ditunda hingga 1971. Setelah 1971, pembayaran akan dilakukan dalam 8 pembayaran bertahap, 5% pada tahun 1971, 10% per tahun dari tahun 1972–1974, 15% per tahun dari tahun 1973 hingga 1977, 20% pada tahun 1978.

Para anggota rapat ini kemudian membentuk apa yang dinamakan IGGI–*International Group of Governments on Indonesia*. Setelah beberapa rapat, IGGI membagi beban hutang ke Indonesia dengan perhitungan sebagai berikut: ⅓ ditanggung oleh Amerika Serikat, ⅓ oleh Jepang, dan sisanya oleh para anggota IGGI lainnya.

Keberhasilan Soeharto dalam membasmi komunisme di Indonesia dan dalam menjamin adanya kekuatan militer yang bisa melindungi kepentingan modal asing menyebabkan IGGI menyalurkan dana untuk pembangunan di Indonesia.

Mengalirlah modal asing ke Indonesia dan semakin besar pintu dibuka, semakin besar modal asing masuk. Kepentingan rakyat seperti yang ditentukan dalam UUD 45 ternyata dikesampingkan.

Mengalirnya dana asing ini ternyata mengubah komposisi kelompok yang diuntungkan. Bilamana sebelumnya para tokoh partai politik yang memperoleh keuntungan dari berbagai fasilitas negara, di awal pemerintahan Soeharto para politikus ini digeser ke samping dan diganti oleh para jenderal yang mendukung Soeharto.

Munculnya kelas pedagang dari kelompok militer memang terjadi setelah Bung Karno pada tahun 1950-an menyetujui adanya dwifungsi yang memungkinkan ABRI berperan di bidang-bidang non-militer, seperti politik dan perdagangan. Banyak jenderal menjadi eksekutif perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil alih pemerintah pada tahun 1957. Karena tidak berpengalaman dan karena motivasinya adalah memperoleh penghasilan baik dan

mampu hidup mewah, perusahaan-perusahaan yang diambil alih ini tidak dikembangkan dengan baik. Di samping itu mereka juga ditugaskan atasannya untuk mengumpulkan dana untuk ABRI, khususnya Angkatan Darat. Budget untuk ABRI tetap di bawah pengeluaran, sehingga dana tambahan dari kegiatan dagang yang dilakukan oleh para perwira tinggi ini dibutuhkan. Keadaan ini membangkitkan nafsu pengumpulan dana, baik untuk kepentingan pribadi maupun kebutuhan Angkatan Bersenjata, terutama para perwira tingginya.

Berdasarkan penuturan di atas, dapatlah dimengerti mengapa kebutuhan memberi kesempatan kepada para jenderal untuk menjadi *entrepreneurs* harus selalu disediakan, bahkan dikembangkan. Terutama untuk para jenderal yang ditugaskan di daerah-daerah. Akan tetapi hal ini tidak bisa terus berkembang, karena pada akhirnya mempengaruhi ekonomi nasional. Karena sistem yang berlangsung tidak diarahkan untuk membangun Indonesia.

Ada sebuah contoh. Jenderal Suhardiman adalah salah satu jenderal yang memperoleh kesempatan berdagang ini. Ia mulai memegang peranan sejak zaman Soekarno. Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan, ia ditugaskan mendirikan dan memimpin PT Berdikari, yang kemudian mengambil alih PT Karkam dan PT Aslam. Pemilik kedua perusahaan ini ditahan, karena dianggap mereka menyalahgunakan hubungan baik dengan Soekarno.

Di bawah pimpinan Suhardiman, PT Berdikari maju pesat. Ia memperoleh berbagai fasilitas pemerintah. Pada tahun 1967, PT ini memperoleh hak monopoli dalam mengimpor Mercedes-Benz.

Suhardiman kemudian mendirikan Bank Dharma Ekonomi yang diketahui terlibat dalam berbagai kegiatan yang merugikan pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 1968, bank ini mampu menawarkan para nasabahnya bunga sebesar 10–15% per bulan. Padahal bunga resmi pada waktu itu hanya 3% per bulan. Dengan

sendirinya banyak nasabah yang mendepositokan uang di bank itu, termasuk para perwira Angkatan Darat.

Bulog yang ditugaskan pemerintah untuk mengatur pengadaan bahan-bahan penting seperti gula dan beras, memperoleh dana besar dari pemerintah. Ternyata sebagian dari dana ini didepositokan di bank ini. Keuntungan besar diperoleh mereka yang memimpin kedua institusi ini. Para pegawai tinggi Bulog memperoleh keuntungan dari bunga tinggi yang ditawarkan Bank Dharma Ekonomi, sedangkan pemilik Bank Dharma Ekonomi memperoleh dana tambahan besar untuk melakukan kegiatan spekulatif yang bisa memberi keuntungan lebih besar lagi, walaupun risiko perdagangan jauh lebih besar.

Suhardiman, bersama dengan beberapa tokoh dagang yang pro-Taiwan seperti Ma Siu Ling dan Bong A Lok mendirikan Indonesian Business Center. Pinjaman Taiwan sebesar US$20 juta yang disinggung sebelumnya disalurkan melalui IBC ini. Ternyata pinjaman ini mengandung syarat. Syaratnya adalah RI harus menentang masuknya RRT di PBB. RI tidak menentang dan juga tidak mendukung. Akibatnya, Taiwan mengurangi hutang yang sudah dijanjikan ini, turun menjadi US$10 juta.

Semua kegiatan ini dilakukan dengan fasilitas atau keterlibatan pemerintah. Akan tetapi bukan pembangunan ekonomi nasional yang dituju, melainkan kekayaan pribadi Suhardiman. Pada akhir 1968, Bank Dharma Ekonomi jatuh. Uang yang didepositokan dan diputar oleh bank itu amblas. Suhardiman kemudian ditahan. Baru kemudian diketahui bahwa US$60 juta didepositokan di bank lain, yaitu Bank Sinar Semesta. Akan tetapi Bank Sinar Semesta juga tidak bisa membayar kembali uang sejumlah itu.

Sementara itu DPR telah menyetujui UU yang berkaitan dengan modal domestik milik asing. UU No.6/1968 ini berlaku mulai tanggal 3 Juli 1968. Ia dianggap sebagai UU yang mengukuhkan PP-10 (Peraturan Pemerintah No.10). UU ini memenuhi permintaan

sementara tokoh politik untuk menghilangkan keterlibatan orang Tionghoa asing dalam bidang perdagangan. Semua modal domestik asing yang terlibat dalam bidang perdagangan harus ditutup pada tahun 1977 dan modal domestik milik asing yang terlibat dalam bidang perindustrian harus ditutup pada tahun 1997.

Jelas yang dimaksud dengan modal domestik milik asing adalah modal milik Tionghoa asing yang menetap di Indonesia. Dan timbul kecenderungan yang serupa sejak zaman RIS, yaitu menggantikan para pelaku dagang Tionghoa asing ini dengan pedagang-pedagang "pribumi". Rupanya ada juga anggapan bahwa status "asing" yang ditekankan ini akan hilang dengan proses naturalisasi.

Akan tetapi bukannya mempermudah proses naturalisasi, pemerintah mempersulitnya. Pemerintah Soeharto juga secara sepihak membatalkan perjanjian dwi-kewarganegaraan yang sudah diratifikasi oleh kedua negara dengan *exchange of notes*, seperti yang dituturkan sebelumnya.

Dengan dalih keamanan, pemerintah mencegah anak-anak mereka yang telah menolak kewarganegaraan Indonesia pada masa 1949–1951 yang mencapai umur 18 tahun, untuk bisa dengan mudah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sikap ini melanggar apa yang tertera di dalam perjanjian dwi-kewarganegaraan. Pemerintah Soeharto merasa berkepentingan melakukan "*screening*" untuk memastikan mereka yang ingin menjadi warga negara Indonesia tidak akan menimbulkan masalah yang mengganggu keamanan. Kebijakan ini menyebabkan proses menjadi warga negara Indonesia menjadi kompleks, memerlukan biaya tinggi dan memakan waktu panjang, hingga 2 tahun.

Rupanya, tidak semua Tionghoa asing harus melalui proses berbelit dan "*screening*" ini. Banyak pedagang Tionghoa yang pro-Taiwan yang juga asing ternyata bisa dengan cepat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Jelas "*screening*" yang dilakukan

bersifat politis. Bilamana orang yang bersangkutan ternyata pro-RRT, pasti ditolak. Padahal tidak semua yang pro-Taiwan itu bersikap positif untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, banyak yang malah ikut merusak ekonomi nasional.

Indonesian Business Center atau IBC yang disinggung sebelumnya ternyata menjadi lembaga yang banyak membantu proses naturalisasi pedagang-pedagang pro-Kuomintang. Dengan melalui IBC, para pelamar rupanya tidak perlu langsung terlibat dalam proses yang berbelit-belit. Kementerian Kehakiman secara resmi menyatakan bahwa IBC harus berfungsi untuk ini. Ini diumumkan dalam edisi bahasa Tionghoa, *Harian Indonesia*.

IBC juga turut mempercepat proses menanjaknya pengaruh Kuomintang di Indonesia. Hari berdirinya Republik Tiongkok pada tanggal 10 Oktober mulai dirayakan. Bahkan hari ulang tahun Chiang Kai Shek pun mulai dirayakan di Jakarta.

Pada April 1969, *Harian Indonesia* edisi bahasa Tionghoa mulai menerbitkan *Hua Chiao Taiwan News Agency* dan pada bulan Juni 1969 delegasi perdagangan Taiwan tiba di Jakarta. Resepsi penyambutan diadakan di rumah Nyoo Han Siang, seorang Tionghoa yang menjadi staf Opsus—operasi khusus yang dipimpin oleh Jenderal Ali Murtopo. Pada waktu Jakarta Fair diadakan, Taiwan memiliki stan besar yang dikunjungi banyak pejabat tinggi pemerintah.

Ini semua menunjukkan bahwa setelah Soeharto berkuasa, kekuatan politik yang pro-Kuomintang di Indonesia memperoleh dukungan besar dari para jenderal yang berkuasa. Dan Taiwan bisa menikmati berbagai keuntungan, ekonomi, maupun politik dari perkembangan ini.

Akan tetapi setelah 1970, arus untuk lebih dekat ke Taiwan terasa sangat berkurang. Perkembangan politik internasional pun berubah. RRT mulai bangkit sebagai kekuatan yang lebih dihargai. Kunjungan Nixon ke RRT dan keharuman Chou En Lai sebagai

Perdana Menteri, memperkecil peranan Taiwan di Indonesia. Pimpinan pemerintahan Soeharto mulai meninggalkan "kuda" Taiwan.

Memang dengan diputusnya hubungan diplomatik dengan RRT, Soeharto berhasil mempercepat hubungan dagang dengan berbagai negara lain yang menentang RRT. Di antaranya tentu Taiwan. Dan dengan mengalirnya dana luar negeri untuk proyek-proyek pembangunan dan pengurasan kekayaan alam yang bertentangan dengan UUD 45, pemerintah Soeharto tidak lagi membutuhkan jalur politik yang bersandar atas penggunaan masyarakat Tionghoa sebagai dongkrak atau perisai.

Dengan demikian, setelah tahun 1970-an, masyarakat Tionghoa memperoleh kembali ruang "bernapas". Ruang "bernapas" ini akan tetap ada sampai ada pergolakan politik yang berkaitan dengan keseimbangan kekuatan—*balance of power*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti yang dibuktikan dalam sejarah, setiap ada situasi yang berkaitan dengan perubahan kekuatan politik yang membutuhkan keseimbangan kekuatan—*balance of power*, masyarakat Tionghoa yang merupakan sasaran empuk dan tidak berdaya melawan, akan menjadi korban.

Di antara modal asing yang masuk ke Indonesia terdapat modal yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa asal Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Filipina. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing—BKPM, modal yang masuk ke Indonesia antara tahun 1967 hingga 1976 adalah sbb:

1.	Jepang	US$ 2.550 juta	untuk 208 proyek
2.	Amerika Serikat	US$ 1.013 juta	untuk 116 proyek
3.	Hongkong	US$ 654 juta	untuk 120 proyek
4.	Filipina	US$ 311 juta	untuk 22 proyek
5.	Jerman Barat	US$ 203 juta	untuk 32 proyek
6.	Belanda	US$ 200 juta	untuk 51 proyek

7.	Australia	US$ 197 juta	untuk 45 proyek
8.	Singapura	US$ 154 juta	untuk 50 proyek
9.	Taiwan	US$ 106 juta	untuk 5 proyek

Daftar ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan investor terbesar di Indonesia. Mereka berkecimpung di dalam bidang pertambangan minyak dan gas. Sebagian modal mereka ditanamkan di dalam bidang industri mobil. Modal Amerika Serikat lebih banyak ditanamkan di bidang pertambangan. Sedangkan modal para pedagang Tionghoa asing dari berbagai negara lebih banyak ditanamkan di bidang industri kehutanan.

Perlu juga diperhatikan bahwa Jawa Barat merupakan kawasan favorit para penanam modal. Pada bulan November 1976, Jawa Barat mengundang penanaman modal sebesar US$1.309 juta, sedangkan Jakarta yang menjadi favorit kedua, US$1.300 juta, diikuti dengan Sumatra Utara, US$1.010 juta.

Angka penanaman modal asing terus meningkat sejak dimulai pembukaan pintu lebar-lebar pada tahun 1967. Pada waktu yang bersamaan, penanaman modal domestik mencapai Rp2.019.008 juta untuk 2.547 proyek, jauh lebih kecil dari penanaman modal asing.

Kebijakan *open door* ini tidak hanya berlangsung di Indonesia. Banyak negara berkembang juga melaksanakannya. Negara-negara maju ternyata cenderung mengubah strategi ekonominya. Mereka tidak lagi menitikberatkan ekspor barang-barang produksinya, tetapi mementingkan dicapainya perjanjian "bantuan" dana yang bersifat jangka panjang.

Pemasukan modal ke negara-negara berkembang ini sangat menguntungkan pembangunan industri di negara-negara yang maju. Data menunjukkan bahwa uang yang keluar dari negara-negara berkembang ini paling sedikit 3 kali lebih besar dari uang yang masuk. Menunjukkan keuntungan dari program "bantuan" ini besar sekali.

Di awal perlombaan memberi bantuan ekonomi ini, Amerika Serikat dan Inggris jauh lebih besar dari Jepang. Jepang dan Jerman Barat pada awal mementingkan ekspor hasil produksinya. Akan tetapi data di Indonesia menunjukkan bahwa Jepang cepat mengejar bahkan melebihi upaya Amerika Serikat dalam program penyaluran penanaman modal.

Pengamatan juga menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang tinggi nasionalismenya seperti beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah, mencoba untuk mengurangi masuknya modal asing. Sedangkan negara-negara yang menghadapi krisis ekonomi dan yang pemerintahnya tidak mempertahankan nasionalisme seperti Indonesia dan beberapa negara Amerika Latin, mengundang masuknya modal asing.

Dari tahun 1967 hingga 1977, IGGI sudah menyalurkan dana sebesar US$5.697 juta. Di samping itu ada dana yang dikategorikan "*Soft Loans*" sebesar US$450 juta ditambah dana sebesar US$670 juta dari World Bank. Lalu karena peristiwa Pertamina, pemerintah meminjam lagi dengan syarat komersial standar sebesar US$1.000 juta dan juga pinjaman dari Iran sebesar US$250 juta. Jadi pada tahun 1977 saja, hutang RI adalah sebesar US$8.067 juta.

Data juga menunjukkan bahwa sejak Soeharto berkuasa, RI telah mendapat suntikan sebanyak US$15 miliar. Timbul pertanyaan: apakah dana ini benar disalurkan untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur? Ternyata tidak.

Buktinya, sebagian besar petani di Indonesia masih tidak memiliki tanah. Mereka tetap miskin. Penghasilannya tidak setimpal dengan tenaga yang mereka kerahkan untuk hidup. Yang dimiliki petani Indonesia, menurut data sensus tahun 1973 hanyalah 22% dari semua tanah yang digarap.

Menteri Sosial, Mintardja dalam memberi sambutan di acara Sumpah Pemuda pada tahun 1977 menyatakan bahwa 60% anak di bawah 5 tahun menderita kekurangan makanan.

Ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan GNP tidak berarti kemiskinan di Indonesia lenyap. Data menunjukkan bahwa di Jawa dan Bali, di mana jumlah penduduknya 65% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, tetapi mereka hanya memperoleh 25% dari GNP.

Hingga 1977, masuknya modal asing belum memperbaiki kondisi penghidupan di daerah pedalaman dan penghidupan kaum buruh umumnya. Menurut data ILO—*International Labor Organization* pada tahun 1976 jumlah pekerja yang tercatat di Indonesia adalah 48 juta orang, 20% bekerja di bagian *services*, 10% di bidang industri, 70% di bidang agraria.

Menurut BPKM pada tahun 1977, penanaman modal asing selama 10 tahun terakhir telah menciptakan 1,2 juta lapangan kerja. Penghasilan minimum di perusahaan asing adalah Rp10.000 per bulan. Akan tetapi gaji di Jawa Timur ternyata jauh lebih kecil. Yang terendah tercatat sebagai Rp50 per hari. Gaji pegawai rokok kretek pun rendah, rata-rata Rp150 per hari. Padahal pemerintah memperoleh penghasilan pajak berjumlah Rp112 miliar dari pabrik-pabrik kretek ini.

Departemen Tenaga Kerja pada tahun 1976 mengeluarkan data yang dinamakan KPM—kebutuhan phisik minimum. Data ini menunjukkan bahwa KPM untuk keluarga masih lebih besar dari penghasilan rata-rata para pekerja di Indonesia. Jadi membuktikan bahwa penghasilan yang diterima tidak cukup untuk menghidupi keluarga secara layak.

Jadi setelah 10 tahun modal asing membanjiri Indonesia, buruh di Indonesia tetap miskin. Keberadaan modal asing tidak secara radikal memperbaiki kondisi penghidupan rakyat terbanyak.

Dari semua penanaman modal asing yang masuk, 16% ditanam di Jakarta Raya. Tetapi kota ini tidak mampu menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan, karena dana nasional untuk pendidikan tidak memadai kebutuhan.

Rekor yang tercatat dalam bidang pendidikan juga tidak memuaskan. Pada tahun 1976–1977, hanya 11% dari budget nasional yang dipergunakan untuk pendidikan. Ini rendah bila dibandingkan dengan budget pendidikan di negara-negara berkembang lainnya. Di Filipina 32%, Malaysia 16%, dan Thailand 28,5%.

Menurut data Kementerian Pendidikan, pada tahun 1977 jumlah murid sekolah dasar yang terdaftar adalah 17 juta. Setiap tahun jumlah ini naik 2 juta. 90% dari pelajar SD lulus dan memperoleh ijazah sekolah dasar. Akan tetapi sekolah menengah hanya bisa menampung 60% dari lulusan SD. Jadi 40% lainnya harus mencari pekerjaan pada umur yang masih membutuhkan mereka belajar.

Mengenai perkembangan meningkatkan kecerdasan rakyat, dapat dikutip beberapa angka yang dimuat dalam *Sinar Harapan* 30 September 1976. Jumlah penduduk Indonesia ketika itu ada 130 juta orang. 44,41% tercatat mencapai usia pra-produktif, jadi kurang lebih 58 juta orang anak yang membutuhkan pendidikan sekolah. Pada akhir Repelita II, 1 April 1981, diharap pemerintah mampu menampung 85% anak-anak itu. Kecuali di Sumatra Barat dan Sulawesi Utara ketika itu baru dicapai penampungan 73% saja.

Diperoleh juga angka bahwa dari 80.000 lulusan Sekolah Lanjutan Atas hanya 26.000 orang yang dapat ditampung pada perguruan-perguruan tinggi yang ada. Jumlah universitas negeri ketika itu ada 40 buah dan jumlah universitas swasta ada 323 buah dengan daya tampung lebih kecil.

Penampungan adalah satu hal. Tetapi yang parah adalah berapa dari yang masuk itu selesai sebagai sarjana. Rektor Universitas Gajah Mada, Profesor Sukadji pada tahun 1976 menyatakan bahwa jumlah *dropout* universitas di Indonesia tinggi sekali, 80–90%. Di Amerika Serikat sekitar 40%, rata-rata di Asia sekitar 50–60%.

Dalam bidang kesehatan, kondisinya lebih parah lagi. Pada tahun 1976, Indonesia hanya memiliki 7000 dokter, untuk menampung kesehatan 138 juta orang. Yang lebih parah lagi, dari 7000 dokter ini, sekitar 3500 menetap di Jakarta Raya yang jumlah penduduknya hanya 4% dari total penduduk di Indonesia.

Selain kekurangan dokter, jumlah rumah sakit pun tidak memadai dibandingkan jumlah penduduk. Pada tahun 1977 hanya terdapat 11.117 rumah sakit yang menyediakan 85.000 ranjang, 613 adalah rumah sakit negara, sedangkan yang lain dijalankan swasta, 483 dari seluruhnya ini adalah rumah sakit bersalin.

Keadaan menjadi lebih buruk lagi. Ongkos rumah sakit tinggi sekali dan pada umumnya tidak terjangkau rakyat terbanyak. Sebagai contoh untuk operasi usus buntu, ongkos yang dibutuhkan adalah Rp300.000. Berarti 30 kali lipat gaji rata-rata seorang pegawai yang bekerja di perusahaan asing per bulan.

Pada tahun 1973 ada sebuah tim yang melakukan survei tentang kesehatan rakyat di 30 desa tersebar di 8 provinsi. Hasil survei itu antara lain:

1. 14 dari 100 bayi meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun, karena penyakit yang disebabkan kondisi hidup yang sub-standar.
2. 32% anak yang berusia dari 0–4 tahun menderita kekurangan kalori.
3. 50–92% wanita yang mengandung menderita anemia.
4. 16–50% laki dewasa menderita anemia.

UUD 45 menjamin hak bekerja dengan penghasilan layak untuk hidup. Akan tetapi masalah pengangguran belum dapat diselesaikan. Juga adanya rejeki nomplok (*windfall profits*) dari meningkatnya harga minyak yang diekspor tidak terasa membantu penyelesaian masalah pengangguran. Menurut harian *Kompas* 16

Juni 1976, Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja, Tatang Mahmud menyatakan bahwa berdasarkan cacah jiwa 1971 jumlah tenaga kerja di Indonesia ada 45 juta orang. Jumlah penganggur penuh ada 9%, tetapi sepertiga dari jumlah tenaga kerja itu dicatat sebagai setengah penganggur.

61% dari jumlah pekerja itu berada di desa-desa, sedang perkembangan desa tidak memungkinkan penampungan pengangguran. Tiap tahun jumlah tenaga kerja meningkat dengan 1 juta orang yaitu berdasarkan perhitungan jumlah penduduk meningkat dengan 3 juta orang tiap tahunnya.

Di samping angka pengangguran yang tidak bisa tidak meningkat terus itu, kita melihat juga masalah sulit lain yaitu penampungan anak-anak terlantar. Ali Bustam, Direktur Jenderal Rehabilitasi Departemen Sosial, menerangkan pada pers bahwa di Indonesia terdapat 15 juta anak terlantar dan 3 juta anak cacat. Sedang kemampuan untuk menampung dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua, yang berakhir 1 April 1981, hanya 16.850 orang anak terlantar dan dilaksanakan oleh 347 panti asuhan yang tersebar dalam 26 propinsi. "Provinsi" Timor Timur belum turut dihitung. Gambaran ini menyedihkan dan tidak mencerminkan pelaksanaan Pasal 34 UUD yang menentukan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Harian *Kompas* tanggal 19 Oktober 1976 memberitakan bahwa di Jakarta Raya terdapat 70% keluarga, jadi 571.186 yang tercatat miskin dan membutuhkan pertolongan. BAK (Bantuan Asistensi Keluarga) itu hanya mampu menolong 123 keluarga saja. Jadi yang dibantu hanya 0,2%.

Lain hal yang menyedihkan adalah kenyataan bahwa Indonesia mengimpor banyak barang yang sebenarnya bisa dihasilkan di Indonesia sendiri, bahkan yang sebelum banjirnya modal asing masuk ke Indonesia, merupakan hasil produksi yang diekspor.

Misalnya tepung tapioka, tapioka, kacang kedelai, kacang tanah, dan lain-lain.

Pada tahun 1976, Indonesia telah mengimpor 140.000 ton kacang kedelai dari USA, Kanada, dan Brazil. Kacang tanah diimpor dari India, Thailand, dan RRT. Sedangkan tapioka diimpor dari Thailand. Hotel-hotel besar juga diketahui mengimpor ayam dan daging dari Australia dan Selandia Baru, melalui Singapura.

Timbullah pertanyaan: mengapa Indonesia harus mengimpor hasil-hasil produksi yang disebut di atas? Jawaban para pejabat pada umumnya adalah: harga impor masih lebih murah dari harga produksi di dalam negeri. Sebuah jawaban yang tidak masuk logika, karena dari segi penghasilan buruh saja jelas bahwa ongkos buruh di Indonesia jauh lebih rendah dari ongkos buruh di banyak negara dari mana Indonesia mengimpor hasil produksinya.

Bila diselidiki lebih lanjut yang menjadi masalah adalah terjadinya korupsi di berbagai tingkat dan lapisan produksi. Adanya keperluan untuk memperlancar proses dengan sogok-menyogok inilah yang mempertinggi ongkos produksi dan distribusi, sehingga akhirnya yang terjadi adalah: upaya produksi dalam negeri merosot dan negara-negara lain menikmati keuntungan dari pembelian Indonesia.

Kebocoran dana pemerintah yang dikorupsi perlu juga diamati dan dianalisa. Menurut fraksi PDI (Partai Demokrat Indonesia) di parlemen, pada tahun 1977, kebocoran yang terjadi sebagai akibat korupsi adalah Rp700 miliar, sama dengan US$2 miliar. Ini melebihi jumlah dana bantuan yang disediakan IGGI per tahun.

Selain hilangnya dana karena korupsi, sistem kredit yang dilaksanakan pemerintah juga menimbulkan penyelewengan yang sangat merugikan negara. Pelaksanaan kredit dibagi dua, KIK—Kredit Investasi Kecil dan KMKP—Kredit Modal Kerja Permanen. Kriteria yang dipergunakan adalah si penerima kredit harus berasal

dari kelompok "ekonomi lemah" yang dalam praktiknya berarti "pribumi".

Ternyata banyak yang memperoleh kredit ini tidak bisa membayar. Bank Bumi Daya menyatakan pada tahun 1977 jumlah kredit yang tidak terbayar adalah US$500 juta atau Rp200 miliar.

Menurut Arief Karnadi dari Bank Indonesia, dari 1974 hingga 1977, jumlah kredit KIK yang diberikan Bank Indonesia mencapai Rp168 miliar. Jumlah terbesar diberikan kepada usaha transportasi minibus.

Pada bulan September 1977, jumlah kredit KMKP mencapai Rp39 miliar untuk perdagangan, Rp18 miliar untuk bidang industri, dan Rp5,4 miliar untuk bidang lainnya.

Kredit semacam ini menguntungkan mereka yang memperolehnya, apalagi bilamana sebagian dari uang yang diperoleh dipergunakan untuk berfoya-foya. Sebagai akibat, usaha tidak jalan dan mereka tidak bisa membayar kembali kredit yang diberikan. Karena kriteria pemberian kredit juga dicampur aduk dengan adanya hubungan pribadi, koneksi jabatan, dan korupsi. Akhirnya timbullah kebocoran yang hebat.

Teknokrat yang mendukung Soeharto memang melaksanakan program di mana perusahaan-perusahaan milik negara dibubarkan dan diganti dengan perusahaan-perusahaan swasta yang didirikan dengan kredit-kredit tersebut di atas. Akan tetapi banyak perusahaan swasta ini gagal berkembang sebagai sebuah kekuatan ekonomi nasional. Di antaranya saudara-saudara Soeharto yang dibantu oleh pedagang-pedagang Tionghoa seperti Liem Sioe Liong. Walaupun mereka berhasil mengontrol distribusi cengkeh untuk kebutuhan pabrik-pabrik rokok kretek dan juga pabrik tepung terigu dan pabrik semen, keberadaan dan operasinya masih tergantung atas kredit-kredit bank negara dan bantuan perusahaan-perusahaan multinasional yang berkepentingan untuk bekerja sama.

Sebenarnya pengalaman dan perkembangan keluarga Soong di zaman Kuo Min Tang perlu dipelajari. Karena inilah ciri khas cara kerja perusahaan-perusahaan multinasional dalam mendominasi ekonomi sebuah negara, yaitu melalui keluarga kepala negara militer yang berkuasa.

Yang sebenarnya perlu diperhatikan pemerintah adalah meningkatnya kehadiran MNC—*Multi National Corporations* (MNC). Menurut definisi, *Multi National Corporations* adalah perusahaan yang berusaha di paling sedikit dua negara dan hasil penjualannya setahun mencapai US$100 juta.

Menurut survei PBB, di dunia ada 7.300 MNC, 200 di antaranya memiliki cabang di 20 negara. 10 MNC terbesar memiliki penghasilan jauh di atas GNP dari 80 negara yang berkembang. Penghasilan dari seluruh MNC ini pada tahun 1971 diperkirakan berjumlah US$500 miliar, ⅓ dari GNP seluruh dunia. 50% dari modal yang ditanam di negara-negara berkembang dipergunakan untuk menyedot kekayaan alam di negara-negara berkembang.

Dapatkah pedagang-pedagang pribumi—*the new comers* yang memperoleh kredit-kredit pemerintah ini tumbuh dan bersaing melawan dominasi MNC? Impian ini tidak akan tercapai selama pedagang-pedagang "pribumi" ini menjadi saluran dan pendukung para MNC dan tumbuh menjadi kapitalis komprador.

Lagi-lagi, Indonesia harus belajar dari pengalaman di Tiongkok di zaman kekuasaan Kuo Min Tang. Di saat itu rakyat Tiongkok menderita tiga penyerapan, dari MNC, dari kaki tangan MNC, dan dari birokrat kapitalis militer.

Bilamana tadinya diharapkan dengan masuknya modal asing dalam jumlah besar, pedagang "pribumi" bisa mengambil alih posisi pedagang Tionghoa, pada kenyataannya tidak demikian. Walaupun berbagai peraturan mempersulit keterlibatan pedagang Tionghoa, mereka tetap memainkan peranan penting. Di belakang layar, mereka tetap memimpin. Dan ternyata, dalam upaya memperoleh

dana dari luar negeri, para pedagang Tionghoa lebih memperoleh kepercayaan. Pemilikan *joint ventures* tetap berada di tangan pedagang Tionghoa. Di luar Indonesia, mereka lebih "*bankable*" dibandingkan pedagang-pedagang "pribumi".

Untuk mengubah keadaan ini, pada tahun 1974 Soeharto mulai melaksanakan program yang dinamakan "Indonesiasi" yang tidak bisa tidak sinonim dengan program "pribumisasi". Program ini menentukan antara lain:

1. Pada tahap permulaan, 30% dari kepemilikan *joint ventures* harus berada di tangan orang "Indonesia". Setelah 10 tahun, kepemilikan harus berubah menjadi paling sedikitnya 51% di tangan Indonesia
2. Pekerja asing akan diizinkan bekerja di beberapa bidang dan sifat izin ini adalah sementara
3. Pekerja asing harus melakukan pelatihan dan *technical transfer* ke pekerja Indonesia

Kebijakan *open door* yang dilaksanakan sejak tahun 1967 mempengaruhi perkembangan posisi pedagang Tionghoa di Indonesia. Seperti dituturkan sebelumnya, sistem penjajahan Belanda telah memaksa banyak orang Tionghoa hidup sebagai pedagang eceran dan kemudian menguasai bidang distribusi dan koleksi hasil produksi rakyat di desa-desa. Importir dan eksportir membutuhkan para pedagang Tionghoa ini, karena keberhasilan mereka sangat tergantung dari kehadiran mereka yang sudah berpengalaman dalam bidang ini.

Masuknya modal asing secara besar-besaran tidak mengubah ketergantungan atas pedagang Tionghoa di bidang distribusi dan koleksi. Pengalaman dan kredibilitas cara berdagang Tionghoa tidak bisa diganti dengan mudah. Seperti yang dituturkan sebelumnya,

pedagang-pedagang asing lebih mempercayai para pedagang Tionghoa.

Masuknya modal asing juga mendorong berlangsungnya *free competition*. Ini memungkinkan para pedagang Tionghoa yang lebih berpengalaman untuk lebih menonjol, karena memang mereka terlatih untuk *competitive*.

Sejak 1967, toko-toko di daerah pedalaman yang dimiliki pedagang Tionghoa dipenuhi barang-barang impor. Toko-toko yang tadinya menjual sepeda dan suku cadangnya, mulai menjual sepeda motor. Tempat-tempat reparasi sepeda juga diubah menjadi tempat reparasi sepeda motor. Yang tadinya berfungsi sebagai distributor sepeda, menjadi distributor sepeda motor. Dalam waktu singkat, Jepang mendominasi pasaran sepeda motor di Indonesia, mengalahkan Amerika, Jerman, dan Italia. Demikian juga dengan ban mobil. Ban mobil Jepang menguasai pasaran. Ini semua terjadi dengan kehadiran para pedagang Tionghoa.

Perkembangan ini menyebabkan banyak pedagang Tionghoa yang berkembang pesat. Toko-toko milik mereka terus membesar karena barang-barang impor memenuhinya. Yang kecil menjadi besar. Yang besar menjadi lebih besar. Jumlah perusahaan milik Tionghoa yang sukses terus meningkat. Demikian juga jumlah pedagang Tionghoa yang menjadi kaya-raya terus meningkat. Inilah yang menyebabkan banyak pengamat Indonesia dari luar negeri yang berkesimpulan bahwa pemerintahan Soeharto dan kebijakannya sebenarnya membawa keuntungan besar untuk pedagang Tionghoa.

Dengan sendirinya perkembangan ini membangkitkan rasa iri di kalangan pedagang "pribumi" yang walaupun sudah memperoleh berbagai macam fasilitas pemerintah dan perlindungan militer, tetap kalah bersaing.

Tentunya tidak semua pedagang "pribumi" yang gagal. Banyak juga yang berhasil, terutama mereka yang memiliki hubungan

khusus dengan pejabat pemerintah yang memegang peranan penting. Juga banyak pedagang Tionghoa yang memiliki hubungan baik dengan mereka yang berkuasa. Akan tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Mayoritas Tionghoa yang ada di Indonesia tidak mencapai tingkat ini.

Berkembangnya perusahaan-perusahaan dan toko-toko milik Tionghoa tidak berarti ekonomi Indonesia didominasi oleh Tionghoa. Tidak.

Memang untuk mengalihkan masalah yang dihadapi, Soeharto, kepala dari kelompok birokrat kapitalis militer dan para pendukung *Multi National Corporations* selalu memberi gambaran bahwa ekonomi Indonesia dikontrol oleh Tionghoa. Dengan demikian penderitaan rakyat yang terasa, oleh mereka dikatakan sebagai akibat penghisapan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Tionghoa.

Pada tanggal 16 Agustus 1977, dalam pidato kenegaraannya, Soeharto menyatakan bahwa:

1. Ekspor barang komoditi selain minyak mencapai US$1,8 miliar
2. Ekspor minyak pada tahun sebelumnya mencapai US$2,5 miliar

Kedua hal di atas menunjukkan bahwa peranan pedagang Tionghoa, yang tidak berkecimpung dalam dunia pertambangan dan agraria, yang menjadi penghasilan utama Indonesia, dalam ekonomi Indonesia tidak begitu besar. Ekonomi Indonesia masih tetap didominasi oleh MNC. Kemelaratan yang dirasakan adalah buah kebijakan pemerintah dan sifat MNC yang menginginkan keuntungan sebesar mungkin untuk pemiliknya di luar Indonesia.

Perlu dipermasalahkan apakah dengan kebijakan *open door* ini benar UUD 45 ditegakkan? Bukankah Pasal 33 sebenarnya melarang pengerukan kekayaan alam negara untuk kepentingan swasta? Benar kemakmuran di tingkat atas terasa tercapai, tetapi bagaimana dengan keadaan rakyat terbanyak? Kemiskinan tetap merajalela,

walaupun modal asing masuk secara besar-besaran dan banyak jutawan baru, pribumi maupun non pribumi, bermunculan.

Pancasila dan UUD 45 tidak merestui rasisme yang dilaksanakan secara terang-terangan oleh berbagai instansi dan pejabat pemerintah. Di manakah logika penegakan UUD 45 yang jelas dilanggar ini?

Gerakan dan kebijakan anti-Tionghoa

Salah satu kejahatan negara yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto berhubungan dengan kebijakan anti-Tionghoa. Masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah bagian yang terpisahkan dari bangsa Indonesia.

Masalah yang dihadapi masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah warisan penjajahan. Kebijakan rasisme di zaman penjajahan ternyata dihidupkan kembali di zaman orde baru. Negara dan pemerintah langsung terlibat dalam mengeluarkan kebijakan anti-Tionghoa dan kemudian melaksanakannya dengan berbagai ketentuan hukum. Timbullah keganjilan.

Di negara merdeka yang seyogianya berhukum, di mana terdapat sejumlah besar warga negara keturunan Tionghoa yang sudah menetap di Indonesia bergenerasi dan yang turut berjasa dalam berbagai perkembangan Indonesia, hadir kebijakan rasis dan yang dilegitimasikan secara hukum, dengan dalih pemurnian UUD 45.

Marilah kita tinjau berbagai ledakan anti-Tionghoa yang dialami masyarakat Tionghoa sejak zaman penjajahan, untuk menyadari betapa besar dampak negatif keganasan anti-Tionghoa yang dilakukan dan yang direstui oleh aparat negara, setelah rezim orde baru dibentuk pada awal tahun 1966.

Seperti yang digambarkan sebelumnya, kebijakan penjajah Belanda lah yang menyebabkan sebagian besar orang Tionghoa yang

menetap di Indonesia hadir di masyarakat sebagai pemilik toko kecil atau warung, pedagang kecil, tukang-tukang dengan berbagai keahlian tertentu, dan lain-lain. Banyak di antaranya, terutama yang menetap di luar Jawa, bekerja sebagai petani, buruh perkebunan, buruh pertambangan, dan nelayan. Tentu ada yang memperoleh pendidikan sehingga menjadi dokter, sarjana hukum, insinyur, pegawai pemerintah, dan lain-lain. Tetapi jumlahnya sangat kecil.

Seperti yang digambarkan sebelumnya, sebagian besar dari mereka ini menjadi warga negara Indonesia setelah melalui berbagai proses dan perjuangan politik. Akan tetapi komposisi masyarakat yang disebut di atas tidak berubah banyak. Di zaman orde baru kira-kira komposisinya masih sama.

Pada awal abad ke-18, penjajah Belanda mengusir banyak orang Tionghoa keluar ke Afrika Selatan. Banyak yang tidak pergi ke Afrika Selatan dikejar dan dibunuh. Akibatnya banyak yang tinggal di pesisiran pantai Pulau Jawa melarikan diri ke daerah-daerah pedalaman Pulau Jawa. Untuk menghindari pengejaran Belanda, pada umumnya mereka mengganti nama, masuk Islam dan mengasimilasikan dirinya ke dalam tubuh penduduk mayoritas dengan kawin campuran.

Akan tetapi proses kawin campuran ini tidak mencegah berkembangnya sebuah golongan minoritas Tionghoa. Jumlah yang besar ini menyebabkan, seperti dituturkan sebelumnya, sebagai reaksi Revolusi Tiongkok, pada tahun 1910 Belanda mengeluarkan undang-undang yang menjadikan orang Tionghoa kaula Belanda. Tujuannya adalah mencegah timbulnya permasalahan Tionghoa asing di Indonesia.

Keberhasilan orang Tionghoa menguasai perdagangan eceran dan kebijakan Belanda menimbulkan meledaknya gerakan anti-Tionghoa di Solo, Pekalongan, dan Kudus. Ini menunjukkan bahwa Belanda berhasil menjadikan golongan Tionghoa sebagai perisai

dalam menghadapi kekecewaan dan kemarahan rakyat, apalagi di saat bangkitnya kesadaran nasional dan keinginan untuk merdeka.

Sementara itu, para pedagang Tionghoa, baik di bidang eceran maupun distribusi, berkembang sebagai rantai perdagangan yang penting dalam menyalurkan barang-barang yang diimpor dan pengumpulan barang yang diperdagangkan. Di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, pengumpulan dan distribusi lembaran karet, slab karet, biji kapuk, kopra, dan lain-lain telah didominasi para pedagang Tionghoa. Sedangkan usaha ekspor barang-barang ini keluar sepenuhnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan Barat, terutama Belanda.

Perkembangan ini yang Belanda ingin pertahankan dengan memperhebat penindasan kaum pekerja dan menggunakan golongan Tionghoa sebagai perisai di setiap saat adanya ledakan.

Inilah warisan penjajahan dan imperialisme Belanda. Dan inilah yang harus dimengerti dan disadari oleh setiap orang yang berjuang dalam mengikis habis sisa-sisa imperialisme.

Ketika tentara Belanda mundur dalam menghadapi Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, terjadi lagi ledakan anti-Tionghoa. Akan tetapi kalau dipelajari, sebenarnya ledakan ini tidak bersandar atas rasisme. Yang terjadi adalah penjarahan dan perampokan barang-barang yang dimiliki oleh para pedagang Tionghoa.

Tentara Belanda, ketika mundur mendobrak toko-toko yang dilewati untuk mengambil makanan kaleng, minuman keras, dan buah-buahan. Para pemilik toko Tionghoa sudah lebih dahulu lari mengungsi. Toko-toko yang didobrak ini kemudian ditinggal terbuka sehingga rakyat segera menyerbu dan turut menjarah barang-barang yang ada di dalam berbagai toko. Perampokan dan penjarahan tidak terdorong oleh rasisme, melainkan keinginan memiliki dan menikmati barang-barang semata-mata. Dan ini terjadi dalam keadaan *vacuum*, karena kekuasaan Belanda hancur.

Pada awal kemerdekaan, di Tangerang terjadi sebuah gerakan anti-Tionghoa. Kejadian ini sebenarnya mengejutkan para pejuang kemerdekaan, karena di Tangerang telah berkembang hubungan harmonis antara mereka yang Tionghoa dan mereka yang dinamakan "pribumi". Mayoritas penduduk Tionghoa di Tangerang adalah petani. Dan banyak yang sudah berasimilasi dengan penduduk lokal.

Dengan demikian, seperti yang digambarkan sebelumnya, sulit dicari perbedaan etnisitas antara kedua golongan yang tinggal bersama di Tangerang secara harmonis. Yang terjadi mengandung konflik agama, karena sumber kejadian adalah adanya pemaksaan penyunatan. Orang Tionghoa yang menolak untuk disunat, dibunuh. Akibat kerusuhan ini, dengan dalih melindungi penduduk Tionghoa, tentara Belanda masuk dan "mengamankan" Tangerang. Jelas, kejadian ini disulut oleh Belanda yang ingin menjelekkan nama dan kewibawaan RI yang baru berdiri. Sebagai akibat, banyak penduduk Tionghoa lari meninggalkan Tangerang dan tanah-tanah yang ditinggalkan ini lalu diambil alih oleh penduduk "pribumi".

Provokasi Belanda dilakukan juga di berbagai kota lainnya selama masa pengonsolidasian kemerdekaan RI, seperti yang dituturkan sebelumnya.

Belanda menggunakan masyarakat Tionghoa sebagai dongkrak untuk menyerang daerah yang diakui sebagai wilayah RI dan menghancurkan perkembangan ekonomi RI. Mereka melakukan *psychological war*, dan warga Tionghoa digunakan sebagai alat ampuhnya. Sebagai akibatnya nasib warga Tionghoa mengenaskan. Mereka selalu menjadi korban dan sasaran kemarahan rakyat dan ekses-ekses revolusi.

Perang psikologis yang dilancarkan Belanda berhasil membangkitkan kecurigaan yang berlebih-lebihan terhadap warga Tionghoa, terutama dari pihak badan-badan perjuangan. Warga Tionghoa dianggap mendukung tentara Belanda yang melakukan

penyerangan. Akibatnya timbullah berbagai keganasan seperti yang dituturkan sebelumnya.

Yang menyedihkan adalah kenyataan bahwa jumlah korban warga Tionghoa lebih tinggi daripada jumlah tentara Belanda yang gugur dalam pertempuran menghadapi perjuangan bersenjata RI di masa revolusi 1945—49. Padahal warga Tionghoa bukan musuh RI.

Penuturan di atas menggambarkan bahwa masyarakat Tionghoa sejak zaman penjajahan, dijadikan umpan oleh pihak penguasa dalam mengatasi berbagai masalah atau dalam mengatasi situasi di saat akan ada pergantian kekuasaan politik. Celakanya warga Tionghoa yang selalu menjadi minoritas tidak berdaya menghadapi keganasan yang dilakukan sebagai akibat kebijakan penguasa.

Antara 1950—65, terjadi beberapa peristiwa anti-Tionghoa. Di antara serentetan peristiwa anti-Tionghoa ini ada dua yang paling menonjol. Yang pertama, PP-10, yang menyebabkan banyak penduduk Tionghoa di desa-desa dan daerah pedalaman terpaksa keluar. Tidak sedikit yang kemudian meninggalkan Indonesia untuk menetap di RRT. Yang kedua, Peristiwa Mei 1963 yang berakibat rusaknya ribuan toko dan rumah milik penduduk Tionghoa di Jawa Barat.

Bila kita lihat, kedua peristiwa ini tidak lepas dari pengaruh politik luar negeri. Perkembangan di Indocina mendorong Amerika Serikat dan sekutunya untuk memperhebat kampanye *China containment policy*. Mereka berusaha keras untuk membendung berkembangnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara dan memusatkan perhatian pada pengaruh RRT di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah negara terbesar di kawasan itu. Dan Soekarno yang gandrung dengan konsepsi Nasakom kian cenderung memihak ke RRT.

Ini mendorong oknum-oknum pendukung Amerika Serikat melakukan berbagai tindakan yang bisa merusak arus ke kiri yang

dipimpin oleh Soekarno. Pihak mana yang paling lemah untuk dijadikan sasaran sekaligus umpan untuk membangkitkan kekacauan? Lagi-lagi, warga Tionghoa yang pada umumnya mendukung kebijakan Soekarno.

Soekarno sendiri menganggap PP-10 dan peristiwa rasisme Mei 1963 sebagai gerakan yang ditujukan untuk memperlemah kedudukan dan mengganggu program politiknya. Akan tetapi pihak oposisi tetap kuat, tidak bisa diberantas dalam waktu singkat, apalagi mereka memperoleh dukungan kuat dari luar.

Kehadiran Baperki memperkuat perlawanan terhadap gerakan anti-Tionghoa, terutama di dalam bidang politik dan kewarga-negaraan. Baperki berjuang untuk mempercepat adanya kondisi yang memungkinkan masyarakat Tionghoa mengintegrasikan dirinya secara wajar ke dalam tubuh bangsa Indonesia sehingga rasisme tidak bisa berkembang dan akhirnya lenyap dari bumi Indonesia. Baperki mengajak massanya dan warga Tionghoa untuk bersama suku-suku lain membangun nasion Indonesia. Dan secara politis, organisasi ini mendukung kebijakan Soekarno.

Berkembangnya Baperki sebagai sebuah kekuatan efektif dan sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi jalan pikiran warga Tionghoa untuk mendukung kebijakan Soekarno menimbulkan kekhawatiran di kalangan yang menentang kebijakan Soekarno.

Pihak Angkatan Darat dan berbagai elemen politik kanan, terutama Partai Katolik, mendorong dibentuknya sebuah organisasi yang diinginkan mereka berkembang sebagai organisasi yang mampu menandingi Baperki. Organisasi ini dinamakan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa—LPKB. Moto perjuangan LPKB adalah asimilasi total—penghilangan ciri-ciri etnisitas Tionghoa demi melenyapkan rasisme dan loyalitas berganda. Penghilangan ciri-ciri etnisitas ini dimulai dengan penggantian nama, dari nama Tionghoa menjadi non-Tionghoa.

Seperti yang digambarkan sebelumnya, perkembangan politik di zaman Soekarno tidak memungkinkan LPKB berkembang. Secara politis, Baperki berada di atas angin. Konsep asimilasi tidak bisa berkembang. Program politik Baperki lebih diterima.

Pergantian politik yang terjadi sebagai kelanjutan Peristiwa G30S pada tahun 1965 mengubah posisi ini. Kekuatan politik kiri dihancurkan oleh kekuatan militer. Seperti yang dituturkan sebelumnya, Baperki dipaksa untuk dibubarkan dan saya bersama banyak pimpinan Baperki lainnya dipenjarakan. Dengan demikian LPKB yang didukung oleh Angkatan Darat dan kekuatan politik kanan bisa mengembangkan konsep asimilasinya.

Pada waktu yang bersamaan, pergantian kekuasaan politik, seperti berbagai masa sebelumnya, membangkitkan sentimen anti-Tionghoa. Ini direstui oleh pihak penguasa dan Amerika Serikat dan sekutunya yang memang ingin melaksanakan kebijakan *China containment policy*. Gerakan anti-Tionghoa meluncur ke anti-RRT. RRT dinyatakan terlibat dalam G30S. Logika yang dipergunakan adalah: warga Tionghoa mendukung RRT, dengan demikian warga Tionghoa mendukung komunisme, sehingga harus turut diganyang.

Perkembangan politik demikian ini dipergunakan oleh LPKB untuk mempelopori pembubaran Baperki, sebagai organisasi yang dituduhnya menjadi kaki-tangan PKI. Dengan bantuan Jenderal Sutjipto, Komandan Koti G-V, dalam bulan Desember 1965 LPKB berhasil membubarkan 25 cabang Baperki. Di Makasar dan Medan, LPKB turut mendorong diadakannya demonstrasi anti-Tionghoa yang kemudian mengakibatkan hancurnya ratusan rumah yang dimiliki warga Tionghoa. Di Medan ada 200-an orang Tionghoa yang dibunuh dalam gerakan anti-Tionghoa tersebut. Ini dilakukan walaupun pada tanggal 31 Oktober dan 1 November, Soekarno telah mengeluarkan instruksi untuk menghentikan semua kekacauan yang mengandung rasisme dengan perintah tembak di tempat. Perintah yang disampaikan dalam rapat yang dihadiri oleh semua

gubernur dan pimpinan militer di berbagai provinsi, tidak dituruti, bahkan dilanggar. Gerakan anti-Tionghoa yang didukung oleh kekuatan politik kanan dan militer terus berlangsung.

Soekarno berupaya mengubah situasi politik dengan membentuk Kabinet Dwikora dan melarang KAMI–Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Sikap ini disambut dengan demonstrasi yang dilancarkan oleh KAPPI–Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia. Demonstrasi yang didukung oleh Angkatan Darat ini menyerbu gedung-gedung Konsulat Jenderal RRT, Kantor Berita *Hsin Hua* dan Kantor Konsul Perdagangan RRT di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1966. Demonstrasi ini berlangsung berhari-hari hingga tanggal 10 Maret 1966.

Seperti yang dituturkan sebelumnya, setelah Supersemar keluar pada tanggal 11 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI dan berbagai organisasi lain yang dianggap berafiliasi dengannya dan menahan 15 menteri Kabinet Dwikora.

LPKB segera meningkatkan kegiatannya dengan mengadakan berbagai demonstrasi untuk menyatakan kesetiaan terhadap Indonesia dan mengutuk RRT. Dengan demikian, sadar atau tidak sadar, LPKB berkembang sebagai alat pelaksanaan *China containment policy* pemerintah Amerika Serikat. Dan secara tidak langsung mereka pun mendukung kebijakan anti-RRT pihak Uni Soviet. Yang menarik perhatian, pimpinan LPKB adalah orang-orang peranakan Tionghoa.

Setelah Supersemar, demonstrasi anti-Tionghoa meningkat drastis. KAMI dan KAPPI dikerahkan untuk berdemonstrasi menuntut pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan RRT. Demonstrasi dilakukan di jalan-jalan raya Jakarta. Yang menarik perhatian, demonstrasi-demonstrasi ini disaksikan rakyat di pinggir jalanan. Sambutan rakyat terlihat pasif. Tidak memberi reaksi yang spontan. Banyak pemuda peranakan Tionghoa yang

bergabung dengan Partai Katolik atau pendukungnya yang terlihat ikut aktif berdemonstrasi.

Pada tanggal 15 April 1966 LPKB mempelopori sebuah demonstrasi di Lapangan Banteng yang dilakukan oleh warga Tionghoa. Pertemuan umum yang dihadiri sekitar 50 ribu orang ini, ternyata dipenuhi pula oleh orang-orang militer dengan pakaian preman. Setelah mendengar beberapa pidato dan sambutan tertulis, di antaranya sambutan tertulis Adam Malik ketika itu Menteri Luar Negeri, pertemuan itu mengeluarkan sebuah pernyataan:

1. Menyatakan setia kepada Republik Indonesia
2. Mengutuk RRT yang dinyatakan telah mencampuri urusan di dalam negeri
3. Menuntut pemerintah untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan RRT
4. Menuntut pemerintah untuk menutup semua sekolah berbahasa Tionghoa di Indonesia
5. Mendukung penuntutan diusirnya semua warga negara Tiongkok yang bermukim di Indonesia

Setelah penyataan itu diumumkan, demonstrasi dilanjutkan di depan gedung kedutaan besar RRT di daerah kota.

Akan tetapi sambutan kelompok "pribumi" tidak begitu hangat. Ada yang menganggap demonstrasi tersebut sebagai tindakan yang munafik. Kelompok KENSI (Konferensi Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia), misalnya menyatakan bahwa kesetiaan tidak perlu ditunjukkan dengan demonstrasi besar-besaran. Kesetiaan harus dimanifestasikan dengan tindakan konkret memperbaiki taraf hidup rakyat terbanyak, dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Meningkatnya gerakan anti-Tionghoa dan anti-RRT mendorong Duta Besar untuk RRT, Djawoto, meletakkan jabatannya. Ia

menyatakan bahwa ia tidak bisa melakukan tugasnya karena perkembangan politik tidak mengizinkan.

Gerakan anti-Tionghoa menjadi lebih serius pada bulan Mei 1966. Komandan militer di Provinsi Aceh mengeluarkan instruksi yang mengharuskan semua warga negara Tiongkok yang menetap di kawasan itu keluar sebelum akhir Agustus 1966. Akibatnya, sebagian besar pindah ke Medan, sebagian lain pergi ke Tiongkok.

Kelompok KENSI mengadakan kongres dari tanggal 7 Mei hingga 10 Mei 1966. Pada akhir kongres, dikeluarkan sebuah program yang mengandung hal-hal sebagai berikut:

1. Ditingkatkannya PP-10, sehingga orang Tionghoa dilarang berdagang di desa-desa.
2. Warga negara Tiongkok dilarang berkecimpung di dalam berbagai bidang di antaranya bidang produksi makanan, termasuk penggilingan padi, bidang transportasi, termasuk bis dan truk.
3. Diadakannya pajak untuk warga negara Tiongkok yang menetap di Indonesia, US$2 per kepala.

Tidak lama setelah itu, pada bulan yang sama, LPKB mengeluarkan surat edaran yang antara lain menyatakan:

1. Orang Tionghoa asing harus dipisahkan dari masyarakat. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa harus diasimilasikan ke dalam tubuh bangsa Indonesia.
2. Jumlah warga Tionghoa asing harus dibuat sekecil mungkin.
3. Semua sekolah Tionghoa yang dijalankan oleh orang Tionghoa asing harus ditutup.
4. Pelajar Tionghoa asing harus dikumpulkan dalam sekolah yang dijalankan oleh pemerintah.
5. Semua penerbitan berbahasa Tionghoa harus ditutup.
6. Peranan orang Tionghoa asing dalam dunia perdagangan harus dibatasi.

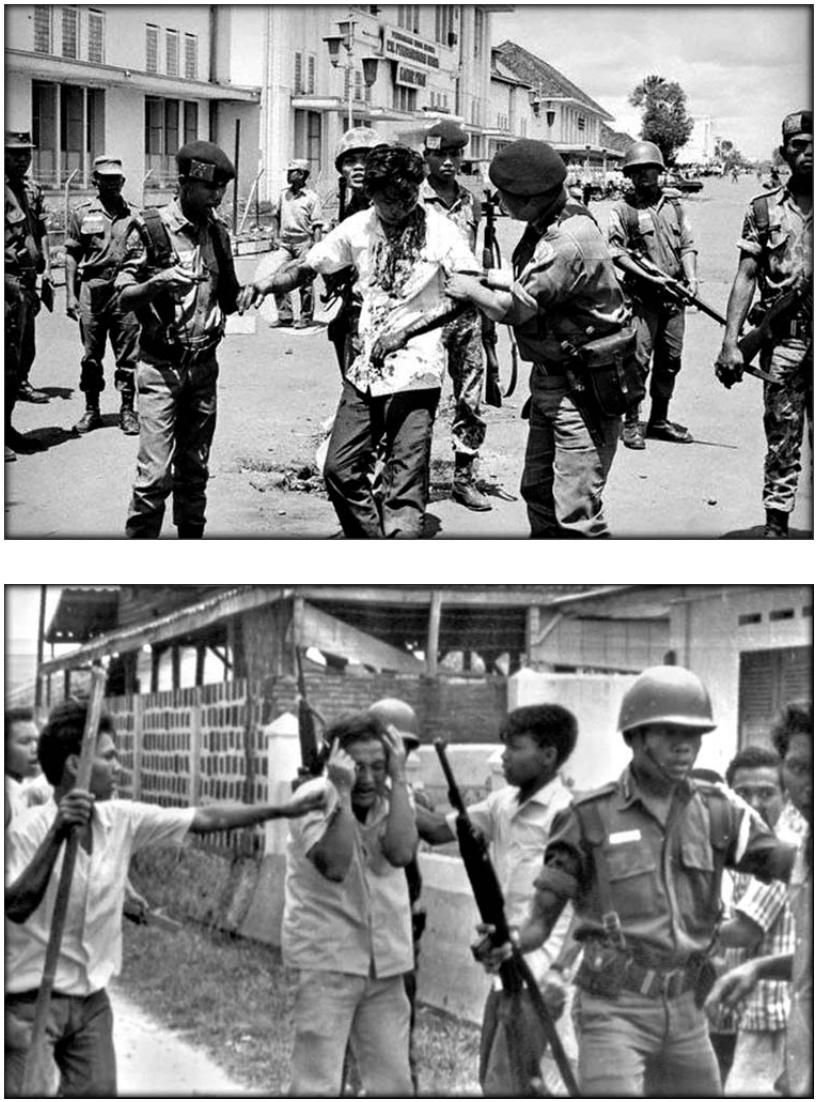

Gerakan anti-Tionghoa (1966)

Ruslan Abdulgani, salah seorang sponsor LPKB mengakui bahwa LPKB bekerja dengan kekuatan ABRI, terutama dengan departemen intel dan pengaturan daerah, yang dinamakan Kogam V (Komando Ganyang Malaysia).

Pada tanggal 28 Mei 1966, LPKB dan Kogam V menyampaikan usul bersama yang disampaikan ke pemerintah:

1. Dikuranginya jumlah penduduk Tionghoa asing.
2. Diadakannya kontrol yang membatasi gerak-gerik penduduk asing.
3. Dilakukan garis pemisah hukum yang jelas antara penduduk berwarganegara Indonesia dan penduduk asing.

Dasar usul adalah mendesak penduduk asing meninggalkan Indonesia, karena tidak lagi nyaman berada di Indonesia. Atau, kalau ingin menetap di Indonesia, mereka dipaksa untuk naturalisasi, menjadi warga negara Indonesia. Dan untuk menjadi warga negara Indonesia, menurut mereka, harus dilakukan sebuah proses yang mengikutsertakan masa percobaan untuk memastikan bahwa yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu hanya setia kepada Indonesia. Tidak memiliki loyalitas berganda.

Rupanya para anggota MPRS tidak bisa menerima semua tuntutan LPKB dan KENSI. Hasil permusyawaratan MPRS yang diselenggarakan dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1966, tidak menyinggung masalah Tionghoa dan Tionghoa Asing. Bahkan yang berhubungan dengan PP-10 dan ekonomi, yang dinyatakan sebagai keputusan XXIII adalah:

1. PP-10 harus ditingkatkan sebagai Undang-Undang. Peraturan Pemerintah saja dianggap tidak cukup.
2. Modal asing termasuk modal domestik yang dimiliki orang asing dinyatakan penting untuk pembangunan Indonesia.

Pengertian modal domestik milik asing tidak bisa tidak berarti modal yang dimiliki oleh pedagang Tionghoa yang berstatus asing. Sebenarnya inilah yang masuk dalam GBHN MPRS pada tahun 1964 sebagai hasil perjuangan Baperki. Ketentuan ini secara hukum memperkecil makna gerakan anti-Tionghoa.

Akan tetapi, upaya LPKB untuk menutup semua sekolah asing ternyata berhasil. Ketentuan MPRS No.XXVII menentukan semua sekolah asing harus ditutup.

Setelah sidang MPRS selesai, LPKB meningkatkan kampanye ganti nama. Secara tidak sadar, kampanye ini mengandung elemen anti-Tionghoa. Memaksa orang untuk mengganti nama pemberian orang tuanya hanya karena ia adalah seorang Tionghoa, memberi kesan bahwa nama Tionghoa itu buruk dan harus dibuang.

Lagi-lagi, LPKB berpaling pada pihak militer untuk mendukung kampanye ini. Pada tanggal 1 Juni 1966, di Sukabumi, komandan militer daerah itu mengundang semua warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk berkumpul merayakan hari lahirnya Pancasila. Dua hari sebelumnya LPKB telah menyebarkan formulir pergantian nama dengan anjuran formulir diisi untuk diserahkan pada acara 1 Juni. Karena takut dengan konsekuensi tidak hadir dan tidak mengisi formulir, 6662 orang Tionghoa yang hadir dalam acara itu telah mengganti namanya—dalam satu hari.

LPKB menganggap kejadian itu sebagai sebuah keberhasilan yang gemilang. Akan tetapi mereka harus mendapati kenyataan bahwa upaya itu tidak sesuai dengan pelaksanaan hukum yang berlaku untuk pergantian nama. Jadi tidak sah. Karena pada umumnya mereka tidak mampu untuk mengurus pergantian nama secara resmi yang memerlukan biaya, mereka menghadapi berbagai kesulitan praktis. Misalnya mereka tidak bisa menerima surat-surat tercatat karena kantor pos tidak bersedia memberikan surat-surat tercatat yang ditujukan ke nama lain, mereka tidak bisa menjual rumahnya karena nama pemilik berubah.

Komandan militer di Sukabumi menekankan pentingnya dilangsungkan asimiliasi biologis, yaitu kawin campuran. LPKB menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan kesan bahwa menentang anjuran seorang komandan militer bisa diartikan sebagai sikap tidak setia terhadap RI. Bisalah dimengerti pada masa itu, penduduk Tionghoa di Sukabumi merasa sangat tertekan.

Sementara itu, perkembangan politik di Jawa Barat tetap mendorong meningkatnya gerakan anti-Tionghoa dan anti-RRT. KAMI dan KAPPI yang didukung oleh kekuatan militer memperhebat tuntutan pengusiran warga negara Tiongkok dari Indonesia. Mereka mengeluarkan pernyataan: semua orang Tionghoa, baik yang sudah berkewarganegaraan Indonesia atau yang asing harus menyadari posisi mereka di Indonesia. Mereka harus mengubah sikap mereka, menghilangkan kebiasaan yang ada di zaman "orde lama". Artinya harus menjiwai pergantian, tidak hanya dengan *lip service* dan pergantian nama.

KAPPI Jawa Barat kemudian menuntut pedagang Tionghoa menyumbangkan sebagian hartanya ke berbagai kelompok "pribumi". Mereka lalu mengeluarkan pula pernyataan:

1. Pergantian nama hanya kedok untuk mempersulit KAPPI dan KAMI mengawasi kegiatan orang Tionghoa dalam bidang politik, perdagangan, dan sosial.
2. Mengizinkan orang Tionghoa hidup di Indonesia sama dengan mengizinkan lintah untuk hidup di Indonesia, lintah yang menghisap kekayaan Indonesia sehingga rakyat hidup melarat. Oleh karenanya orang Tionghoa harus diusir dari Indonesia.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa kegiatan LPKB bukannya menurunkan intensitas gerakan anti-Tionghoa, melainkan memperhebatnya. Dan ini rupanya tidak disadari oleh pimpinan LPKB.

Dalam sebuah seminar perwira Angkatan Darat di Bandung yang diselenggarakan dari tanggal 25 hingga 31 Agustus 1966, diputuskan pengubahan istilah "Tionghoa" menjadi "Cina". Keputusan ini kemudian disampaikan ke pemerintah untuk disetujui. Alasan pengubahan ini adalah untuk menghilangkan adanya *superiority complex* dalam benak orang Tionghoa di Indonesia terhadap mereka yang "pribumi".

Seminar itu katanya diadakan untuk membahas masalah Tionghoa dan bagaimana melaksanakan kebijakan anti-Tionghoa. Ternyata ada beberapa ahli non-militer, terutama yang memiliki pengetahuan ekonomi, diundang. Ada ahli ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan anti-Tionghoa bisa merugikan upaya RI memperoleh bantuan ekonomi. Akan tetapi terlambat. Sentimen anti-Tionghoa sudah sedemikian besarnya, terutama di kalangan Angkatan Darat dan kekuatan politik kanan.

Dalam masa transisi dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto, banyak komandan militer daerah mengeluarkan berbagai peraturan yang bersifat anti-Tionghoa. Di antaranya yang dikeluarkan komandan militer Jawa Timur dengan dalih sekuriti pada tanggal 31 Desember 1966:

1. Orang Tionghoa asing dilarang melakukan perdagangan grosiran di seluruh Provinsi Jawa Timur kecuali di Surabaya.
2. Orang Tionghoa asing dilarang mengubah domisilinya.
3. Orang Tionghoa asing harus membayar pajak Rp2.500 per kepala.
4. Penggunaan bahasa Tionghoa dalam semua bentuk hubungan dagang, keuangan, dan administrasi dilarang.

Untuk memperlancar peraturan ini, dikeluarkan pula dua peraturan penunjang pada tanggal 3 Januari dan 21 Januari 1967. Akan tetapi pelaksanaan tetap kacau karena ternyata peraturan ini bertentangan dengan apa yang diinstruksikan Soeharto pada bulan

September 1966 di mana ia menyatakan: "Pemerintah Indonesia akan melindungi setiap anggota penduduk di wilayah Indonesia, baik ia adalah warga negara Indonesia maupun asing, selama ia menerima dan mematuhi semua undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemerintah juga akan menentang rasisme dan akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan tindakan rasisme dan tindakan lain yang bertentangan dengan Pancasila."

Pernyataan ini tentu dibuat untuk meyakinkan para kreditor bahwa di Indonesia berlaku *rule of law* dan rasisme tidak akan direstui. Pada waktu itu, IMF sedang mempersiapkan program yang akan membantu perkembangan ekonomi Indonesia dengan dana World Bank dan IMF. Program yang akhirnya diterima dan diresmikan oleh kabinet pada bulan Oktober 1966.

Pernyataan Soeharto yang disinggung di atas, diperkuat dengan instruksi ketua Kogam G-V ke semua komandan militer provinsi yang berbunyi:

1. Semua komandan militer provinsi dilarang memerintahkan pengusiran orang Tionghoa asing dari kawasan-kawasan daerah yang dipimpinnya.
2. Tindakan tegas harus diambil terhadap orang Tionghoa yang melakukan tindakan subversi.
3. Orang Tionghoa yang tidak melakukan subversi dan telah mematuhi Undang-Undang harus dilindungi.

Tentu saja, instruksi Soeharto dan Ketua Kogam G-V bertentangan dengan instruksi komandan militer Jawa Timur. Akan tetapi instruksi komandan militer Jawa Timur lah yang dilaksanakan.

Akibatnya terjadi kekacauan di Jawa Timur. Ekonomi pun merosot. Pengumpulan pajak merosot drastis, karena penghasilan

penduduk terutama petani jatuh. 80 toko dari 105 toko di Lumajang tutup. Di Jember, 75 toko dari 423 toko juga tutup.

Hatta, mantan wakil presiden, mengkritik kebijakan anti-Tionghoa di Jawa Timur itu. Sebagai seorang ahli ekonomi, ia menyatakan bahwa pedagang Tionghoa sudah berpengalaman dan bermodal dalam berdagang di daerah-daerah Jawa Timur. Mereka tidak bisa demikian saja diganti dengan pedagang-pedagang "pribumi" yang tidak berpengalaman. Anjurannya adalah mendirikan koperasi di mana para pedagang "pribumi" secara perlahan bisa menambah pengalaman dan berkompetisi dengan sehat.

Antara bulan Maret dan April 1967, ada beberapa demonstrasi yang dilakukan untuk menentang kebijakan militer di Jawa Timur. Warga Tionghoa turut berpartisipasi di dalam demonstrasi-demonstrasi ini. Banyak di antaranya yang ditahan dengan tuduhan terlibat dalam tindakan subversi.

Sementara itu, seorang tokoh LPKB Jawa Timur, Liem Kok Liang, yang kemudian mengganti namanya menjadi Basuki Sudjatmiko, mempelopori kampanye mendorong orang Tionghoa yang menganut agama atau kepercayaan Tionghoa seperti Kong Hu Cu atau Taoisme, masuk ke dalam agama yang dianggap non-Tionghoa, seperti Katolik. Ia sendiri adalah seorang Katolik. Ia menyatakan bahwa kelenteng-kelenteng dan ritual sembahyang yang dilakukan oleh orang Tionghoa merupakan sikap ingin mempertahankan ke-Tionghoa-an. Oleh karenanya ia menganjurkan mereka dilarang. Ia pun menolak Kong Hu Cu diterima sebagai agama.

Sikap Liem Kok Liang mengundang reaksi keras dari mereka yang tidak menyetujuinya. Oen Tjhing Tiauw, salah satu promotor LPKB di Surabaya menuntut Liem Kok Liang menarik pernyataan dan meminta maaf. Ia menyitir PenPres 1/1965 di mana Kong Hu Cu

dinyatakan sebagai salah satu agama. Akhirnya LPKB memerintahkan Liem Kok Liang untuk meminta maaf.

Tidak bisa dipastikan apakah anjuran Liem Kok Liang telah menyebabkan besarnya jumlah orang Tionghoa masuk Kristen dan Katolik. Pada tahun 1967, Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) didirikan. Tetapi pendiriannya tidak bisa mencegah pergantian agama yang berlangsung.

Salah satu alasan pergantian agama ini berkaitan dengan besarnya jumlah pelajar Tionghoa yang memasuki sekolah-sekolah Kristen dan Katolik. Setelah sekolah-sekolah Baperki diambil alih dan dijadikan sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah Tionghoa ditutup, banyak pelajar Tionghoa masuk ke sekolah-sekolah Kristen dan Katolik. Akibatnya, sekolah-sekolah Kristen dan Katolik berkembang dan didominasi oleh pelajar Tionghoa. Ini berlangsung walaupun Kementerian Pendidikan mengeluarkan peraturan yang menentukan bahwa setiap sekolah paling sedikit harus terdiri dari 50% pelajar "pribumi".

Upaya LPKB untuk mencapai hasil dalam pergantian nama didukung oleh Menteri Dalam Negeri, Basuki Rachmat. Pada tanggal 27 Februari 1967 Basuki Rachmat dan LPKB mengeluarkan pernyataan bersama di mana ditegaskan cabang-cabang LPKB harus didukung dalam mendorong sebanyak mungkin warga negara Indonesia keturunan Tionghoa mengganti namanya. Prosedur untuk mengganti nama juga dipermudah.

Pengisian formulir pergantian nama disertai dengan uang Rp25 cukup untuk meresmikan proses. Akan tetapi dalam praktik, ongkos yang dibutuhkan jauh lebih tinggi dari Rp25. Ada yang mencapai Rp75 ditambah berbagai ongkos lainnya.

Dengan instruksi yang disinggung di atas, LPKB berharap bisa mencapai target 100%. Setiap warga negara keturunan Tionghoa akan memiliki nama non-Tionghoa. Demikian harapannya.

Akan tetapi ini tidak tercapai. Pada bulan Juli 1967, ada perubahan struktural yang berakibat LPKB diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. LPKB tidak bisa bertindak tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Dan ini menghambat banyak program LPKB, terutama kampanye pergantian nama.

Dari semua perkembangan yang berkaitan dengan gerakan dan kebijakan anti-Tionghoa, orang bisa mengambil kesimpulan bahwa tokoh-tokoh yang paling militan menentang kebijakan Soekarno menjadi tokoh-tokoh yang paling militan dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan anti-Tionghoa.

Demonstrasi anti-Tionghoa dan anti-RRT pada tahun 1967 tetap berlangsung. Pada tanggal 24 April 1967, pemerintah mengusir Konsul Jenderal Xu Ren dan General Manager Kedutaan Besar RRT, Yao Teng Shan.

Akan tetapi desakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Tiongkok tetap belum bisa dilaksanakan. Ini tentu menggemaskan banyak pihak, termasuk pihak Taiwan. Mereka mendorong diputusnya hubungan diplomatik dengan RRT dan dijalinnya hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok di Taiwan. Ada desas-desus yang menyatakan bahwa kemungkinan untuk ini dipersiapkan oleh sementara pejabat RI. Adam Malik, sebagai Menteri Luar Negeri ternyata membantah desas-desus ini pada tanggal 5 Mei 1967.

Akan tetapi, lambat laun, sikap RI terhadap RRT berubah. Ruslan Abdulgani, Duta Besar RI di PBB turut melahirkan peraturan baru yang mencegah masuknya RRT sebagai anggota PBB, menggantikan Taiwan. Peraturan ini membutuhkan ⅔ suara di PBB. Pada waktu itu, dukungan untuk masuknya RRT masih di bawah ⅔.

Pemerintah membentuk sebuah komite yang ditugaskan mempelajari masalah Tionghoa dan jalan keluarnya. Komite ini dipimpin oleh Jenderal Soenarso dan sekretarisnya, Letnan Kolonel Soekisman.

Ada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia ketika itu dan ini menjadi bahan pertimbangan komite tersebut:

1. Pertimbangan pertama yang ekstrem adalah: Peranan Tionghoa dalam bidang ekonomi dianggap terlalu besar sehingga harus ada perubahan drastis. Oleh karenanya PP-10 harus ditingkatkan dan orang Tionghoa asing harus segera diusir dari Indonesia. Dengan demikian pengaruh ekonomi Tionghoa bisa dikikis habis.
2. Pertimbangan kedua lebih membangun tetapi dianggap pro-Tionghoa. Tionghoa telah berperan positif dalam bidang perdagangan eceran dan distribusi, yang sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Oleh karena ini, sumbangsih mereka dalam bidang ekonomi besar dan seharusnya dipertahankan.
3. Pertimbangan ketiga merupakan kompromi dari kedua pertimbangan di atas. Ia menolak anjuran diadakannya pelaksanaan yang tidak direncanakan dengan matang yang mengubah keadaan secara drastis. Ia mendukung adanya perubahan secara perlahan tetapi berencana. Pada waktu bersamaan secara perlahan membangun kemampuan untuk mengambil alih apa yang dimiliki pedagang Tionghoa.

Komite yang diketuai Soenarso ini kemudian mengeluarkan pengarahan sebagai berikut:

1. Tidak ada orang Tionghoa baru yang diizinkan masuk ke Indonesia.
2. Tionghoa asing yang sudah ada di Indonesia harus memiliki penghidupan yang ditunjang oleh pekerjaan yang baik dan harus memiliki izin kerja.
3. Tionghoa asing yang meninggalkan Indonesia tidak diizinkan kembali ke Indonesia. Kepada mereka hanya diberi *exit visa*.

4. Perjanjian dwi-kewarganegaraan harus dipelajari kembali.
5. Proses naturalisasi harus dipersulit. Akan tetapi prosedur untuk mereka yang dianggap memenuhi persyaratan, harus dipermudah.
6. Garis pemisah antara warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Tionghoa asing harus jelas. Akan tetapi antara warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan "pribumi" tidak ada pemisahan. Kebijakan yang mengandung rasisme harus dihentikan.

Tidak jelas, apakah masukan komite ini memperoleh pertimbangan yang serius. Tetapi yang jelas, tidak ada pelaksanaan konkret yang didasari masukan-masukan yang disinggung, terutama yang berkaitan dengan dihilangkannya kebijakan rasisme.

Demonstrasi-demonstrasi anti-Tionghoa dan anti-RRT pada masa April—Mei 1967 ternyata merugikan citra RI dan upayanya dalam memperoleh bantuan luar negeri. Akibatnya, pada tanggal 7 Juni 1967, Soeharto harus mengeluarkan lagi sebuah pernyataan yang pada hakikatnya mengulangi janji yang dikeluarkan pada bulan September 1966. Pernyataan Soeharto ini juga menyinggung beberapa hal lain:

1. Pelajar asing dianjurkan masuk ke sekolah nasional. Akan tetapi warga negara Indonesia harus menjadi mayoritas di setiap kelas.
2. Organisasi asing hanya diizinkan beroperasi di bidang kebudayaan dan olah raga. Keberadaannya harus diizinkan dan diawasi pemerintah.
3. Modal domestik harus dikerahkan, dikembangkan, dan dipergunakan untuk pembangunan di Indonesia. Modal ini tidak boleh dikirim ke luar negeri.

Pada tanggal 25 Juli 1967, kabinet secara resmi mengganti istilah "Tionghoa" dengan istilah "Cina". Akan tetapi keputusan resmi ini tidak sepenuhnya didukung oleh beberapa pimpinan harian surat kabar. Harian *Merdeka* misalnya menolak penggunaan istilah "Cina". Mereka tetap mempertahankan istilah "Tionghoa".

Pimpinan harian *Merdeka* adalah B.M. Diah, salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Para pejuang ini tentu menghargai istilah "Tionghoa" sebagai istilah perjuangan, karena ini dipergunakan sebagai simbol kemenangan Revolusi Tiongkok di bawah pimpinan Sun Yat Sen pada tahun 1911. Negara yang dibangun sebagai hasil revolusi itu adalah Chung Hua Ming Kuo (Republik Tiongkok). Dalam bahasa Hokkian, dialek mayoritas Tionghoa di Indonesia adalah Tionghoa Bing Kok. Sejak itu, istilah Tionghoa lah yang dipergunakan.

Ternyata siaran radio dalam bahasa Indonesia *BBC, Radio Moskow*, dan *Radio Australia*, juga mempertahankan penggunaan istilah "Tionghoa".

Sedangkan istilah "Cina" sejak zaman penjajahan Belanda mengandung konotasi penghinaan. Istilah ini memang digunakan di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura karena pengaruh bahasa Inggris di sana masih kuat. Dan dalam bahasa Inggris, Tiongkok disebut sebagai "China". Dalam hal Indonesia, penggunaan istilah "Cina" menanamkan rasa dianaktirikan di dalam kalangan Tionghoa.

Dari pengertian ini jelas, tujuan pemerintah RI negatif dan didasari atas sikap anti-Tionghoa.

Pada tanggal 16 Agustus 1967, Soeharto berpidato sebagai pejabat presiden. Di dalam pidato itu ia menyatakan bahwa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak akan didiskriminasi dan Tionghoa asing akan diperlakukan sama dengan orang asing lainnya. Rupanya pernyataan ini yang menyebabkan pada bulan September 1967 kementerian kehakiman mencabut larangan yang

sebelumnya dikeluarkan pada bulan September 1966, yaitu larangan untuk menerima proses naturalisasi Tionghoa asing menjadi warga negara Indonesia dan menolak pelaksanaan perjanjian dwi-kewarganegaraan.

Akan tetapi arus anti-Tionghoa tetap tidak dibendung. Amir Machmud, komandan Kodam Jakarta pada bulan September 1967 menangkap 60 Tionghoa asing dengan tuduhan subversi. Tidak ada satu pun yang ditahan itu diajukan ke pengadilan.

Pada waktu yang bersamaan, pedagang Tionghoa asing yang pro-Kuomintang Taiwan, seperti Ma Siu Ling (kemudian mengganti nama menjadi Be Sulindro) dan Bong A Lok (mengganti nama menjadi Suwandi Hamid), aktif membangun hubungan dagang antara Taiwan dan Indonesia. Mereka juga mendorong pemerintah RI untuk meningkatkan perwakilan Taiwan menjadi perwakilan pemerintahan resmi. Adam Malik ternyata sebagai Menteri Luar Negeri tetap menyatakan bahwa Indonesia tetap menjunjung *one China policy*.

Walaupun demikian, hubungan Taiwan dan Indonesia kian mendekat. Dimulai dengan delegasi perdagangan yang disponsori oleh Jenderal Suhardiman, pernah ketua SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia) di zaman pemerintahan Soekarno, kemudian menjadi Direktur PT Berdikari, perseroan Angkatan Darat. Delegasi perdagangan ini ternyata membuahkan perjanjian di mana RI memperoleh pinjaman sebesar US$20 juta. Ketika Adam Malik ditanya tentang perjanjian ini, ia menyatakan bahwa ini bisa terjadi karena yang berlangsung adalah perjanjian antara dua perusahaan swasta, bukan perjanjian antar-negara yang resmi.

Gerakan anti-RRT mencapai puncaknya pada Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1967. Kedutaan Besar RRT diserbu demonstran dan dijarah. Staf diplomatik ada yang terluka ketika mencoba mempertahankan gedung kedutaan besar. Salah seorang demonstran yang kemudian menjadi tokoh adalah Liem Bian Koen,

yang dikatakan menjadi orang yang menurunkan bendera RRT dari tiang di gedung kedutaan besar. Setelah penyerbuan itu, delegasi pemuda mengunjungi Adam Malik, menuntut diputuskannya hubungan diplomatik dengan RRT.

Pada tanggal 9 Oktober 1967, kabinet akhirnya memutuskan untuk menghentikan hubungan diplomatik dengan RRT. Pesawat terbang Tiongkok yang khusus diizinkan mendarat di Jakarta untuk menjemput semua staf kedutaan besar Tiongkok dengan syarat pesawat yang sama membawa semua staf kedutaan besar Indonesia di Tiongkok. Duta Besar Djawoto ternyata memilih untuk tidak kembali ke Indonesia. Ia tetap menetap di Beijing sebagai pelarian politik.

Dengan berangkatnya pesawat tersebut meninggalkan Jakarta ke Beijing, hubungan diplomatik antara RRT dan RI dengan resmi dinyatakan dibekukan.

Lenyapnya Demokrasi

Arti demokrasi pemerintahan Soeharto

Soekarno mendasarkan kehadiran politiknya di atas Nasakom. Pengamatan sejarah membenarkan kesimpulan ini. Hasil Pemilu I yang diadakan pada tahun 1955 menunjukkan hasil sebagai berikut:

PNI – nasionalis memperoleh 22,3%
NU – Islam memperoleh 18,4%
PKI – komunis memperoleh 15,4%
Partai Katolik dan Kristen memperoleh 4,6%

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan di atas, konsepsi Nasakom bukanlah hal yang kosong. Indonesia memang terdiri dari 3 komponen politik besar yaitu nasionalis, agama, dan komunis.

Dasar kekuatan politik Soeharto, setelah ia mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno, berbeda. Massa politik yang diandalkan Soekarno tidak menjadi perhatian utama Soeharto. Di awal kekuasaannya, Soeharto sangat tergantung atas dukungan para perwira tinggi Angkatan Darat yang terdiri dari 3 aliran:

1. Kelompok perwira tinggi yang tadinya mendukung Soekarno, seperti Amir Machmud dan Basuki Rachmat.
2. Kelompok perwira tinggi yang mendukung Soekarno secara "*lip service*", tetapi pada hakikatnya selalu menentang kebijakan Soekarno, seperti Jenderal Sutjipto.
3. Kelompok perwira tinggi yang anti-komunis dan sepenuhnya mendukung kebijakan Amerika Serikat.

Gabungan ketiga kelompok inilah yang menjadi sumber kekuatan Soeharto di awal kekuasaannya. Dan merekalah yang mengebirikan kekuasaan politik Soekarno.

Dengan dibentuknya Kopkamtib yang dipimpin langsung oleh Soeharto, semua pelanggaran hukum dan UU dilaksanakan tanpa halangan. Dimulai dengan dikeluarkannya *Martial Law*, tanpa konsultasi dengan Soekarno yang ketika itu masih Presiden dan Panglima Besar Angkatan Bersenjata. Ini kemudian diikuti dengan mobilisasi massa untuk menyerang PKI dan ormasnya—dengan membentuk KAMI dan KAPPI. Penduduk-penduduk di daerah-daerah didorong oleh kekuatan militer melalui RPKAD untuk melakukan pembunuhan massal. Kopkamtib dengan dalih keamanan juga menangkap ratusan ribu orang. Pelanggaran HAM dilaksanakan secara sistematik. Lagi-lagi, tidak ada yang berani menentangnya.

Kehadiran Kopkamtib dengan sendirinya bagaikan momok hebat. Pimpinan partai-partai politik yang tidak diganyang, gentar dan siap menuruti apa pun yang dikehendaki Kopkamtib. Inilah sebabnya dalam waktu sekejap mata, *retooling* pimpinan partai-partai politik bisa dicapai, tanpa perlawanan atau protes apa pun.

Pimpinan partai-partai politik harus melalui *screening*. Yang dianggap tidak menguntungkan posisi politik Soeharto, diganti. Akhirnya yang tinggal adalah mereka yang bersedia bekerja sama.

Dengan demikian syarat dasar demokrasi hilang, yaitu kemampuan untuk berorganisasi secara bebas dan menentukan langkah organisasi tanpa campur tangan pihak penguasa.

Setelah berhasil mengganti pimpinan partai-partai politik dengan orang-orang yang bersedia mendukung Soeharto, Kopkamtib me-*retool* DPR dan MPRS. Semua anggota yang dianggap pro-Soekarno diganti dengan orang-orang yang bersedia mendukungnya.

Dengan demikian, dengan jalur konstitusional, Soeharto menggantikan Soekarno. Soekarno mudah dijatuhkan karena ia kehilangan dukungan di lembaga yang bisa mengukuhkannya sebagai presiden.

Dan kesemuanya ini dilakukan dengan semboyan memurnikan pelaksanaan UUD 45 dan Pancasila.

Setelah Soekarno dijatuhkan, Kopkamtib tidak dibubarkan, melainkan dipertahankan terus. Dan Soeharto tetap menjadi pemimpinnya. Kekuasaan mutlak Kopkamtib menyebabkan Soeharto tidak pernah bisa mempercayai orang lain sebagai kepalanya. Posisi ini dipegangnya sampai kekuasaannya sebagai presiden RI teguh. Baru kemudian diberikan kepada Jenderal Sumitro. Ketika Sumitro dianggap bersalah karena Peristiwa Malari pada tahun 1974, posisi ini diberikan ke Laksamana Sudomo.

Kopkamtib memainkan peranan penting dalam pelaksanaan Pemilu ke-2 pada tahun 1972. Setiap partai yang diperkenankan ikut Pemilu harus menyerahkan daftar calonnya ke Kopkamtib. Dengan alasan menghindari kemungkinan elemen PKI masuk, *screening* dilaksanakan. Lagi-lagi kebijakan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Pada Pemilu pertama pada tahun 1955, setiap partai politik bebas memilih calon-calonnya dan dalam menentukan ranking para calon. Tidak ada campur tangan pihak di luar partai. Tidak ada *screening* yang dilakukan oleh lembaga negara.

Dengan demikian partai-partai politik oleh Soeharto telah ditransformasi menjadi sekedar alat jenderal yang berkuasa. Mereka tidak memiliki kekuatan politik melawan kebijakan yang diambil Kopkamtib. *Freedom to organize* hilang dari permukaan bumi Indonesia.

Masyumi dan PSI yang dilarang oleh Soekarno karena keterlibatannya dalam PRRI/Permesta ingin berdiri kembali menjelang Pemilu kedua. Soeharto menolaknya karena tidak menginginkan adanya *precedence* di mana partai politik yang sudah dibubarkan bisa hidup kembali dan ikut Pemilu. Dikhawatirkan PKI bisa mengambil jalur ini. Oleh karena itu pimpinan Masyumi membentuk Parmusi—Partai Muslimin Indonesia. Ketika kongres Parmusi memilih Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan Moh. Roem sebagai pimpinan partai, Kopkamtib menolaknya. Akhirnya yang dipilih sebagai ketua adalah seorang tokoh yang kurang dikenal, Mintardja. Sebagai akibat, Parmusi tidak berhasil dalam Pemilu. Jumlah suara yang dicapai kecil.

Pelanggaran demokrasi lebih tampak setelah Pemilu selesai. Hasil Pemilu adalah sebagai berikut:

Golkar memperoleh 62,8%
NU memperoleh 18,7%
Parmusi memperoleh 5,4%
PNI memperoleh 6,9%
Partai Kristen dan Katolik memperoleh 2,4%

Dari 360 kursi, Golkar, partai politik yang dijadikan "kendaraan" politik Soeharto memenangkan 236 kursi.

UU Pemilu yang disahkan DPR menentukan DPR akan terdiri dari 360 anggota pilihan Pemilu, ditambah 100 anggota yang diangkat oleh Presiden, 75 di antaranya dari ABRI. MPR terdiri dari

seluruh anggota DPR ditambah 460 anggota lain yang diangkat oleh Presiden pula.

Dari sini jelas, bentuk demokrasi apa yang ada di zaman ini. Lembaga yang menentukan siapa yang menjadi presiden, sebagai lembaga tertinggi menurut UU, ternyata terdiri dari 360 anggota yang dipilih rakyat, sedangkan 560 anggota lainnya, jadi mayoritas, diangkat oleh Presiden. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan ada pengamat luar negeri yang menyatakan bahwa di Indonesia hanya ada 40% demokrasi.

Ini tentu bertolak belakang dengan apa yang diformulasikan para tokoh politik yang duduk di dalam DPA di zaman Soekarno. Oleh Soekarno dibentuk sebuah panitia kecil untuk merumuskan Undang-Undang Pemilu. Panitia kecil itu juga membahas hubungan MPR dan DPR. MPR dianggap lembaga terpenting dan tertinggi. Oleh karenanya harus dijamin pelaksanaan prinsip kedaulatan di tangan rakyat melalui lembaga ini. Apakah susunan jumlah anggota MPR = 2 x DPR sudah tepat? UUD 1945 menentukan bahwa MPR terdiri dari DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan yang ditentukan dengan undang-undang.

Semua tokoh-tokoh partai-partai menjadi anggota panitia kecil DPA itu. Angkatan Darat diwakili oleh Jenderal Gatot Subroto. Saya diturutsertakan pula. Dalam rapat panitia, saya kemukakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Dalam UUD Sementara Negara Kesatuan RI ditentukan bahwa Konstituante terdiri dari 2 x DPR, ketika membentuk MPRS, Bung Karno juga berpegangan pada ketentuan MPRS harus 2 x jumlah anggota DPR. Apakah pendirian ini sudah tepat?

Komposisi politik MPR dan DPR praktis tidak berbeda, hanya jumlah anggota dua kali lipat. Akibat dari kenyataan ini ialah uang negara diboroskan karena sebuah hal yang digolkan dalam DPR, pasti bisa gol juga di MPR. Antara DPR dan MPR tidak mungkin ada perbedaan pendapat karena komposisi politik, artinya imbangan

suaranya adalah sama. Lalu apakah arti pembentuk UUD dengan mengadakan MPR itu? Rasio adanya MPR adalah untuk mengadakan badan lebih tinggi yang dapat mengoreksi DPR, terutama bila DPR dan Presiden telah melakukan kesalahan dalam pekerjaan legislatif dan eksekutif. Komite Nasional Pusat dahulu mengenal jumlah anggota jauh lebih besar dari Badan Pekerjanya. Tiap kali sidang KNIP, Badan Pekerja memberi *progress report* dan bila dianggap perlu KNIP dapat mengoreksi Badan Pekerjanya. Komposisi KNIP dan Badan Pekerja tidak sama.

Oleh karenanya saya usulkan susunan sebagai berikut:

a. DPR merupakan perwakilan politik. Pemilu untuk DPR berdasarkan tanda-gambar partai-partai politik.
b. MPR juga harus dipilih langsung dalam Pemilu. Para anggotanya mewakili daerah-daerah dan golongan-golongan. Undang-undang menentukan wakil daerah dan golongan apa yang harus dipilih. Dan daftar bisa datang dari daerah-daerah dan golongan-golongan yang telah ditentukan.

Dengan susunan demikian MPR dapat mengoreksi DPR bila dianggap perlu. Usul ini diterima oleh semua anggota DPA dan seyogianya akan dijadikan rumusan UU Pemilu. Sayang ketindak-lanjutannya terhenti karena pergantian politik pada tahun 1965.

Tidak lama setelah Pemilu kedua, operasi khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Jenderal Ali Murtopo mendorong peleburan partai-partai politik yang ada. Partai-partai Islam "dianjurkan" bersatu dalam sebuah partai yang dinamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan partai-partai Kristen, Katolik, dan PNI digabung dalam sebuah partai yang dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Resminya pimpinan partai-partai baru ini dipilih oleh kongres partai. Akan tetapi daftar pimpinan harus disetujui oleh Kopkamtib dan yang bersangkutan harus melalui

screening yang dilakukan oleh Kopkamtib. Dengan sendirinya elemen yang menentang kebijakan pemerintahan militer Soeharto tidak bisa mencapai tingkat pimpinan atau calon partai dalam Pemilu.

Dengan demikian rakyat benar-benar tidak memperoleh kesempatan diwakili orang-orang yang bisa menyampaikan aspirasinya, di dalam lembaga-lembaga yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat—di mana pilihan-pilihan rakyatlah yang seharusnya duduk.

Dalam Pemilu ke-3 yang dilangsungkan pada tahun 1977, hanya tiga partai inilah yang boleh berpartisipasi. Hasilnya:

Golkar memperoleh 64,4% — 232 kursi
PPP memperoleh 27,8% — 99 kursi
PDI memperoleh 7,8% —29 kursi

Susunan di MPR dibuat sedemikian rupa sehingga ABRI memiliki 24%. Ditambah dengan Golkar 30% dan para anggota yang diangkat langsung oleh Soeharto, kekuatan politik Soeharto secara konstitusional pun menjadi mutlak. Oposisi tidak ada, karena partai-partai lainnya dijadikan alat pendukung pula.

Akan tetapi lenyapnya demokrasi tidak menjadi persoalan untuk negara-negara yang mendukung kehadiran Soeharto dan dipertahankannya kekuasaan militer di Indonesia. Dukungan terhadap Soeharto dari dalam negeri pun tetap kuat. Dukungan setia ia peroleh dari:

1. Elite ABRI, terutama Angkatan Darat yang berkembang menjadi kapitalis birokrat. Dwifungsi memungkinkan lahir dan berkembangnya kelompok kuat ini
2. Anggota keluarga dan kerabat para perwira tinggi ABRI yang memperoleh berbagai fasilitas kredit dan perlindungan ABRI

3. Pedagang-pedagang sipil yang memperoleh keuntungan besar dari masuknya modal asing dan yang berkembang menjadi komprador kapitalis, pendukung MNC
4. Kelompok anti-komunis, baik militer maupun sipil yang mengisi kedudukan penting di berbagai lembaga pemerintahan dan perusahaan-perusahaan swasta. Mereka langsung diuntungkan dengan kehadiran Soeharto sebagai kepala negara.

Pendukung Soeharto di awal kekuasaannya termasuk para akademik, mahasiswa, pelajar, pemuda, dan politikus yang tadinya bersatu dalam menjatuhkan Soekarno, setelah kekuasaan Soeharto dikukuhkan ternyata pecah. Sebagian yang memperoleh kedudukan yang baik dan menguntungkan terpaksa mendukung Soeharto. Akan tetapi banyak juga yang melakukan perlawanan dengan demonstrasi dan mengeluarkan berbagai pernyataan dan selebaran yang mengecam tindak-tanduk Soeharto sebagai kepala negara.

Oposisi ini ditindak keras. Beberapa pemimpin mahasiswa ditahan dan diadili dengan tuduhan menghina Presiden. Dalam pembelaan di pengadilan, ada yang mempertanyakan: mengapa ketika mereka mendukung Soeharto dalam menjatuhkan Soekarno, mereka tidak ditangkap? Padahal kecaman mereka terhadap Soekarno jauh lebih keras ketimbang apa yang mereka lakukan terhadap Soeharto. Bukankah mengkritik kepala negara yang dianggap menyimpang dari UUD adalah tugas suci setiap anggota masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi?

Kekuatan Soeharto tidak bisa diganggu-gugat. Celaan terhadapnya dianggap *punishable crime* yang berakibat hukuman penjara. Ia tidak peduli apakah yang mengecamnya itu berjasa dalam mendukungnya sehingga ia menjadi presiden.

Subchan, Ketua NU pernah mengusulkan agar semua lembaga yang tidak ada dalam UUD 45, terutama Kopkamtib dibubarkan. Anjurannya tidak diperhatikan. Tidak lama setelah itu, ia

dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Tentu tidak bisa dibuktikan bahwa wafatnya berhubungan dengan anjuran pembubaran Kopkamtib.

Selain tokoh-tokoh politik yang merasa tidak puas, ada pula beberapa jenderal yang tidak puas. Soeharto ternyata bergerak cepat. Ketidakpuasan tokoh atau perwira yang masih memegang peranan penting cepat ditindak. Bilamana ketidaksetiaan tercium olehnya, mereka digeser. Jenderal-jenderal yang pernah setia mendukungnya seperti Sarwo Edhie, Sumitro, Widodo akhirnya digeser pula.

Oposisi terhadap Soeharto berkembang. Akan tetapi selama mereka tidak mendapat dukungan yang lebih luas dari massa, mereka tidak akan bisa menandingi Soeharto yang didukung oleh kekuatan militer dan kekuatan ekonomi luar negeri yang merasa diuntungkan oleh Soeharto. Soeharto hanya akan jatuh bilamana kekuatan massa bertambah dalam jumlah yang besar dan pihak militer dan MNC tidak lagi mendukungnya. Hal ini pasti terjadi di suatu saat.

Pers di Indonesia juga tidak berfungsi secara wajar. Di bawah kekuasaan Soeharto, apa pun yang ingin dicetak dan disiarkan harus memperoleh izin dari Kementerian Penerangan. Dengan demikian, setiap penerbit harus mengikuti pengarahan—*guidelines* pemerintah. Melanggar pengarahan ini menyebabkan penerbitan mereka ditutup. Berbagai surat kabar yang sempat memberitakan kenegatifan pemerintah ditutup, walaupun pemberitaan itu akurat, tidak dilebih-lebihkan.

Lagi-lagi ini merupakan pembunuhan demokrasi. *Freedom of speech* dan *freedom to express opinion* merupakan dasar demokrasi. Bilamana ini tidak diizinkan, demokrasi bisa dikatakan lenyap.

Memang pers di zaman orde baru tidak berkembang. Pada tahun 1965 sirkulasi surat kabar di Indonesia sebesar 1,5 juta. Pada tahun 1977 sirkulasi bertambah menjadi 1,7 juta. Penambahan sirkulasi sebesar 200 ribu dalam 12 tahun bisa dikatakan kecil sekali,

apalagi dengan kenyataan jumlah kelas menengah di Indonesia meningkat drastis, dengan banjirnya investasi asing—diperkirakan ada sekitar 27 juta orang yang masuk dalam kategori kelas menengah. Ini berarti banyak orang yang berada di kelas ini tidak membaca surat kabar. Tentunya bukan karena tidak bisa membaca melainkan karena tidak mau membaca. Memang sulit mendorong orang membaca bilamana ada perasaan yang dibaca itu bukan berita sesungguhnya, melainkan apa yang sudah disetujui pemerintah.

Akan tetapi keadaan ini tidak membuat pemerintah prihatin. Bahkan ini mendukung kebijakan politiknya. Kalau di zaman Soekarno kesadaran massa untuk mengerti politik dianjurkan dan partai-partai politik terdorong untuk memperoleh dukungan melalui penerbitan, di zaman Soeharto ingin diciptakan sebuah masyarakat yang apolitis.

Semua kegiatan politik di daerah-daerah pedalaman dilarang. Masyarakat harus mengikuti pengaturan kepala desa. Dengan demikian, tercapailah struktur politik yang diinginkan, ialah struktur *floating mass*—massa yang mengambang dan apolitis. Dengan demikian kritik terhadap pemerintah tidak dapat mudah dibangkitkan sebagai kekuatan politik yang mampu menjatuhkannya.

Salah satu keberhasilan pemerintah orde baru adalah pembungkaman buruh. Serikat buruh yang ada di zaman Soekarno dibubarkan. Yang dibentuk adalah FBSI—Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Ia adalah satu-satunya organisasi buruh yang diizinkan pemerintah. Lain organisasi buruh dilarang. FBSI memiliki tugas khusus yaitu menjinakkan kekuatan buruh di Indonesia sehingga tidak terjadi kekacauan dan pemogokan yang merugikan kepentingan modal asing. Seperti lembaga penting lainnya, Ketua FBSI tidak dipilih oleh anggotanya, melainkan oleh pemerintah. Dan pimpinan lain lembaga ini pun harus melalui *screening* yang dilakukan oleh Kopkamtib. Jelas bahwa keadaan ini tidak memungkinkan buruh memperoleh apa yang ia tuntut, seandainya

tuntutan itu bangkit dari kesadarannya sebagai kelompok yang ditindas.

Banjirnya dana asing ke Indonesia selama 10 tahun telah menciptakan 1,5 juta pekerjaan. Akan tetapi jumlah orang yang mencari pekerjaan setiap tahunnya 1,4 juta. Jumlah pengangguran terus meningkat, yang berarti kemiskinan terus meningkat pula.

Perkembangan yang digambarkan tidak akan bisa terus berlangsung. Kemiskinan dan penderitaan akhirnya membangunkan massa yang tertidur karena kebijakan *floating mass*. Dan ketika massa bangkit, didukung dengan keinginan untuk menikmati demokrasi, kekuatan militer tidak akan mampu membendungnya.

Setiap penguasa diktator militer memiliki nasib yang sama. Ia akan berakhir karena penindasannya akan membangkitkan keinginan rakyat untuk menghentikan penderitaan yang terjadi karena penindasan itu. Penggulingan setiap rezim diktator militer pasti terjadi. Yang berbeda adalah waktu dan bagaimana kekuasaan diktator militer itu jatuh, karena faktor di dalam dan luar negeri memainkan peranan besar pula.

Arti sesungguhnya "mengembalikan ke dalam masyarakat"

Penahanan/penangkapan massal dan pembunuhan massal yang dilakukan penguasa militer Soeharto sejak Peristiwa G30S itu telah menimbulkan reaksi rakyat di negara-negara Barat. Dunia akhirnya terkejut setelah sadar tentang perkembangan di Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Kenyataan yang dihadapi sangat berbeda dengan pengertian yang dunia peroleh setelah mendengar pidato Presiden Soekarno di PBB yang berjudul *To Build the World a New* pada tahun 1963, di mana Indonesia digambarkan sebagai sebuah negara yang penuh toleransi dan bersandar atas Pancasila.

Pancasila adalah filsafat negara yang memberikan toleransi terhadap beraneka ragam pendapat, ideologi, dan agama.

Di bawah kekuasaan Jenderal Soeharto, pemerintah telah melakukan kejahatan negara yang melebihi kekejaman Nazi Hitler dalam membasmi Yahudi. Prinsip Pancasila malah dilanggar. PKI yang sebelum Peristiwa G30S merupakan bagian penting dari konsep Nasakom dihancurkan dengan kejam.

Memang pemerintah negara-negara Barat itu pada awalnya mendukung dan mendorong kebijakan Jenderal Soeharto dalam menumpas PKI dan menjatuhkan Soekarno. Kebijakan Soekarno sebelum G30S yang menurutsertakan pengambilalihan banyak perusahaan milik asing tentunya merugikan posisi negara-negara Barat. Upaya perusahaan-perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan Indonesia terhenti. Penghancuran PKI dan disingkirkannya Soekarno setelah G30S memberi peluang baru untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Akan tetapi akhirnya rakyat di negara-negara Barat menyadari bahwa tindakan Jenderal Soeharto melanggar perikemanusiaan dan HAM. Mereka menyadari bahwa Jenderal Soeharto menghancurkan *the rule of law*. Mereka menyadari bahwa tidak ada prinsip *presumption of innocence*—hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan. Tidak ada yang kehadiran *fair trial*—pengadilan yang adil dan tidak memihak. Timbullah aksi-aksi publik di negara-negara Barat mengutuk tindakan penguasa militer Soeharto yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal. Timbullah tuntutan agar para tahanan politik dibebaskan.

Komite Amnesty International memperhatikan perkembangan di Indonesia. Komite ini merupakan *"agency"* PBB yang memperjuangkan penegakan HAM. Amnesty International mengeluarkan tuntutan-tuntutan tegas terhadap pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah tapol dan menghentikan

persekusi biadab dan tidak adil terhadap orang-orang komunis atau orang-orang yang dicurigai menganut paham komunisme.

Timbullah sebuah kontradiksi. Di satu pihak negara-negara Barat menginginkan Indonesia menjunjung tinggi humanisme dan HAM. Di lain pihak, pemerintah-pemerintah yang sangat tergantung atas dukungan perusahaan-perusahaan multinasional ini menginginkan Indonesia bebas dari pengaruh komunisme sehingga mereka bisa terus-menerus mengeruk kekayaan alam Indonesia. Keadaan ini menyebabkan tidak ada tekanan keras dari pemerintah-pemerintah Barat terhadap Jenderal Soeharto untuk menyelesaikan masalah puluhan ribu tapol.

Akan tetapi tekanan-tekanan negara Barat memiliki dampak. Antara tahun 1970 dan tahun 1975 jumlah orang baru yang ditahan berkurang. Setelah tahun 1975 secara berangsur telah ada pembebasan, walaupun jumlah yang dibebaskan kecil sekali. Pembebasan ini oleh pemerintah Soeharto dinyatakan sebagai upaya "mengembalikan tahanan ke masyarakat" dan sering dilakukan dalam bentuk upacara, di mana para duta besar dan pers negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman Barat diundang untuk menyaksikannya.

Bagaimanakah sesungguhnya "kerja sama" antara negara-negara Barat dengan kekuasaan militer Soeharto? Benarkah negara-negara donor itu menanamkan modalnya di Indonesia untuk kepentingan rakyat banyak dan untuk menegakkan keadilan di Indonesia?

Tuntutan-tuntutan negara-negara Barat terhadap Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Membebaskan semua tapol G30S dan melikuidasi semua tahanan-tahanan politik di Indonesia, khususnya Pulau Buru
2. Mengeluarkan amnesti dan abolisi untuk mengakhiri penahanan yang berkaitan dengan G30S

3. Menjamin pelaksanaan HAM dan menciptakan pelaksanaan demokrasi

Seperti dituturkan di atas, tuntutan-tuntutan tersebut mendorong pemerintah Soeharto untuk melakukan berbagai tindakan sebagai berikut:

1. Mereka yang dikeluarkan dari tahanan setelah tahun 1970 memperoleh surat yang distempel dengan tinta biru "tahanan kota" atau "bebas penuh". Ternyata "bebas penuh" tidak memiliki arti bebas penuh. Mereka yang masuk dalam kategori ini harus setiap bulan datang menghadap ke Kodim—Komando Distrik Militer.

2. Di Kodim mereka memperoleh penekanan lisan sebagai berikut:
   a. Mereka tetap tidak mempunyai hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum.
   b. Bilamana hendak melakukan perjalanan ke luar daerah Kodim, harus lebih dahulu minta "surat jalan".
   c. Bilamana ingin pindah dari satu alamat ke alamat lain di dalam satu Kodim, harus memberitahu perubahan alamat baru.
   d. Bilamana ingin pindah ke alamat baru di bawah Kodim lain, harus lebih dahulu minta izin.
   e. Bilamana ingin pindah dari satu pulau ke pulau lain, harus terlebih dahulu minta izin pada Kodam (Komando Daerah Militer).
   f. Mereka dilarang menjadi anggota partai politik atau organisasi apa pun dan tidak boleh mendirikan partai atau organisasi baru apa pun.

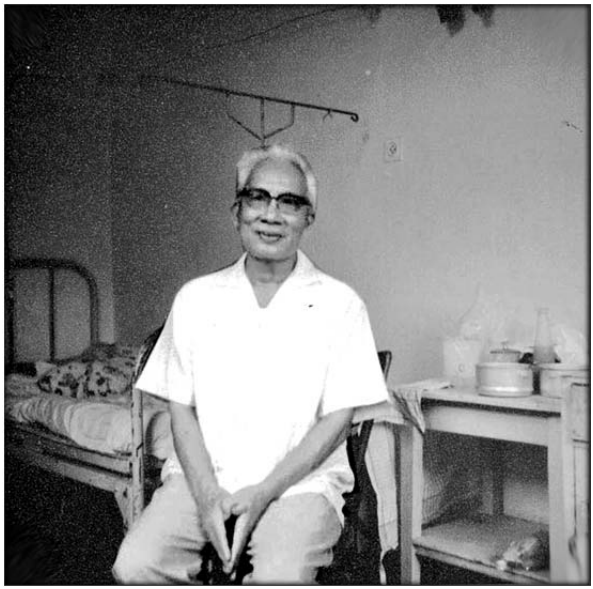

Siauw Giok Tjhan, tapol di RSPAD (1974)

Lukisan Djunta Suwardi untuk Siauw
di penjara RTM (1972)

Hadiah perpisahan Siauw
ketika keluar dari Penjara Salemba (1975)

Kodim sering mengundang mantan tapol yang "dikembalikan ke masyarakat" ini untuk memberi pengarahan. Kodim mempertegas bahwa:

a. Mereka tidak boleh menulis buku atau tulisan-tulisan tentang pengalaman mereka selama ditahan.
b. Mereka tidak diizinkan menceritakan pengalaman buruk selama di tahanan kepada orang-orang asing, walaupun orang-orang asing ini memiliki izin untuk mewawancarai para mantan tapol. Yang harus disampaikan kepada para orang asing ini adalah hal-hal yang tidak merugikan nama baik Indonesia.
c. Mereka dilarang ke luar negeri.

Semua warga negara Indonesia ditentukan memiliki Kartu Tanda Penduduk—KTP. Ternyata KTP para mantan tapol, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, harus diberi tanda khusus dengan kode "ET" (eks-tapol) di depan nomor KTP.

Adanya tanda ET di KTP, para mantan tapol ini tidak akan bisa memperoleh surat keterangan "bebas G30S" dan dengan demikian tidak akan mungkin mendapat pekerjaan. Pemerintah mengeluarkan ketentuan bahwa semua orang yang lahir setelah tahun 1955 harus memperoleh surat keterangan "bebas G30S" dari pihak Kepolisian untuk memperoleh pekerjaan.

Ini berarti para mantan tapol tersebut tidak bisa bekerja. Tidak bisa memperoleh penghasilan untuk hidup layak. Pada hakikatnya, "dikembalikan ke dalam masyarakat" berarti mereka dijerumuskan ke dalam jurang penghidupan sebagai gelandangan.

Para mantan tapol yang pernah menjadi anggota DPR seperti saya dan pegawai negeri mengalami hal yang ganjil. "Bebas penuh" ternyata berarti mereka tidak bisa menerima pensiun karena hak pensiun secara sepihak telah dibatalkan pemerintah.

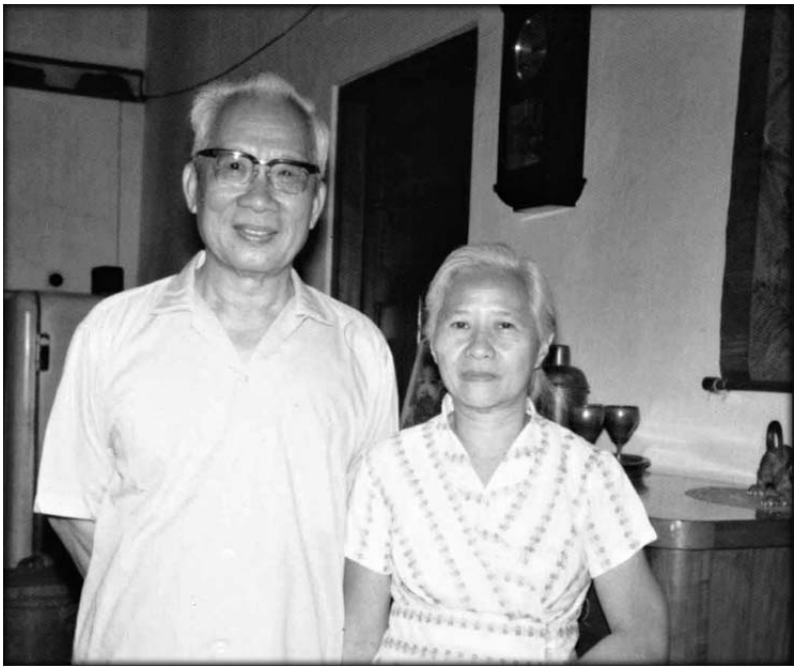

Siauw dan istri, tahanan rumah (1976)

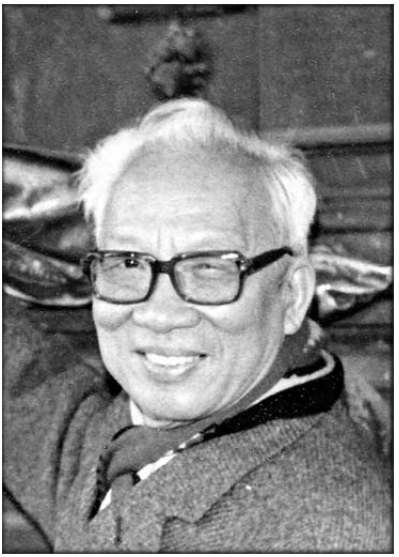

Siauw Giok Tjhan (1980)

Mereka yang sudah ditahan bertahun-tahun tanpa dibuktikan di pengadilan bahwa mereka bersalah, jadi tidak memiliki status hukum "tahanan penuh", setelah "dikembalikan ke dalam masyarakat" tetap mengalami hukuman. Tidak sepenuhnya bebas. Dan hak-hak fundamental sebagai warga negara Indonesia dicabut. Kartu penduduknya ditandai ET. Tidak bisa memperoleh pekerjaan. Tidak bisa memperoleh penghasilan. Hak pensiunan dicabut. Hak untuk memilih dan dipilih dicabut. Kebebasan untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain dibatasi.

Banyak dari mereka ini adalah perintis kemerdekaan, ikut berjuang fisik melawan penjajahan Belanda, bahkan ada yang pernah meringkuk di Boven Digul. Setelah ditahan bertahun-tahun, ternyata kehilangan semua hak fundamentalnya sebagai warga negara Indonesia. Penghargaan sebagai perintis kemerdekaan pun tidak diakui.

Jenderal Soeharto ternyata memberikan perlakuan yang berbeda terhadap tahanan-tahanan politik yang tidak berkaitan dengan G30S. Contohnya perlakuan terhadap tiga tokoh yang ditahan oleh Soeharto selama 364 hari, jadi kurang satu hari dari setahun pada tahun 1979, yaitu Sutomo—bekas pimpinan Barisan Pemberontak Indonesia, Mahmud Junaedi—bekas pimpinan redaksi harian NU *Duta Masyarakat,* dan Profesor Ismail Suny, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ketiga orang ini ditahan dengan tuduhan mendalangi demonstrasi mahasiswa Indonesia. Mereka ternyata dibebaskan penuh tanpa syarat, dan tidak menjadi "*civiel dood*".

Ketika Laksamana Sudomo selaku Panglima Kopkamtib ditanya tentang hal ini, ia menerangkan kepada pers bahwa menurut hukum, masa tahanan seorang tertuduh tidak boleh lebih lama dari satu tahun. Hukum ini ditaati oleh penguasa militer Jenderal Soeharto terhadap mereka bertiga.

Anehnya, mengapa hukum yang ditaati ini tidak berlaku untuk puluhan ribu tahanan politik G30S yang tidak ada bukti-bukti konkret kalau mereka bersalah? Jawabannya tentu berkaitan dengan dasar kebijakan Jenderal Soeharto yang didukung oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yaitu penumpasan PKI dan paham komunisme di Indonesia. Walaupun kebijakan ini sepenuhnya melanggar UUD 45 dan berbagai ketentuan yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*—di mana ditentukan bahwa setiap orang berhak memiliki pandangan ideologi tertentu walaupun pandangan itu bertentangan dengan ideologi yang dianut penguasa.

Pada hari kemerdekaan RI, 17 Agustus 1972, Soeharto menyatakan dalam pidatonya bahwa semua tahanan golongan C sudah dibebaskan dari tahanan. Ini berarti, seharusnya sudah tidak ada lagi tahanan golongan C yang ditahan dalam berbagai penjara di Indonesia sejak Agustus 1972.

Apakah ini benar? Tentu saja tidak benar. Masih ada ribuan tahanan yang baru memperoleh status "bebas" penuh antara tahun 1975 dan 1978. Dan mereka ini dinyatakan secara resmi masuk golongan C.

Memang selama ditahan, tidak pernah ada penjelasan mengapa seorang tahanan masuk dalam golongan C, atau B, atau A. Tidak pernah ada prinsip yang dijadikan dasar penggolongan. Para tahanan golongan B dinyatakan sebagai para tahanan yang harus diasingkan ke Pulau Buru. Tetapi cukup banyak tokoh-tokoh PKI bahkan mereka yang menjadi anggota CC PKI, tidak dibuang ke Pulau Buru. Sedangkan pesuruh atau pembantu yang bekerja di kantor PKI bisa dibuang ke Pulau Buru.

Pada akhir 1979 Kopkamtib mengeluarkan pernyataan bahwa semua tahanan golongan C dan B, termasuk yang pernah dibuang ke Pulau Buru, sudah "dikembalikan ke dalam masyarakat". Yang masih ditahan hanyalah mereka yang masuk dalam golongan A.

Mereka yang harus diadili. Ternyata jumlah yang masuk golongan A masih sekitar 500 orang. Dan pada tahun 1979 belum ada tahanan golongan A yang diadili. Tidak ada perkara yang berkaitan dengan G30S. Ternyata perkara-perkara pengadilan yang berkaitan dengan tuntutan mahasiswa menentang Soeharto didahulukan.

Bilamana kita anggap secara realistik pemerintah bisa mengadili 25 tahanan golongan A setiap tahun, pemerintah memerlukan waktu 20 tahun untuk mengadili semua tahanan golongan A. Mereka yang seharusnya dijatuhi hukuman mati mungkin sudah tidak bisa menjalankan hukuman tersebut karena sudah meninggal sebelum diadili.

Memang penyelesaian masalah tapol akan lebih cepat dan tuntas seandainya pemerintah Soeharto mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap semua tahanan politik G30S. Akan tetapi, walaupun sudah berkuasa belasan tahun, Jenderal Soeharto masih khawatir bahwa kekuasaannya yang mengandung banyak pelanggaran UUD 45 dan HAM, yang membiarkan kekayaan alam Indonesia disedot oleh perusahaan-perusahaan asing dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah termasuk Soeharto sendiri, akan terancam bilamana para tapol dibebaskan penuh. Tuntutan para mahasiswa yang menjadi sandarannya pada tahun 1965—66 untuk menegakkan keadilan pada tahun 1978 saja sudah cukup untuk Soeharto menindak secara keras. Jenderal Soeharto melanjutkan warisan ketentuan kolonial bahwa protes terhadapnya bisa ditindak sebagai tindakan *lesse majesty*—tindakan menghina raja dengan sanksi hukum penjara.

Menjadi lebih tidak bebas dan tidak merdeka

Republik Indonesia yang telah diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus 1945, memasuki zaman pembangunan ekonomi, usaha

kemampuan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia.

Jiwa Proklamasi 1945 tercermin di dalam UUD 45 yang mengandung berbagai ketentuan yang tidak menyenangkan para modal monopoli asing. UUD 45 mewajibkan pemerintah Indonesia melaksanakan pasal-pasalnya, antara lain Pasal 33 yang menyatakan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan ini seharusnya Republik Indonesia melaksanakan prinsip berdikari, tidak tergantung dari negara-negara asing dalam melaksanakan pembangunan mencapai masyarakat yang tidak mengenal lagi pengangguran, seperti ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945: "2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia."

Jadi jelas, pasal ini mewajibkan setiap pemerintah Indonesia untuk menjamin adanya pekerjaan untuk setiap orang warga negaranya. Dan pekerjaan itu harus bisa menjamin penghidupannya sebagai manusia yang layak.

Pasal 33 juga menentukan bahwa kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan air Indonesia dikuasai oleh negara. Ini berarti seluruh kegiatan industri penting dan semua kekayaan alam dikuasai negara. Sayangnya banyak orang yang mengartikan bahwa dikuasai tidak berarti dimiliki oleh negara. Timbullah pengertian bahwa pemerintah bisa saja menguasai kekayaan alam, tetapi

perusahaan-perusahaan asing bisa memilikinya. Oleh karena itu pemerintah bisa memberi izin kepada para perusahaan asing untuk menggali kekayaan alam Indonesia. Itulah sebabnya Caltex yang baru memulai eksplorasi minyak pada tahun 1950 telah berkembang sebagai perusahaan yang menghasilkan 80% dari seluruh penghasilan minyak di Indonesia.

Kekaburan tentang pengertian "dikuasai oleh negara" ini berlarut hampir 20 tahun. Baru pada tahun 1965, setelah amanat Presiden Soekarno "Banting Stir untuk Berdikari" disahkan oleh MPRS, pengertian istilah "dikuasi oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas dinyatakan sebagai "dimiliki oleh negara". Pengertian tegas ini mencerminkan jiwa Proklamasi 1945.

Setelah itu secara hukum ada pembatasan ruang gerak para modal monopoli asing di Indonesia. Dengan sendirinya mereka tidak tinggal diam dan berupaya menjatuhkan Presiden Soekarno yang didukung oleh PKI. Setelah Peristiwa G30S, PKI dihancurkan dan Presiden Soekarno jatuh, Jenderal Soeharto, dengan dalih memurnikan pelaksanaan UUD 45 ternyata membatalkan penetapan MPRS tentang Pasal 33 UUD 45. Istilah "dikuasai negara" tidak lagi berarti "dimiliki oleh negara".

Modal monopoli asing dengan demikian dipersempit ruang geraknya. Mereka terancam dengan pengertian baru atas "milik negara" yang mengarah ke nasionalisasi kepemilikan. Bisa dimengerti mengapa mereka tidak tinggal diam dan berusaha melawan arus ini. Timbullah keinginan menjadikan Indonesia sebuah "*neo-colony*" dalam arti sesungguhnya. Peristiwa G30S dan munculnya Jenderal Soeharto sebagai kekuatan pada tanggal 1 Oktober memberi kesempatan yang baik untuk upaya ini.

Kekuasaan diktator militer Jenderal Soeharto tidak bisa menyembunyikan lagi perkembangan Republik Indonesia menjadi *neo-colony*. Kelompok-kelompok di dalam masyarakat Indonesia bisa melihat kenyataan yang terjadi ini, termasuk Dewan Harian

Nasional Angkatan 45 yang membuat kesimpulan di dalam diskusi panelnya Desember 1978. Diskusi panel Dewan Harian Angkatan 45 yang dikenal sebagai Ekubang—Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah memenuhi ciri-ciri masyarakat *neo-colony*, yakni:

1. Perbedaan/jurang sosial yang semakin dalam, yaitu perbedaan antara kaya dan miskin yang hebat.
2. Pola hidup mewah yang berlebih-lebihan dari golongan elite yang bersikap mumpung kuasa dan hidup serakah.
3. Tumbuh kuatnya neo-feodalisme.
4. Berkembangnya sikap konsumtif materialistis yang memperhebat keinginan untuk korupsi dan dilakukannya pungutan liar (pungli).
5. Menipisnya nasionalisme dan patriotisme.
6. Bertambahnya upaya menghambat tumbuhnya daya kreatif bangsa.
7. Dikembangkannya secara luas sikap acuh tak acuh terhadap berbagai masalah masyarakat. Kemampuan untuk menghadapi tantangan masyarakat dipertipis. Penyelewengan-penyelewengan tidak ditindak dengan hukum yang tegas.

Dewan Harian Nasional Angkatan 45 selanjutnya mengajukan agar pemerintah bersama DPR segera meninjau kembali Undang-Undang Pemilihan Umum, UU Kepartaian dan Keormasan, supaya terdapat susunan keanggotaan DPR/MPR yang demokratis. Ia juga menekankan betapa pentingnya politik kepartaian memperoleh hak otonom, yang sejak Soeharto berkuasa diambil alih oleh pemerintah. Ia menekankan pula pentingnya UUD 45 dipatuhi secara keseluruhan dan demokrasi dijunjung tinggi tanpa dalih pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada hakikatnya menginjak demokrasi dan melanggar UUD 45.

Selain Dewan Harian Nasional Angkatan 45, kelompok Legiun Veteran RI pada tanggal 6 Desember menyatakan:

"Keadaan dan perkembangan masyarakat dewasa ini dapat di konstatir berada dalam semacam 'krisis terselubung' di semua sektor kehidupan, yaitu baik di bidang politik, ekonomi, hukum, maupun sosial budaya, yang bersumber dari ekses proses pembangunan ekonomi yang lepas dari landasan serta jiwa perjuangan 45 dan meluasnya arus kehidupan materialistis dan individualistis yang menjurus pada penilaian tak wajar pada kekuasaan dan materi (uang) yang kian hari kian mengikis idealisme, merongrong jiwa pengabdian dan persatuan serta makin menipisnya moral perjuangan."

Legiun Veteran RI lebih lanjut menegaskan:

"Pembangunan politik jika kita kembalikan kepada sumbernya, hakikatnya adalah pembangunan demokrasi yang sehat yang digali dan dikembangkan menurut dasar filsafat Pancasila. Pembangunan politik menurut ajaran Pancasila tidak lain daripada pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan patriotisme dalam arti semangat pengorbanan untuk masyarakat dan negara, pembangunan semangat gotong-royong dan sama sekali bukan '*power politic*', yang hanya mengutamakan golongan sendiri dengan meniadakan golongan lain yang berbeda pendapat. Pembangunan politik adalah pembangunan masyarakat Pancasila, yang anti-penjajahan dalam segala bentuknya, anti-keterbelakangan dan anti-kemiskinan!"

Sedangkan Dewan Harian Nasional Angkatan 45 dalam hal ini mengemukakan kesimpulannya sebagai berikut:

"Belum benar-benar dilaksanakannya apa yang disebut di dalam Pembukaan UUD 1945 dan belum dilaksanakannya kedaulatan rakyat secara sungguh-sungguh sebagai yang tercermin

di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, susunan anggota MPR/DPR yang tidak mencerminkan perwakilan rakyat yang murni. Di samping itu UU tentang kepartaian dan keormasan masih bertentangan dengan prinsip demokrasi, terutama kebebasan rakyat untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat....”

Demikianlah kutipan-kutipan yang mencerminkan 2 kelompok pejuang kemerdekaan yang kompeten untuk menilai perkembangan Republik Indonesia.

Ada beberapa contoh konkret yang menunjukkan bahwa Jenderal Soeharto telah menjerumuskan Indonesia sebagai *new colony* – koloni model baru.

1. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA), yang mewajibkan pemerintah melaksanakan pembatasan hak milik atas tanah dan melaksanakan pembagian tanah secara lunak untuk menuju tercapainya tanah bagi penggarap tanah, ternyata dilemari-eskan.

   Orang-orang yang berani membuka mulut untuk melaksanakan UU Pokok Agraria tahun 1960 akan dituduh antek PKI, dan menghadapi risiko ditahan dan bahkan dibunuh.

   Baru pada tahun 1978, kita bisa mendengar lagi tuntutan pelaksanaan UU Pokok Agraria 1960, dan dinyatakan bahwa UU Pokok Agraria ini bukan hasil perjuangan PKI, melainkan pencerminan hasil perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai keadilan sosial. Tapi sayang, tidak pernah terdengar pelaksanaannya. Bahkan pidato Jenderal Soeharto sebagai Presiden pada tanggal 17 Agustus 1978, merupakan siraman air es bagi pelaksanaan UU Pokok Agraria itu. Ia menyatakan dalam pidato tersebut bahwa pemilikan tanah dibatasi hanya pada daerah-daerah baru yang akan dibuka. Sedang di daerah-

daerah yang sudah diusahakan, yaitu 12% dari seluruh wilayah Indonesia, tidak akan ada pembatasan hak milik tanah.

Tentunya ini disebabkan kenyataan, "bapak-bapak" penguasa keluarga Jenderal Soeharto dan komplotannya telah mengembangkan dirinya menjadi kapitalis-birokrat (kabir) di bidang tanah juga. Mereka telah menguasai tanah-tanah luas sebagai milik pribadinya. Ini menyebabkan berkembangnya "*absentee landlordism*" di Indonesia dan merosotnya produktivitas tanah. Tanah-tanah yang dikuasai oleh para kabir tersebut tidak digarap, melainkan untuk "*belegging*" supaya lolos dari inflasi.

Sedangkan tanah-tanah yang baru dibuka dan disediakan untuk transmigrasi oleh banyak orang dinilai sebagai pemindahan kemiskinan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Indonesia tetap kekurangan makanan, menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia.

Dalam tahun 1978 saja Indonesia harus mengimpor beras sebanyak 2,5 juta ton dengan biaya US$650 juta. Jumlah impor beras hendak ditekan rendah dengan memperhebat program "keluarga berencana", tapi bila usaha memperluas tanah garapan dan mempertinggi produktivitas tanah tidak diusahakan dengan baik, jumlah impor beras tidak akan turun. Sebaliknya dikhawatirkan Indonesia bukan saja tetap menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, bahkan menjadi pemborong beras dari seluruh dunia.

2. Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH), yang seharusnya menjamin pembagian hasil 50%—50% antara pemilik tanah dan penggarap tanah, ternyata dicap sebagai UU-nya komunis. Oleh karenanya dibekukan.

   Pembekuan Undang-Undang ini memperbesar jurang perbedaan antara kaya dan miskin di desa-desa. Ada perbedaan

besar antara keuntungan yang diperoleh oleh para tuan tanah dan para petani yang tidak memiliki tanah tapi bekerja keras menggarapnya.

Semakin banyak tuan tanah yang memperoleh keuntungan ini adalah berseragam hijau dengan berbintang emas. Pembagian hasil panen berubah menjadi lebih jelek lagi, dari 60%—40% menjadi 80%—20%. Pemilik tanah memperoleh 80% sedang tani penggarap tanah hanya 20%. Pemerasan ini menyebabkan petani dan buruh-petani di desa-desa menjadi lebih miskin lagi. Dengan sendirinya produktivitas tanah pun menurun.

Pengangguran di desa-desa terus meningkat, apalagi setelah para pemilik tanah kabir menggunakan *huller* (mesin perontok beras), sehingga mereka bisa bertindak lebih sewenang-wenang terhadap buruh-tani, petani penggarap tanah yang tidak memiliki tanah.

3. Undang-Undang Penananaman Modal Asing (UUPMA). Undang-Undang yang diundangkan pada tahun 1967, dan sejak Januari 1967 hingga Maret 1978 sudah ada 784 proyek penanaman modal asing dengan seluruh modal berjumlah: US$6.898 juta. 36% berasal dari Jepang, 6% berasal dari Amerika, 12% dari Hongkong, 4% dari Filipina, 3% dari Australia, 2% dari Singapura, 1% dari Korea Selatan. 36% dari negera-negara lain, termasuk Belanda dan Jerman Barat. Jepang menggunakannya untuk pabrik-pabrik, Amerika untuk pengolahan sumber kekayaan alam seperti minyak dan logam-logam strategis.

   Berdasarkan statistik Bank Indonesia tahun 1978, penanaman modal asing dapat dibagi sebagai berikut:

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,9%
Pertambangan & Penggalian	20,8%
Manufaktur	58,3%
Perdagangan & Perhotelan	2,9%
Real Estate dan Jasa-jasa	4,1%
Lain-lainnya	2.0%

Untuk menarik lebih banyak modal asing masuk ke Indonesia, penguasa militer Soeharto telah memberi berbagai macam jaminan, seperti bebas pajak (*tax holiday*) untuk sejumlah tahun; bebas bea impor untuk mesin dan bahan baku selama waktu tertentu; jaminan pada modal asing untuk mengirim pulang modal, memulangkan hasil keuntungan, penyusutan dan pemulangan modal-pokok dari penjualan perusahaan. Waktu bekerja perusahaan dijamin selama 30 tahun, artinya selama 30 tahun itu, tidak akan ada peraturan nasionalisasi.

Pada tahun 1974, Undang-Undang Penanaman Modal Asing hanya bisa dilakukan dalam bentuk patungan (*joint venture*) dengan usaha nasional. Dengan adanya perubahan demikian, minat modal asing jadi berkurang, apalagi setelah adanya kebijakan tambahan di mana terselubung peraturan yang mengharuskan para modal asing bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nasional yang ada usahawan pribumi.

4. Pada tahun 1968 dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Domestik, yaitu modal milik orang asing yang telah menjadi penduduk tetap Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah "meningkatkan" apa yang di zaman Presiden Soekarno dikenal sebagai PP-10 tahun 1962 (sebuah Peraturan Pemerintah yang tidak mengizinkan orang asing berdagang eceran di desa-desa).

Undang-Undang ini memberi kesempatan untuk orang asing melakukan usaha dagangnya selama 10 tahun, dari 1 Januari 1968. Diperkirakan selama 10 tahun itu, para pedagang asing yang sudah menjadi penduduk tetap Indonesia akan mengajukan permohonan naturalisasi. Undang-undang ini dikeluarkan untuk menjamin kelancaran peredaran barang dagangan dari kota ke desa dan sebaliknya.

5. Dalam rangka menarik modal asing, ternyata penguasa militer Soeharto membekukan UU Pokok Perburuhan hasil usaha PKI. Serikat-serikat buruh dianggap komunis. Setelah ada kritik keras dari *Confederation of Free Trade Union* dari Amerika Serikat, dibentuklah serikat buruh "kuning". Dikatakan "kuning" karena pemimpin-pemimpin serikat buruh ini adalah orang-orang membela kepentingan majikan, tidak membela kepentingan kaum buruh. Jadi, sekalipun kaum buruh mempunyai serikat buruh, tapi tidak ada yang membela kepentingannya. Serikat-serikat buruh yang didirikan oleh pemerintah militer Soeharto ternyata membela kepentingan majikan terutama para majikan asingnya.

   Tetapi, kesadaran kaum buruh akan haknya tidak bisa dibendung. Pada awal tahun 1979, kaum buruh berbagai perusahaan melakukan aksi-aksi yang oleh pemerintah dinyatakan "liar", tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebenarnya menghendaki tercapainya keadilan sosial, dan keadilan sosial ini seharusnya dicapai melalui perjuangan gigih kaum buruh. Pihak majikan pengusaha tidak akan secara sukarela menyerahkan dan membagikan keuntungannya secara besar-besaran kepada buruh-buruhnya.

Setelah terjadinya G30S yang dijadikan alasan oleh penguasa militer Soeharto untuk menumpas PKI, nasib kaum tani dan buruh

di Indonesia memburuk. Mereka tidak memiliki kekuatan organisasi untuk membela kepentingannya. Kemunduran-kemunduran yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia sangat menyedihkan.

Penguasa militer Soeharto membanggakan GNP (*annual income per capita*) Republik Indonesia yang di bawah kekuasaannya telah meningkat secara berlipat-ganda, dari US$75 menjadi US$150. Akan tetapi kita harus ingat bahwa Indonesia masih tergolong nomor 4 dari bawah di dalam daftar negara-negara termiskin di dunia. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia masih termasuk yang termiskin. Ini dialami walaupun Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan menjadi pengekspor minyak terbesar di ASEAN.

Ali Wardhana, Menteri Keuangan RI, di dalam pidato TVRI menyatakan kebanggaannya karena berhasil memasarkan surat-surat hutang RI di Tokyo, Bonn, dan Den Haag. Pada bulan Juli 1978, RI memasarkan surat pinjaman sebanyak 10 miliar yen untuk 10 tahun dengan bunga 7,5% dan pada bulan September 1978 dipasarkan surat hutang sebanyak 100 juta mark Jerman untuk 6 tahun dengan bunga 7%. Di Amsterdam dipasarkan surat hutang sebanyak 100 juta gulden untuk 10 tahun dengan bunga 8%. Ali Wardhana merasa bahwa keberhasilannya ini menunjukkan bahwa dunia internasional memiliki kepercayaan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi orang pasti kecewa bahwa menanjaknya hutang-hutang yang dianggap tanda kepercayaan dunia internasional ini tidak mengubah perbedaan antara kaya dan miskin di Indonesia. Para pemberi pinjaman bisa juga salah hitung seperti yang terjadi dengan Iran. Syah di Iran juga memperoleh kepercayaan dunia internasional. Ternyata walaupun pemerintahan Syah didukung oleh kekuatan Barat dengan perlengkapan senjata yang canggih, ia dapat dihancurkan dalam sekejap mata.

Memang, di dalam pembangunan Indonesia, kita bisa melihat adanya gedung-gedung pencakar langit. Terdapat pula banyak

gedung-gedung mewah di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali. Meningkatnya jumlah gedung mewah, berkeliarannya mobil-mobil mewah di Indonesia, tidak bisa dijadikan ukuran kemajuan pembangunan masyarakat Indonesia sudah mencapai masyarakat adil dan makmur.

Pada kenyataannya kehadiran gedung-gedung mewah di Indonesia berarti meningkatnya hutang! Hutang-hutang dengan bunga pinjaman yang akan memberatkan beban hidup rakyat banyak.

Marilah kita lihat bagaimana hutang-hutang ini akan melilit leher rakyat Indonesia:

Hingga 31 Maret 1978 telah digunakan pinjaman jangka panjang dan menengah sebanyak US$9.721,5 juta. Jumlah hutang yang telah disanggupkan dan belum digunakan pada tanggal 31 Maret 1978 itu masih adalah US$3.815,3 juta.

Kemudian terdapat hutang-hutang perusahaan negara yang telah digunakan berjumlah US$1.834,9 juta dan dari jumlah ini US$1.755,9 juta adalah hutang Pertamina. Hutang Pertamina menurut Piet Maryono seluruhnya berjumlah US$9 miliar.

Pembayaran hutang-hutang ini, belum termasuk surat-surat hutang yang telah dijual dalam pasaran Tokyo, Bonn, dan Den Haag antara 1977—78 yang berjumlah US$1.426 juta, berjumlah 17,9% daripada penghasilan ekspor Indonesia.

Para ahli ekonomi Bank Dunia berpendapat, bahwa *debt service ratio* sebuah negara tidak boleh mencapai 20% dari hasil ekspornya. Dengan demikian untuk tidak mencapai *debt service ratio* lebih tinggi dari 20%, Indonesia harus berusaha mencapai jumlah ekspor yang lebih tinggi lagi. Karena jumlah cicilan dan bunga tiap tahunnya pasti terus meningkat lebih tinggi lagi. Hal ini dapat dibayangkan, bila kita membandingkan *debt service ratio* tahun anggaran 1976—77 masih berjumlah 12,6%, tetapi dalam tahun anggaran 1977—78 sudah meningkat menjadi 17,9%.

Kenyataan ini telah mendorong Indonesia mengadakan devaluasi, yang dikenal dengan KNOP 15 (Kebijaksanaan November 15). Setiap devaluasi bertujuan untuk meningkatkan ekspor. Tetapi pada kenyataannya KNOP-15 malah memperberat beban hidup rakyat.

Yang patut diperhatikan adalah kenyataan bahwa informasi tentang KNOP 15 ini ternyata menguntungkan banyak pejabat negara dan para jenderal. Karena dikabarkan beberapa hari sebelum KNOP 15 dikeluarkan, banyak istri pejabat dan jenderal menukarkan uang rupiah ke dolar dalam jumlah yang sangat besar. Kejadian ini tidak membuahkan tuntutan dari pihak pemerintah maupun DPR. Kopkamtib pun bungkam. Rakyat hanya bisa menarik napas panjang karena tidak berdaya menuntut.

Dengan adanya KNOP-15, banyak perusahaan telur ayam mesti gulung tikar. Karena bahan makanan ayam yang diimpor menjadi jauh lebih tinggi dari harga telur ayam. Harga telur ayam impor jadi lebih murah akibat KNOP-15, sehingga untuk keperluan perhotelan Indonesia harus mengimpor telur ayam dari luar negeri.

Harga beras ditekan rendah oleh pemerintah, agar dengan demikian upah buruh pun ditekan rendah. Ini menjadi daya tarik untuk modal-modal asing beroperasi di Indonesia. Anehnya, di satu pihak pemerintah menekan rendah harga pembelian dari para petani tetapi di lain pihak menanggung kerugian dari harga impor beras. Jadi hakikatnya penekanan rendah harga beras hanya untuk mencekik rakyat Indonesia saja demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing.

KNOP-15 menentukan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan untuk mencegah reaksi rakyat kecil yang merasa kenaikan harga minyak tanah sangat memperberat kehidupan mereka.

Penguasa militer Jenderal Soeharto lebih mengutamakan usaha mendapat hutang dari luar negeri lebih besar lagi, sehingga memungkinkan para jenderal hidup mewah.

Rakyat terbanyak merasakan perkembangan 5 bulan pertama tahun 1979 tidak dapat mengharapkan perlindungan dan pembelaan dari DPR. Walaupun DPR ini dinyatakan sebagai hasil "pemilihan umum", hasil dari pilihan rakyat sendiri. Pada kenyataannya tingkat hidup para anggota DPR telah ditingkatkan dengan baik, sedangkan kehidupan rakyat terbanyak memburuk. Tidak ada anggota DPR yang mengeluarkan suara menentang kebijakan pemerintah Jenderal Soeharto yang telah merugikan rakyat yang diwakilinya. Mereka takut bersuara, karena sikap menentang pemerintah Soeharto mengundang pemeriksaan dan risiko dipenjarakan.

Profesor Sumitro sebagai Menteri Urusan Riset dan Teknologi pernah mensinyalir adanya kebocoran anggaran belanja negara 30—40%. Tetapi DPR tidak pernah memberikan reaksi atas keterangan seorang menteri ini.

Jaksa Agung di depan sidang DPR hasil "pemilihan umum" tahun 1977, mengumumkan hasil penelitiannya bahwa jumlah korupsi pada tahun 1978 telah merugikan negara sebanyak 30 miliar rupiah. Dari jumlah yang demikian besarnya itu, Jaksa Agung hanya bisa menyelesaikan sekitar 1 miliar rupiah. Jadi hanya 1/30 dari apa yang dikorupsi. Menurutnya, korupsi pada tahun 1978, 7 kali lipat jumlah korupsi yang dialami pada tahun 1977.

Sabam Sirait, anggota DPR dari PDI menyambut laporan Jaksa Agung di atas. Ia menyatakan bahwa korupsi sebesar itu tidak ada artinya dibandingkan kebocoran anggaran belanja pembangunan, yang menurutnya sebesar 30%. Kebocoran yang dimaksud Sabam Sirait itu merugikan negara sebanyak 800 miliar rupiah. Menurutnya, di samping kebocoran anggaran belanja pembangunan, masih ada kebocoran anggaran belanja rutin, sebesar 180 miliar rupiah. Mashuri, sebagai Wakil Ketua DPR memasalahkan kebocoran-

kebocoran ini tanpa memberi penjelasan apa yang harus DPR sebagai wakil rakyat harus lakukan sebagai tuntutan.

Laksamana Sudomo, sebagai Panglima Kopkamtib ternyata mengecam sikap DPR. Ia menyatakan bahwa DPR sebaiknya tidak "asbun"—asal bunyi. Ia menyatakan bahwa DPR harus mendukung angka-angka kebocoran dengan data-data lengkap. Ternyata permintaan Sudomo itu tidak membangkitkan keinginan untuk memberi penjelasan tuntas dari pihak DPR. Mashuri tidak lagi bersuara. Pers Indonesia tidak lagi memasalahkannya. Ini menunjukkan bahwa DPR hasil pemilihan umum tidak bergigi. Pemerintah Soeharto didukung oleh kekuatan militer bisa tetap sewenang-wenang bertindak bahkan mendukung tindakan korupsi yang merugikan negara dan rakyat dalam skala sedemikian besarnya.

Seymour Hersch, wartawan *New York Times* pernah membongkar masalah "minta komisi" dalam hubungan dengan pembelian satelit Palapa. Menurutnya, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi meminta komisi sebesar US$30 juta kepada GTE—*General Telecommunication and Electronics* yang seyogianya membangun proyek Palapa tersebut. Ketika permintaan ini ditolak, proyek Palapa diserahkan ke perusahaan lain. Berapa komisi yang diberikan tidak pernah diketahui.

Masalah ini pernah dibicarakan dalam DPR. Tetapi tidak ada tindak lanjutnya karena Menteri Perhubungan Emil Salim menyatakan bahwa dalam penanganan Proyek Palapa tidak terdapat hal-hal yang luar biasa.

Akan tetapi Jenderal Suhardjono, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi mengakui bahwa ia memiliki sebuah *ranch* dengan lebih dari 100 kuda balap impor. Ongkos merawat seekor kuda balap di *ranch*nya itu Rp60 ribu sehari. Timbullah pertanyaan apakah mungkin seorang pegawai tingkat tinggi pemerintah memiliki kemampuan memiliki *ranch* sebesar itu tanpa korupsi? Dan ternyata

tindakan korupsi sewenang-wenang ini tidak membuahkan tuntutan apa-apa, baik dari DPR maupun pemerintah.

Untuk mencegah reaksi rakyat menentang kebijakan dan tingkah laku sewenang-wenang para jenderal dan pejabat pemerintah lainnya, Kopkamtib turun ke lapangan.

Perkembangan di Indonesia ini membuktikan bahwa setelah PKI dilarang, sebagai akibat Peristiwa G30S, kemudian juga menyusul dilarang dan dibubarkannya partai-partai lain yang secara historis telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia terjerumus dalam "krisis terselubung" yang menimbulkan keresahan hebat.

"Pemilihan umum" telah berlangsung 2 kali, tetapi tidak bisa menghasilkan perwakilan rakyat yang efektif membela kepentingan rakyat terbanyak. Karena "pemilihan umum" hanyalah melahirkan DPR dan MPR untuk meng-"iya"-kan semua tindakan demi kepentingan penguasa militer Jenderal Soeharto.

Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945 menentukan: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ketentuan ini, pernah diinterpretasi seolah-olah MPR cukup bersidang sekali saja selama 5 tahun.

Oleh karena itu Presiden tidak merasa perlu memberi pertanggungan jawab pada MPR yang memilihnya dan memberi mandat untuk bekerja. Dengan demikian berarti Presiden telah mengelakkan tanggung jawab pada MPR yang memilihnya dan terjadilah korupsi tanggung jawab dengan tidak dilaksanakannya UUD 1945 secara murni.

"Krisis terselubung" ini tentu saja meningkat terus. Kemampuan RI untuk berdikari semakin menurun. Indonesia yang semula dikenal dengan negara nyiur melambai, dengan penghasilan kopra berlimpah-limpah dan mengekspor kelapa, harus impor kopra untuk menjamin terus bekerjanya penggilingan minyak kelapa.

Untuk mencukupi kebutuhan minyak kelapa, Indonesia harus impor minyak kelapa.

Pemerataan pembagian seharusnya meratakan pembagian rejeki. Tapi dalam kenyataan yang ada, hanya segolongan kecil penguasa yang mengantongi pembagian rejeki sebesar-besarnya. Rakyat kecil hanya merasakan getahnya saja.

Keresahan dan ketidakpuasan angkatan-angkatan tua ini yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tentunya mempengaruhi dan membuka mata angkatan muda. Dan ini membangkitkan pemuda-pemuda dan mahasiswa-mahasiswa untuk mengadakan berbagai aksi. Dan ini selalu mengundang kehadiran Kopkamtib, menindas dengan kekuatan senjata.

Rakyat Indonesia hidup dalam kungkungan kekuasaan militer yang dengan sewenang-wenang menindas rakyatnya sendiri. Rakyat Indonesia hidup di alam kemerdekaan, tetapi dalam keadaan serba tidak bebas. Keinginan untuk mencapai perbaikan ditindak dengan kekerasan senjata.

Indeks

A

ABRI, 3, 4, 6, 17, 30, 45, 51, 120, 138, 141, 143, 145, 174, 190, 193
Achmad Husein, 90
Achmad Soemadi, 116
Achmadi, 8, 20, 21, 22, 103
Adam Malik, xiii, 171, 181, 185, 186
Afrika, 1, 2, 3, 38, 128, 132, 152, 164
Aidit, v, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 73, 74, 82, 83, 84, 94, 100, 115, 123
Ali Archam, 36, 115, 125
Ali Bustam, 156
Ali Murtopo, 68, 149, 192
Ali Sastroamidjojo, 63, 133, 140
Alimin, 28, 36
Aljazair, 1, 2, 6, 132
Amerika Latin, 1, 2, 3, 152
Amerika Serikat, xxiv, xxvii, 1, 2, 3, 5, 47, 49, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 71, 76, 81, 100, 132, 133, 141, 142, 144, 145, 150, 151, 152, 154, 167, 169, 170, 188, 199, 205, 215
Amir Alwi, 128
Amir Machmud, 22, 23, 137, 185, 188
Amir Sjarifoeddin, 2, 28, 35, 58, 59, 60
Amnesty International, 198
Angkatan Bersenjata, 3, 5, 10, 12, 24, 31, 32, 57, 58, 59, 60, 62, 73, 74, 82, 89, 117, 136, 137, 140, 141, 146, 188
Angkatan Darat, v, viii, ix, x, xi, xvi, xvii, xviii, xxiii, xxiv, xxvii, 3, 8, 10, 13, 17, 45, 46, 49, 53, 54, 57, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 78, 83, 85, 98, 100, 107, 132, 133, 134, 140, 141, 143, 146, 147, 168, 169, 170, 177, 185, 187, 191, 193
Angkatan Udara, viii, xxv, 12, 14, 74
Aradjibal, 125
Arief Karnadi, 158
Arjuna, 125
Asaat, 86, 90
Asia, xxix, 1, 2, 3, 6, 66, 67, 128, 132, 154, 167
Asmu, 29
Astrawinata, 4, 106
Atjep, 124, 128

B

B.M. Diah, 184

Bakin, vii, 31
Bakri Siregar, 124, 128
Bank Dharma Ekonomi, 146, 147
Baperki, 2, vii, x, xi, xv, xvii, 7, 21, 100, 112, 134, 135, 136, 138, 168, 169, 175, 180
Basuki, 22, 23, 125, 137
Basuki Rachmat, 22, 23, 137, 180, 188
Basuki Sudjatmiko, 179
Bengawan Solo, 21, 92, 134
Bing Kok., 184
Biro Khusus, xxv, xxvi, 10, 12, 16, 24, 29, 30, 39, 73, 74, 82
Blitar Selatan, xii, 85, 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Bong A Lok, 147, 185
Bong Nyan Fong, 21
Boven Digul, 99, 204
BPI, vii, 31
BTI, vii, 24, 29, 100, 103, 124
Bung Karno, 2, 3, 4, 8, 16, 22, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 70, 74, 80, 81, 132, 135, 138, 140, 142, 143, 145, 191
Burhan Kemala Sakti, 126

C

Cakrabirawa, vii, 13, 23, 41, 42, 70
CGMI, vii, 103, 111, 122, 128
Chaerul Saleh, 80, 133, 138
Chiang Kai Shek, 149
China, 1, 3, 167, 169, 170, 184, 185
Chou En Lai, 149
Chung Hua Ming Kuo, 184
CIA, vii, xxvii, 2, 6, 9, 14, 32, 66, 79, 133
Cina, 177, 184
Conefo, vii, 2, 71, 83, 132
CPM, vii, 89, 98

D

Datong, 125
Dewan Jenderal, 10, 32, 39, 41, 48, 50, 51, 52, 53, 73, 142
Dewan Revolusi, v, ix, x, xxvii, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 65, 137
Dewi Soekarno, 16, 43
Dharsono, 140
Djawoto, 171, 186
Djohan Sjahroezah, 29
Djufri, 125
Djungkung, 20, 21
DPR, 2, xii, xix, xxii, xxiv, 4, 64, 68, 80, 86, 138, 147, 189, 190, 191, 192, 202, 209, 211, 218, 219, 220, 221
Dua Aspek, 115, 116
Dudung, 115

E

Emil Salim, 220

F

FBSI, 196

G

G30S, 1, 3, 4, v, vi, vii, ix, x, xii, xiii, xvi, xvii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 65, 66, 69, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 93, 99, 102, 111, 112, 115, 122, 123, 126, 131, 132, 133, 137, 140, 141, 142, 169, 197, 198, 199, 202, 204, 205, 206, 208, 215, 221
Gatot Subroto, 28, 36, 48, 50, 60, 191
GBHN, 76, 175
genosida, 95
Gerwani, 78

H

hak asasi manusia, xix, xxix, 87, 93, 132
Hanoi, 3, 71
Hardjito, 128
Hardoyo, 120
Harian Rakyat, 128
Hartoyo, 28, 29, 124
Haryono, 13, 38
Henk Ngantung, 4
Howard Jones, 5
HSI, 104

I

IBC, 147, 149
IGGI, 145, 152, 157
ILO, 96, 112, 153
Indocina, 1, 5, 101, 167
Inggris, xx, 3, 67, 69, 70, 110, 144, 152, 184
intel, 12, 40, 51, 74, 124, 126, 128, 174
interogator, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Iskandar Subekti, 54, 103
Ismail Bakri, 115

J

Jakarta, xii, xv, xvi, xxvi, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 22, 25, 26, 28, 29, 36, 44, 45, 48, 49, 51, 64, 70, 71, 73, 74, 84, 89, 103, 116, 124, 131, 149, 151, 153, 155, 156, 170, 185, 186, 204, 216
Jimmy Bong, 126
Jimmy Lumenta, 126
John Lumengkuwas, 32
Jusuf, 23, 137
Jusuf Muda Dalam, 103

K

KAMI, 78, 89, 133, 134, 135, 140, 170, 176, 188
KAPI, 78
Kapolri, vii, 18, 23, 54
KAPPI, 89, 133, 134, 135, 136, 140, 170, 176, 188
Karto, 29, 30
KASI, 78
Kemal Idris, 38, 140
KENSI, vii, 171, 172, 174
KGB, vii, xxvii, 2, 6, 9, 14, 133
KIAPMA, 13, 83
Kissinger, 99
KNIP, 2, vii, xix, 35, 192
KNOP, 218
Kodim, vii, 21, 27, 200, 202
Kogam, vii, 174, 178
komunis, viii, xviii, xix, xx, xxvi, xxvii, xxix, 3, 6, 8, 9, 22, 32, 33, 34, 36, 58, 84, 87, 88, 100, 102, 111, 120, 187, 188, 194, 199, 212, 215
Konferensi Asia–Afrika, 1, 132
Kong Hu Cu, 179
Konstituante, 2, xix, xxii, 191
Kopkamtib, viii, 18, 79, 87, 88, 100, 128, 133, 136, 137, 138, 140, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 204, 205, 218, 220, 221, 222
Korea Selatan, 5, 66, 213
Kostrad, viii, 17, 18, 51, 52, 68, 78, 79, 80
Koti, viii, 91, 169
Kritik Oto Kritik, vi, 85, 115, 116
KSAD, viii, xii, 9, 17, 18, 40, 45, 50, 62, 63, 68, 79, 89, 139
KSAL, viii, 18, 23
KSAU, viii, xii, 23
Kuo Min Tang, 159
Kuomintang, 149, 185
Kusnan, 125
Kyai Dachlan, 140

L

Latief, xii, 19, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 77
Leimena, 15, 23

Lekra, viii, 4, 39, 104, 125
Leninisme, xix, 36, 115, 134
Liem Kok Liang, 179, 180
Liem Sioe Liong, 158
LPKB, viii, 136, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181
Lu Tjun Seng, 11
Lubang Buaya, 13, 16, 40, 78, 91
Lukman, 10, 20, 25, 28, 36, 37, 40, 83

M

Ma Siu Ling, 147, 185
Makudum Sati, 104
Malari, 189
Malaysia, vii, xxix, 12, 54, 67, 68, 69, 70, 74, 150, 154, 174, 184
Mao, xxvi, 8, 9, 33, 34, 36, 37, 116, 119, 123, 134
Mao Tse Tung, 8, 33
Marshall Green, 5, 9, 66, 133
Marsudi, 31
Martadinata, 18, 23
Marxisme, xix, 36, 115, 122, 125, 134
Mashuri, 219, 220
Masyumi, viii, xxiv, 64, 86, 190
Matakin, 180
Merbabu, 27
Mintardja, 152, 190
Mohamad Natsir, 90
Moskow, 2, 6, 38, 66, 124, 184
MPRS, 2, x, xii, 68, 80, 138, 140, 141, 143, 174, 175, 189, 191, 208
Munir, xii, xxv, 26, 28, 29, 32, 54, 103, 104, 117, 118, 119
Murba, 133
Murdiono, 20
Mursyid, 17, 106, 136

N

Nasakom, viii, x, 3, 4, 44, 83, 88, 137, 167, 187, 198
Nasution, 13, 15, 17, 45, 52, 62, 80, 85, 141
Natsir, 86, 190
Nazi, 112, 198
Nico Laleno, 128
Nirbaya, xii, xvii, 104, 105, 106, 138
Nixon, 67, 81, 99, 113, 149
Njoto, 10, 20, 25, 37, 38, 39, 40, 83, 110
NU, viii, 84, 140, 141, 187, 190, 194, 204
Nyono, 10, 12, 73, 74, 99, 102, 104
Nyoo Han Siang, 149

O

OECD, 144
Oei Tjoe Tat, xii, 8, 57, 103, 105, 106, 138
Oen Tjhing Tiauw, 179
OISRA, 128
Oloan Hutapea, 117, 121
Omar Dhani, xii, 23, 67, 103, 106, 136
Operasi Kalong, 30, 125
Opsus, 149, 192
orde baru, 2, xxii, 1, 16, 109, 163, 164, 195, 196
Osa Maliki, 140

P

Pancasila, vi, xxviii, xxix, 87, 101, 142, 163, 175, 178, 185, 189, 197, 198, 210, 215
Panjaitan, 13
Park Chung Hee, 5
Parman, 13
Partai Sosialis, 2, viii, 29, 35, 58
Partindo, viii, ix, 22, 57, 128
PDI, viii, 157, 192, 193, 219
Peking, 2, 3, 8, 66, 71, 124, 125
Pembunuhan massal, 90, 134
pemilu, 3, 6
Pemuda Rakyat, 12, 25, 74, 85, 103, 104, 111, 125
Peng Chen, 6
Perang Dunia II, viii, x, 60, 87, 95, 112

Peristiwa Madiun, v, xxiii, 28, 34, 36, 46, 59, 60, 61
Perjuangan bersenjata, vi, 116
Permesta, v, viii, xxiii, xxiv, 63, 64, 65, 68, 86, 90, 190
Pertamina, 152, 217
Pesindo, 46, 90
PhnomPenh, 3
PKI, v, vi, vii, viii, x, xi, xiii, xvi, xvii, xviii, xix, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 50, 53, 57, 59,60, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 93, 99, 100, 101, 102, 104, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 169, 170, 187, 188, 189, 190, 198, 205, 208, 211, 215, 221
PKT, viii, 6
PKUS, viii, 6
PNI, viii, 5, 20, 32, 63, 133, 140, 187, 190, 192
Politbiro, xxv, xxviii, 5, 12, 17, 28, 33, 39, 74, 82, 83, 85, 99, 115
PPP, 192, 193
Pranoto, xii, 17, 18, 24, 46, 79, 106
PRRI, v, viii, xxiii, xxiv, 63, 64, 65, 68, 86, 90, 190
PSI, viii, xxiv, 29, 31, 64, 66, 86, 190
Pulau Buru, xi, 98, 99, 112, 113, 114, 127, 128, 199, 205
Pyongyang, 3, 71, 115

R

Red-drive, 100
Respublica, x, xii, 135
Rewang, 54, 103
Roem, 190
RRI, 13, 14, 20
RRT, viii, xix, 2, 6, 28, 36, 65, 66, 71, 79, 81, 100, 132, 147, 149, 150, 157, 167, 169, 170, 171, 176, 181, 183, 185, 186
RSPAD, 85, 201
RTM, xii, 104, 201
Rukman, 106, 137
Ruslan, xii, 54, 103, 104
Ruslan Abdulgani, 174, 181

S

Sabam Sirait, 219
Saelan, 23, 42, 137
Salemba, xii, xvii, 20, 30, 94, 98, 104, 105, 106, 107, 109, 124, 127, 128, 201
Salim Bin De Mar, 104
Sampir, 29, 30
Sampir Suwarto, 29, 30
Samsu Harya Udaya, 30
Sarwo Edhie, 134, 140, 195
Satrio, 4
SBPP, 29
Senko, 18, 47, 51
Setiadi, xii, 106, 138
Seymour Hersch, 220
Siauw, 2, 3, 4, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxii, xxiii, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxx, 7, 8, 11, 108, 134, 201, 203
Sidartojo, 117
Sjam, v, xxv, xxvi, xxvii, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 43, 45, 70, 74, 82, 83, 102
SOBSI, viii, 29, 111, 117
Soebandrio, 38, 75, 103, 106, 137, 138
Soeharto, v, vi, x, xi, xiii, xvii, xviii, xxii, xxiv, xxviii, xxix, xxx, 12, 14, 17, 18, 23, 27, 30, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 65, 68, 71, 76, 78, 79,

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 98, 99, 101, 103, 109, 112, 113, 117, 120, 131, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 158, 160, 161, 162, 163, 170, 177, 178, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221
Soekarno, v, xi, xxii, xxiii, xxiv, xxvii, xxviii, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 50, 53, 54, 55, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 83, 86, 88, 100, 103, 128, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 167, 168, 169, 170, 177, 181, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 196, 197, 198, 208, 214
Soekatno, 120
Soekisman, 181
Soemarsono, 34, 46, 116
Soenarso, 181, 182
SOKSI, 185
Soong, 159
Subono, 10, 74
Sudisman, 10, 34, 40, 73, 77, 83, 100, 102, 104, 115, 116, 122, 125, 126
Sudomo, 189, 204, 220
Sugiono, 115
Suhadiono, 124
Suhardiman, 146, 147, 185
Suhardjono, 220
Suherman, 27
Sujono Atmo, 128
Sujono Pradigdo, 22, 122
Sukadji, 154
Sukarni, 133
Sumarno, xii, 20, 138
Sumitro, 66, 86, 189, 195, 219
Sun Yat Sen, 184
Sunito, ix, x
Supardjo, 17, 19, 43, 53, 76, 77, 102, 104, 126
Supersemar, viii, 23, 53, 55, 76, 80, 90, 95, 137, 141, 170
Supono, 10, 24, 74
Suprapto, 13
Suroso, 125, 128
Sutjipto, 18, 23, 91, 92, 169, 188
Sutoyo, 13
Suwandi, 121
Suwandi Hamid, 185
Syafruddin Prawiranegara, 90, 190
Syng Man Rhee, 5, 66

T

Taiwan, 64, 147, 148, 149, 150, 151, 181, 185
Tangerang, 94, 96, 98, 103, 104, 107, 166
Taoisme, 179
tapol, xii, xvii, 93, 94, 95, 96, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 117, 129, 130, 198, 199, 201, 202, 206
Tendean, 13, 15
Teperpu, 30
Tio King Hok, 128
Tionghoa, 2, vi, xi, xv, 79, 116, 119, 122, 130, 148, 149, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
Tiongkok, viii, 2, 6, 65, 79, 119, 130, 149, 159, 164, 171, 172, 176, 181, 184, 186
Tjoa Ma Tjoen, 125
Tjoo Tik Tjoen, 33, 116
Tjugito, 20, 103
Togliati, 116

U

Umar Wirahadikusuma, 22
Uni Soviet, vii, viii, 2, 6, 38, 39, 66, 71, 100, 132, 133, 170

Untung, xxvii, 13, 18, 23, 24, 27, 37, 40, 41, 42, 47, 48, 70, 75, 76, 94, 102
Usep, 140
Utomo Ramelan, 21
UU Pokok Agraria, 211
UUPBH, 212
UUPMA, 213

V

Vietnam, 28, 36, 66, 71

W

Warta Bakti, 128
Washington, 5
Werdojo, 8, 128
World Bank, 144, 152, 178

X

Xu Ren, 181

Y

Yani, 9, 10, 13, 17, 45, 50, 52, 68
Yao Teng Shan, 181